



Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah

RPJMD

2018-2023

KOTA BEKASI



Curug Pargi





**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
18. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan :
 - a. Visi dan Misi, Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN serta memperhatikan :
 - a. RPJPD Kota Bekasi;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;

- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. BAB IX : Penutup.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Penyusunan perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Maret 2019

WALI KOTA BEKASI,


RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

TTD/CAP

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 8 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(8/45/2019)**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dasar untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera, baik bersifat materiil maupun imateriil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus mengorbankan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan dengan harapan tatanan sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab dan berkeadilan. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi prinsip-prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia.

Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Bekasi mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development Function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objective* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari Perangkat Daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bekasi diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kota Bekasi perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Disisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Bekasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini pada awalnya disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Namun dalam perjalanannya, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 25 September 2017. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini mengalami penyesuaian mengikuti aturan tersebut, sejak tanggal diundangkannya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kota Bekasi. Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN. Selanjutnya RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2024. Pemerintah Kota Bekasi akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain itu untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.



WALIKOTA BEKASI

RAHMAT EFFENDI

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BEKASI
2018 - 2023**

KATA PENGANTAR

Dokumen RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 merupakan produk akhir dari tahapan penyusunan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023. Sesuai Permendagri 86 tahun 2017, Dokumen RPJMD terdiri dari Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Umum Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kota Bekasi; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan; Kerangka Pendanaan Pembangunan; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan; dan Penutup.

Dokumen RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 merupakan hasil dari serangkaian proses teknokratis dan partisipatif yang melibatkan berbagai metode dan berbagai pihak terkait, baik dari Pemerintah Kota Bekasi, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, hingga masyarakat. Proses teknokratis dilakukan melalui penggunaan metode-metode ilmiah sesuai bidang kajian yang diamanahkan Permendagri 86 Tahun 2017 serta berbasiskan pada analisis data dan fakta. Beberapa pendekatan terkini yang bersifat holistik digunakan pada proses teknokratis guna mendapatkan gambaran kondisi dan permasalahan Kota Bekasi yang lebih komprehensif. Sementara proses partisipatif dilakukan melalui proses FGD maupun workshop untuk mendapatkan masukan yang lebih nyata terkait permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Bekasi.

Setelah tahapan teknokratis, Dokumen RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 ini juga telah melalui beberapa iterasi dengan pertimbangan politis melalui pembicaraan dengan tim walikota terpilih dan Musrenbang yang melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dengan perwakilan pembangunan di Kota Bekasi. Setelah melalui berbagai konsultasi dengan pihak terkait (Pemerintahan Provinsi, Kemen PAN-RB, dan Kemendagri) dokumen ini kemudian disahkan melalui Perwal Kota Bekasi.

Tak ada gading yang tak retak. Meskipun telah melalui berbagai iterasi dan tahapan, dokumen ini tetaplah karya manusia yang memiliki kekurangan. Segala kekurangan dan penyempurnaan masih dapat dilakukan dengan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, semoga dokumen ini bermanfaat dalam menghantarkan pembangunan Kota Bekasi menuju kota Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
1. BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	6
1.4. Maksud Dan Tujuan	10
1.5. Sistematika	12
2. BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	14
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	14
1.1.1. Aspek Geografi	14
1.1.2. Aspek Demografi	21
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	24
2.2.1 Laju Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi	24
2.2.2 Laju Inflasi	31
2.2.3 PDRB per Kapita	33
2.2.4 Indeks Gini	35
2.2.5 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	35
2.2.6 Rasio Kesenjangan Kemiskinan	36
2.2.7 Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari US\$1 per Kapita per Hari	36
2.2.8 Indeks Pembangunan Manusia	37
2.2.9 Harapan Lama Sekolah	38
2.2.10 Angka Rata-rata Lama Sekolah	39
2.2.11 Angka Usia Harapan Hidup	39
2.2.12 Persentase Balita Gizi Buruk	39
2.2.13 Prevalensi Balita Gizi Kurang	41
2.2.14 Cakupan Desa Siaga Aktif	41
2.2.15 Angka Angkatan Kerja	42
2.2.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	44
2.2.17 Angka Pencari Kerja	45
2.2.18 Rasio Penduduk yang Bekerja	46
2.2.19 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	47
2.2.20 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	48
2.2.21 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	48
2.2.22 Indeks Kepuasan Masyarakat	50
2.2.23 Persentase PAD terhadap Pendapatan	51
2.2.24 Opini BPK	51

2.2.25	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	52
2.2.26	Penguatan Cadangan Pangan	53
2.2.27	Penanganan Daerah Rawan Pangan	54
2.2.28	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	54
2.2.29	Kontribusi Subsektor Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian	55
2.2.30	Produksi Sektor Pertanian	55
2.2.31	Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian	56
2.2.32	Produksi Subsektor Perkebunan	57
2.2.33	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Padi terhadap PDRB	58
2.2.34	Kontribusi Subsektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	58
2.2.35	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	58
2.2.36	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	61
2.2.37	Pertumbuhan Industri	61
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah	62
2.3.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	63
2.3.2	Nilai Tukar Petani	63
2.3.3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non pangan per Kapita	64
2.3.4	Produktivitas Total Daerah	65
2.3.5	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB	66
2.3.6	Angka Kriminalitas yang Tertangani	67
2.3.7	Rasio Ketergantungan Penduduk	67
2.3.8	BUMD	68
2.3.9	Kerjasama Daerah	70
2.3.10	Perhubungan	76
2.3.11	Lingkungan	77
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	78
2.4.1	Pendidikan	78
2.4.2	Kesehatan	89
2.4.3	Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	102
2.4.4	Penataan Ruang	112
2.4.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	113
2.4.6	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	114
2.4.7	Sosial	116
2.4.8	Tenaga Kerja	118
2.4.9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	120
2.4.10	Pangan	124
2.4.11	Pertanahan	124
2.4.12	Lingkungan Hidup	124
2.4.13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	129
2.4.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129
2.4.15	Perhubungan	133
2.4.16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	134
2.4.17	Penanaman Modal	134
2.4.18	Kepemudaan dan Olahraga	135
2.4.19	Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	136
2.4.20	Perpustakaan	136
2.4.21	Kearsipan	137

2.4.22	Pariwisata dan Kebudayaan	139
2.4.23	Pertanian, Kelautan dan Perikanan	140
2.4.24	Perindustrian dan Perdagangan	140
2.4.25	Perencanaan Pembangunan	141
2.4.26	Keuangan	141
2.4.27	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	142
2.4.28	Penelitian dan Pengembangan	142
2.4.29	Pengawasan	142
2.4.30	Sekretariat Dewan	142
2.5.	Evaluasi Capaian Hasil Pembangunan	143
2.5.1	Analisis Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Kinerja Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (Permendagri 86/2017)	143
2.5.2	Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2013-2018	163
2.5.3	Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	170
3.	BAB 3 GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH	188
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	188
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	188
3.1.2	Neraca Daerah	197
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	203
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	203
3.2.2	Analisis Pembiayaan	204
3.3	Kerangka Pendanaan	206
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	206
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan	212
3.4	Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya	214
4.	BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI 2018-2023	217
4.1	Permasalahan	217
4.1.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	217
4.1.2	Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	238
4.2	Isu Strategis Pembangunan	247
5.	BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	258
5.1.	Visi	258
5.2.	Misi	259
5.3.	Tujuan dan Sasaran	260
5.4.	Prioritas Pembangunan Daerah Janji Politik	266
6.	BAB 6 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	269
6.1	Strategi Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023	269
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023	271
6.2.1	Umum	271

6.2.2	Arah Kebijakan Pembangunan yang Menjadi Prioritas	272
6.3	Tahapan Pembangunan	284
7.	BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	346
8.	BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	383
9.	BAB 9 PENUTUP	414
9.1.	Kaidah Pelaksanaan	414
9.2.	Pedoman Transisi	415

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Kota Bekasi Dirinci Menurut Kecamatan	15
Tabel 2.2 Perubahan luas lahan di Kota Bekasi dari tahun 2000 sampai 2015	20
Tabel 2.3. Koefisien Wilayah Terbangun Maksimum dan Koefisien Wilayah Terbangun Aktual Kota Bekasi Eksisting	21
Tabel 2.4 Perkembangan Penduduk Kota Bekasi menurut Jenis Kelamin 2013-2017	22
Tabel 2.5 Distribusi Penduduk menurut Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2017	22
Tabel 2.6 Struktur Penduduk Kota Bekasi Tahun 2017	23
Tabel 2.7 Perkembangan Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2016	24
Tabel 2.8 Perkembangan Sumber Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi 2013-2017 (%)	27
Tabel 2.9 Perkembangan Nilai PDRB Menurut Harga Berlaku dan Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi di Kota Bekasi 2013-2017	28
Tabel 2.10 Perkembangan PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhannya di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia, 2013-2017	34
Tabel 2.11 Perkembangan Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Bekasi 2013-2017	40
Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah dan Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Bekasi 2013-2015	41
Tabel 2.13 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2017	50
Tabel 2.14 Perkembangan Opini BPK terhadap LKPD Kota Bekasi 2013-2016	52
Tabel 2.15 Nilai Tukar Petani Kota Bekasi	64
Tabel 2.16 Angka Kriminalitas Tertangani di Kota Bekasi	67
Tabel 2.17 Tabel Kerjasama Pemkot Bekasi 2013-2016	70
Tabel 2.18 Jumlah Penumpang yang menggunakan kereta api tahun 2017	76
Tabel 2.19 Perbandingan Panjang Jalan dengan jumlah Kendaraan	76
Tabel 2.20 Rasio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Usia SekolahDasar Kota Bekasi Tahun 2015-2017	79
Tabel 2.21 Rasio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Kota Bekasi Tahun 2015-2017	79
Tabel 2.22 Rasio Jumlah Murid terhadap Kelas Pendidikan Dasar (SD/MI; SMP/MTS) Kota Bekasi Tahun 2016-2017	80
Tabel 2.23 Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Bekasi 2013-2017	80
Tabel 2.24 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Bekasi 2013-2017	81
Tabel 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar 2013-2017	81
Tabel 2.26 APK Menurut Jenjang Kota Bekasi dan Jawa Barat Tahun 2015	84
Tabel 2.27 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	86
Tabel 2.28 Perkembangan Nilai MYS Kota Bekasi dan Jawa Barat	87
Tabel 2.29 Kondisi Akreditasi Sekolah di Kota Bekasi Tahun 2016	87
Tabel 2.30 Sarana Kesehatan Skala Kota Bekasi 2017	90
Tabel 2.31 Sarana Kesehatan Skala Kecamatan di Kota Bekasi	90

Tabel 2.32 Jumlah Kematian Bayi Kota Bekasi Tahun 2014 - 2017	93
Tabel 2.33 Beberapa Indikator Tentang Kematian Bayi dan Balita	94
Tabel 2.34 Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Bayi dan Balita	95
Tabel 2.35 Banyaknya Angka Kematian Ibu di Kota Bekasi	96
Tabel 2.36 Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Ibu	97
Tabel 2.37 Status Gizi Balita di Kota Bekasi Tahun 2013 -2016	98
Tabel 2.38 Cakupan Layanan Balita Gizi Buruk, 2013-2017	98
Tabel 2.39 Jumlah Kasus TB Paru di Kota Bekasi Tahun 2013-2017	98
Tabel 2.40 Beberapa Indikator Layanan Penyakit Menular, 2013-2017	99
Tabel 2.41 Beberapa Indikator Tentang Layanan Sarana dan Prasarana Kesehatan	101
Tabel 2.42 Daerah yang Belum Tersedianya Jaringan Air Bersih	106
Tabel 2.43 Tonase, Volume Sampah yang Masuk Ke TPA Sampah Sumur Batu Kota Bekasi 2015	108
Tabel 2.44 Tingkat Pelayanan Persampahan Kota Bekasi Tahun 2016	109
Tabel 2.45 Perubahan stock lahan di Kota Bekasi 2009- 2014	112
Tabel 2.46 Perubahan Penggunaan Lahan Kota Bekasi 2009-2014	114
Tabel 2.47 Evaluasi Capaian Indikator RPJMD Urusan Sosial, Tahun 2014-2016	116
Tabel2.48 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kecamatan	117
Tabel2.49 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kecamatan (lanjutan)	117
Tabel 2.50 Beberapa Indikator Urusan Sosial 2016-2017	118
Tabel 2.51 Beberapa Indikator Urusan Tenaga Kerja 2013-2017	119
Tabel 2.52 Beberapa Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	122
Tabel 2.53 Beberapa Indikator Urusan Lingkungan Hidup	126
Tabel 2.54 Kriteria Indek Standar Pencemar Udara	128
Tabel 2.55 Capaian indikator Dukcapil dari tahun 2015 – 2017	129
Tabel 2.56 Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	130
Tabel 2.57 Beberapa Indikator Urusan Perhubungan	133
Tabel 2.58 Beberapa Indikator Urusan Penanaman Modal	135
Tabel 2.59 Beberapa Indikator Urusan Pemuda dan Olahraga	135
Tabel 2.60 Beberapa Indikator Urusan Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	136
Tabel 2.61 Beberapa Indikator Urusan Perpustakaan	137
Tabel 2.62 Beberapa Indikator Urusan Kearsipan	138
Tabel 2.63 Beberapa Indikator Urusan Pariwisata	140
Tabel 2.64 Beberapa Indikator Urusan Kebudayaan	140
Tabel 2.65 Beberapa Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan	141
Tabel 2.66 Perkembangan Indikator ASN Kota Bekasi 2013-2017	142
Tabel 2.67 Penjelasan SPM Dasar menurut bidang	144
Tabel 2.68 Jenis Tindakan Menurut Tingkatan Pemerintah.	145
Tabel2.69 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Sesuai Standar Pelayanan Minimum dan Target Pembangunan	149
Tabel 2.70 Ketercapaian Kinerja Pemerintahan	163
Tabel2.71 Faktor Keberhasilan Terpenuhinya Atau Terlampauinya Target Kinerja Program	167

Tabel2.72	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program dan Pemecahan Masalahnya.	168
Tabel 2.73	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi	171
Tabel 2.74	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi	172
Tabel 2.75	Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional, dan Indikator yang Tidak Memiliki Data di Kota Bekasi	173
Tabel 2.76	Capaian Jumlah Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional	174
Tabel 2.77	Capaian Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional	175
Tabel 2.78	Capaian Indikator TPB Pada Perangkat Daerah Pada Pilar Sosial	176
Tabel2.79	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi perangkat daerah pada Pilar Ekonomi	178
Tabel 2.80	Capaian Indikator TPB Pada Perangkat Daerah Pada Pilar Lingkungan	179
Tabel2.81	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola	180
Tabel 2.82	Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Eksisting	181
Tabel2.83	Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Rencana Pola Ruang	182
Tabel 2.84	Kebutuhan Air di Kota Bekasi	184
Tabel 2.85	Proyeksi Status Daya Dukung Air Kota Bekasi Tahun 2017-2036	185
Tabel 2.86	Hasil Perhitungan Nilai Produksi Total Kota Bekasi	185
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2017	190
Tabel 3.2	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2013-2017 (Dalam Rupiah)	192
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2017	194
Tabel 3.4	Proporsi Realisasi Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi 2013-2017 (Dalam Rupiah dan%)	196
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2017	198
Tabel 3.6	Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017	200
Tabel 3.7	Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017	202
Tabel 3.8	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bekasi	204
Tabel 3.9	Defisit Riil Anggaran Kota Bekasi, 2013-2017	205
Tabel3.10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Anggaran Kota Bekasi, 2013-2017	205
Tabel 3.11	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi, Tahun 2019-2023 (Rupiah)	210
Tabel3.12	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023	213
Tabel 3.13	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bekasi 2019-2023	215
Tabel 3.14	Data Pembiayaan Non APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 S/D 2017	216
Tabel 4.1	Struktur Permintaan Akhir Ekonomi Kota Bekasi	222
Tabel 4.2	Indeks Derajat Kepekaan Ekonomi Kota Bekasi	225

Tabel 4.3 Indeks Derajat Penyebaran Ekonomi Kota Bekasi	227
Tabel 4.4 Lingkup Permasalahan isu Strategis Penguatan Struktur Perekonomian Kota Bekasi	249
Tabel 4.5 Identifikasi Alternatif Solusi	250
Tabel 5.1 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi 2019-2023	262
Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Bekasi 2018-2023	274
Tabel 6.2 Tahapan Pembangunan Kota Bekasi 2018 - 2023	284
Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif	285
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023	346
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	347
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi 2018-2023	384
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	385

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	11
Gambar 2-1 Peta Batas Administrasi Kota Bekasi	14
Gambar 2-2 Kondisi Cuaca	16
Gambar 2-3 DAS yang meliputi Kota Bekasi	17
Gambar 2-4 Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Bekasi	18
Gambar 2-5 Peta Gerakan Tanah	19
Gambar 2-6 Piramida Penduduk Kota Bekasi Tahun 2017	23
Gambar 2-7 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia 2013-2017 (Persen)	25
Gambar2-8 Sektor-sektor Ekonomi yang Memiliki Kecenderungan Laju Pertumbuhan Menguat di Kota Bekasi 2013-2017	26
Gambar2-9 Sektor-sektor Ekonomi yang Mengalami Tren Laju Pertumbuhan Melemah di Kota Bekasi 2013-2017	26
Gambar2-10 Struktur Ekonomi Kota Bekasi 2017 (Persen)	29
Gambar2-11 Sektor-sektor Ekonomi yang Memiliki Kecenderungan Kontribusi Meningkat di Kota Bekasi 2013-2017	29
Gambar2-12 Sektor-sektor Ekonomi yang Mengalami Tren Kontribusi Menurun di Kota Bekasi, 2013-2017	30
Gambar2-13 Matriks Empat Kuadran Tren Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi di Kota Bekasi, 2013-2017	31
Gambar2-14 Laju Inflasi Menurut Kelompok Barang di Kota Bekasi, Januari-Desember 2017 (%)	32
Gambar2-15 Perbandingan Laju Inflasi di Delapan Kota, 2013-April 2018 (%)	33
Gambar2-16 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia 2013-2017	34
Gambar2-17 Perkembangan Indeks Gini Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia, 2013-2017	35
Gambar2-18 Perkembangan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan di Kota Bekasi, 2013-2017	36
Gambar2-19 Perkembangan Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Kota Bekasi, 2013-2017	37
Gambar2-20 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota Bekasi, 2013-2017	38
Gambar2-21 Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bekasi, 2013-2015	44
Gambar2-22 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Kota Bekasi, Tahun 2013-2015	48
Gambar2-23 Perkembangan Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Bekasi, Tahun 2013-2015	50
Gambar2-24 Perkembangan Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bekasi 2013-2017	51
Gambar2-25 Perkembangan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan di Kota Bekasi 2013-2017	53

Gambar2-26 Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Bekasi, 2013-2016	55
Gambar2-27 Perkembangan Produksi Palawija di Kota Bekasi, 2013-2017 (Ton)	56
Gambar2-28 Perkembangan Produksi Sektor Pertanian di Kota Bekasi, 2013-2016 (Ton)	57
Gambar2-29 Perkembangan Produksi Kebun Rakyat di Kota Bekasi, 2013-2017 (Ton)	57
Gambar2-30 Perkembangan Jumlah Perusahaan Perdagangan di Kota Bekasi, 2013-2016	60
Gambar2-31 Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Bekasi, 2013-2016	60
Gambar2-32 Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kota Bekasi, 2013-2016	61
Gambar2-33 Perkembangan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Industri Menengah Besar di Kota Bekasi, 2013-2016	62
Gambar 2-34 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	63
Gambar 2-35 Nilai Tukar Petani	64
Gambar 2-36 Komponen Pengeluaran Rumah Tangga	65
Gambar 2-37 Produktivitas Total Daerah	65
Gambar 2-38 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB	66
Gambar 2-39 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bekasi	68
Gambar 2-40 Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih	77
Gambar 2-41 Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih	78
Gambar 2-42 Grafik perkembangan angka partisipasi murni (a) dan angka partisipasi kasar (b) Kota Bekasi Tahun 2013 – 2017 (BPS 2018)	82
Gambar 2-43 Perkembangan APM SD Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat	83
Gambar 2-44 Perkembangan APM SMP Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat	83
Gambar 2-45 Perkembangan APM SMA Kota Bekasi dan Provinsi Jabar Tahun 2011-2015	84
Gambar 2-46 Perkembangan APK SD Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015	85
Gambar 2-47 Perkembangan APK SMP Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015	85
Gambar 2-48 Perkembangan APK SMA Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015	86
Gambar 2-49 Proporsi Kualifikasi Guru Kota Bekasi 2016 (Ditjen Dikbud 2017)	88
Gambar 2-50 Rata-Rata UKG Menurut Kabupaten/KotaTahun 2015 (Ditjen Dikbud, 2017)	88
Gambar 2-51 Rata-Rata Hasil UKG Kota Bekasi Menurut JenjangTahun 2015 (Ditjen Dikbud, 2017)	89
Gambar 2-52 Kapasitas Jaringan Jalan Utama Kota Bekasi	103
Gambar 2-53 Peta V/C Rasio Jaringan Jalan Kota Bekasi	104
Gambar 2-54 Wilayah Potensi Banjir Kota Bekasi	111
Gambar 2-55 Kesesuaian rencana alokasi ruang dengan pemanfaatannya	113
Gambar 2-56 Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Bekasi	115
Gambar 2-57 Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kota Bekasi 2013-2017	139
Gambar 2-58 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi	172

Gambar2-59 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi	173
Gambar2-60 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional, dan Indikator yang Tidak Memiliki Data (BB dan NA) di Kota Bekasi	174
Gambar 2-61 Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional	176
Gambar 2-62 Kontribusi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Sosial	177
Gambar 2-63 Kontribusi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi	179
Gambar 2-64 Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan	180
Gambar 2-65 Kontribusi Organisasi perangkat daerah dalam capaian indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola	181
Gambar 3-1 Pertumbuhan Rata-Rata PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain dan Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2013-2017 (%)	191
Gambar3-2 Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2013-2017 (%)	193
Gambar 3-3 Pertumbuhan Rata-rata Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Belanja Daerah Kota Bekasi, 2013-2017	195
Gambar 3-4 Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi, 2013-2017	196
Gambar 3-5 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023	206
Gambar 3-6 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023 (%)	207
Gambar 3-7 Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi, 2019-2023	208
Gambar 3-8 Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Bekasi, 2019-2023 (%)	208
Gambar 4-1 Tahapan Pembangunan Kota Bekasi	218
Gambar 4-2 Garis Besar Komponen Struktur Perekonomian Kota	219
Gambar 4-3 Kinerja Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi	220
Gambar 4-4 Struktur Input Ekonomi Kota Bekasi	221
Gambar 4-5 Struktur Pasar Produk Ekonomi Kota Bekasi	222
Gambar 4-6 Kinerja Struktur Tenaga Kerja Kota Bekasi	224
Gambar 4-7 Derajat Tingkat Perkembangan Wilayah Kota Bekasi	228
Gambar 4-8 Perkembangan Produktivitas Daerah Kota Bekasi	231
Gambar 4-9 Struktur Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bekasi	237
Gambar 4-10 Rumusan Isu Strategis Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023	248
Gambar 5-1 Arsitektur Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2018-2023	261
Gambar 6-1 Kerangka Strategi Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023	271
Gambar 6-2 Arah Kebijakan yang Menjadi Prioritas	273
Gambar 6-3 Tahapan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023	284

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih yang dilantik pada tanggal 20 September 2018 untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun. Selain dari itu, penyusunan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 juga berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang secara substantif memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif. Selain dari itu, RPJMD Kota Bekasi 2018-2018 juga digunakan sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya dimulai dari tahun 2019

sampai dengan 2023. RKPD merupakan rencana kerja tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja serta kerangka anggaran pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang berupa stimulasi pembangunan kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 merupakan tahap ke IV dari program jangka panjang Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJPD Kota Bekasi 2005-2025. Sesuai amanah RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, maka tema pembangunan pada RPJMD 2018-2023 adalah perwujudan struktur perekonomian Kota yang semakin kokoh dan kompetitif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga di masa yang akan datang. Upaya mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dan kompetisi tersebut antara lain didukung dengan upaya memperkuat peran sektor ekonomi kreatif kota yang memiliki potensi dan peluang yang cukup besar di Kota Bekasi dalam 5 (lima) tahun terakhir ini. Berdasarkan amanah tersebut serta diintegrasikan dengan permasalahan, isu strategis serta visi misi kepala daerah, maka Dokumen RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 diharapkan mampu menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi dalam kerangka waktu 2018-2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atas Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 994);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 10);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
 40. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 43. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 44. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
 45. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2

Seri D);

46. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rencana pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian dari rencana pembangunan provinsi, demikian juga rencana pembangunan provinsi merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional. Dengan demikian bahwa dokumen RPJP Nasional menjadi pedoman penyusunan RPJP Provinsi dan RPJPD Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota. Begitu juga RPJMN Nasional menjadi pedoman penyusunan RPJMD Provinsi dan RPJMD Provinsi menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu RPJMD Kota Bekasi 2018–2023 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, dan mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025. Selain dokumen-dokumen perencanaan tersebut, perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Agenda Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs); (2) RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar; dan (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bekasi 2018–2023.

A. Agenda Pembangunan *Sustainable Development Goals*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan berkelanjutan pasca 2015 yang memberikan arahan tentang pentingnya 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta status nutrisi. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan SDGs meliputi:

1. Penghapusan kemiskinan;
2. Penghapusan kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;

4. Pendidikan berkualitas;
5. Kesenjangan gender;
6. Air bersih dan sanitasi;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;
9. Infrastruktur tangguh, industri inklusif, dan inovatif;
10. Penurunan kesenjangan;
11. Kota inklusif dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
14. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem bawah laut;
15. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat;
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh;
17. Kemitraan untuk semua tujuan pembangunan.

Terkait dengan *SDGs*, Pemerintah Daerah Kota Bekasi berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Bekasi mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Kebijakan pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 secara umum adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Kebijakan pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan daya saing daerah melalui keunggulan kompetitif perekonomian, sumber daya manusia, dan kemampuan ilmu pengetahuan, serta teknologi yang tinggi.

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019

Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2015-2019 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah *“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”*, yang dilakukan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “*Nawa Cita*”, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

- 1) Dimensi pembangunan manusia, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
- 2) Dimensi pembangunan sektor unggulan, meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata, dan industri;
- 3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan, yaitu antar kelompok pendapatan dan antar wilayah, meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Tantangan RPJMN 2015-2019 bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi adalah: (1) menjalankan reformasi birokrasi publik; (2) membuka partisipasi publik; (3) membangun politik legislasi yang kuat; (4) pemberantasan korupsi; (5) penegakan HAM; dan (6)

perlindungan lingkungan hidup. RPJMN 2015-2019 secara umum mengharuskan pemerintah daerah termasuk Kota Bekasi membuat perencanaan pembangunan dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif, dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Penyelarasan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

E. Hubungan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 dengan RPJPD Kota Bekasi 2005-2025

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

F. Hubungan RPJMD dengan RKPD

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan *“RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”*. Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: *“RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”*.

G. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

H. Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031

Penyusunan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Bekasi dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

I. Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Perangkat Daerah).

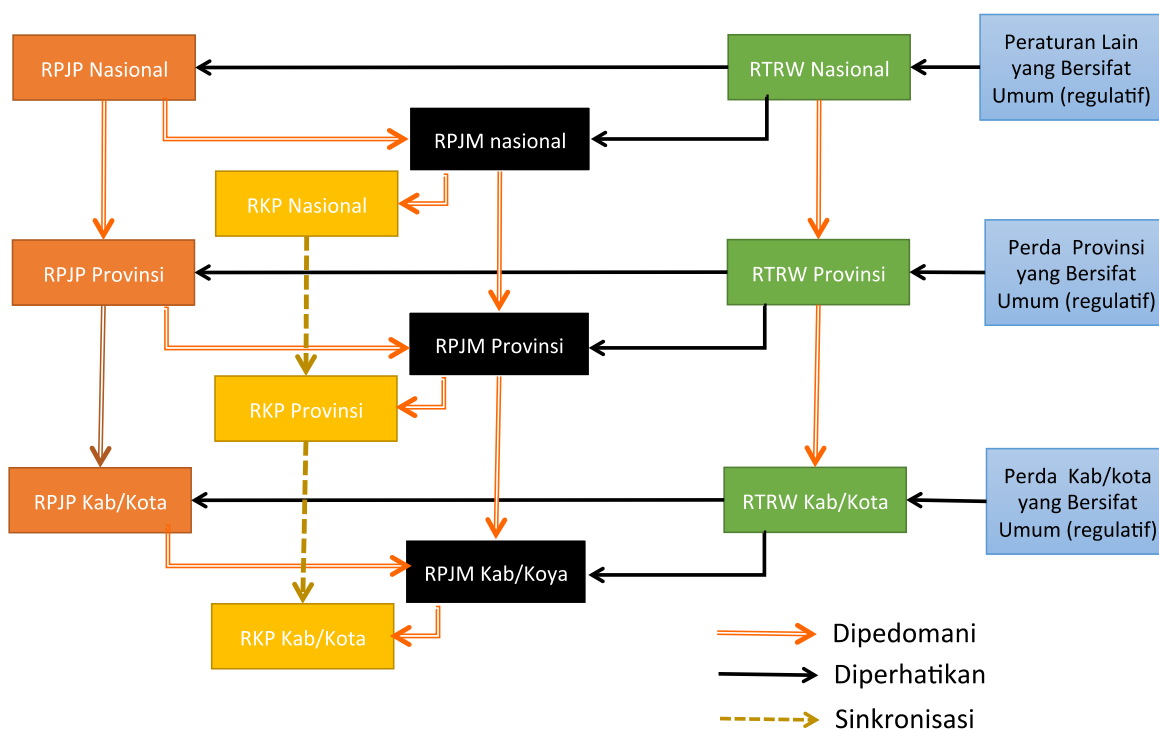
Secara garis besar hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1-1 pada halaman berikut.

1.4. Maksud Dan Tujuan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018–2023 ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Gambar 1-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 adalah:

- Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada periode 2018-2023.
- Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi jangka menengah 2018-2023 serta sebagai landasan pencapaian visi misi maupun jangka panjang hingga 2025.
- Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);
- Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode 2018-2023.
- Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan sesuai arahan dan tahapan pembangunan jangka panjang Kota Bekasi.

1.5. Sistematika

Sistematika Dokumen RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, dasar hukum perencanaannya, maksud, dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian dokumen.

Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, serta evaluasi terkait capaian pembangunan RPJMD periode sebelumnya.

Bab 3 Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan anggaran, dan kerangka pendanaan serta beberapa komponen keuangan lainnya seperti komponen pendapatan, komponen belanja, kapasitas fiskal, neraca pendapatan dan belanja, serta aspek pembiayaan pembangunan.

Bab 4 Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kota Bekasi

Bab ini berisi penjelasan terkait permasalahan dan isu strategi pembangunan daerah yang terjadi pada masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa mendatang. Permasalahan menggambarkan *gap* antara target pembangunan dengan capaian pembangunan sesuai bidang urusannya, sementara isu strategis membahas terkait permasalahan yang dapat berdampak luas bagi pembangunan Kota Bekasi.

Bab 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Bab ini berisi penjelasan terkait visi misi pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 yang merupakan visi misi kepala daerah terpilih serta penjabarannya pada tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pembangunan.

Bab 6 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan

Bab ini berisi penjelasan rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 yang merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi misi tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Bab 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini berisi penjelasan berbagai program pembangunan daerah, indikator kinerja dan target kinerja outcome beserta pagu indikatif seluruh Perangkat

Daerah untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telah dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Bab 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi penjelasan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah yang merupakan indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab 9 Penutup

Bab ini berisi penjelasan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RPJMD secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

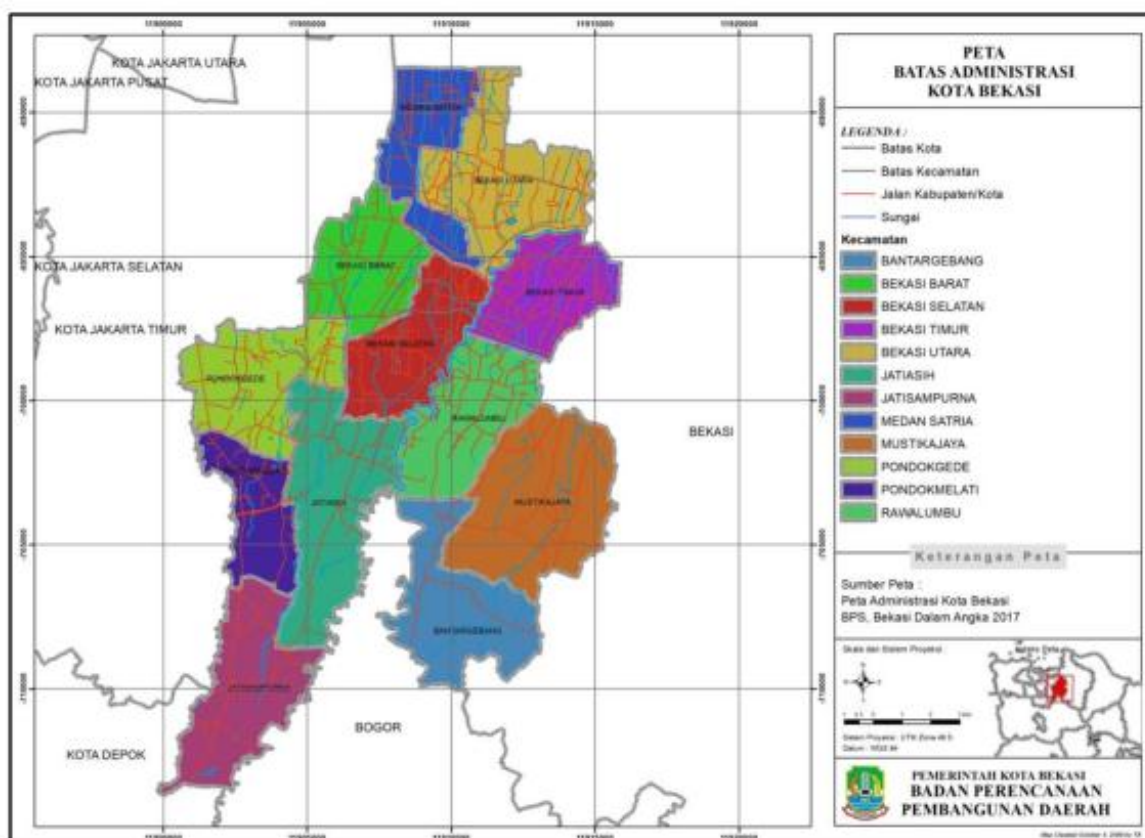
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

1.1.1. Aspek Geografi

Kota Bekasi yang merupakan salah satu wilayah bagian dari Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km² atau 21.049 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi.
- ✓ Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
- ✓ Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta.
- ✓ Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

Sedangkan secara astronomis, wilayah Kota Bekasi terletak pada 106°48'28" – 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" – 6°30'6" Lintang Selatan.



Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2017

Gambar 2-1 Peta Batas Administrasi Kota Bekasi

Secara geografis Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, sekaligus merupakan bagian dari perlintasan atau poros Sumatera – Jakarta – Jawa Tengah – Jawa Timur maupun poros Jakarta – Bandung. Kota Bekasi merupakan penyangga bagi Kota Jakarta. Dalam konteks nasional maupun regional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam PP tersebut dijelaskan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Secara administrasi Kota Bekasi dibagi menjadi 12 wilayah kecamatan yaitu: Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Pondok Gede, Jatiasih, Pondok Melati, Mustika Jaya, Bantar Gebang, dan Jatisampurna. Kecamatan Mustika Jaya mempunyai wilayah yang paling luas yaitu 24,7 km², sedangkan Kecamatan Bekasi Timur merupakan wilayah yang paling kecil yaitu 13,5 km². Dari 12 kecamatan, terbagi lagi menjadi 56 kelurahan, dimana setiap kecamatan dibagi sedikitnya menjadi 4 kelurahan. Pusat Kota Bekasi berada pada Kecamatan Bekasi Timur.

Tabel 2.1 Luas Kota Bekasi Dirinci Menurut Kecamatan

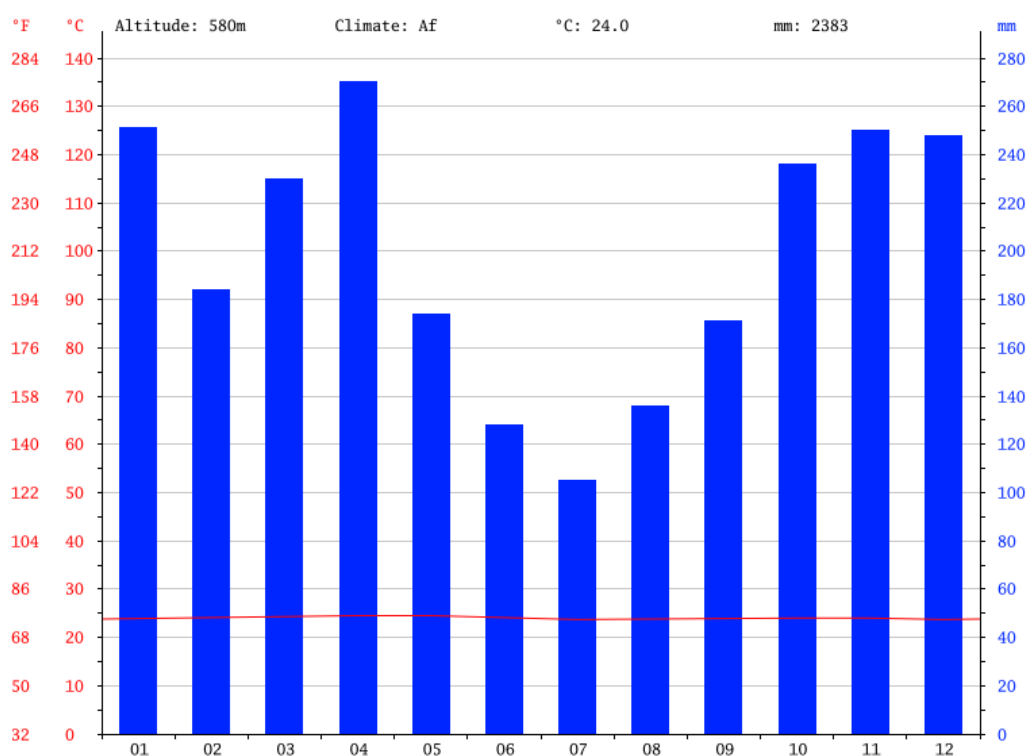
No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Ha	(%)
1	Pondok Gede	1.629	7,74
2	Jatisampurna	1.449	6,88
3	Pondok Melati	1.857	8,82
4	Jatiasih	2.200	10,45
5	Bantar Gebang	1.704	8,10
6	Mustika Jaya	2.473	11,75
7	Bekasi Timur	1.349	6,41
8	Rawalumbu	1.567	7,44
9	Bekasi Selatan	1.496	7,11
10	Bekasi Barat	1.889	8,97
11	Medan Satria	1.471	6,99
12	Bekasi Utara	1.965	9,33
	Kota Bekasi	21.049	100,00

Sumber: BPS (2018)

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar dan landai, dengan kemiringan lerengnya antara 0 – 2%. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81 m di atas permukaan air laut (dpl). Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur merupakan wilayah yang paling rendah berada pada 0 – 5 m dpl, sehingga wilayahnya banyak

genangan, terutama pada musim hujan. Ketinggian kurang dari 30 m dpl berada pada Kecamatan Bekasi Selatan (sebagian), Pondok Gede, Jatiasih (sebagian), Medan Satria, dan Mustika Jaya. Sedangkan ketinggian di atas 30 dpl berada di Pondok Melati, Jatiasih (sebagian), dan Mustika Jaya (sebagian). Kecamatan Jatisampurna dan Bantar Gebang merupakan wilayah yang memiliki ketinggian di atas 45 m dpl.

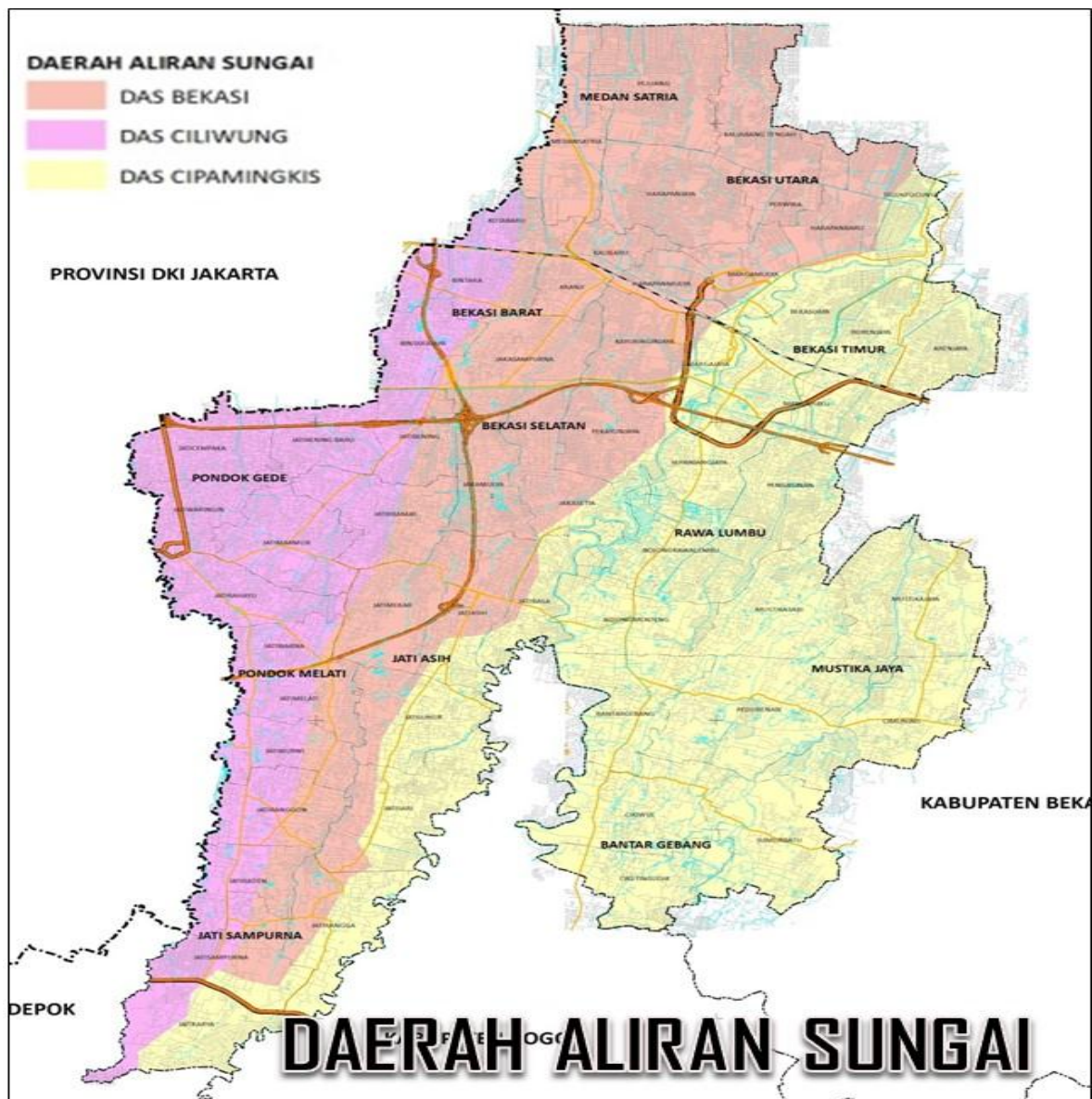
Kota Bekasi memiliki iklim kering dengan tingkat kelembaban rendah dan rata-rata suhu udara tiap tahun sekitar 26,2°C. Pola curah hujan di Kota Bekasi adalah monsunial dimana hanya terdapat satu puncak terjadinya musim hujan. Berdasarkan data Perum Jasa Tirta II tahun 2016 menunjukkan bahwa intensitas curah hujan sebanyak 1.792 mm, dengan jumlah hari hujan 147 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 112 hari dengan intensitas curah hujan total 332 mm. Data yang sama juga memperlihatkan kondisi iklim yang tidak menentu yaitu terjadinya hujan hampir sepanjang tahun.



Gambar 2-2 Kondisi Cuaca

Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama, yaitu: Sungai Cakung, Sungai Bekasi, dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung dengan ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air laut. Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan sungai-sungai yang melintasi Kota Bekasi berdasarkan Kajian Lingkungan

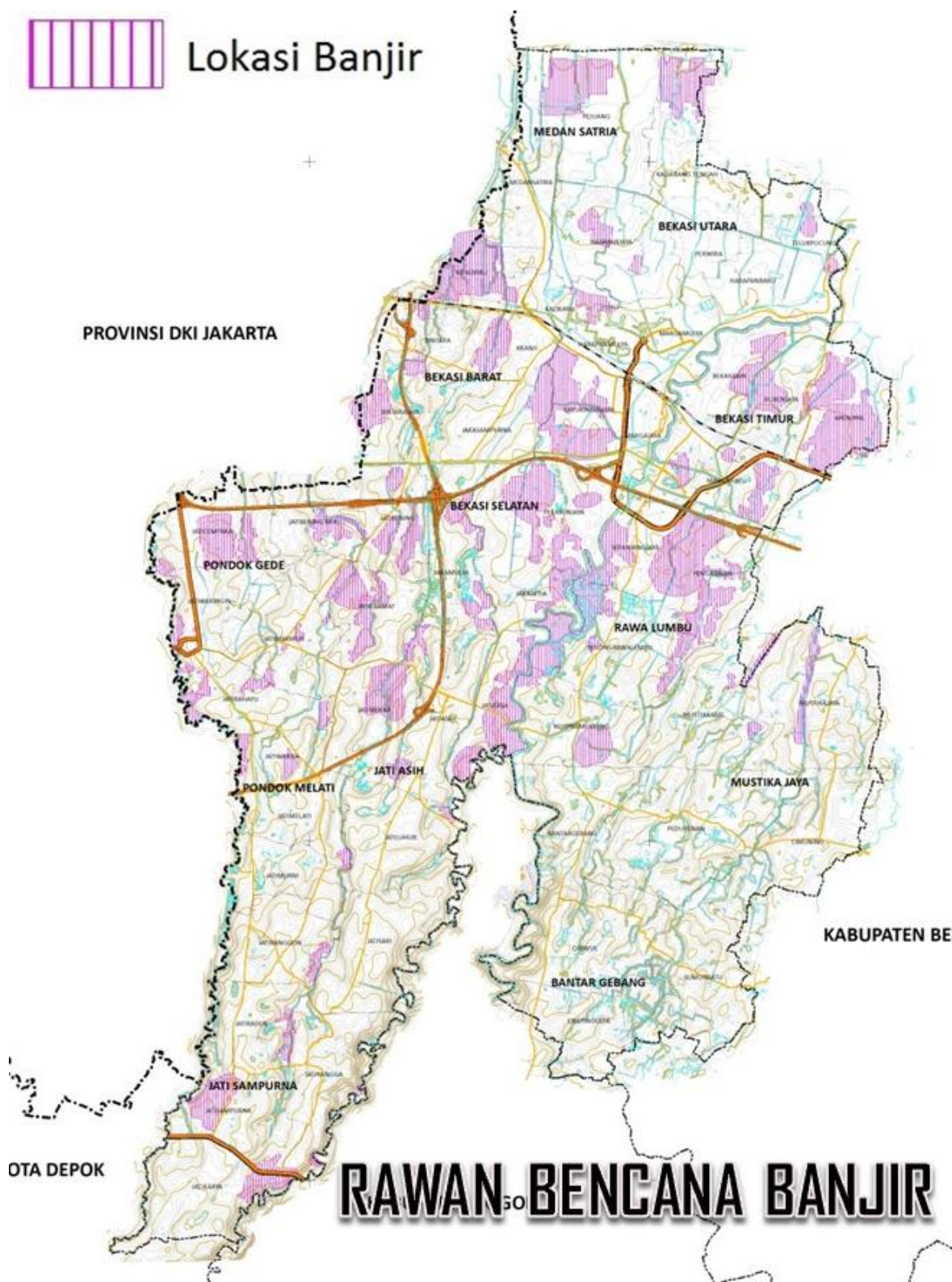
Hidup Strategis (KLHS) Metropolitan Bodebekkapur (2016) saat ini kondisi tercemar sedang hingga berat. Kemungkinan besar pencemaran ini disebabkan oleh limbah rumah tangga dan limbah industri yang berada di sekitar aliran sungai.



Sumber: KLHS Revisi RTRW Kota Bekasi (2017)

Gambar 2-3 DAS yang meliputi Kota Bekasi

Kota Bekasi tercatat ada 49 titik rawan banjir yang tersebar di 10 kecamatan. Daerah rawan banjir yang jumlahnya mencapai 49 titik terbagi di Kecamatan Jatiasih delapan titik, Kecamatan Bekasi Selatan tujuh titik, Kecamatan Rawalumbu lima titik, Kecamatan Bekasi Timur delapan titik, Kecamatan Bekasi Utara tiga titik, Kecamatan Bekasi Barat enam titik, Kecamatan Pondok Melati dua titik, Kecamatan Pondok Gede lima titik, Kecamatan Medan Satria tiga titik, dan Kecamatan Mustika Jaya dua titik.



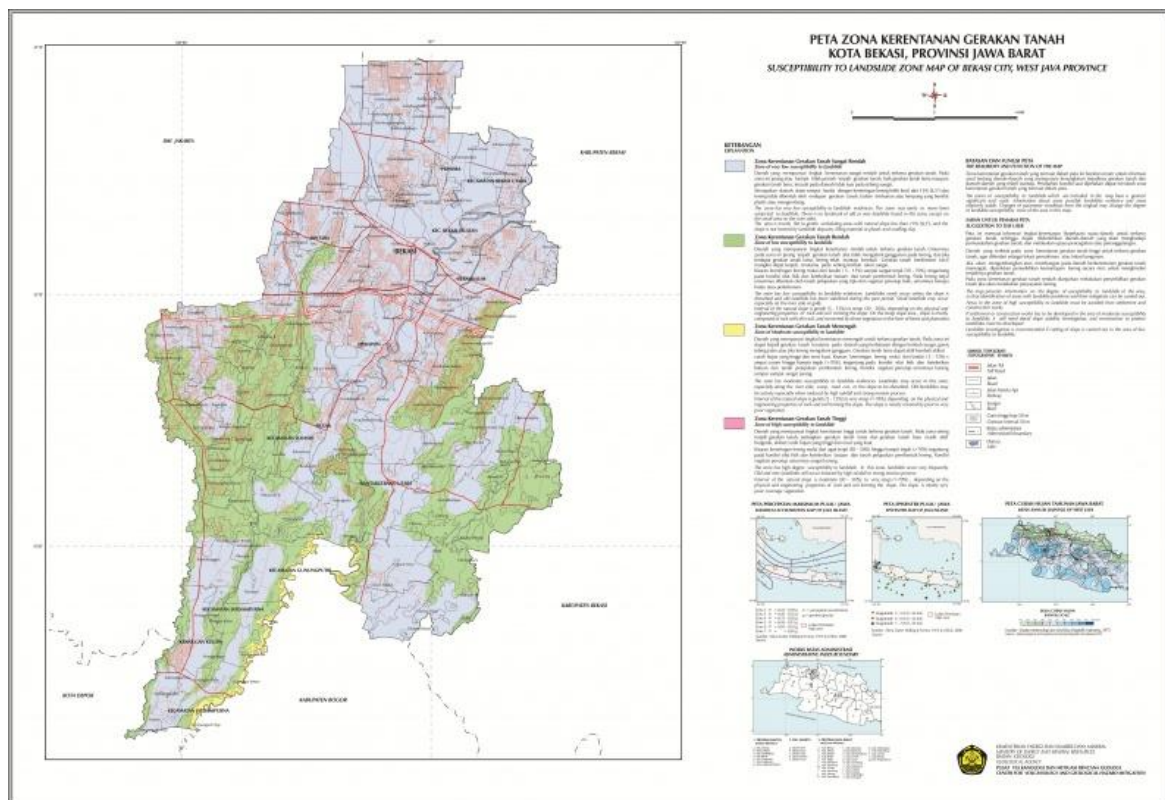
Sumber: KLHS Revisi RTRW Kota Bekasi (2017)

Gambar 2-4 Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Bekasi

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantar Gebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah

tercemar. Kondisi air tanah yang terdapat di Bekasi Timur sebagian mengandung zat besi. Namun secara umum wilayah Kota Bekasi merupakan kawasan resapan air pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bekasi-Karawang. Untuk penggunaan air tanah, baik air tanah dangkal maupun dalam harus dikendalikan, karena menurut Kementerian ESDM, CAT Bekasi-Karawang dinyatakan dalam kondisi kritis.

Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh *pleistocene volcanik facies*. Struktur aluvium menempati sebagian kecil wilayah Kota Bekasi bagian utara sedangkan struktur *miocene sedimentary facies* terdapat di bagian timur wilayah Kota Bekasi sepanjang perbatasan dengan DKI Jakarta. Kedalaman efektif tanah sebagian besar di atas 91 cm. Jenis tanah latosol dan aluvial, serta tekstur tanah didominasi tekstur sedang dan halus. Komposisi perbandingan berdasarkan luasnya adalah: tekstur halus seluas 17.260 ha (82%), tekstur sedang seluas 3.368 ha (16%) dan tekstur kasar seluas 421 ha (2%) (Bappeda Kota Bekasi, 2005).



Gambar 2-5 Peta Gerakan Tanah

Pengembangan Kota Bekasi sangat pesat. Jumlah penduduk yang semakin bertambah yang disertai peningkatan kegiatan perekonomian, tentunya membutuhkan ruang dan lahan. Berdasarkan penelitian Putri (2017) ditunjukkan bahwa secara umum luas lahan terbuka dan lahan bervegetasi mengalami penurunan. Perubahan luas antara lahan bervegetasi dengan lahan terbangun menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya lahan bervegetasi dan bertambahnya lahan terbangun selama 15 tahun. Luas lahan vegetasi berkurang sebesar 4.805 ha dan lahan

terbuka yang berkurang sebesar 752 ha. Sementara lahan terbangun menjadi bertambah sebesar 5.596 ha. Secara lebih rinci hal tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan IMB berupa rumah tinggal tahun 2012 sebanyak 2.338 bangunan, tahun 2013 sebanyak 1.975 bangunan, dan tahun 2014 sebanyak 1.906 bangunan. Sementara IMB untuk perumahan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2012 sebanyak 1.671 bangunan, tahun 2013 sebanyak 356 bangunan, dan tahun 2014 sebanyak 49 bangunan (Bappeda Kota Bekasi, 2015). Perumahan dan tempat tinggal di Kota Bekasi berpusat di Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, dan Bekasi Utara. Sedangkan di bagian Selatan Kota Bekasi masih banyak wilayah yang belum terbangun seperti di Kecamatan Jatiasih, Jatisampurna, Bantar Gebang, dan Mustika Jaya (Dinas Tata Kota Bekasi 2013).

Tabel 2.2 Perubahan luas lahan di Kota Bekasi dari tahun 2000 sampai 2015

No	Tutupan Lahan	Luas Lahan 2000		Luas Lahan 2015		Perubahan Luas Lahan	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Badan Air	58	0.3	20	0.1	-38	-0.2
2	Lahan Terbangun	12250	56.4	17846	82.1	5596	25.8
3	Lahan Terbuka	2412	11.1	1660	7.6	-752	-3.5
4	Vegetasi	7004	32.2	2199	10.1	-4805	-22.1

Analisis ketersediaan lahan di Kawasan Bekasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kemampuan kawasan tersebut untuk meresapkan air. Kemampuan meresapkan air ini tergantung beberapa faktor, seperti: jenis tanah, geologi, curah hujan, kemiringan lereng, dan morfologi. Selanjutnya kemampuan meresapkan air pada setiap zonasi dari hasil analisis perhitungan neraca air digunakan untuk menentukan besaran Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum. KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa daya tampung suatu lahan untuk bisa dikembangkan dengan asumsi peningkatan air larian mencapai 100% dari kondisi awal. Daya tampung lahan terbangun setiap zonasi potensi resapan akan berbeda besarnya, untuk KWT maksimum di zona resapan tinggi akan lebih kecil dibandingkan dengan besaran KWT maksimum di zona potensi resapan rendah. Hal ini disebabkan pada zona potensi resapan tinggi mempunyai fungsi orologis yaitu sebagai pasokan air tanah untuk daerah hilirnya, sehingga untuk kegiatan pembangunan di zona potensi resapan sedang hingga tinggi perlu adanya rekayasa teknik seperti sumur resapan dan atau kolam resapan. Untuk pembangunan di daerah yang berpotensi resapan rendah bisa dilakukan dengan KWT yang lebih besar, tetapi untuk mencegah terjadi air limpasan terhadap bagian hilir yang tidak menimbulkan banjir maka perlu dibuatkan kolam retensi, yang juga dapat berfungsi untuk penyediaan sumber air.

Guna mengetahui kondisi daya dukung lahan yang ada di suatu kawasan, maka perlu dihitung KWT aktual, yang merupakan kondisi pada saat ini terkait dengan perbandingan (persentase) luas kawasan yang terbangun terhadap kawasan peruntukan seluruhnya di dalam satu kawasan. Selanjutnya KWT aktual dibandingkan dengan KWT maksimal suatu kawasan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika KWT aktual lebih besar atau melampaui KWT maksimal maka berarti kawasan tersebut sudah melebihi daya dukung lahannya. Koefisien Wilayah Terbangun Aktual (KWT_{aktual}) di Kota Bekasi belum melebihi KWT_{maks} . Sehingga banyak lahan yang tersedia untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Koefisien Wilayah Terbangun Maksimum dan Koefisien Wilayah Terbangun Aktual Kota Bekasi Eksisting

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas Tertutup Bangunan (Ha)	KWT Aktual (%)	KWT Maksimal (%)	Ketersediaan Ruang Lahan Terbangun (%)	Ketersediaan Ruang Lahan Terbangun (Ha)
1.	Bantar Gebang	2.159	1.353	63	98	35	763
2.	Bekasi Barat	1.489	1.285	86	98	12	174
3.	Bekasi Selatan	1.582	1.355	86	98	12	195
4.	Bekasi Timur	1.407	1.285	91	96	5	65
5.	Bekasi Utara	2.061	1.764	86	98	12	256
6.	Jatiasih	2.536	1.989	78	98	20	496
7.	Jatisampurna	2.248	1.529	68	93	25	562
8.	Medan Satria	1.434	967	67	97	30	424
9.	Mustika Jaya	2.414	1.663	69	85	16	389
10.	Pondok Melati	963	730	76	96	20	194
11.	Pondok Gede	1.501	1.448	96	98	2	23
12.	Rawalumbu	1.772	1.454	82	92	10	175

Sumber: KLHS Metropolitan Bodebekkarpur (2016)

Berdasarkan data ketersediaan lahan dan karakteristik wilayah, maka pengembangan wilayah dapat dilaksanakan sesuai dengan RTRW Kota Bekasi yang ada. Namun yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan dan pemerataan pembangunan antara wilayah di Kota Bekasi. Pembangunan yang ada cenderung lebih ke arah ke pusat Kota Bekasi, dimana daya dukung wilayah sudah hampir terlampaui.

1.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan definisi BPS (2018), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk dalam suatu daerah merupakan subyek dan obyek pembangunan. Semakin bagus kualitas penduduk suatu daerah maka akan semakin baik pembangunan daerah tersebut.

Jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2017 mencapai 2.873.484 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.447.872 dan perempuan sebanyak 1.425.612 dan rasio jenis kelamin 101,56. Terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari

penduduk perempuan, dengan rata-rata rasio periode 2012-2016 sebesar 101,79. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Bekasi selama periode 2013-2017 sebesar 2,64%. Secara lengkap data perkembangan penduduk Kota Bekasi selama periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Perkembangan Penduduk Kota Bekasi menurut Jenis Kelamin 2013-2017

Tahun	Jumlah penduduk			Rasio jenis kelamin	Laju pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
2017	1.447.872	1.425.612	2.873.484	101,56	2,50
2016	1.413.424	1.389.859	2.803.283	101,70	2,56
2015	1.378.883	1.354.357	2.733.240	101,81	2,64
2014	1.344.022	1.318.989	2.663.011	101,90	2,71
2013	1.309.175	1.283.644	2.592.819	101,99	2,77
Rata-rata				101,79	2,64

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018.

Distribusi penduduk Kota Bekasi, seperti tersaji pada tabel berikut ini. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 382.840 jiwa dan yang paling sedikit terdapat di kecamatan Bantar Gebang yaitu sebanyak 122.710 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata mencapai 137 jiwa/Ha, dimana kepadatan tertinggi pada Kecamatan Bekasi Timur sebesar 195 Jiwa/Ha, dan yang terendah adalah Kecamatan Bantar Gebang yaitu 72 Jiwa/Ha.

Tabel 2.5 Distribusi Penduduk menurut Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1	Pondok Gede	305.587	1.629	188
2	Jatisampurna	147.921	1.449	102
3	Pondok Melati	159.175	1.857	86
4	Jatiasih	251.302	2.200	114
5	Bantar Gebang	122.710	1.704	72
6	Mustika Jaya	260.063	2.473	105
7	Bekasi Timur	260.247	1.349	193
8	Rawalumbu	264.032	1.567	168
9	Bekasi Selatan	229.809	1.496	154
10	Bekasi Barat	301.818	1.889	160
11	Medan Satria	187.980	1.471	128
12	Bekasi Utara	382.840	1.965	195
Kota Bekasi		2.873.484	21.049	137

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018

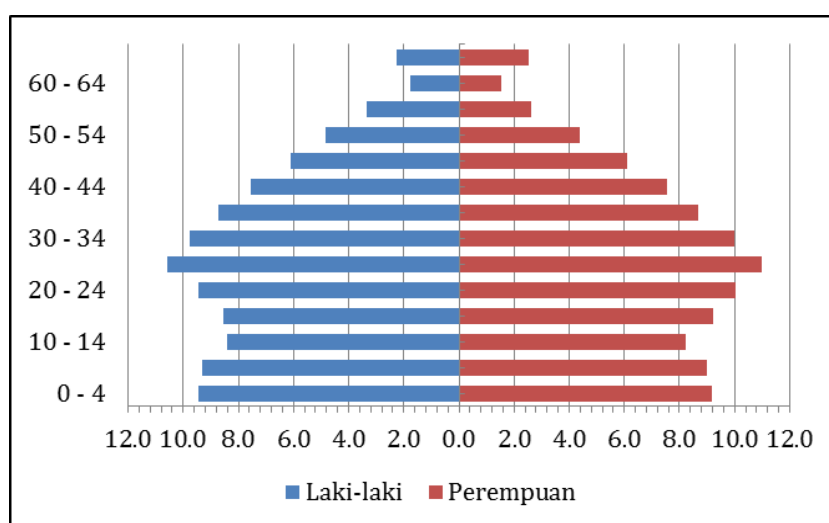
Struktur penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bekasi didominasi oleh usia produktif/angkatan kerja yaitu penduduk berusia antara 15 – 64 tahun sebesar 70,85% sedangkan sisanya sebesar 29,15% merupakan penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia 0 – 14 tahun dan usia > 64 tahun. Hal ini berarti bahwa angka ketergantungan Kota Bekasi sebesar 41,15%. Secara rinci struktur penduduk Kota Bekasi terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Struktur Penduduk Kota Bekasi Tahun 2017

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
0 - 4	136.557	130.875	267.432	9,31
5 - 9	135.148	128.196	263.344	9,16
10 - 14	121.637	117.017	238.654	8,31
15 - 19	123.494	131.710	255.204	8,88
20 - 24	136.700	142.839	279.539	9,73
25 - 29	153.476	156.291	309.767	10,78
30 - 34	141.185	142.538	283.723	9,87
35 - 39	126.597	123.704	250.301	8,71
40 - 44	109.105	107.420	216.525	7,54
45 - 49	88.455	87.245	175.700	6,11
50 - 54	69.730	62.473	132.203	4,60
55 - 59	48.152	37.448	85.600	2,98
60 - 64	25.221	22.037	47.258	1,64
65 +	32.415	35.819	68.234	2,37
TOTAL	1.447.872	1.425.612	2.873.484	100

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018

Secara grafis struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam bentuk piramida penduduk seperti berikut ini.



Sumber: diolah dari data penduduk pada Bekasi Dalam Angka, 2018.

Gambar 2-6 Piramida Penduduk Kota Bekasi Tahun 2017

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Laju Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah/negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi bisa pula diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah/nasional. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat perkembangan dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi selama rentang waktu 2013-2017.

A. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sepanjang kurun masa 2013-2017, laju pertumbuhan ekonomi yang diraih Kota Bekasi pada awal periode cenderung menurun, namun memasuki akhir periode menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bekasi telah bertambah dari Rp49,7 triliun tahun 2013 menjadi Rp62,2 triliun tahun 2017. Pertambahan ini telah menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi sebesar 6,04% pada tahun 2013, namun dua tahun berikutnya merosot hingga angka 5,61% tahun 2014 dan 5,57% tahun 2015.

Tabel 2.7 Perkembangan Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi Menurut Harga Konstan 2010 Tahun 2010-2016

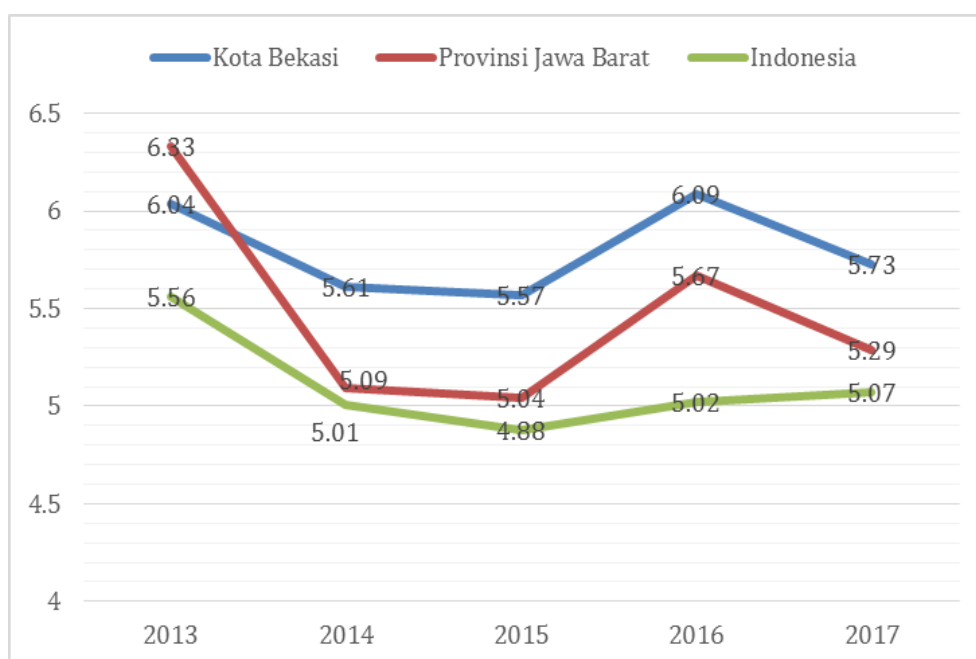
No	LAPANGAN USAHA	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-rata
		Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	327,4	0,94	322	-1,64	320,9	-0,33	329,28	2,61	330,55	0,39	0,39
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	18.348,20	3,46	19.008,20	3,6	19.621,30	3,23	20.450,19	4,22	21.423,43	4,76	3,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.066,90	9,44	1.143,20	7,15	1.040,00	-9,03	1.081,09	3,95	841,2	-22,19	-2,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40,9	6,91	43,1	5,32	45,2	4,97	48,09	6,39	51,64	7,38	6,20
6	Konstruksi	4.678,50	17,18	5.330,10	13,93	5.877,00	10,3	6.407,34	9,02	7.037,07	9,83	12,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.878,60	5,39	12.261,40	3,22	12.858,30	4,87	13.583,48	5,64	14.326,49	5,47	4,92
8	Transportasi dan Pergudangan	4.451,00	4,13	4.779,80	7,39	5.199,60	8,78	5.463,65	5,08	5.799,08	6,14	6,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.723,10	9,57	1.873,00	8,7	2.027,20	8,24	2.248,29	10,91	2.450,12	8,98	9,28
10	Informasi dan Komunikasi	964,6	8,98	1.130,40	17,19	1.333,00	17,9	1.526,91	14,55	1.694,67	10,99	13,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.376,60	12,93	1.417,70	2,98	1.523,10	7,44	1.689,55	10,93	1.788,20	5,84	8,02
12	Real Estat	845,3	6,65	894,3	5,79	958	7,13	1.021,45	6,62	1.091,85	6,89	6,62

No	LAPANGAN USAHA	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-rata
		Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	
13	Jasa Perusahaan	207,4	8,58	225,7	8,83	241,9	7,17	262,86	8,66	285,16	8,48	8,35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.039,30	0,92	1.045,40	0,59	1.065,50	1,92	1.086,60	1,98	1.098,70	1,11	1,30
15	Jasa Pendidikan	935,6	9,21	1.057,30	13,01	1.165,20	10,2	1.254,04	7,62	1.365,23	8,87	9,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	512,3	9,27	557,7	8,87	618	10,8	679,65	9,98	747,48	9,98	9,78
17	Jasa Lainnya	1.345,50	5,05	1.444,90	7,39	1.563,60	8,21	1.689,63	8,06	1.835,13	8,61	7,46
18	Produk Domestik Regional Bruto	49.741,10	6,04	52.534,10	5,61	55.457,80	5,57	58.822,10	6,09	62.166,00	5,73	5,81

Sumber: BPS Kota Bekasi (2018a:64); diolah.

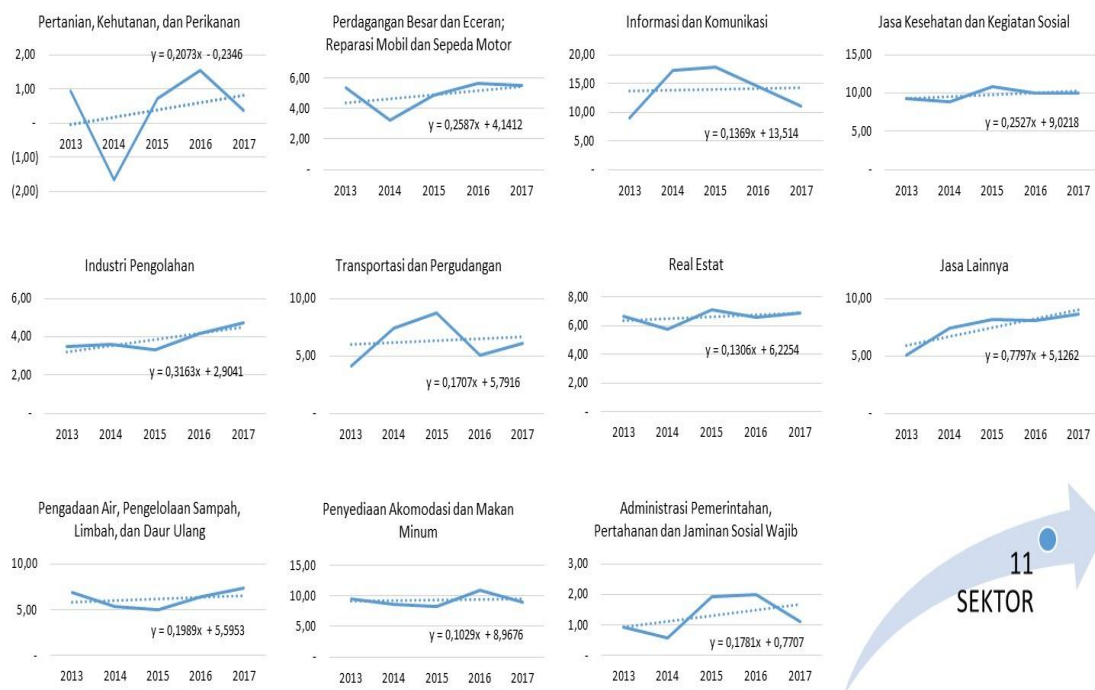
Memasuki tahun 2016, perekonomian Kota Bekasi mampu bangkit kembali untuk meraih laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,09%, yang berarti melampaui angka pertumbuhan tahun 2013. Namun di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sedikit merosot menjadi 5,73%. Dengan demikian, selama periode 2013-2017 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi adalah 5,81% per tahun (lihat Tabel 2.7).

Angka laju pertumbuhan ekonomi yang diraih Kota Bekasi di atas ternyata lebih besar dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat (rata-rata 5,48% per tahun) dan laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,11% per tahun) untuk jangka waktu yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Bekasi memiliki daya saing kuat di level Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia selengkapnya dapat diperhatikan dalam Gambar 2-7.



Gambar 2-7 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia 2013-2017 (Persen)

Apabila ditelusuri menurut sektor-sektor ekonomi, terdapat sebelas dari 16 sektor ekonomi yang memiliki tren¹ laju pertumbuhan menguat selama periode 2013-2017 (lihat Gambar 2-8). Sebaliknya, lima sektor ekonomi lainnya mengalami pelemahan tingkat pertumbuhan, seperti tampak dalam Gambar 2-9.



Gambar 2-8 Sektor-sektor Ekonomi yang Memiliki Kecenderungan Laju Pertumbuhan Menguat di Kota Bekasi 2013-2017



Gambar 2-9 Sektor-sektor Ekonomi yang Mengalami Tren Laju Pertumbuhan Melemah di Kota Bekasi 2013-2017

¹ Menggunakan *linear trendline*.

B. Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2017 lalu, sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi berasal dari sektor industri pengolahan. Dari laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,73%, sekitar 1,78% di antaranya bersumber dari sektor ini. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menduduki posisi kedua dengan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,36%. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang paling kecil, yakni mendekati 0,00%, selain sektor pertambangan dan penggalian yang memang tidak ada kegiatannya di Kota Bekasi (lihat Tabel 2.8).

Tabel 2.8 Perkembangan Sumber Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi 2013-2017 (%)

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,04	0,04	0,03	0,04	0,00	0,03
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	2,2	2,02	1,96	2,1	1,78	2,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,17	0,15	0,16	(0,44)	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,005	0,004	0,004	0,005	0,01	0,00
6	Konstruksi	0,57	0,57	0,58	0,65	1,15	0,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,46	1,29	1,27	1,37	1,36	1,35
8	Transportasi dan Pergudangan	0,54	0,52	0,56	0,6	0,61	0,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,2	0,2	0,2	0,23	0,37	0,24
10	Informasi dan Komunikasi	0,11	0,1	0,11	0,12	0,31	0,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,17	0,16	0,16	0,18	0,18	0,17
12	Real Estat	0,1	0,09	0,09	0,1	0,13	0,10
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,13	0,12	0,11	0,12	0,02	0,10
15	Jasa Pendidikan	0,11	0,11	0,12	0,13	0,20	0,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,06	0,06	0,06	0,07	0,00	0,05
17	Jasa Lainnya	0,15	0,14	0,14	0,16	0,01	0,12
18	Produk Domestik Regional Bruto	6,04	5,61	5,57	6,08	5,73	5,81

Sumber: BPS Kota Bekasi (2017a, 2018); diolah.

2. Struktur Ekonomi

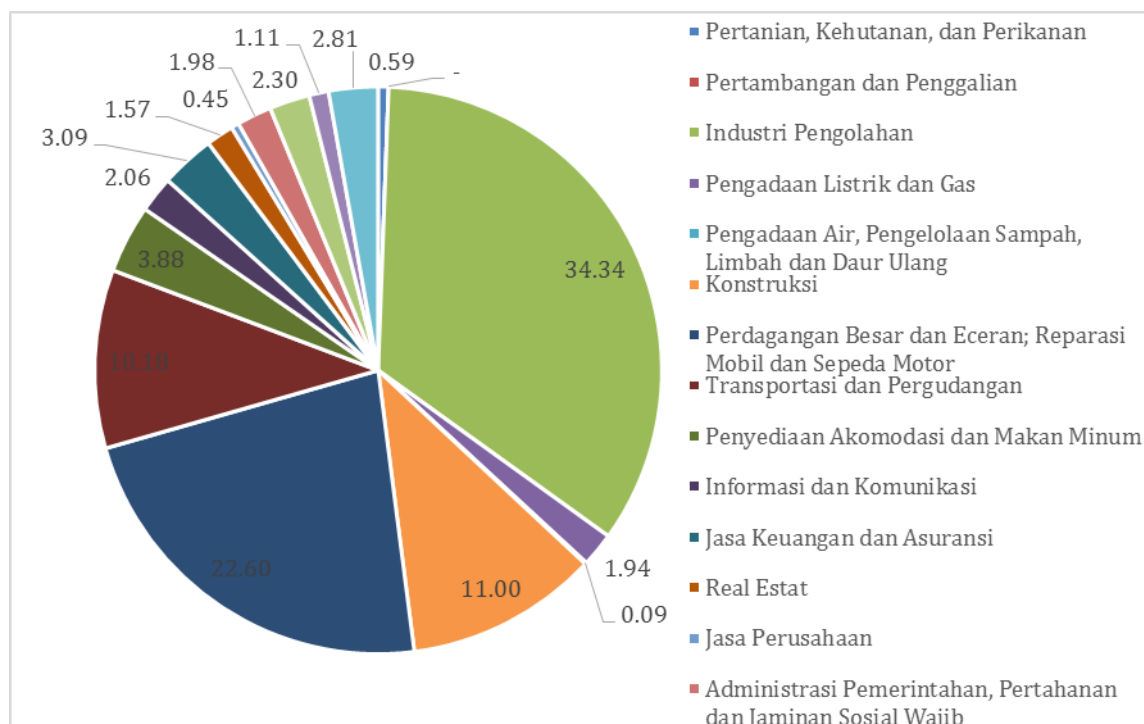
Struktur ekonomi menggambarkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Struktur ekonomi dapat dilihat dari komposisi persentase nilai tambah (*percentage of added value*) yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi di dalam suatu daerah/negara pada waktu tertentu.

Sampai dengan tahun 2017, PDRB Kota Bekasi menurut harga berlaku telah mencapai angka Rp83,33 triliun (lihat Tabel 2.9). Dua per tiga dari nilai ini dikuasai oleh tiga sektor, yakni sektor industri pengolahan sebesar 34,34% (Rp28,62 triliun), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 22,60% (Rp18,3 triliun), dan sektor konstruksi sekitar 11% (Rp9,2 triliun). Sejak tahun 2013 sektor konstruksi berhasil menggeser sektor transportasi dan pergudangan dari posisi ketiga. Keberhasilan ini berkat berkembangnya proyek-proyek besar infrastruktur dan perumahan di Kota Bekasi. Sektor transportasi dan pergudangan itu sendiri memiliki pangsa sebesar 10,8% atau senilai Rp8,5 triliun pada tahun 2017 (lihat Gambar 2-10).

Tabel 2.9 Perkembangan Nilai PDRB Menurut Harga Berlaku dan Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi di Kota Bekasi 2013-2017

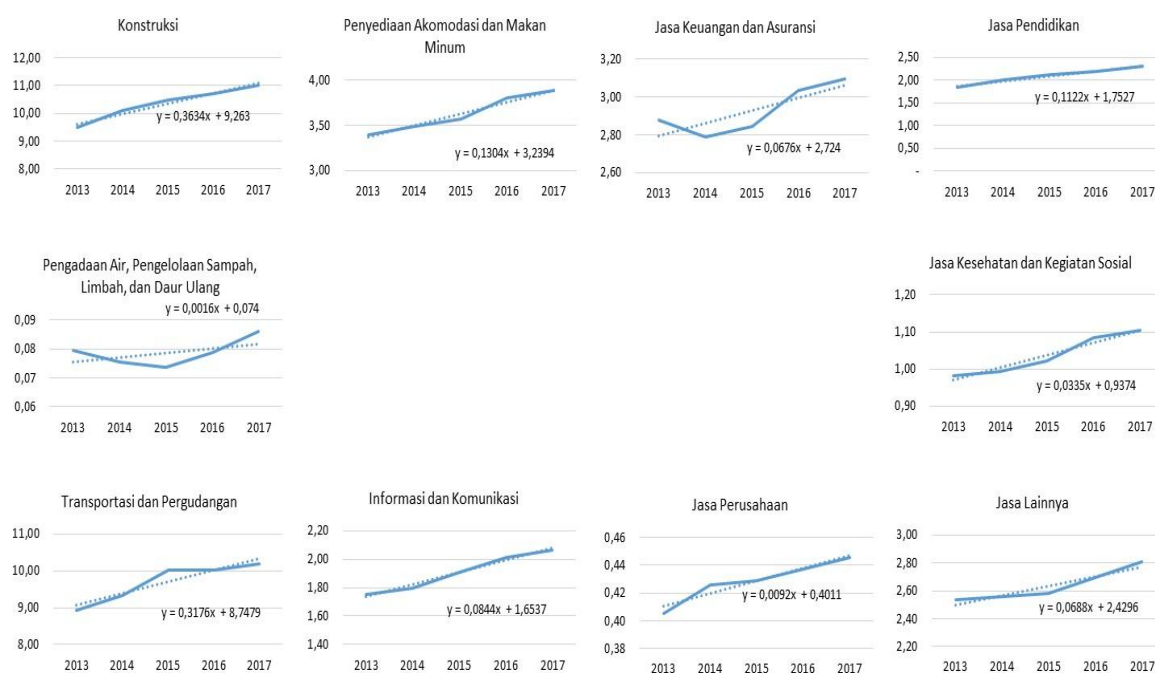
No.	LAPANGAN USAHA	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-rata (%)
		Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%	
1	Pertanian, Kehu-tanan, dan Perikanan	387,8	0,67	414	0,65	440,7	0,62	464,2	0,60	493,92	0,59	0,63
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
3	Industri Pengolahan	20.971,10	36,34	23.109,50	36,05	24.909,60	35,19	26.581,40	34,61	28.615,70	34,34	35,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.553,30	2,69	1.976,70	3,08	1.969,90	2,78	2.013,60	2,62	1.619,23	1,94	2,62
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45,9	0,08	48,5	0,08	52,2	0,07	60,5	0,08	71,64	0,09	0,08
6	Konstruksi	5.478,40	9,49	6.467,10	10,09	7.417,10	10,48	8.240,30	10,73	9.167,21	11,00	10,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.936,40	24,15	14.749,80	23,01	16.106,30	22,75	17.359,00	22,6	18.832,04	22,60	23,02
8	Transportasi dan Pergudangan	5.156,40	8,93	5.988,00	9,34	7.093,70	10,02	7.638,10	9,94	8.482,75	10,18	9,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.957,70	3,39	2.238,00	3,49	2.530,00	3,57	2.942,50	3,83	3.236,73	3,88	3,63
10	Informasi dan Komunikasi	1.011,60	1,75	1.149,70	1,79	1.351,50	1,91	1.549,00	2,02	1.720,10	2,06	1,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.661,30	2,88	1.786,60	2,79	2.011,70	2,84	2.332,20	3,04	2.577,88	3,09	2,93
12	Real Estat	956,3	1,66	1.020,50	1,59	1.118,30	1,58	1.206,50	1,57	1.310,05	1,57	1,59
13	Jasa Perusahaan	233,9	0,41	273,2	0,43	303,7	0,43	336,5	0,44	371,32	0,45	0,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.273,80	2,21	1.330,40	2,08	1.432,30	2,02	1.496,00	1,95	1.649,22	1,98	2,05
15	Jasa Pendidikan	1.061,70	1,84	1.280,20	2	1.496,50	2,11	1.687,30	2,2	1.918,28	2,30	2,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	567,3	0,98	637,6	0,99	722,9	1,02	834	1,09	921,11	1,11	1,04
17	Jasa Lainnya	1.462,10	2,53	1.639,60	2,56	1.829,70	2,58	2.072,40	2,7	2.340,46	2,81	2,64
18	Produk Domestik Regional Bruto	57.715,00	100	64.109,40	100	70.786,20	100	76.813,70	100	83.327,64	100	100

Sumber: BPS Kota Bekasi 2017 dan 2018, diolah.



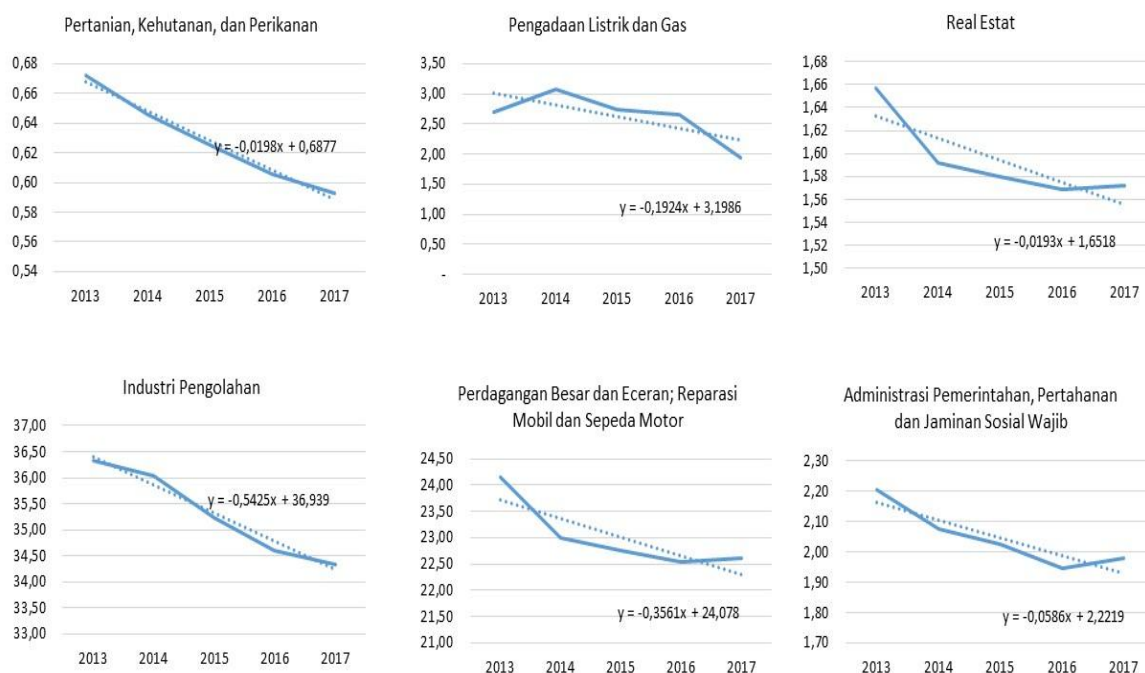
Gambar 2-10 Struktur Ekonomi Kota Bekasi 2017 (Persen)

Dengan struktur perekonomian seperti di atas, jelaslah bahwa sektor industri pengolahan sangat diandalkan untuk menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) di Kota Bekasi. Dalam empat tahun terakhir, nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ini terus bergerak naik dari tahun ke tahun, tepatnya meningkat dari Rp20,9 triliun tahun 2013 menjadi Rp28,6 triliun tahun 2017.



Gambar 2-11 Sektor-sektor Ekonomi yang Memiliki Kecenderungan Kontribusi Meningkat di Kota Bekasi 2013-2017

Dari enam belas sektor ekonomi yang berkembang di Kota Bekasi, ada sembilan sektor ekonomi yang kontribusinya terhadap PDRB memiliki tren meningkat selama kurun waktu 2013-2017, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2-11. Sebaliknya, Gambar 2-12 menunjukkan tujuh sektor ekonomi yang mengalami kecenderungan penurunan kontribusi terhadap PDRB Kota Bekasi.

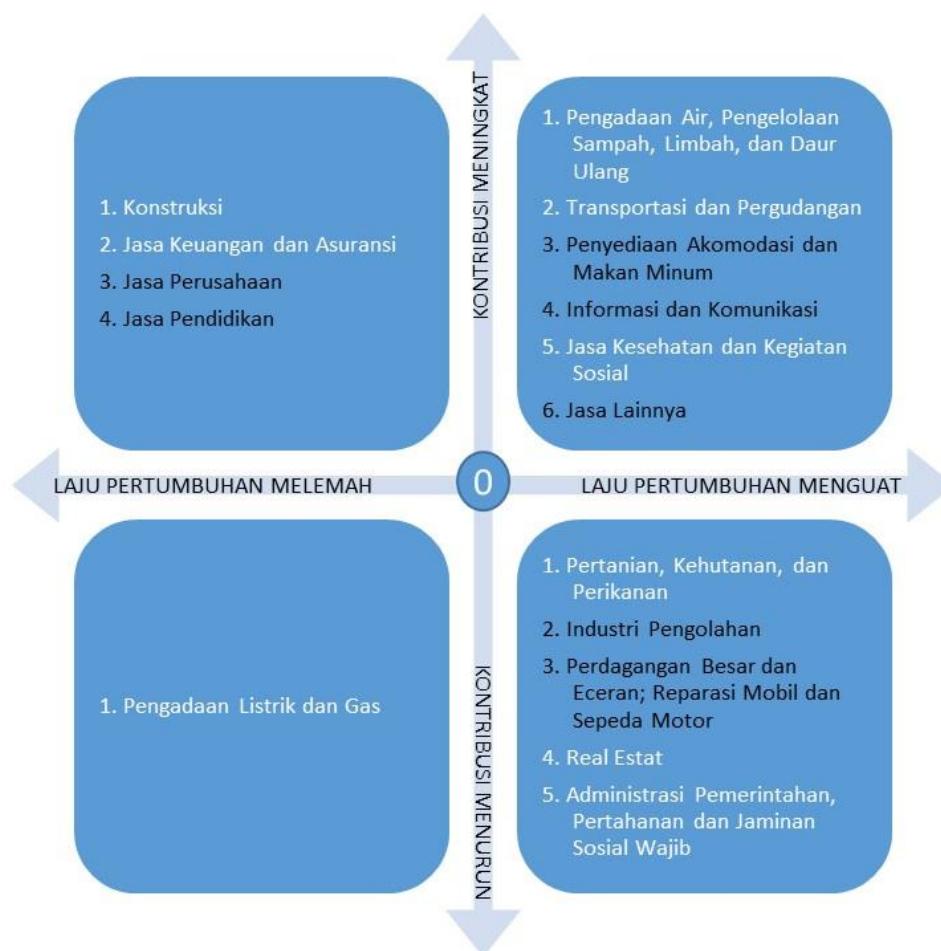


Gambar 2-12 Sektor-sektor Ekonomi yang Mengalami Tren Kontribusi Menurun di Kota Bekasi, 2013-2017

3. Matriks Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi

Berdasarkan tren laju pertumbuhan setiap sektor ekonomi dan tren kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB, maka dapat disusun matriks empat kuadran laju pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor ekonomi di Kota Bekasi sebagaimana terlihat dalam Gambar 2-13.

Sepanjang periode 2013-2017, ada enam sektor ekonomi yang meraih tren laju pertumbuhan menguat dan tren kontribusinya terhadap PDRB meningkat. Keenam sektor tersebut adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya. Artinya, keenam sektor ini memiliki daya saing yang kuat dan mampu meraih *economies of scale* dalam lingkup PDRB Kota Bekasi. Sebaliknya, sektor pengadaan listrik dan gas menjadi satu-satunya sektor ekonomi yang berdaya saing lemah karena mengalami tren laju pertumbuhan maupun kecenderungan kontribusi yang menurun.



Gambar 2-13 Matriks Empat Kuadran Tren Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi di Kota Bekasi, 2013-2017

Sementara itu, sektor-sektor ekonomi yang mengalami tren laju pertumbuhan melemah namun tren kontribusinya terhadap PDRB meningkat, terdiri dari sektor konstruksi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa pendidikan.

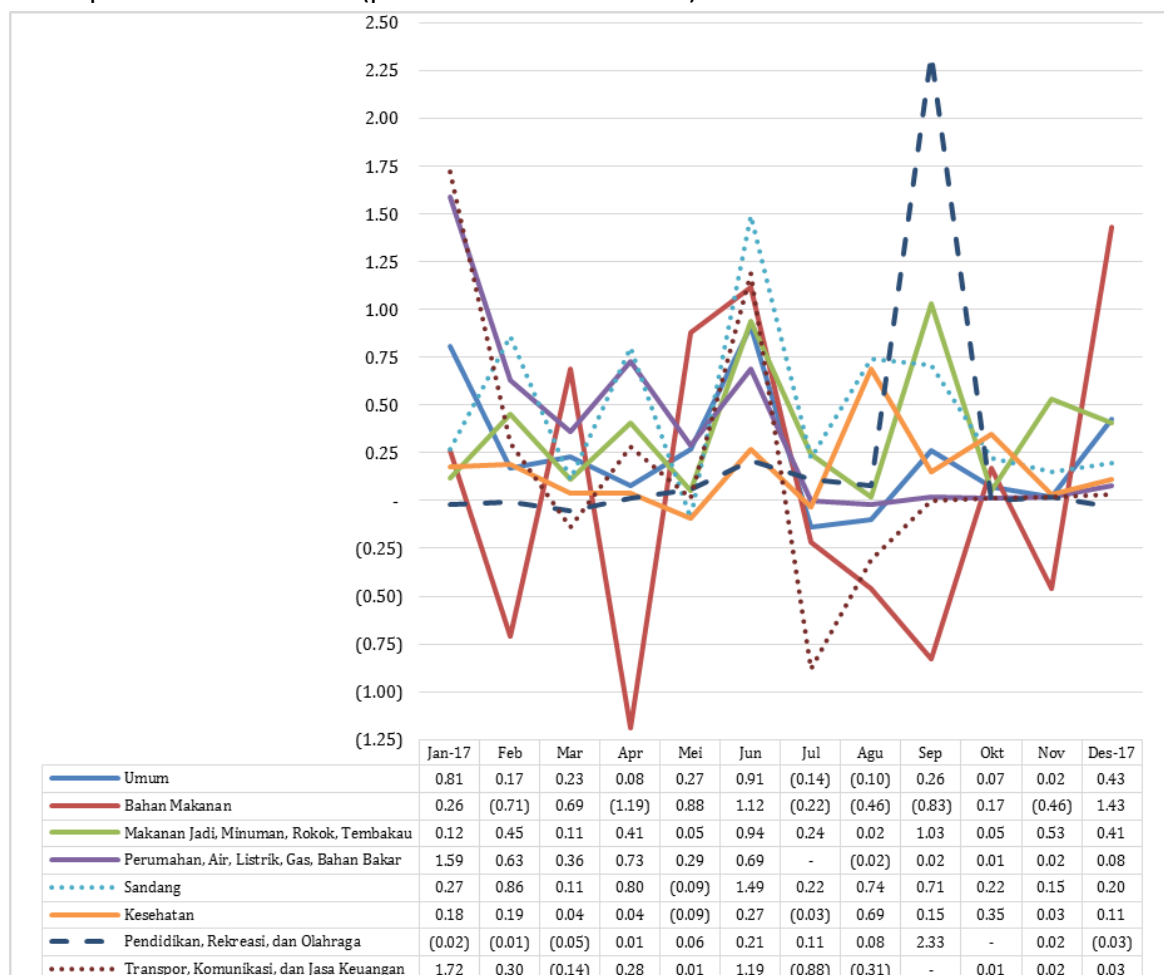
Sedangkan lima sektor lainnya yang menggoreskan laju pertumbuhan menguat tetapi kontribusinya terhadap PDRB menurun adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor real estat, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung atau mengukur rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (*household*) atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur laju inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

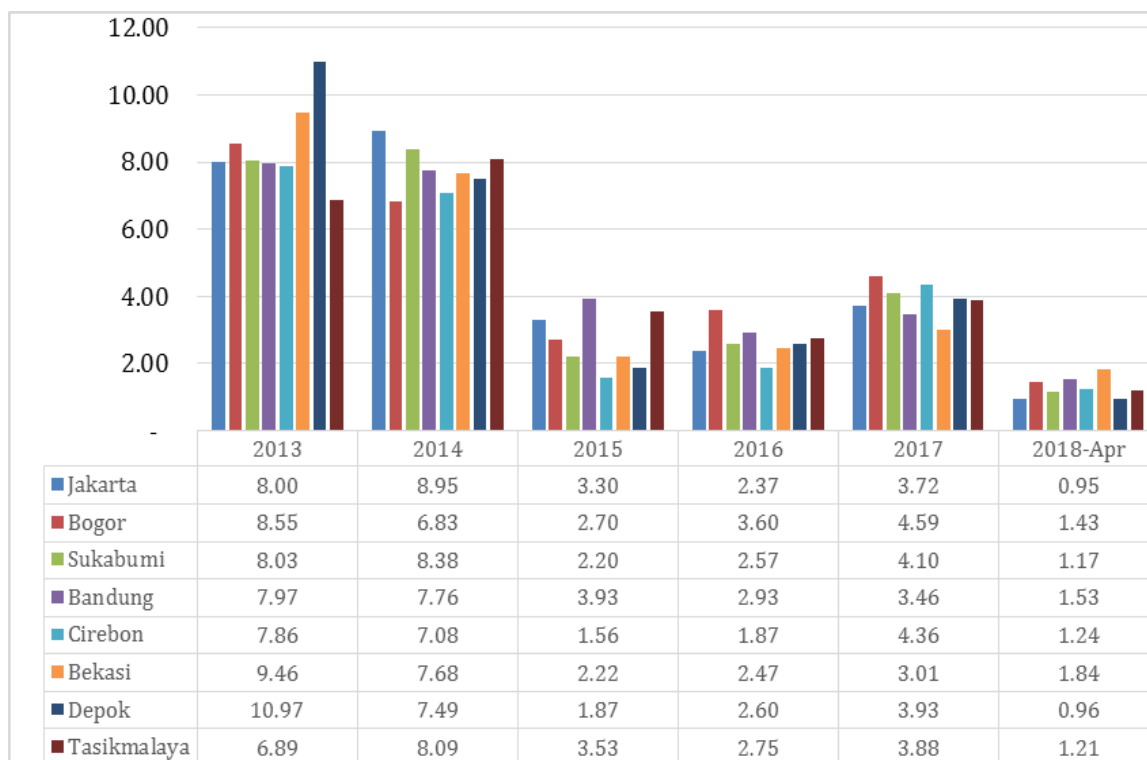
Kota Bekasi merupakan salah satu dari tujuh kota di Provinsi Jawa Barat yang dijadikan sebagai wilayah pengukuran laju inflasi. Sepanjang Januari-Desember 2017, laju inflasi umum (seluruh kelompok barang dan jasa) di kota ini secara kumulatif mencapai angka 3,01%. Laju inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni (0,91%), sebaliknya pada bulan Juli terjadi deflasi sekitar 0,14%. Laju inflasi tertinggi berasal dari kelompok barang sandang sebesar 5,68%, lalu diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, masing-masing sebanyak 4,40% dan 4,36%. Sedangkan laju inflasi terendah, yakni 0,68%, diraih oleh kelompok bahan makanan (perhatikan Gambar 2-14).



Gambar 2-14 Laju Inflasi Menurut Kelompok Barang di Kota Bekasi, Januari-Desember 2017 (%)

Dibandingkan dengan Jakarta dan beberapa kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, laju inflasi di Kota Bekasi relatif lebih rendah. Selama periode 2013-April 2018, Kota Bekasi

tidak pernah menempati posisi paling tinggi dalam pencapaian laju inflasi. Bahkan, pada tahun 2017 kota ini berhasil mencatat laju inflasi paling rendah dibandingkan tujuh kota lainnya, sebagaimana tampak dalam Gambar 2-15. Akan tetapi, sampai dengan April 2018 Kota Bekasi justru mencatat laju inflasi paling tinggi, yakni sudah mencapai angka 1,84%, melampaui laju inflasi Kota Bandung (1,53%) maupun Jakarta (0,95%).



Gambar 2-15 Perbandingan Laju Inflasi di Delapan Kota, 2013-April 2018 (%)

2.2.3 PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah/negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan daerah/nasional suatu daerah/negara dengan jumlah penduduk daerah/negara tersebut. Pendapatan daerah/negara di sini direpresentasikan oleh PDRB/PDB. Di bawah ini akan diuraikan PDRB per kapita Kota Bekasi selama kurun waktu 2013-2017.

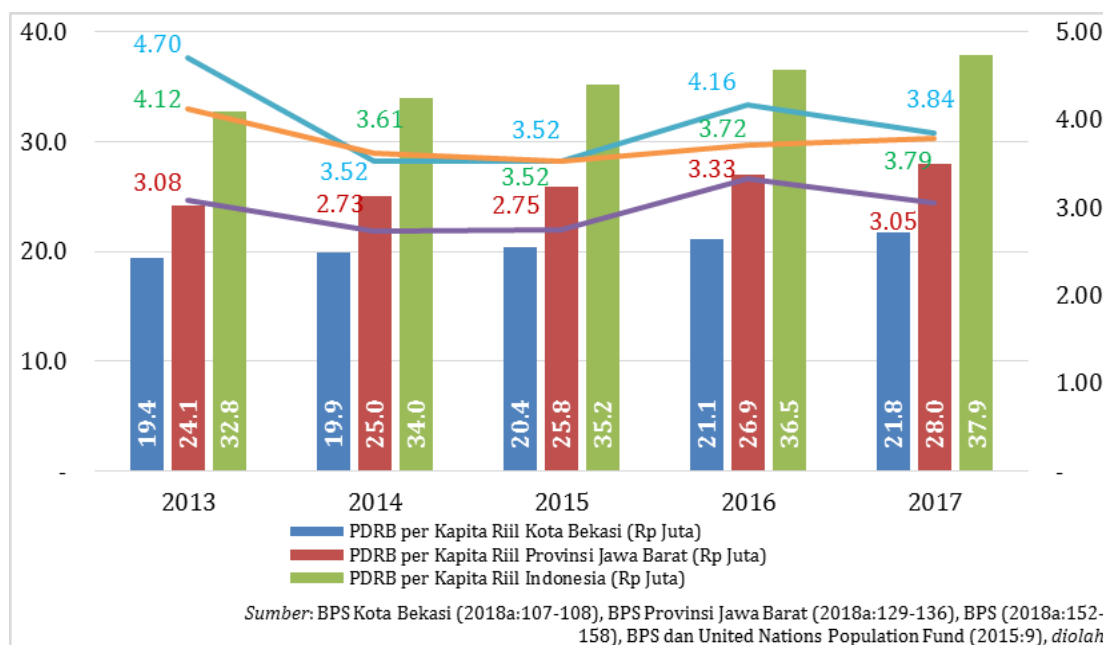
Seiring dengan pertambahan penduduk di Kota Bekasi dari 2.570.397 jiwa tahun 2013 menjadi 2.873.484 jiwa tahun 2017(BPS, 2018), produktivitas masyarakat di kota ini juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diindikasikan oleh perkembangan PDRB per kapita sepanjang kurun waktu 2013-2017. Secara nominal, PDRB per kapita Kota Bekasi pada tahun 2013 telah mencapai sekitar Rp22,5 juta dan semakin bertambah besar hingga mencapai Rp29 juta tahun 2017. Sedangkan secara riil meningkat dari Rp19,4 juta menjadi Rp21,63 juta. Dibandingkan dengan penduduk Provinsi Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan, pendapatan masyarakat (PDRB per kapita) di Kota Bekasi lebih rendah, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.10 dan Gambar 2-16, baik secara nominal maupun riil. Dilihat dari sisi tingkat pertumbuhannya, laju PDRB per kapita Kota

Bekasi (rata-rata 2,97% per tahun selama 2013-2017) juga lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (rata-rata 4,25%) dan nasional (rata-rata 4,02%). Di sisi lain, laju pertumbuhan PDRB per kapita riil masyarakat di Kota Bekasi cenderung meningkat selama periode kajian. Sebaliknya, laju pertumbuhan PDRB per kapita riil masyarakat di Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia justru mengalami tren menurun.

Tabel 2.10 Perkembangan PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhannya di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB per Kapita Nominal (Rp Juta)					
Kota Bekasi	22,5	24,3	26,1	27,6	29,1
Provinsi Jawa Barat	27,8	30,1	32,6	34,9	37,2
Indonesia	38,4	41,9	45,1	48,0	51,9
PDRB per Kapita Riil (Rp Juta)					
Kota Bekasi	19,4	19,9	20,4	21,1	21,8
Provinsi Jawa Barat	24,1	25,0	25,8	26,9	28,0
Indonesia	32,8	34,0	35,2	36,5	37,9
Laju Pertumbuhan (%)					
Kota Bekasi	3,08	2,73	2,75	3,33	3,05
Provinsi Jawa Barat	4,70	3,52	3,52	4,16	3,84
Indonesia	4,12	3,61	3,52	3,72	3,79

Sumber: BPS Kota Bekasi (2018a:107-108), BPS Provinsi Jawa Barat (2018a:129-136), BPS (2018a:152-158), BPS dan United Nations Population Fund (2015:9), diolah.



Gambar 2-16 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia 2013-2017

2.2.4 Indeks Gini

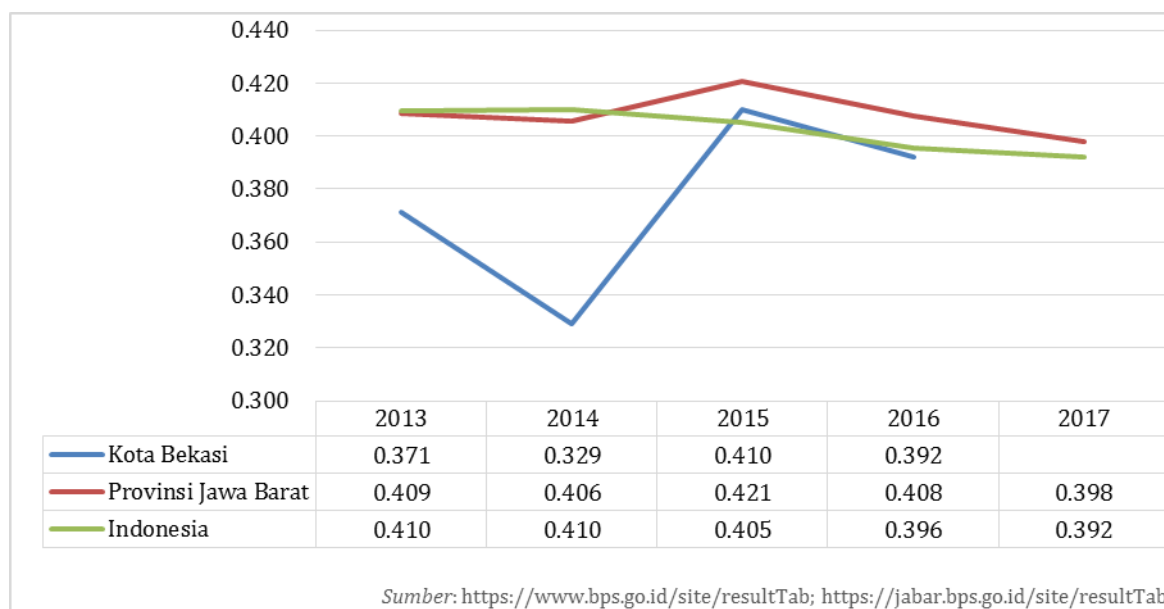
Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu daerah/negara. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 mengindikasikan ketimpangan sempurna. Berikut ini akan diuraikan indeks Gini Kota Bekasi sepanjang rentang waktu 2013-2016.

Gambar 2-17 memperlihatkan bahwa indeks Gini di Kota Bekasi mengalami fluktuasi selama periode 2013-2016. Pada tahun 2013, indeks Gini di kota ini mencapai angka 0,371 dan berhasil ditekan hingga 0,329 setahun kemudian. Akan tetapi, pada tahun 2015 melonjak mencapai angka 0,410 dan pada tahun berikutnya turun menjadi 0,392. Secara keseluruhan, sepanjang periode kajian indeks Gini di Kota Bekasi berada pada angka rata-rata 0,376, yang berarti termasuk kategori ketimpangan sedang.²

2.2.5 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

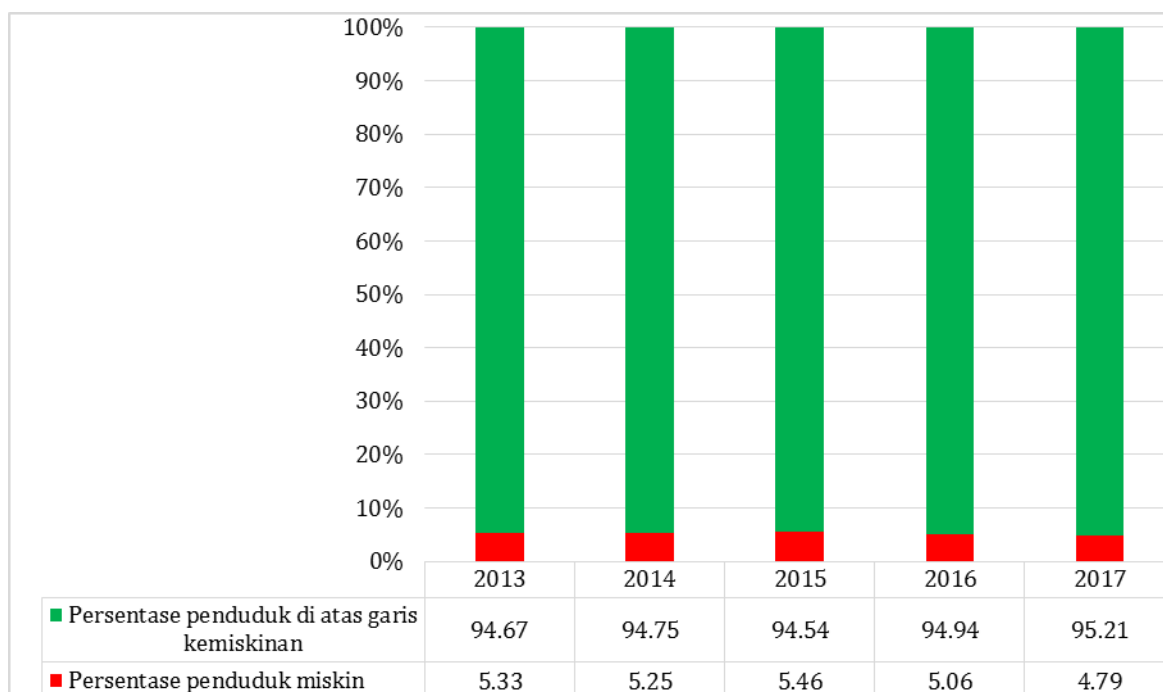
Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Di Kota Bekasi, persentase penduduk di atas garis kemiskinan mengalami kenaikan dari 94,67% pada tahun 2013 menjadi 95,21% pada tahun 2017. Kenaikan ini terjadi karena keberhasilan Kota Bekasi dalam menurunkan persentase penduduk miskin dari 5,33% menjadi 4,79% dalam kurun waktu bersamaan (perhatikan Gambar 2-18).



Gambar 2-17 Perkembangan Indeks Gini Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia, 2013-2017

² Arti besaran indeks Gini: $G=0$ pemerataan sempurna, $0 < G < 0,3$ ketimpangan rendah, $0,3 \leq G \leq 0,5$ ketimpangan sedang, $0,5 < G < 1$ ketimpangan tinggi, dan $G=1$ ketimpangan absolut.



Sumber: BPS (2018b:14; 2017b:14; 2016a:16, 2015:17, 2014a:17), diolah

Gambar 2-18 Perkembangan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan di Kota Bekasi, 2013-2017

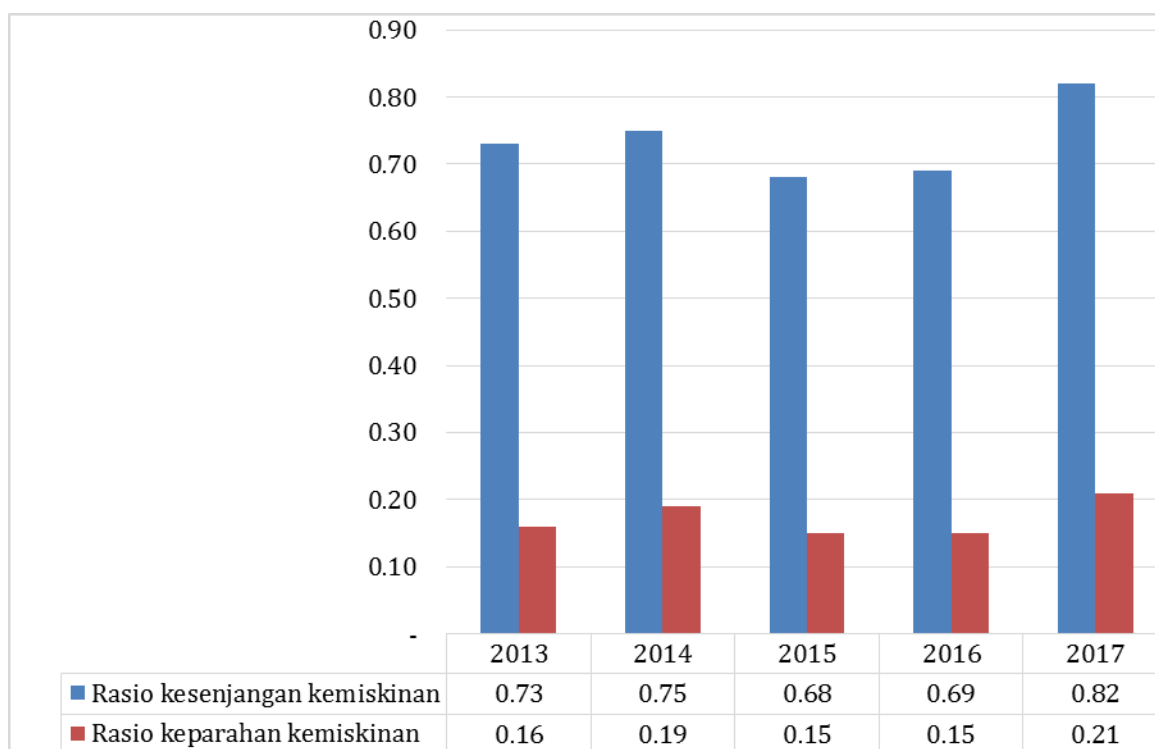
2.2.6 Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio kesenjangan kemiskinan atau disebut juga indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sepanjang kurun waktu 2013-2017, rasio kesenjangan kemiskinan di Kota Bekasi bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013, rasio kesenjangan kemiskinan di kota ini mencapai angka rasio 0,73. Beberapa tahun kemudian, seperti dapat dilihat pada Gambar 2-19, berhasil ditekan hingga angka 0,68. Akan tetapi, rasio kesenjangan kemiskinan di Kota Bekasi kembali meningkat menjadi 0,82, yang berarti lebih tinggi dibandingkan rasio tahun 2013. Kecenderungan serupa juga diperlihatkan oleh rasio keparahan kemiskinan untuk rentang waktu bersamaan.

2.2.7 Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari US\$1 per Kapita per Hari

Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$1 per kapita per hari lebih dikenal dengan istilah persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per hari dibawah garis kemiskinan. Di Kota Bekasi, persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 5,33% pada tahun 2013 menjadi 4,79% pada tahun 2017 (lihat kembali Gambar 2-18).



Sumber: BPS (2018b:14; 2017b:14; 2016a:16, 2015:17, 2014a:17), diolah

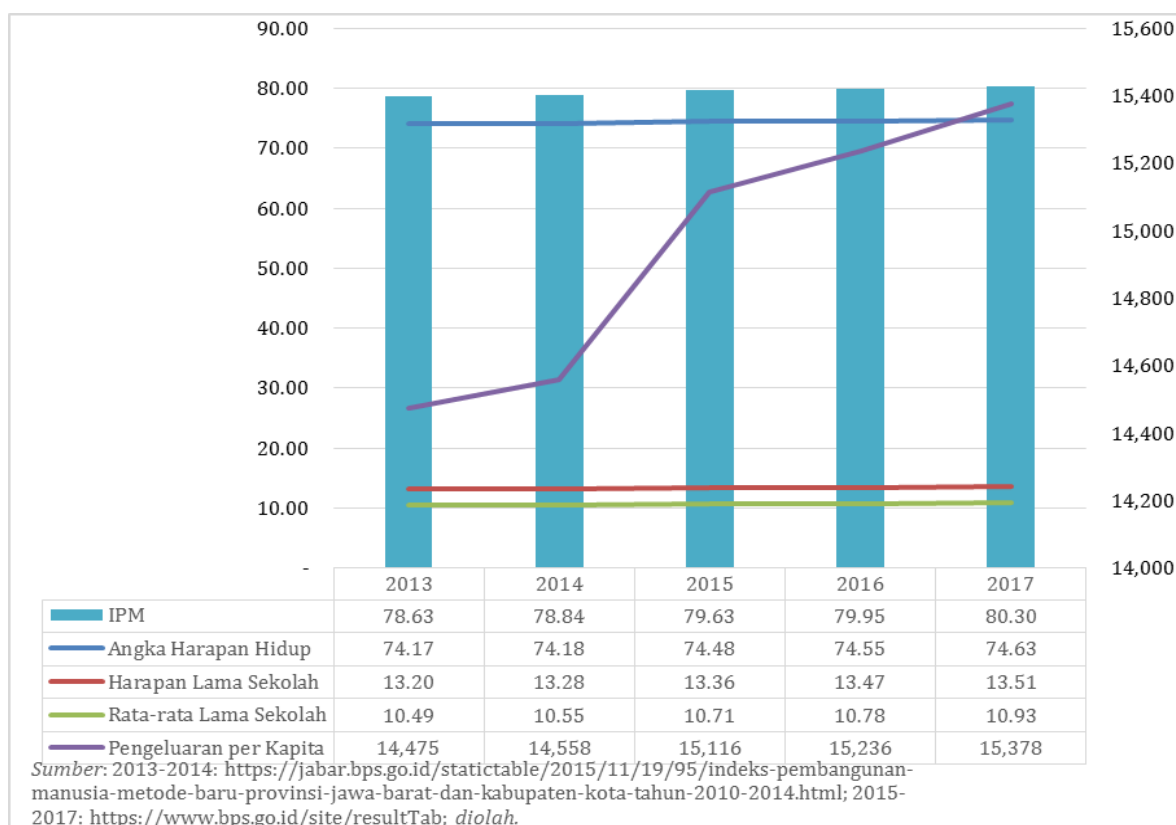
Gambar 2-19 Perkembangan Rasio Kesenjangan Kemiskinan di Kota Bekasi, 2013-2017

2.2.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hasil pengukuran IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal berikut:

- Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah/negara.
- Menjadi ukuran kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- Khusus di Indonesia, digunakan sebagai salah satu indikator untuk penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU).

Dari Gambar 2-20 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 IPM Kota Bekasi telah berhasil mencapai angka 80,30, meningkat 0,35 dari tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Kota Bekasi pada status pembangunan manusia “sangat tinggi”. Status ini merupakan babak baru dalam pembangunan kualitas manusia di Kota Bekasi.



Gambar 2-20 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota Bekasi, 2013-2017

Dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, indeks pembangunan manusia yang diraih oleh Kota Bekasi jauh lebih tinggi. Pada tahun 2017, IPM Provinsi Jawa Barat dan Indonesia masing-masing adalah 70,69 (kategori tinggi) dan 70,81 (kategori tinggi). Akan tetapi, dari sisi pertambahan kenaikan angka IPM, Kota Bekasi (rata-rata bertambah sebesar 0,52 per tahun) masih di bawah Provinsi Jawa Barat (rata-rata meningkat sebanyak 0,67 setahun) dan Indonesia (rata-rata naik sekitar 0,62 setiap tahunnya) (<https://www.bps.go.id/site/resultTab>).

2.2.9 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) menggantikan komponen Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Standar HLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 18 tahun.

Angka harapan lama sekolah Kota Bekasi tahun 2017 adalah sebesar 13,51 tahun (simak kembali Gambar 2-20). Artinya, lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,51 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan jenjang diploma D-II.

Seperti halnya hasil pengukuran IPM secara keseluruhan, angka harapan lama sekolah yang diraih Kota Bekasi pada tahun 2017 di atas juga unggul dari Provinsi Jawa Barat (12,42 tahun) dan Indonesia (12,85 tahun). Namun pertambahannya lebih rendah dibandingkan kedua wilayah pembanding tersebut.

2.2.10 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar RLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Dari Gambar 2-20 tampak bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi pada tahun 2017 adalah 10,93 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Bekasi usia 15 tahun ke atas sudah menempuh 10,93 tahun masa sekolah atau hampir menyelesaikan pendidikan setara kelas XI. Angka rata-rata lama sekolah yang telah dicapai Kota Bekasi ini jauh lebih unggul dibandingkan Provinsi Jawa Barat (8,14 tahun) dan Indonesia (8,10 tahun).

2.2.11 Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup (*age specific rate*) penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, maka usia harapan hidup akan rendah. Usia harapan hidup di negara-negara maju relatif tinggi karena tingkat kesehatan ibu dan bayinya pada umumnya juga tinggi. Sebaliknya, di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan ibu dan bayi.

Di Kota Bekasi, sebagaimana terlihat kembali dalam Gambar 2-20, angka usia harapan hidup saat lahir sudah mencapai 74,63 tahun, sedangkan di Provinsi Jawa Barat 72,47 tahun dan Indonesia 71,06 tahun. Ini berarti bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 74,63 tahun. Meskipun angka harapan hidup yang diraih Kota Bekasi lebih besar, namun pertambahannya dari tahun ke tahun lebih kecil dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Sepanjang rentang waktu 2013-2017, pertambahan angka usia harapan hidup yang diraih Kota Bekasi hanya rata-rata sebesar 0,10 tahun per tahun, sedangkan di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia masing-masing bertambah sebanyak 0,13 tahun dan 0,17 tahun setiap tahunnya.

2.2.12 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi (malnutrisi), atau dengan kata lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat, dan kalori. Gizi buruk merupakan

bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang mengkonsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan gangguan pencernaan atau penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Kelaparan yang lama bisa berujung kepada status gizi buruk. Masalah gizi buruk merupakan sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga serta juga berkaitan dengan aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat.

Di Kota Bekasi, persentase balita gizi buruk relatif rendah. Selama jangka waktu 2013-2015, persentase balita gizi buruk di kota ini sempat meningkat dari 0,10% tahun 2013 menjadi 0,25% tahun 2014. Setahun kemudian berhasil ditekan hingga angka 0,08% (lihat Tabel 2.11). Pada tahun 2016 dan 2017, persentase balita gizi buruk semakin membaik karena pada tahun ini hanya terjadi 142 dan 141 kasus balita gizi buruk, menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 201 kasus.

Di antara 12 kecamatan yang terdapat di Kota Bekasi, pada tahun 2015 lalu persentase balita gizi buruk paling besar terjadi di Kecamatan Jatisampurna, yakni mencapai 0,40% atau sebanyak 51 kasus. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Jatiasih sebanyak 0,22% atau 49 kasus. Sedangkan persentase balita gizi buruk paling rendah terjadi di Kecamatan Mustika Jaya, yakni senilai 0,01% atau hanya 3 kasus.

Menurunnya persentase balita gizi buruk di Kota Bekasi ini seiring dengan membaiknya ekonomi keluarga (yang diindikasikan oleh menurunnya persentase penduduk miskin) serta meningkatnya pemahaman keluarga terhadap jenis-jenis makanan yang baik dan mengandung gizi seimbang yang harus dikonsumsi oleh balita.

Tabel 2.11 Perkembangan Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Bekasi 2013-2017

Kecamatan	Jumlah Balita Gizi Buruk					Persentase Balita Gizi Buruk		
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015
Pondok Gede	26	60	15	4	7	0,09	0,21	0,05
Jatisampurna	9	27	51	1	0	0,07	0,21	0,40
Pondok Melati	5	11	4	10	13	0,03	0,07	0,03
Jatiasih	56	66	49	55	41	0,24	0,29	0,22
Bantar Gebang	26	19	2	11	5	0,23	0,17	0,02
Mustika Jaya	9	12	3	3	20	0,04	0,06	0,01
Bekasi Timur	21	121	13	9	6	0,08	0,47	0,05
Rawalumbu	14	67	7	13	12	0,06	0,28	0,03
Bekasi Selatan	39	31	20	12	11	0,15	0,14	0,09
Bekasi Barat	6	101	16	8	9	0,03	0,34	0,06
Medan Satria	2	35	6	2	6	0,01	0,20	0,03
Bekasi Utara	49	112	15	14	11	0,14	0,32	0,04
Kota Bekasi	262	662	201	142	141	0,10	0,25	0,08

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2014:90; BPS Kota Bekasi, 2015:92; BPS Kota Bekasi, 2016:108; BPS Kota Bekasi, 2017b:149; diolah.

2.2.13 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Seperti halnya balita gizi buruk, kecenderungan serupa juga diperlihatkan oleh prevalensi balita gizi kurang. Selama periode 2013-2015, sebagaimana tampak pada Tabel , prevalensi balita gizi kurang pada awalnya meningkat dari 2,72% menjadi 2,86%, namun memasuki tahun 2015 telah menurun cukup signifikan hingga 2,17%.

Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah dan Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Bekasi 2013-2015

Kecamatan	Jumlah Balita Gizi Kurang			Prevalensi Balita Gizi Kurang		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Pondok Gede	669	459	430	2,32	1,62	1,56
Jatisampurna	541	387	75	4,19	3,00	0,58
Pondok Melati	459	211	172	3,04	1,43	1,19
Jatiasih	640	645	577	2,74	2,80	2,56
Bantar Gebang	297	415	324	2,60	3,70	2,95
Mustika Jaya	117	499	43	0,56	2,33	0,20
Bekasi Timur	872	950	740	3,23	3,68	3,00
Rawalumbu	663	837	619	2,69	3,46	2,61
Bekasi Selatan	980	545	372	3,66	2,46	1,74
Bekasi Barat	833	949	1.073	3,67	3,24	3,81
Medan Satria	420	612	501	2,28	3,43	2,90
Bekasi Utara	768	1.109	696	2,24	3,14	2,02
Kota Bekasi	7.259	7.618	5.622	2,72	2,86	2,17

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2014:90; BPS Kota Bekasi, 2015:92; BPS Kota Bekasi, 2016:108, diolah.

Kecamatan di Kota Bekasi yang paling tinggi angka prevelansi balita gizi kurangnya pada tahun 2015 adalah Bekasi Barat, yakni sebanyak 3,81% atau 1.073 kasus. Jika dibandingkan dengan total kasus balita gizi kurang di kota ini (5.622 kasus), maka Kecamatan Bekasi Barat berkontribusi sekitar 19,09%. Sebaliknya, Mustika Jaya menjadi kecamatan yang paling rendah prevelansi balita gizi kurangnya, yaitu hanya 0,20% atau 43 kasus.

2.2.14 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.³ Desa siaga aktif merupakan bentuk peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

³Baca: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh desa siaga adalah sebagai berikut (Departemen Kesehatan, 2006):

1. Memiliki 1 (satu) orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan sekurang-kurangnya 2 orang kader desa.
2. Memiliki minimal 1 (satu) bangunan pos kesehatan desa (poskesdes) beserta peralatan dan perlengkapannya. Poskesdes tersebut dikembangkan oleh masyarakat yang dikenal dengan istilah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan minimal:
 - Pengamatan epidemiologis penyakit menular dan yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB) serta faktor-faktor risikonya.
 - Penanggulangan penyakit menular dan yang berpotensi menjadi KLB serta kekurangan gizi.
 - Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan.
 - Pelayanan kesehatan dasar, sesuai dengan kompetensinya.
 - Kegiatan pengembangan seperti promosi kesehatan, kadarzi, PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), penyehatan lingkungan, dan lain-lain.

Di Kota Bekasi, ketersediaan data mengenai cakupan desa/kelurahan siaga maupun desa/kelurahan siaga aktif masih minim. Merujuk pada beberapa seri publikasi Profil Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, di Kota Bekasi pada tahun 2016 terdapat 32 kelurahan siaga kategori pratama (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017). Tidak diketahui, apakah ke-32 kelurahan siaga ini berstatus aktif semua atau hanya sejumlah tertentu. Sementara itu, pada tahun 2013 di Kota Bekasi ada 47 kelurahan siaga, tetapi kelurahan siaga yang aktif hanya mencakup 19 kelurahan, atau sekitar 40,43% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2014).

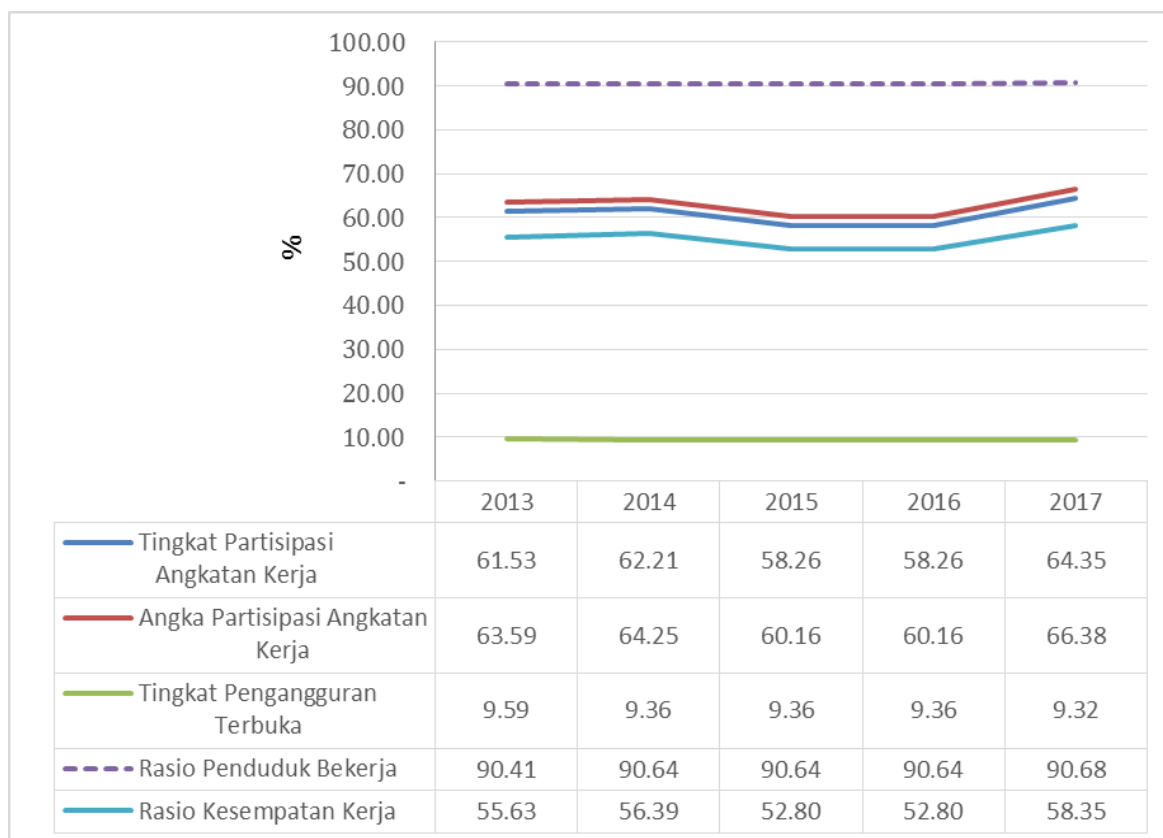
2.2.15 Angka Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan sedang mencari kerja. Dengan begitu, angka angkatan kerja merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan besarnya persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk.

Di Kota Bekasi, angka angkatan kerja cenderung menurun selama periode 2013-2015, yakni dari 63,59% tahun 2013 menjadi 60,16% tahun 2015, meskipun pada tahun 2014 sempat mencapai angka 64,25%.

TAHUN	ANGKATAN KERJA BERDASARKAN UMUR														
	15-19 TH			20-29 TH			30-44 TH			45-55 TH			JUMLAH TOTAL		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
2018	4446	4615	9061	6867	5988	12855	831	855	1686	58	66	124	12202	11524	23726
2017	4272	4888	9160	7776	6330	14106	891	792	1683	47	24	71	12986	12034	25020
2016	5532	5541	11073	7535	6008	13543	914	703	1617	50	22	72	14031	12274	26305
2015	5987	5618	11605	6460	5067	11527	772	724	1496	89	32	121	13308	11441	24749

Penurunan angka angkatan kerja selama 2013-2015 disebabkan oleh jauh lebih tingginya laju pertumbuhan penduduk bukan angkatan kerja dibandingkan angkatan kerja, yakni rata-rata 8,74% berbanding 1,26% per tahun sepanjang kurun waktu 2013-2015. Angka angkatan kerja pada tahun 2017 naik lagi menjadi 64,35%. Sedangkan untuk tahun 2016 tidak dihitung karena adanya pengurangan sampel dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Kota Bekasi dalam Angka, 2018).



Gambar 2-21 Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bekasi, 2013-2017

2.2.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan/kemudahan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, sehingga untuk mendapatkannya relatif mudah.

Seperti halnya perkembangan angka partisipasi angkatan kerja, selama jangka waktu 2013-2017 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bekasi juga mengalami fluktuasi. Pada awalnya terjadi peningkatan dari 61,53% menjadi 62,21%. Namun memasuki tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 58,26% dan tahun 2017 meningkat menjadi 64,35 (lihat kembali Gambar 2-21).

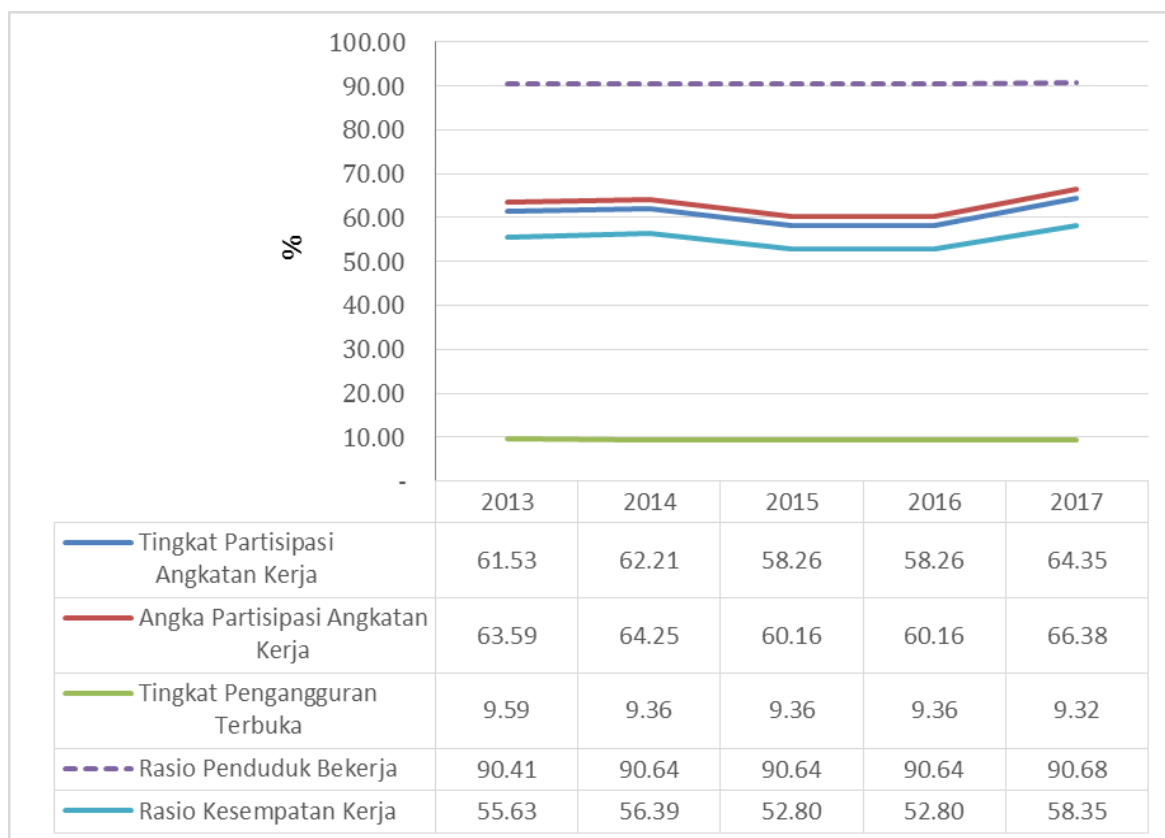
Dibandingkan Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia, tren TPAK kedua wilayah ini memang sama-sama fluktuatif. Akan tetapi, kedua wilayah ini memiliki TPAK yang lebih tinggi dibandingkan Kota Bekasi. Pada tahun 2015, TPAK di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 60,34% (BPS Provinsi Jawa Barat, 2017). Sedangkan TPAK nasional lebih tinggi lagi, yakni 67,63% (BPS, 2017).

2.2.17 Angka Pencari Kerja

Angka Pencari Kerja adalah persentase jumlah pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pencari Kerja terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

KEGIATAN <i>Activities</i>		Penduduk <i>Population</i>	%
(1)		(2)	(3)
1.	Angkatan Kerja / <i>Economically Active</i>	1.458.231	65,30
	a. Bekerja / <i>Working</i>	1.325.953	90,93
	b. Mencari Kerja / <i>Looking for Job</i>	132.278	9,07
2.	Bukan Angkatan Kerja / <i>Not Economically Active</i>	774.956	34,70
	a. Sekolah / <i>Attending</i>	218.329	28,17
	b. Mengurus Rumah Tangga / <i>House Keeping</i>	470.674	60,74
	c. Lainnya / <i>Others</i>	85.953	11,09
2018		2.233.187	100,00
2017		2.170.937	100,00
2016		2.048.958	100,00
2015		2.048.958	100,00

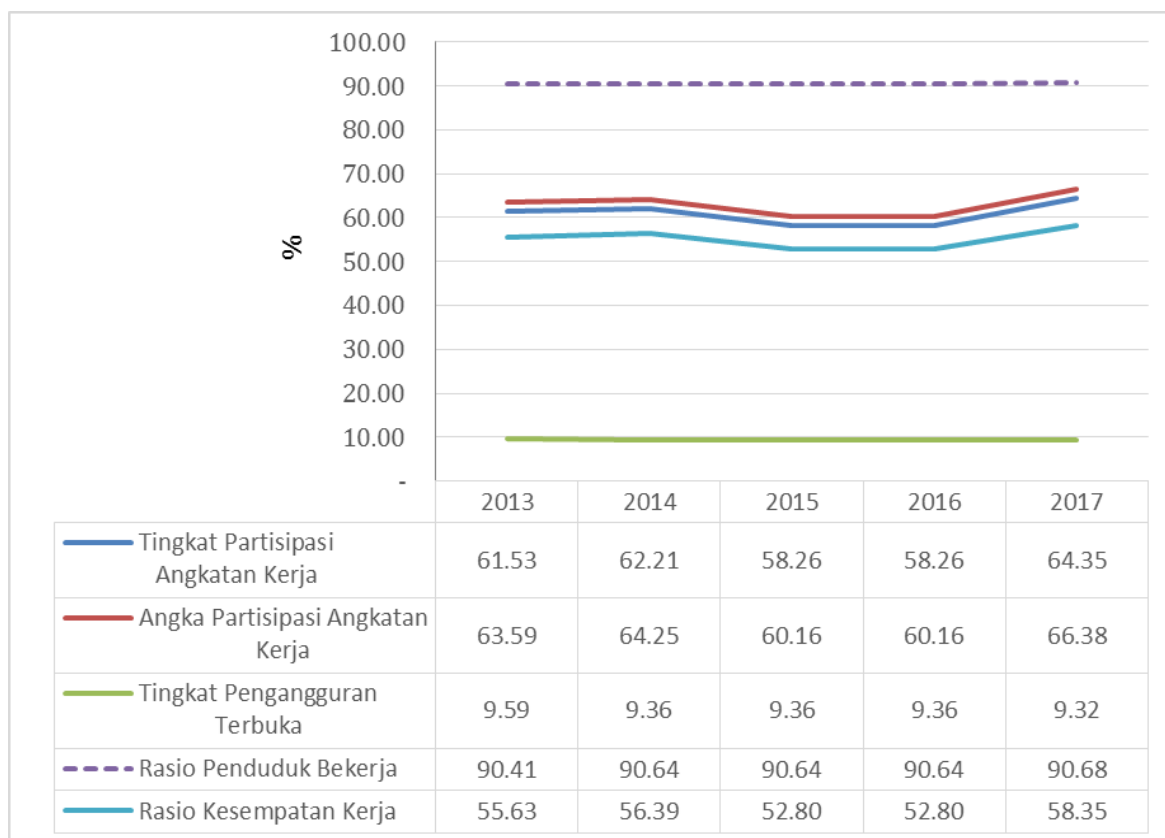


Gambar 2-21 dapat dilihat bahwa angka pencari kerja di Kota Bekasi cenderung menurun dari 9,59% tahun 2013 menjadi 9,32% tahun 2017. Menurunnya persentase angka pencari kerja ini bukan disebabkan oleh meningkatnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap pencari kerja, tetapi lebih dikarenakan meningkatnya persentase penduduk bukan angkatan kerja selama kurun waktu bersamaan, yakni dari 39,37% tahun 2013 menjadi 41,74% tahun 2015.

Dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, angka pencari kerja di Kota Bekasi juga lebih tinggi, dimana pada tahun 2015 kedua wilayah pembandingan tersebut mencatat angka pencari kerja masing-masing sebesar 8,56% dan 6,00% (BPS, 2017).

2.2.18 Rasio Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

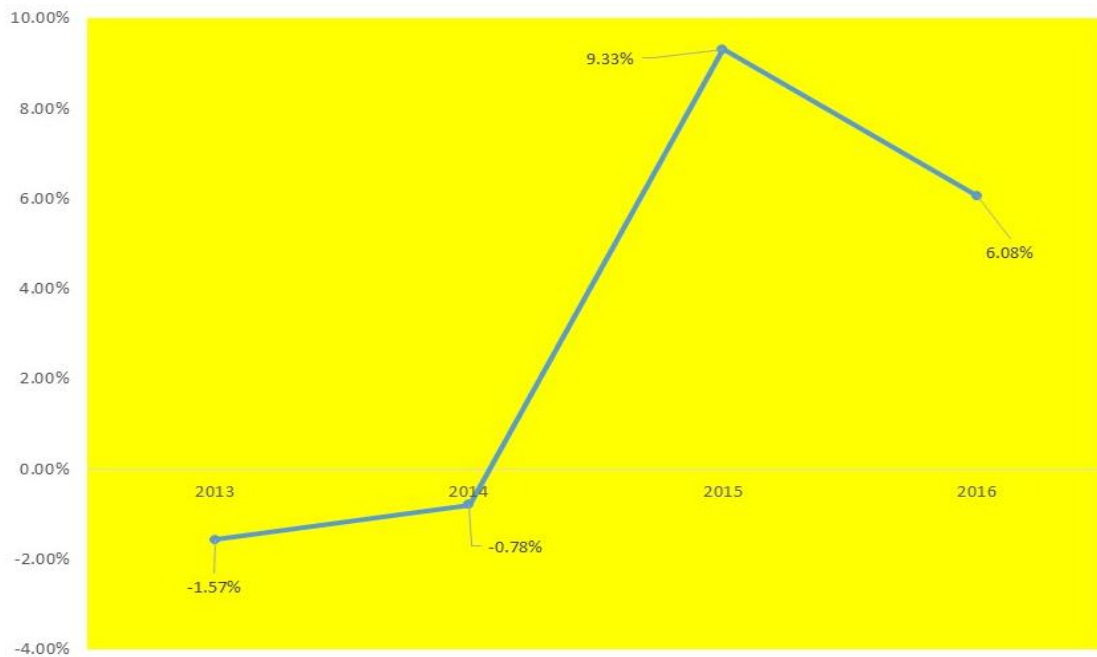


Gambar 2-21 memperlihatkan bahwa rasio penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kota Bekasi memperlihatkan tren meningkat dari 90,41% (2013) menjadi 90,64% (2015). Sementara itu, di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia juga terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja, masing-masing dari 90,78% menjadi 91,28% dan dari 93,75% menjadi 93,82% untuk periode waktu yang sama (BPS, 2014; BPS, 2016).

2.2.19 Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada rentang usia kerja yang siap melaksanakan pekerjaan, antara lain mereka yang telah bekerja, mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang sedang menempuh pendidikan (sekolah), dan juga mereka yang sedang mengurus rumah tangga.

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir cenderung menguat, yakni dari angka -1,57% dan -0,78% tahun 2013 dan 2014 meningkat hingga mencapai angka 9,33% pada tahun 2015, namun kemudian melemah hingga 6,08% tahun 2016 (lihat Gambar 2-22).



Sumber: BPS Kota Bekasi, Kota Bekasi Dalam Angka, beberapa seri, diolah.

Gambar 2-22 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja di Kota Bekasi, Tahun 2013-2015

2.2.20 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Kesempatan kerja merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan peluang kerja yang bisa didapatkan oleh para angkatan kerja yang telah siap dan mau bekerja. Kesempatan kerja biasanya menggambarkan lowongan pekerjaan yang masih bisa diisi oleh para pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang masih bisa diisi oleh orang yang mau bekerja.

Sebagaimana dapat dilihat kembali dalam Gambar 2-21, rasio kesempatan kerja di Kota Bekasi pada awalnya meluas dari 55,63% tahun 2013 menjadi 56,39% tahun 2014. Akan tetapi, seiring dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2015 rasio kesempatan kerja di kota ini menurun hingga 52,80% dan meningkat menjadi 58,53% tahun 2017.

2.2.21 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional⁴, tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dapat dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu Pra Sejahtera (sangat miskin), Sejahtera Tahap I (miskin), Sejahtera Tahap II (hampir miskin), Sejahtera Tahap III (tidak miskin), dan Sejahtera Tahap III Plus.

⁴ Baca: Euis Sunarti. 2011. "Kependudukan dan Keluarga Sejahtera". *Tulisan Tidak Dipublikasikan*. Bogor, Juli.

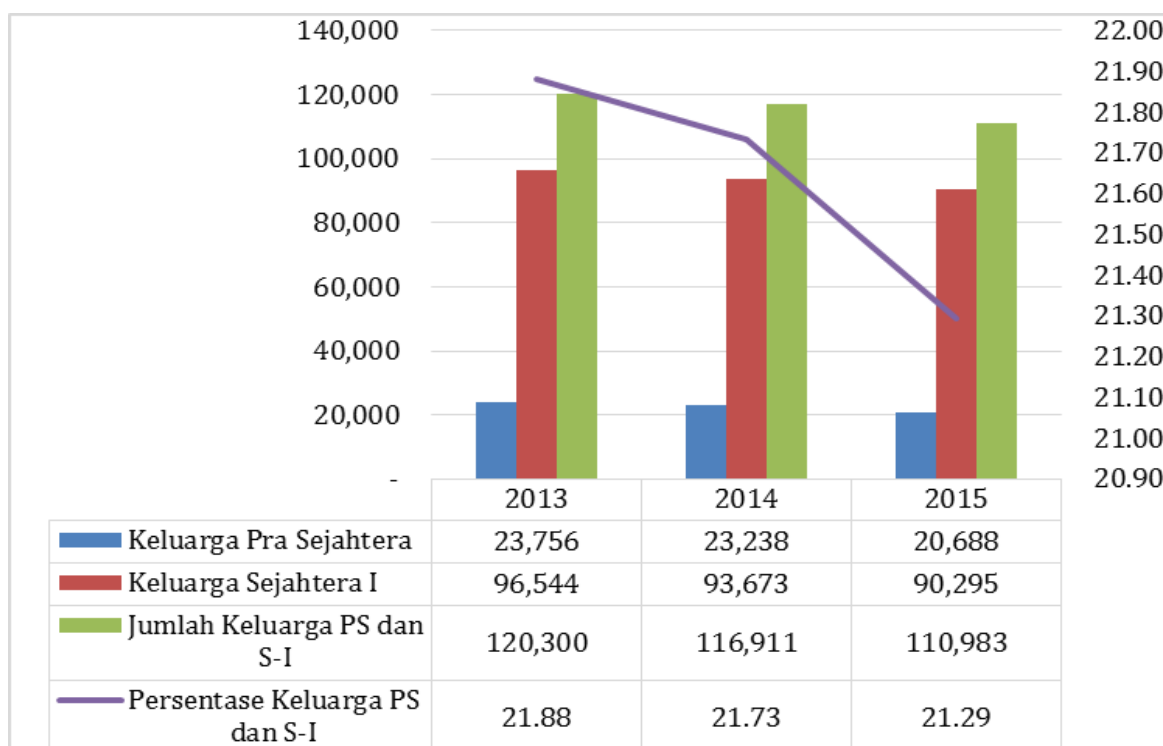
Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana. Kebutuhan dasar minimal mencakup:

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- b. Seluruh anggota keluarga makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- c. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah, atau berpergian.
- d. Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah.
- e. Apabila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana, dibawa ke sasaran kesehatan.

Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Kebutuhan sosial psikologi yang belum terpenuhi meliputi:

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- b. Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging, ikan atau telur.
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 (satu) pasang pakaian baru per tahun.
- d. Luas lantai rumah paling kurang 8 (delapan) meter persegi untuk setiap pengguna rumah.
- e. Seluruh anggota keluarga dalam 3 (tiga) bulan terakhir dalam keadaan sehat.
- f. Paling kurang 1 (satu) anggota keluarga berusia 15 tahun ke atas sudah berpenghasilan tetap.
- g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf latin.
- h. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- i. Bila anak hidup 2 (dua) atau lebih, keluarga yang usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

Selama kurun waktu 2013-2015, persentase jumlah Keluarga Pra Sejahtera ditambah Keluarga Sejahtera I dibandingkan jumlah seluruh keluarga di Kota Bekasi, memperlihatkan penurunan (lihat Gambar), yakni dari 21,88% (120.300 keluarga) menjadi 21,29% (110.983 keluarga). Penurunan ini mengindikasikan bahwa secara eksplisit kesejahteraan keluarga di Kota Bekasi mulai meningkat menuju tahapan Keluarga Sejahtera II dan seterusnya. Dengan kata lain, ekonomi masyarakat di Kota Bekasi semakin membaik.



Gambar 2-23 Perkembangan Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Bekasi, Tahun 2013-2015

Pada tahun 2015, persentase jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Bekasi lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang mencapai angka sekitar 48,05 persen.

2.2.22 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Berdasarkan data LKPJ tahun 2018, IKM Kota Bekasi dari tahun 2014 – 2017 adalah terlihat pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	rata-rata
IKM	n.a	69,58	71,48	82,07	76,00	74,78

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kota Bekasi mengalami fluktuasi dengan nilai terendah adalah 69,58 pada tahun 2014, sedangkan IKM tertinggi dicapai pada tahun 2016 dengan nilai 82,07.

2.2.23 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Pendapatan Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2017). * APBD

Gambar 2-24 Perkembangan Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bekasi 2013-2017

Dalam lima tahun terakhir, persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kota Bekasi meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, persentase tersebut berada pada angka 32,73%, kemudian membesar menjadi 37,92% tahun 2015. Memasuki tahun 2017, persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Kota Bekasi sudah menembus angka 40,31% (perhatikan Gambar 2-24).

2.2.24 Opini BPK

Opini BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) di sini adalah penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pada pemerintah pusat, pemerintah

daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan lainnya. Penilaian opini diselenggarakan setiap tahun.

Dalam beberapa tahun belakangan, opini BPK terhadap LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) Kota Bekasi menunjukkan perbaikan kualitas dari semula mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada tahun 2013 dan 2014 menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2015, 2016, dan 2017 (lihat Tabel 2.14).

Tabel 2.14 Perkembangan Opini BPK terhadap LKPD Kota Bekasi 2013-2016

Tahun	Opini BPK
2013	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2014	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

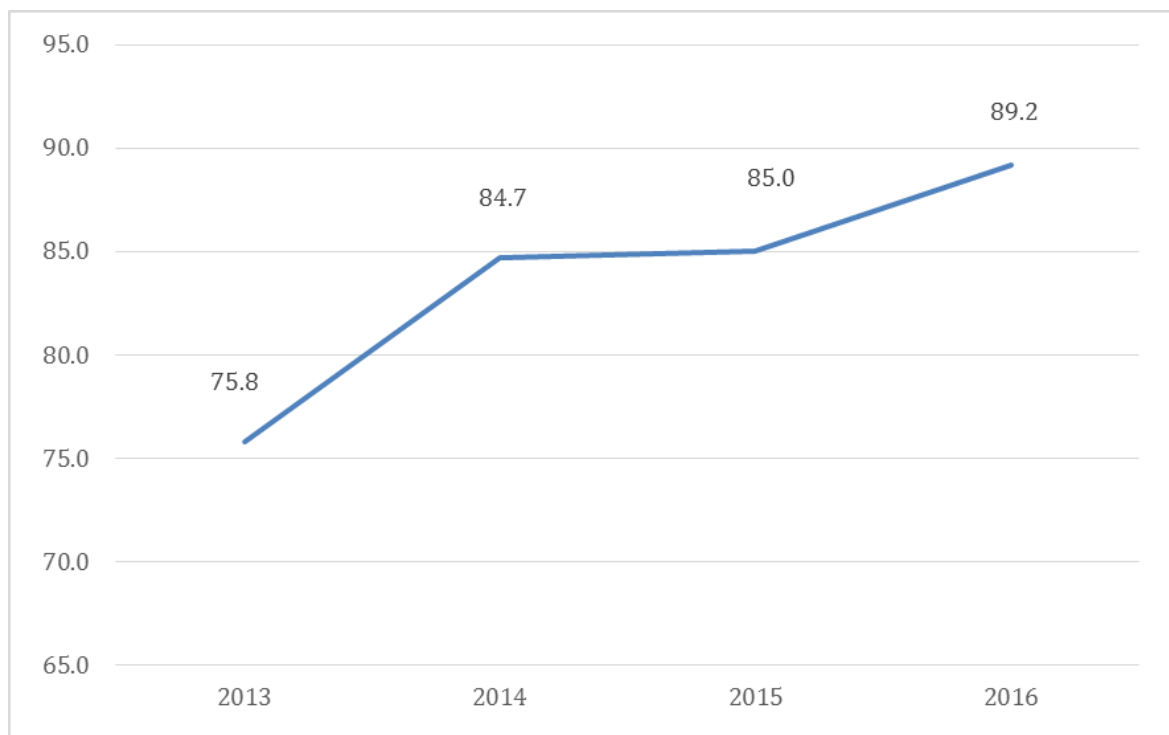
Sumber: BPK RI (2018:345 dan 388)

2.2.25 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pola Pangan Harapan (*desirable dietary pattern*) adalah susunan jumlah pangan yang terdiri dari sembilan kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energi yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas, maupun keragaman dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. Dewasa ini, Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator dari pembangunan nasional di bidang gizi dan pangan yang digunakan sebagai acuan dalam penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan dilihat dari sisi produksi, pengolahan, ataupun konsumsi mengingat pentingnya kecukupan energi dan zat gizi bagi setiap individu.

Melalui pendekatan PPH di atas, kualitas atau mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (*dietaryscore*) dan dikenal sebagai skor PPH. Skor PPH dapat dihitung dengan menggunakan formulasi persentase angka kecukupan gizi dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan (mencakup kelompok padi-padian, umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain). Apabila skor PPH makin tinggi (idealnya 100), maka artinya konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Pencapaian skor pola pangan harapan di Kota Bekasi dapat dilihat dalam Gambar 2-25. Sepanjang periode 2013-2016, skor PPH Kota Bekasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tepatnya bergerak naik dari 75,8 pada tahun 2013 naik menjadi 85,0 tahun 2015 dan meningkat lagi hingga 89,2 tahun 2016. Peningkatan skor PPH ini mengindikasikan bahwa konsumsi pangan di Kota Bekasi semakin beragam dan seimbang selama kurun waktu di atas.

Untuk kategori kota, skor PPH yang diraih Kota Bekasi pada tahun 2016 merupakan skor tertinggi dibandingkan delapan kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, Kota Bekasi menduduki posisi ketiga skor PPH tertinggi di Provinsi Jawa Barat di bawah Kabupaten Indramayu (92,1) dan Kabupaten Majalengka (89,6).



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (2016:173)

Gambar 2-25 Perkembangan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan di Kota Bekasi 2013-2017

Dinas Ketahanan Pangan mencatat bahwa Ketersediaan Pangan Utama tahun 2017 sebesar 82,17 Kg/jiwa, angka ini diperoleh dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 236.101.634 Kg dengan jumlah penduduk 2.873.484 jiwa.

Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Tahun 2017 tercatat 26 sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di Kota Bekasi dari 48 total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di Kota Bekasi (54,17%).

2.2.26 Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan adalah persediaan pangan di sebuah wilayah untuk keperluan konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga pangan, serta keadaan darurat pangan. Cadangan pangan ini terdiri dari persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Pangan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Khusus untuk beras, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi menyiapkan cadangan beras seberat 11,5 ton⁵ pada tahun 2018. Artinya, Kota Bekasi melakukan penguatan cadangan pangan berupa beras sebesar 11,5% pada tahun 2018.

2.2.27 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Daerah rawan pangan (*food insecurity district*) dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang mengalami kondisi ketidakmampuan untuk menyediakan pangan yang cukup dan sesuai bagi masyarakatnya, baik yang bersifat kronis (*chronical food insecurity*) maupun sementara (*transitory food insecurity*).

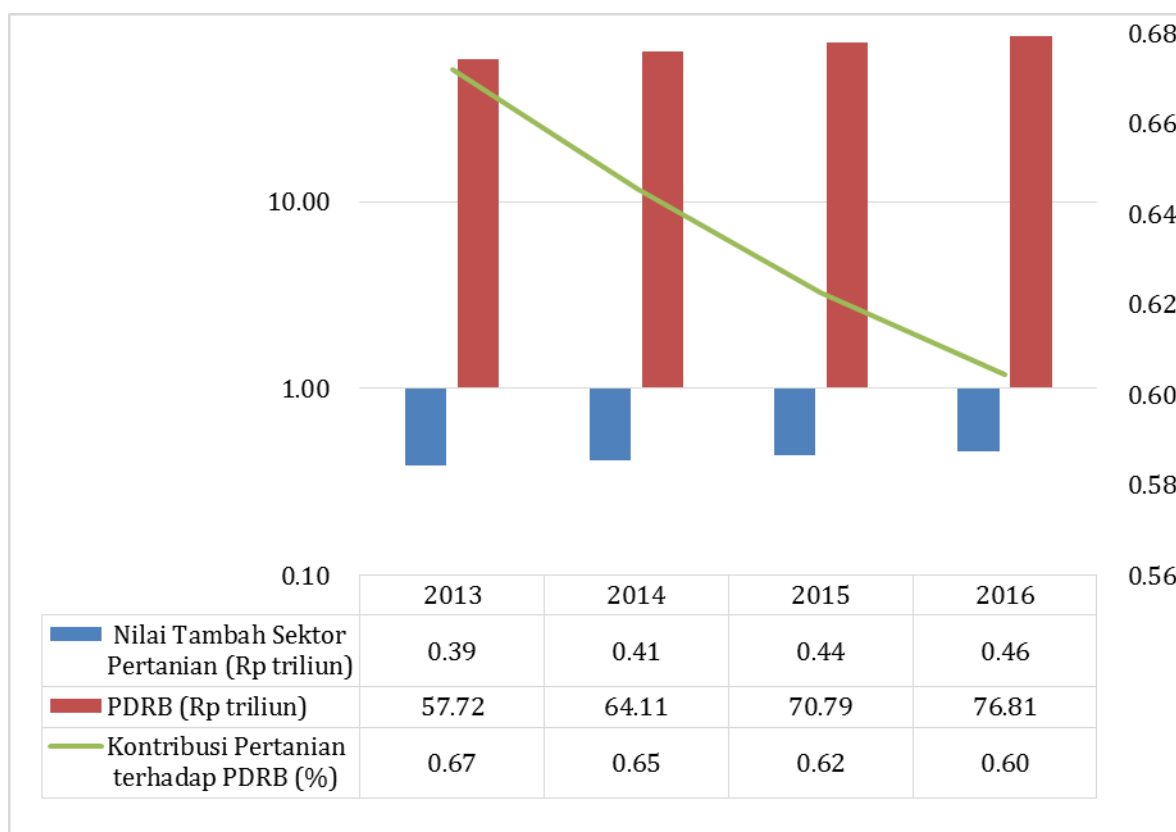
Di Kota Bekasi, pada awal tahun 2018 ini diduga ada dua wilayah yang terancam rawan pangan bersifat sementara, yakni Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Bekasi Barat. Dugaan ini diindikasikan oleh menipisnya stok beras dan pada gilirannya akan meningkatkan harga beras di pasar setempat.

2.2.28 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian di Kota Bekasi memang tidak berkembang karena wilayah ini termasuk kategori urban, dimana pada umumnya pertanian bukanlah menjadi sektor yang diandalkan. Usaha pertanian di kota ini yang masih dikembangkan oleh masyarakat adalah tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Usaha tanaman pangan terdiri dari budidaya padi (sawah dan ladang), palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah), sayur-sayuran (petsai/sawi, kacang panjang, bayam, ketimun, cabe, terong, kangkung), buah-buahan (jeruk siam, duren, duku, jambu biji, mangga, sawo, pepaya, pisang, rambutan), tanaman obat-obatan (jahe, kencur). Usaha peternakan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam ras, ayam buras, itik. Sedangkan perikanan darat mencakup beberapa jenis ikan untuk konsumsi yang dibudidayakan di kolam/tambak serta usaha budidaya ikan hias.

Dengan kondisi seperti di atas, maka tidaklah mengherankan apabila kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sangatlah kecil. Sepanjang kurun waktu 2013-2016, nilai tambah yang dihasilkan sektor ini memang naik dari Rp. 0,39 triliun menjadi Rp. 0,46 triliun. Akan tetapi, nilai tambah sebanyak ini baru mampu memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 0,67 persen pada tahun 2013. Bahkan, sebagaimana tampak pada Gambar 2-27, pada tahun-tahun berikutnya kontribusi sektor pertanian terus menurun hingga hanya 0,60 persen pada tahun 2016.

⁵ <https://bisnis.tempo.co/read/1049927/bekasi-mencadangkan-115-ton-beras-untuk-stabilkan-harga>.



Sumber: BPS Kota Bekasi (2017a:63), diolah.

Gambar 2-26 Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Bekasi, 2013-2016

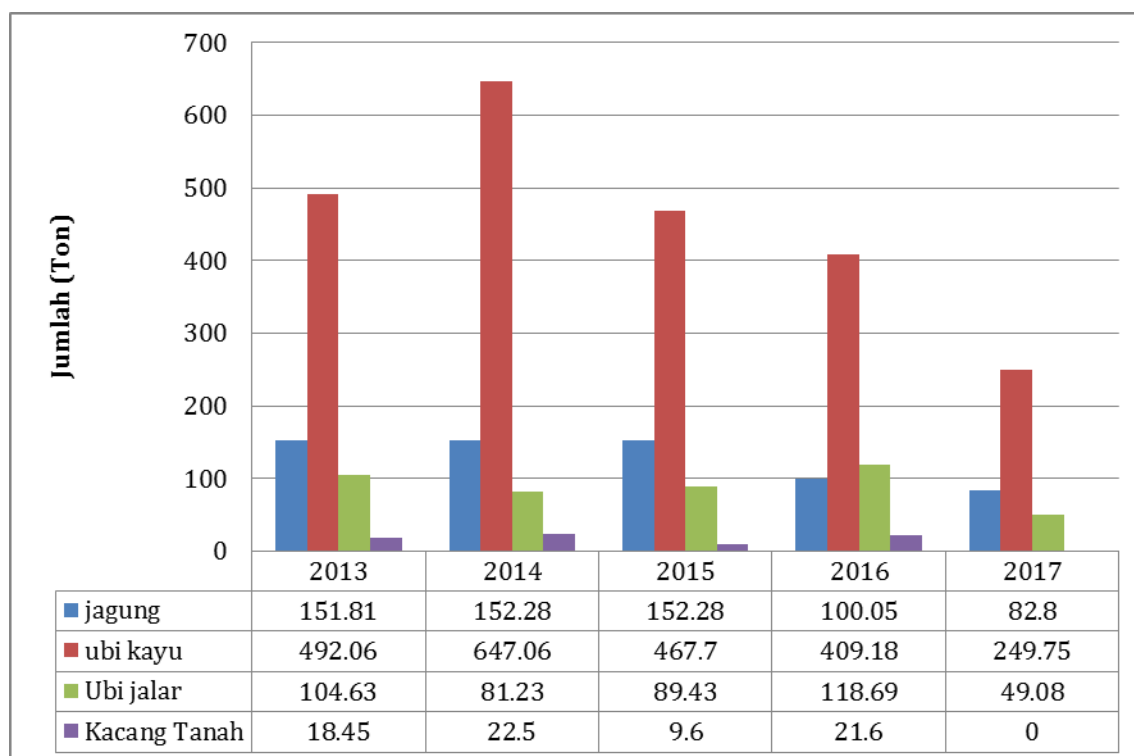
2.2.29 Kontribusi Subsektor Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, usaha palawija yang berkembang di Kota Bekasi hanya meliputi komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Pada tahun 2017, produksi keempat komoditas secara keseluruhan adalah sebesar 1.126,83 ton, mengalami peningkatan dibandingkan total produksi tahun 2014 yang mencapai 903,07 ton. Sebagian besar produksi palawija di Kota Bekasi adalah berupa jagung, dimana pada tahun 2017 meraih angka 828 ton, naik cukup besar dimana pada tahun 2016 hanya sekitar 100,05 ton. (lihat Gambar 2.28).

2.2.30 Produksi Sektor Pertanian

Perkembangan produksi sektor pertanian di Kota Bekasi dapat dilihat dalam Gambar 2-28, Produksi pertanian di kota ini terdiri dari kelompok tanaman pangan (padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), perkebunan rakyat (tanaman obat-obatan), peternakan, dan perikanan. Dari Gambar 2-28 tampak bahwa sebagian besar produksi sektor pertanian dihasilkan oleh kelompok tanaman pangan, dimana pada tahun 2017 produksinya mencapai 51.219,31 ton, jauh meningkat dibandingkan produksi tahun 2013 yang sekitar 18.954,19 ton. Sementara itu, produksi peternakan melejit dari 4.299,8 ton (2013) menjadi 16.190,0 ton (2017). Produksi perkebunan rakyat berupa tanaman obat-obatan naik dari 25,5 ton menjadi 85,9 ton. Sedangkan produksi perikanan darat

bertambah dari 1.164,4 ton menjadi 1.638,2 ton. Di Kota Bekasi juga berkembang budidaya ikan hias, dimana pada tahun 2016 produksinya sudah mencapai angka 4,9 juta ekor.



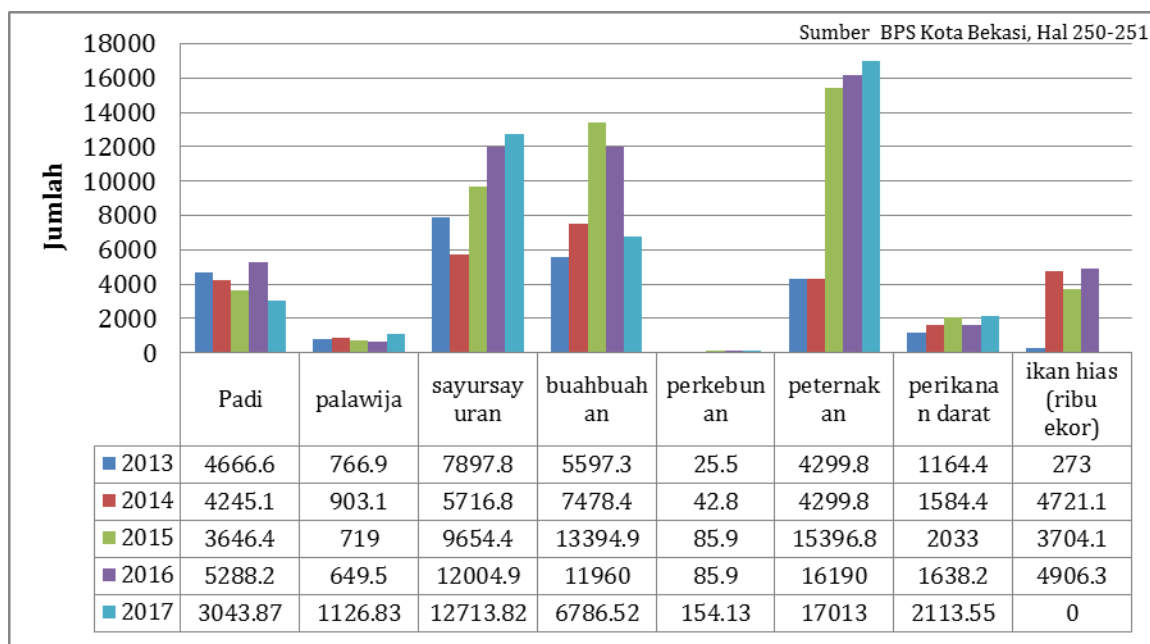
sumber: BPS Kota Bekasi 2017, Hal 251-252

Gambar 2-27 Perkembangan Produksi Palawija di Kota Bekasi, 2013-2017 (Ton)

Dari Gambar 2-28 tampak bahwa sebagian besar produksi sektor pertanian dihasilkan oleh kelompok sayur mayuran, dimana pada tahun 2017 produksinya mencapai 12.713,8 ton, jauh meningkat dibandingkan produksi tahun 2014 yang sekitar 5.716,8 ton. Sementara itu, produksi peternakan meningkat dari 4.299,8 ton (2013) menjadi 17.013 ton (2017). Sedangkan produksi perikanan darat bertambah dari 1.164,4 ton (2013) menjadi 2.113,55 ton (2017). Di Kota Bekasi juga berkembang budidaya ikan hias, dimana pada tahun 2016 produksinya sudah mencapai angka 4,9 juta ekor.

2.2.31 Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB Sektor Pertanian

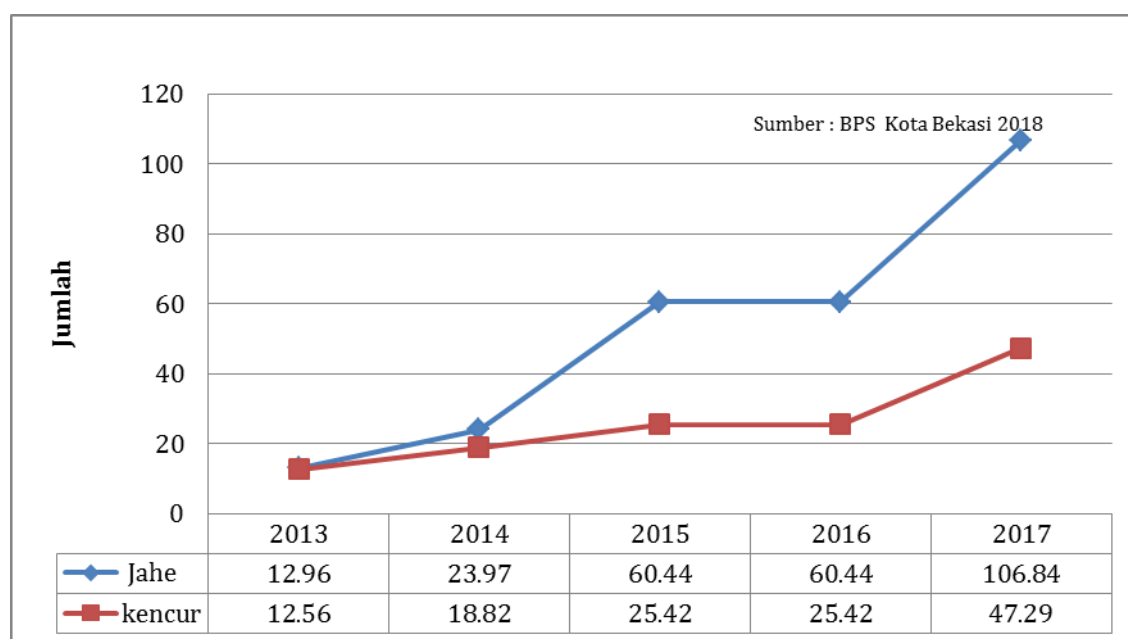
Karena data nilai tambah subsektor perkebunan di Kota Bekasi tidak tersedia, maka kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian tidak dapat diuraikan. Adapun dari sisi jumlah produksi, sebagaimana dapat ditelusuri dari data pada Gambar 2-28, kontribusi subsektor perkebunan (tepatnya perkebunan rakyat) terhadap total produksi sektor pertanian pada awalnya adalah sekitar 0,10% (2013) dan kemudian meningkat menjadi 0,18% (2016).



Gambar 2-28 Perkembangan Produksi Sektor Pertanian di Kota Bekasi, 2013-2016 (Ton)

2.2.32 Produksi Subsektor Perkebunan

Kota Bekasi hanya memiliki sedikit perkebunan, tepatnya perkebunan rakyat yang ditanami dengan tanaman obat-obatan berupa jahe dan kencur. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 2-28, produksi perkebunan rakyat ini bergerak naik dari 25,5 ton tahun 2013 menjadi 85,9 ton tahun 2016 dan meningkat kembali ditahun 2017 menjadi 154,13 Ton. Produksi tanaman jahe bertambah dari 12,96 ton menjadi 106,84 ton, sedangkan produksi tanaman kencur juga mengalami peningkatan dari 12,56 ton (2013) menjadi 47,29 ton (2017).



Gambar 2-29 Perkembangan Produksi Kebun Rakyat di Kota Bekasi, 2013-2017 (Ton)

2.2.33 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Padi terhadap PDRB

Karena data produksi kelompok petani (padi) di Kota Bekasi tidak tersedia, maka kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB tidak dapat diuraikan. Akan tetapi, sebagai uraian tambahan, produksi padi di Kota Bekasi secara keseluruhan telah meningkat dari 4.666,6 ton tahun 2013 menjadi 5.288,2 ton tahun 2016. Hampir seluruhnya produksi padi ini berasal dari padi sawah. Produksi padi ladang hanya terjadi pada tahun 2013 dan 2014, yakni masing-masing sebanyak 4,36 ton dan 4,15 ton (BPS Kota Bekasi, 2017). Pada tahun 2015 dan 2016 produksi padi ladang sudah tidak terdata lagi.

2.2.34 Kontribusi Subsektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Aktivitas ekonomi di subsektor kelautan dan perikanan di Kota Bekasi yang berkembang hanyalah berupa perikanan darat dan budidaya ikan hias air tawar. Perikanan darat dikembangkan di areal kolam/tambak dan perairan umum, seperti ikan nila, gurame, lele, patin, dan jenis ikan lainnya. Pada tahun 2016, usaha perikanan darat di perairan umum tidak berproduksi lagi. Spanjang periode 2013-2016, produksi perikanan darat sempat melejit dari 1.164,4 ton tahun 2013 menjadi 2.033,0 ton tahun 2015, namun setahun kemudian menurun hingga 1.638,2 ton (lihat kembali Gambar 2-28). Penurunan produksi ini menyebabkan penerimaan juga merosot dari Rp42,6 miliar (2015) menjadi Rp28,1 miliar (2016)(BPS Kota Bekasi, 2017).

Untuk ikan hias air tawar, sejak tahun 1998 Kota Bekasi menjadi eksportir terbesar di Indonesia. Setiap bulannya jutaan ekor aneka ikan hias air tawar telah didistribusikan ke mancanegara di Asia, Eropa, dan Amerika. Di Kota Bekasi ada 18 eksportir ikan hias, paling banyak di Indonesia. Akan tetapi, jumlah pembudidaya ikan hias air tawar di kota ini mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 700-an orang menjadi 400-an orang pada akhir 2017. Untuk mempertahankan predikat eksportir ikan hias air tawar terbesar di Indonesia, pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan beberapa lokasi sentra ikan hias, satu di antaranya adalah di Jalan Pariwisata, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga membantu mensuplai indukan unggul, menyelenggarakan pameran ikan hias secara berkala, dan pendanaan. Adapun produksi ikan hias di Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir meningkat dari 3.704.090 ekor tahun 2015 menjadi 4.906.300 ekor tahun 2016 (BPS Kota Bekasi, 2017).

Karena penciptaan nilai tambah di sektor kelautan dan perikanan tidak didata secara khusus, maka kontribusi sektor ini terhadap PDRB tidak dapat diuraikan.

2.2.35 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sampai dengan tahun 2016, pengembangan sektor perdagangan di Kota Bekasi didukung oleh 5.366 perusahaan ber-SIUP, terbagi atas 158 perusahaan besar, 1.736 perusahaan menengah, dan 3.472 perusahaan kecil (BPS Kota Bekasi, 2017). Sejak tahun

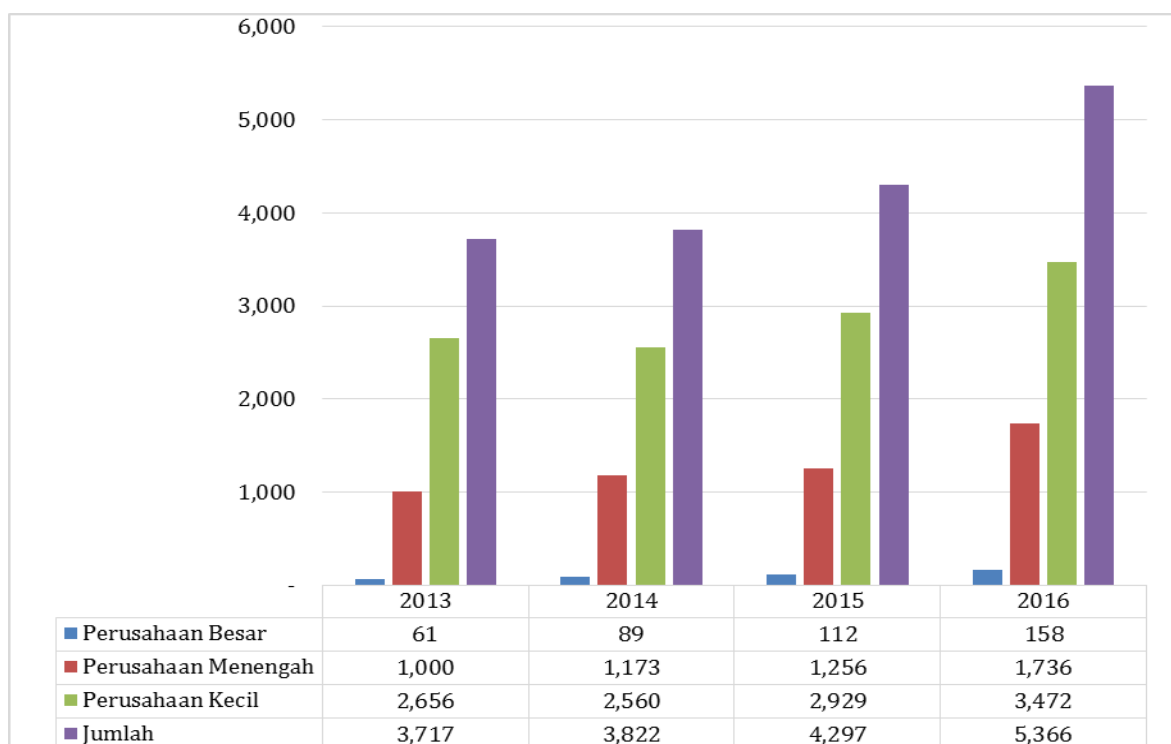
2013, jumlah perusahaan perdagangan di kota ini memang terus meningkat, seperti tampak pada Gambar .

Dalam hal penciptaan nilai tambah, sektor perdagangan mampu menjadi kontributor PDRB Kota Bekasi terbesar kedua setelah sektor industri, meskipun trennya menurun. Dari Gambar 2.31 dapat dilihat tren menurun tersebut. Pada tahun 2013, sektor perdagangan menghasilkan nilai tambah sebanyak Rp. 13,94 triliun, yang berarti memberikan kontribusi sekitar 24,15% kepada PDRB. Akan tetapi, memasuki tahun 2016 andil sektor ini berkurang menjadi 22,60%, meskipun nilai tambahnya naik hingga Rp. 17,36 triliun. Penurunan kontribusi ini mengindikasikan bahwa daya saing sektor perdagangan terhadap sektor-sektor lainnya dalam perekonomian Kota Bekasi melemah.

Melemahnya daya saing sektor perdagangan Kota Bekasi juga diindikasikan oleh terus menurunnya nilai ekspor kota ini. Pada tahun 2013, ekspor mencapai angka US\$570,7 juta, namun pada tahun-tahun berikutnya terus menurun hingga US\$357,9 juta tahun 2016. Di sisi lain, impor Kota Bekasi naik dari US\$171,2 juta (2013) menjadi US\$183,2 juta (2015).

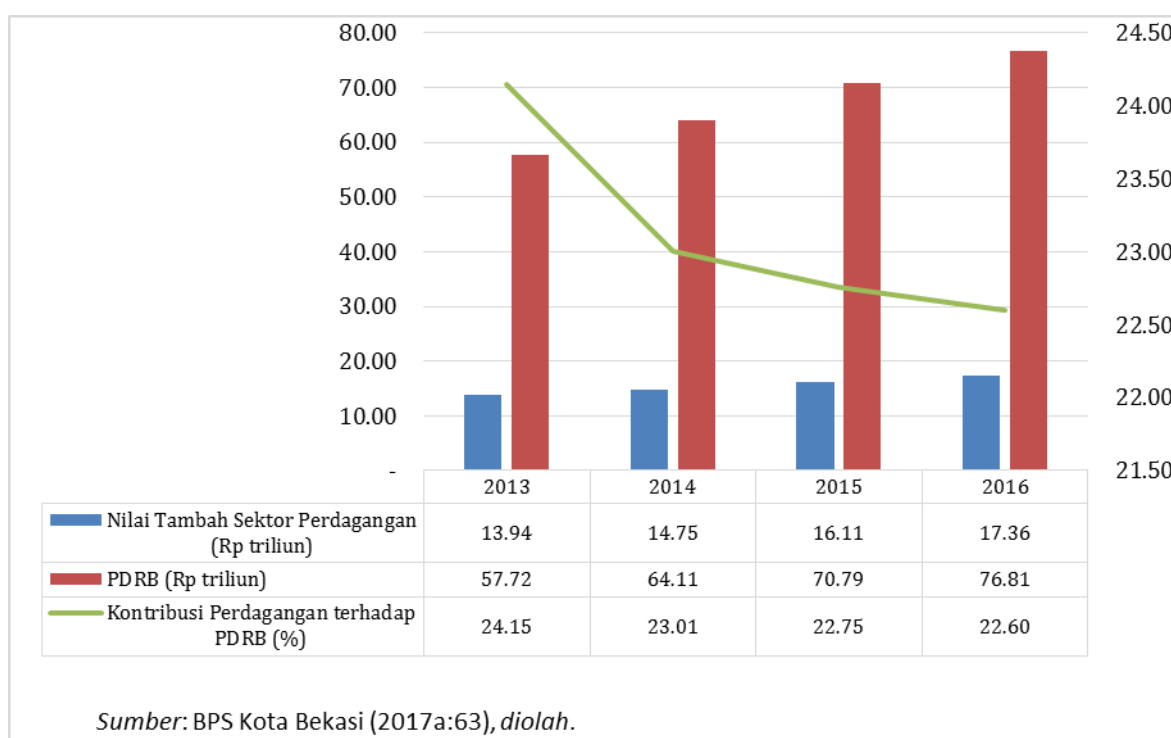
Menurunnya nilai eksport Kota Bekasi berdampak pada nilai eksport bersih perdagangan Kota Bekasi yang juga cenderung menurun. Pada tahun 2013 nilai eksport bersih perdagangan Kota Bekasi mencapai US\$ 830 juta, namun pada tahun berikutnya terus menurun hingga US\$ 245 juta ditahun 2015.

Sektor perdagangan Kota Bekasi juga ditopang dengan pertumbuhan unit-unit usaha koperasi, pertumbuhan unit-unit koperasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, unit koperasi pada tahun 2013 mencapai 928 unit mengalami peningkatan menjadi 1.008 unit pada tahun 2016. Pertumbuhan unit koperasi ini dibarengi dengan pertumbuhan UMKM yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan 15%, pada tahun 2013 jumlah UMKM di Kota Bekasi mencapai 1.226 UMKM meningkat ditahun 2016 menjadi 2.043 UMKM, hal ini menunjukkan peningkatan perekonomian Kota Bekasi akan terus meningkat dengan adanya inidikasi pertumbuhan perdagangan skala mikro dalam masyarakat.



Sumber: BPS Kota Bekasi (2017b:303)

Gambar 2-30 Perkembangan Jumlah Perusahaan Perdagangan di Kota Bekasi, 2013-2016



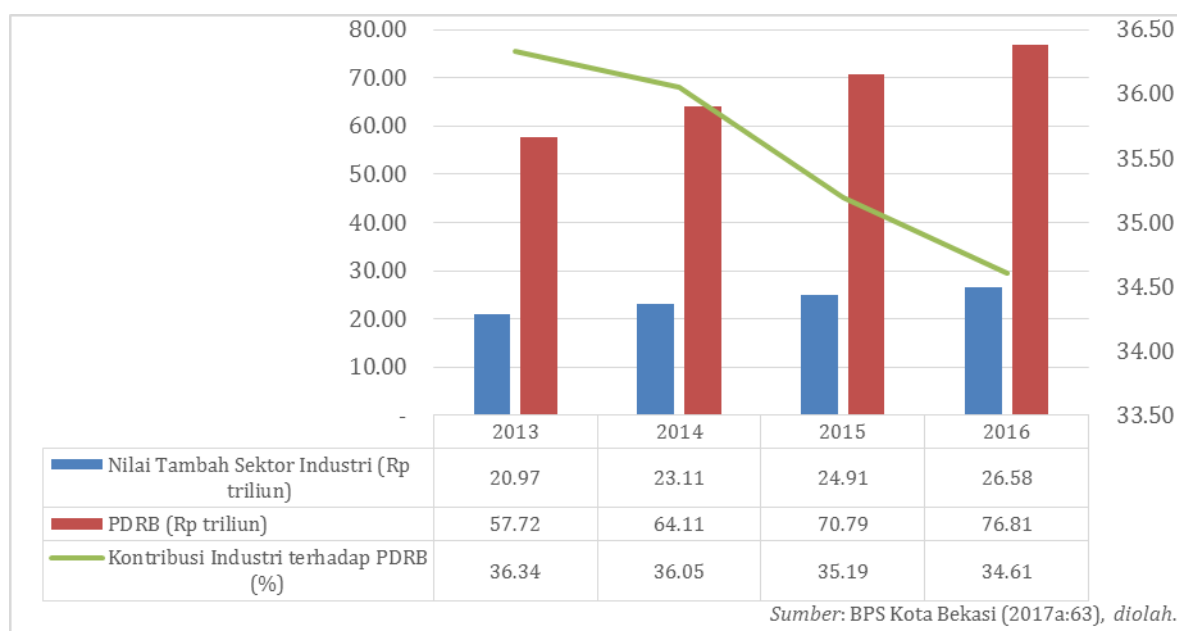
Sumber: BPS Kota Bekasi (2017a:63), diolah.

Gambar 2-31 Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Bekasi, 2013-2016

2.2.36 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha/perusahaan di sektor industri pengolahan di Kota Bekasi adalah sebanyak 13.042 perusahaan, terdiri dari 12.396 usaha mikro dan kecil serta 646 usaha menengah besar. Jumlah usaha/perusahaan ini mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 105.983 orang, dimana 69.959 orang di antaranya bekerja di perusahaan berskala usaha menengah dan besar (BPS Kota Bekasi, 2017).

Nilai tambah yang berhasil diciptakan oleh sektor industri pada tahun 2016 adalah senilai Rp. 26,58 triliun. Angka ini menempatkan sektor industri menjadi kontributor terbesar pada PDRB, yakni sebanyak 34,61 persen. Akan tetapi, seperti halnya sektor perdagangan, kontribusi sektor industri terhadap PDRB dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. Pada tahun 2013 sektor ini mampu menyumbang sebesar 36,34 persen (Rp. 20,97 triliun), namun merosot hingga 35,19 persen tahun 2015 dan kemudian 34,61 persen tahun 2016.

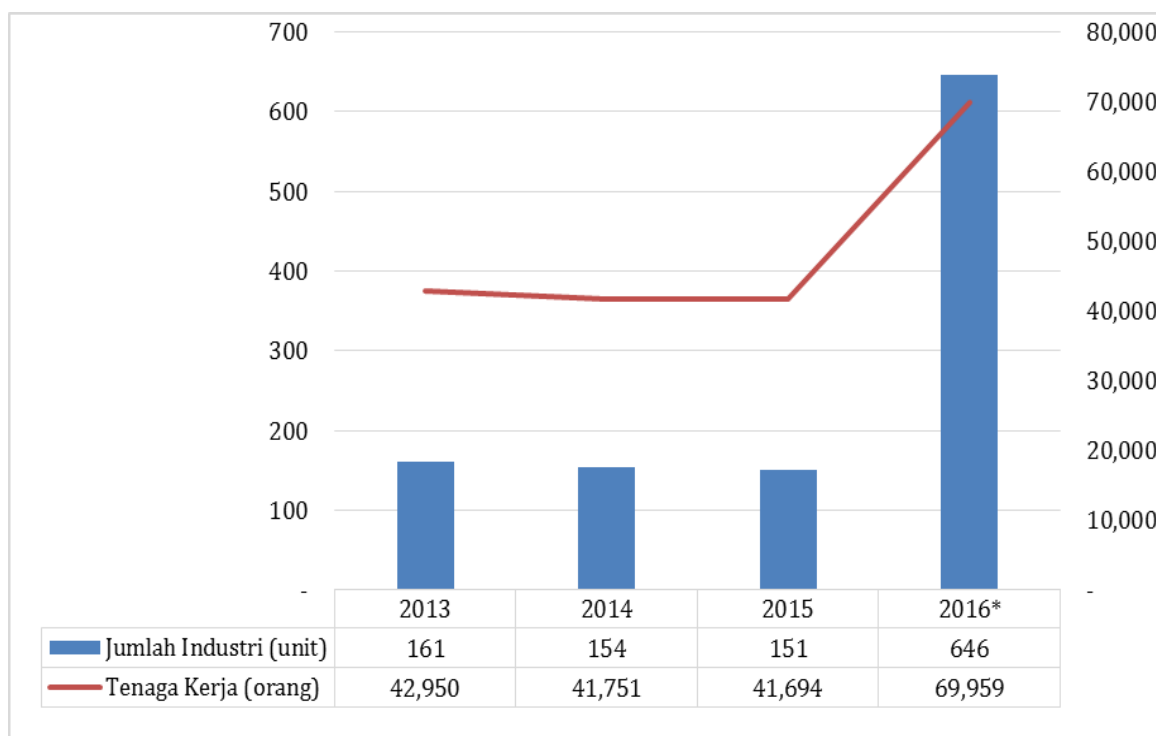


Gambar 2-32 Perkembangan Nilai Tambah dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB di Kota Bekasi, 2013-2016

2.2.37 Pertumbuhan Industri

Jumlah industri menengah besar di Kota Bekasi pada tahun 2015 ada sebanyak 152 perusahaan yang tersebar di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Pondok Gede. Jumlah industri menengah besar sebanyak ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 41.694 orang. Industri makanan merupakan jenis industri terbanyak di Kota Bekasi, yakni 18 perusahaan. Industri makanan juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni 7.889 orang. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah industri yang berada di Kota Bekasi tahun 2015 mengalami penurunan dari sebelumnya 154 perusahaan (2014). Berkurangnya dua perusahaan ini menyebabkan jumlah tenaga

kerja turun dari 41.751 orang menjadi 41.694 orang. Bahkan, pada tahun 2013 jumlah industri menengah besar sempat mencapai angka 161 perusahaan, yang mempekerjakan 42.950 orang tenaga kerja (BPS Kota Bekasi, 2016).



Sumber: 2013-2015: BPS Kota Bekasi (2016); 2016: BPS Kota Bekasi (2017). * Hasil SE 2016.

Gambar 2-33 Perkembangan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Industri Menengah Besar di Kota Bekasi, 2013-2016

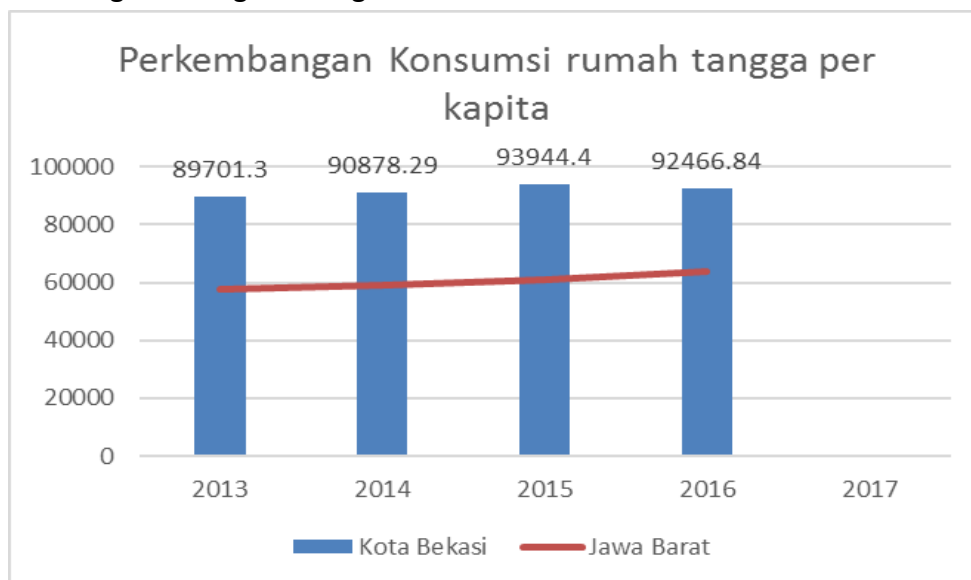
2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu tinjauan tingkat keberhasilan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Indikator daya saing daerah di Kota Bekasi ditunjukkan oleh tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa, rasio ekspor-impor terhadap PDRB, rasio Pinjaman terhadap simpanan di Bank Umum, angka kriminalitas yang tertangani, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di BPR, angka kriminalitas yang tertangani, rasio ketergantungan penduduk.

A. Fokus Ekonomi

2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Bekasi dari tahun ke tahun semakin meningkat sebagaimana grafik di bawah ini:



Sumber: PDRB Kota Bekasi 2012-2016 dan PDRB Jawa Barat 2012 - 2016

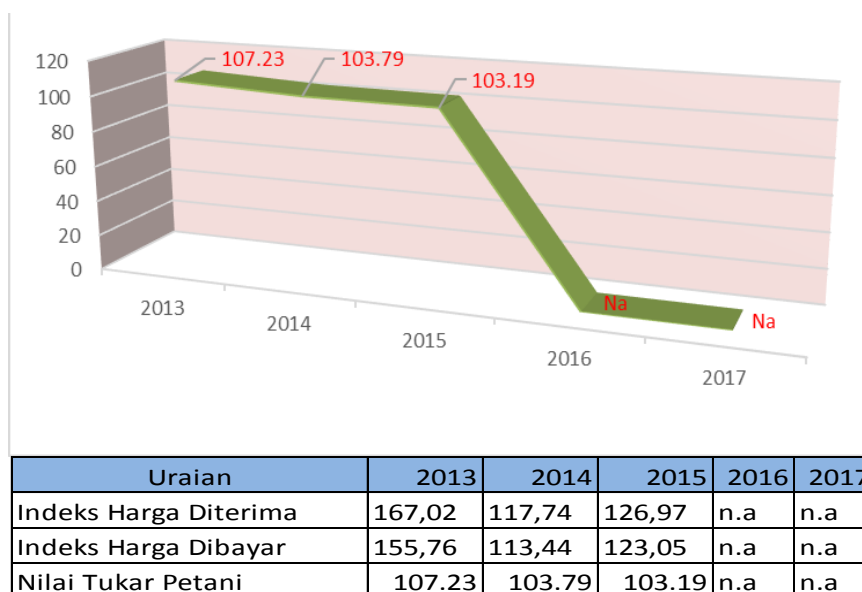
Gambar 2-34 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Bekasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 pengeluaran rata-rata per kapita di Kota Bekasi sebesar Rp89.701.300,-. Nilai tersebut semakin meningkat hingga pada tahun 2016 menjadi Rp92.466.840,-. Jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita di Provinsi Jawa Barat, nilai tersebut jauh lebih tinggi. Di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 pengeluaran per kapita hanya sekitar Rp57.536.270,- dan Rp63.714.960,- pada tahun 2016. Dari indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi lebih baik.

2.3.2 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Nilai Tukar Petani Kota Bekasi dari tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut:

Nilai tukar petani pada tahun 2013 sebesar 107,23, kemudian semakin menurun dari pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 103,78 dan 103,19. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun tersebut petani mengalami surplus sebesar 7,23%, kemudian menurun menjadi 3,78% dan 3,19%. Jika dibandingkan Provinsi Jawa Barat, NTP Kota Bekasi cenderung lebih kecil. Selengkapnya Nilai Tukar petani di Jawa Barat sebagai berikut:



Gambar 2-35 Nilai Tukar Petani

Sedangkan nilai tukar petani Kota Bekasi selama 2013-2017 diperlihatkan pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15 Nilai Tukar Petani Kota Bekasi

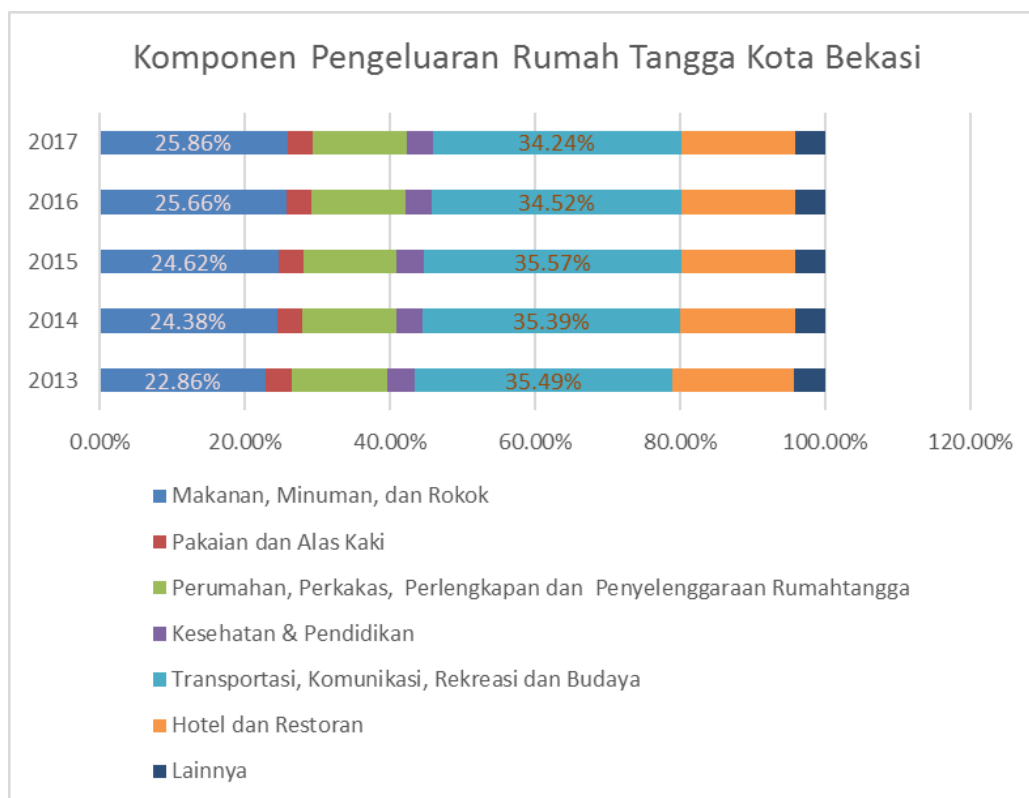
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Diterima Petani	109,55	117,74	126,97	132,25	137,27
2	Indeks Dibayar Petani	105,53	112,74	120,83	126,13	130,82
3	Nilai Tukar Petani	103,81	104,43	105,07	104,86	104,92

NTP Kota Bekasi yang lebih rendah ini dapat disebabkan daya dukung pertanian di Kota Bekasi tidak begitu kondusif.

2.3.3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non pangan per Kapita

Sebagaimana penjelasan pada sub bab 2.3.1, penjabaran pola konsumsi atau pengeluaran rumah tangga di Kota Bekasi tergambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Alokasi pengeluaran rumah tangga untuk keperluan makanan dan minuman hanya sekitar 22,86% pada tahun 2013 dan semakin meningkat hingga 25,86% pada tahun 2017. Sebagian besar pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk keperluan non pangan, yaitu untuk pengeluaran di bidang transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya, hotel dan restoran, serta perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga. Pola pengeluaran yang demikian dipengaruhi oleh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Melihat komponen pengeluaran ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sudah cukup baik, kebutuhan pokok untuk bertahan hidup sudah sangat terpenuhi dan kelebihan penghasilan dapat digunakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier.

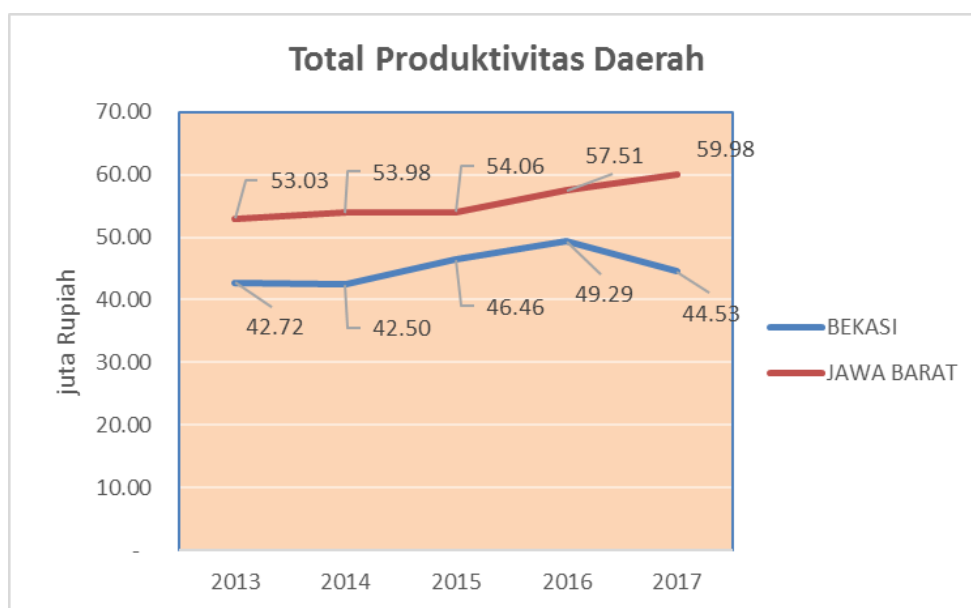


Sumber: PDRB Kota Bekasi 2013-2017

Gambar 2-36 Komponen Pengeluaran Rumah Tangga

2.3.4 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah menunjukkan seberapa produktif angkatan kerja yang bekerja pada setiap sektor dan nilai tambah pada sektor tiap PDRB. Tingkat produktivitas total Kota Bekasi disajikan dalam tabel di bawah ini.



Sumber: PDRB Kota Bekasi 2013-2017

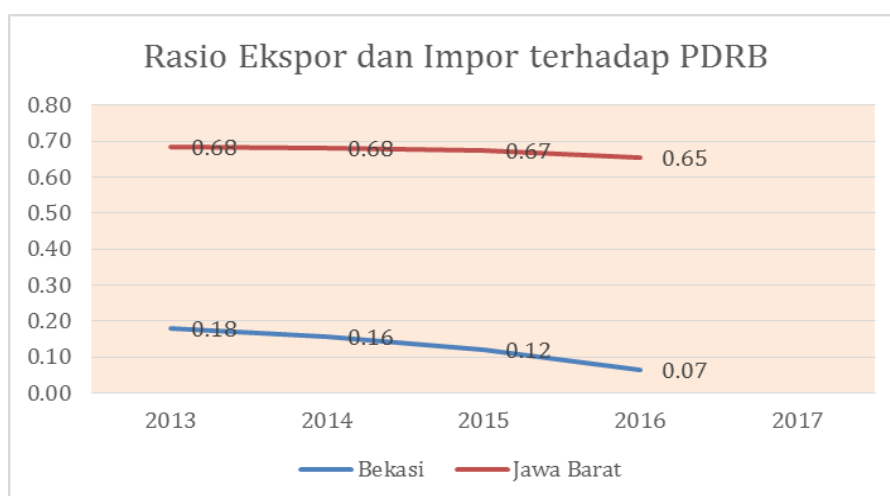
Gambar 2-37 Produktivitas Total Daerah

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa produktivitas total daerah semakin meningkat. Namun demikian, produktivitas total daerah Kota Bekasi masih berada dibawah rata-rata provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2013 produktivitas total per tenaga kerja selama setahun mencapai 42,72 juta rupiah, sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat, rata-rata produktivitas daerah sebesar 53,03 Juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2017, produktivitas tenaga kerja Kota Bekasi hanya mencapai 44,53 juta rupiah selama satu tahun, sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat mencapai 59,98 juta rupiah selama satu tahun. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Bekasi yang melakukan aktivitas ekonomi di luar Kota Bekasi (DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi). Hal ini menyebabkan perhitungan output ekonomi diperhitungkan di luar Kota Bekasi, sementara mereka diperhitungkan sebagai kapita yang membagi total output ekonomi Kota Bekasi.

2.3.5 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB

Indikator keterbukaan ekonomi Kota Bekasi dinilai dari rasio jumlah ekspor dan impor terhadap total PDRB di tahun yang sama. Pada sajian ini data ekspor dan impor Kota Bekasi diperoleh dari dokumen Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2016 yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. Total nilai ekspor dan impor tersebut dikonversi menjadi satuan rupiah dengan menggunakan kurs tengah mata uang USD per tahun yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Sedangkan nilai PDRB diperoleh dari dokumen Kota Bekasi Dalam Angka.

Tren adanya rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Bekasi menunjukkan adanya penurunan sejak tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012 nilai rasio tersebut hamper mencapai 24%. Nilai ini terus mengalami penurunan menjadi 15,67% di tahun 2013, 13,87% di tahun 2014 dan 11,91% di tahun 2015. Bahkan pada tahun 2016 rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Bekasi kurang dari 10% yaitu hanya 8,95%. Hal ini senada dengan semakin menurunnya total ekspor dan impor hingga 2016. Di sisi lain, PDRB Kota Bekasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 2-38 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, tingkat keterbukaan ekonomi Kota Bekasi jauh lebih kecil. Jika tingkat keterbukaan ekonomi Provinsi Jawa Barat berada diatas 0,65, maka di Kota Bekasi berada dibawah 0,20. Sedangkan dari sisi tren nya, tingkat keterbukaan di Kota Bekasi juga semakin menurun yang menunjukkan kondisi ekonomi yang semakin tertutup. Pola ekonomi yang cenderung tertutup akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat.

2.3.6 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bekasi dihitung dengan melakukan pembagian jumlah kasus kriminal yang tertangani/terselesaikan dengan jumlah penduduk Kota Bekasi di tahun yang sama kemudian dikalikan dengan konstanta sebesar 1000. Jumlah kasus kriminal maupun penduduk Kota Bekasi dapat diperoleh dari dokumen Kota Bekasi dalam Angka setiap tahun.

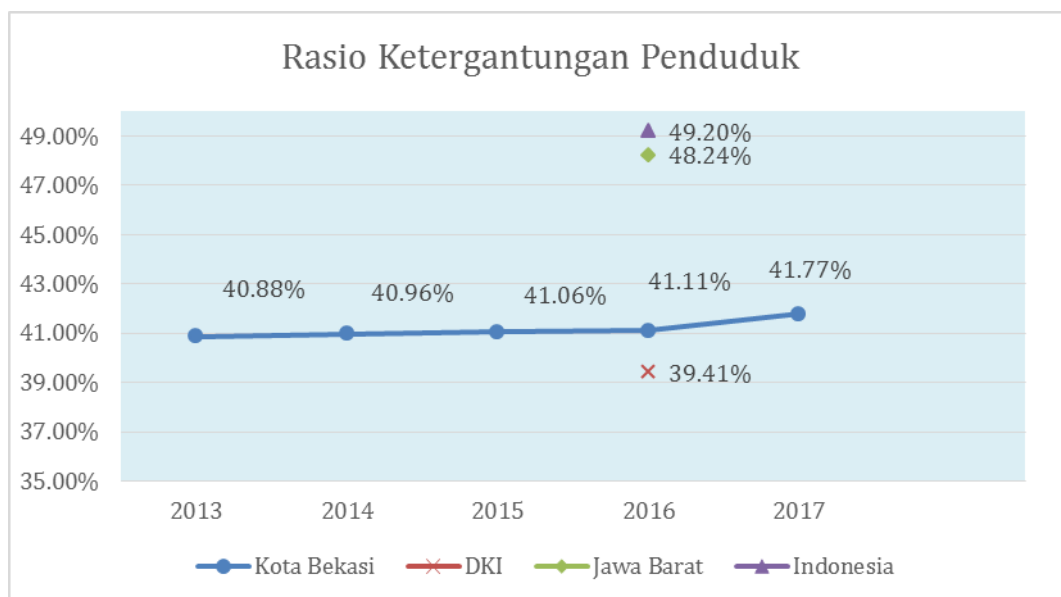
Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bekasi tidak mengalami banyak perubahan signifikan dan cenderung stagnan antara tahun 2012 hingga tahun 2015. Pada tahun 2012 dan 2015 angka kriminalitas yang terselesaikan sama-sama sejumlah 1,87 sedangkan tahun 2013 dan 2014 memiliki nilai yang identik yaitu 1,92. Namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup dramatis hingga mencapai angka 6,54 atau hampir 3,5 kali angka di tahun sebelumnya. Peningkatan angka ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah kriminalitas yang tertangani di tahun tersebut yaitu 1.833 perkara dibandingkan tahun 2015 yang hanya berjumlah 511 perkara. Sedangkan pada tahun 2017 ada penurunan angka kriminalitas yang tertangani yaitu 6,38 ini di karenakan jumlah kriminal yang ditangani yaitu 1.833 sama dengan tahun 2016.

Tabel 2.16 Angka Kriminalitas Tertangani di Kota Bekasi

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk	2.523.032	2.592.819	2.663.011	2.733.240	2.803.283	2.873.484
Kriminal tertangani	471	511	511	511	1.833	1.833
Angka Kriminalitas yang tertangani/jumlah penduduk	0.000187	0.000197	0.000192	0.000187	0.000654	0.000638

2.3.7 Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan menunjukkan rasio antara penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk produktif dalam satu tahun tertentu. Kategori penduduk produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan penduduk di luar usia tersebut dikategorikan sebagai penduduk tidak produktif. Data jumlah penduduk berdasarkan usia tersebut tersedia di dokumen Kota Bekasi dalam Angka. Rasio ketergantungan penduduk Kota Bekasi cenderung stabil sebagaimana grafik dibawah ini.



Sumber: Kota Bekasi dalam angka 2018

Gambar 2-39 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bekasi

Pada tahun 2013 rasio ketergantungan penduduk berada pada angka 40.88%, kemudian perlahan mulai meningkat menjadi 40, 96% pada tahun 2014, 41.06% pada tahun 2015, dan 41.77% pada tahun 2017. Angka-angka tersebut jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya relatif kecil. Rasio ketergantungan penduduk di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 49.20%. Sedangkan di provinsi Jawa Barat mencapai 48.24. karakter rasio ketergantungan penduduk di Kota Bekasi hampir sama dengan di wilayah provinsi DKI yaitu 39.41 pada tahun 2015, rendahnya rasio ketergantungan ini disebabkan karena daya tarik Kota Bekasi sebagai tujuan urbanisasi. Beberapa golongan masyarakat banyak yang memilih kembali ke kampung halaman jika sudah memasuki usia yang kurang produktif. Dari aspek daya saing, hal ini merupakan suatu kekuatan dan potensi ekonomi yang baik, karena perbandingan SDM yang produktif relatif lebih tinggi dibandingkan SDM yang menjadi tanggungan, terlebih jika melihat angka-angka di daerah lainnya.

2.3.8 BUMD

Kota Bekasi memiliki 6 BUMD yang bergerak di berbagai sektor usaha. Berikut merupakan gambaran ke-6 BUMD tersebut.

a. PDAM Tirta Patriot

PDAM ini bergerak di bidang pengelolaan air minum di Kota Bekasi. Jumlah penduduk yang dilayani oleh PDAM ini sebanyak 184.944 jiwa (6% dari jumlah penduduk) dengan total sambungan sebanyak 33.449 SL. Pada RKAP 2018 direncanakan penambahan sambungan pelanggan sebanyak 1.419 SL dari jumlah sambungan sampai akhir tahun 2017. BUMD ini menjual air dengan tarif dasar 4.200/m³. Tingkat kehilangan air BUMD ini cukup kecil yakni hanya sebesar 4,6% dari distribusi (standar kehilangan air maksimal sebesar 20%).

Realisasi pendapatan usaha untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp74.954.233.638 atau sekitar 99.73% dibawah target dari RKAP yaitu sebesar Rp75.158.436.134. Menurut indikator BPPSPAM kinerja PDAM ini mendapatkan nilai 3.470 yang tergolong sehat, karena *cash* rasio yang cukup tinggi. Selain itu, BUMD ini juga sudah tergolong *Full Cost Recovery* (sudah mampu menutupi biaya operasional).

b. PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi

BUMD ini juga bergerak di bidang pengelolaan air minum yang melayani 2 wilayah yaitu Kota Bekasi dengan cakupan wilayah 45,74% dan Kabupaten Bekasi seluar 37,55% dengan total sambungan pelanggan sebanyak 231.842.

c. PD. Mitra Partiot Kota Bekasi

BUMD ini bergerak di bidang transportasi dengan mengelola Bus Trans Patriot, Moda Transportasi massal bersubsidi milik Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 9 (sembilan) bus. Selain pengelolaan Bus Trans Partiot, BUMD ini merencanakan kegiatan bisnis (i) Pengelolaan Parkir RSUD dr. Chasbullah, dan (ii) Pengelolaan Pemasangan Reklame Charging Station.

d. PD. Migas Kota Bekasi

BUMD ini didirikan dengan maksud untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada wilayah dan di luar wilayah administrasi Kota Bekasi. Pendirian BUMD ini dilatarbelakangi adanya potensi cadangan migas di wilayah Jatinegara, di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna. PD. Migas Kota Bekasi masih mengalami berbagai kendala usaha. Pendapatan BUMD ini masih sangat kecil sehingga tidak dapat menyumbang ke kas pemerintahan/PAD Kota Bekasi. Karena kecilnya pendapatan PD. Migas ini untuk menutupi kebutuhan operasional mengajukan *Finansial Support* ke Mitra Usaha.

e. PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi (SBP).

BUMD ini bergerak di bidang gas bumi dengan memanfaatkan sumber gas di daerah Bojong, Kecamatan Rawalumbu. Pengguna gas bumi di Kota Bekasi masih tergolong kecil. Jumlah pelanggan BUMD ini pada tahun 2018 hanya sekitar 4.700-an pelanggan aktif. BUMD in dalam menjalankan usahanya masih mengalami berbagai kendala yakni kondisi infrastruktur yang kurang memadai, pembayaran tagihan masih bersifat manual, tunggakan pelanggan masih banyak, serta gas *losses* cukup besar yakni mencapai 30%.

f. PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Partiot Kota Bekasi

PT. BPRS ini bergerak dibidang jasa keuangan (perbankan). Sebagaimana lembaga keuangan lainnya BPRS ini memiliki berbagai jenis produk baik yang bersifat penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun produk jasa dengan bagi hasil yang kompetitif. Saat ini BUMD ini memiliki sebuah kantor pusat dan 13 kantor kas di seluruh Kota Bekasi. Perkembangan aktiva per 31 Desember 2018 sebesar Rp192.580.362.000 atau mengalami kenaikan sebesar 33,69% dari tahun 2017 yakni sebesar Rp14.050.559.000. Dari sisi permodalan, per 31 Desember

2018 Rasio CAR perseroan sebesar 26,96%. Rasio ini jauh diatas keentuan minimal OJK yakni sebesar 12%. Dari sisi aktiva, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,16%. Rasio NPF (*Non Performing Financing*) pada tahun 2018 turun sebesar 10,10% dari tahun buku 2016. Pada tahun buku 2017 Rasio NPF sebesar 1,98%. Sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 1,70%. Dari sisi pasiva, semua pos mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan dan semakin dikenalnya Perseroan ini oleh masyarakat.

2.3.9 Kerjasama Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Kota Bekasi tidak dapat bekerja sendiri dan perlu melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya yang saling membutuhkan. Dari tahun 2013 sampai dengan 2016 Pemerintah Kota Bekasi melakukan kerjasama baik dengan sesama pemerintah daerah lain, maupun institusi non pemerintah. Pada tahun 2013 terdata 9 kerjasama. Adapun pada tahun 2014 mencapai 25 kerjasama, tahun 2015 sebanyak 27 kerjasama, dan pada tahun 2016 sebanyak 30 kerjasama.

Secara lengkap data kerja sama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Tabel Kerjasama Pemkot Bekasi 2013-2016

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
Tahun 2013		
1	Pemerintah Kabupaten Kota Bekasi	Pengembangan pelayanan air bersih kepada masyarakat di kedua daerah
2	Kerja Sama Pembangunan Antar Wilayah Perbatasan	Mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, pelaksanaan pembangunan JABODETABEKJUR yang saling terkait, saling mempengaruhi, saling ketergantungan, dan saling menguntungkan serta memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama Daerah
3	Kabupaten Bogor	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi
4	Pemerintah Provinsi Kota Bekasi	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi
5	PT. Metropolitan Land, Tbk.	Pembangunan Gerbang Keluar Tol Bekasi Barat 3 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
6	PT. Bangunbina Primasarana	Pengelolaan Pertokoan Kranji
7	PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia	Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell Dengan Metode Kamufase di Kota Bekasi
8	PT. Quattro Internasional	Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell Hotel dengan Jaringan Serat Optik (Fiber Network)
9	PT. Gikoko Kogyo Indonesia	Pembakaran Gas dan Pembangkit Listrik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Sumur Batu Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
Tahun 2014		
1	Pemerintah Kabupaten Kota Bekasi	Pengembangan pelayanan air bersih kepada masyarakat di kedua daerah
2	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Karawang	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur Untuk Wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang
3	Kerja Sama Pembangunan Antar Wilayah Perbatasan	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di wilayah perbatasan Jabodetabekjur.
4	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang
5	Gereja Toraja Jemaat Galaxi	Perpanjangan Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Gereja Toraja Jemaat Galaxy Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
6	Yayasan Mulia Raharja	Perpanjangan Ke 4 (empat) Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Yayasan Mulia Raharja Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat
7	Ketua DKM Masjid Ar Ridho	Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan Masjid Ar-Ridho Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi
8	PT. Seni Pembangunan	Perpanjangan ke-4 Pemanfaatan Aset Dalam Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk PT. Seni Pembangunan Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur
9	Yayasan Al Qalam Citra Gran	Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan Masjid Al-Qalam Citra Gran Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi
10	Gereja Kasih Karunia Indonesia "Gekari" Filadelfia Bekasi	Perpanjangan Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Gereja Kasih Karunia Indonesia "Filadelfia" Bekasi.
11	Yayasan Nurul Firdaus Taman	Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Nurul Firdaus Kelurahan Pejuang kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
12	Gereja Batak Karo Protestan	Perpanjangan Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
13	Yayasan Bina Nurul Haq	Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk Penyewaan Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Masjid Nurul Haq Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
14	Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin Perumnas I Bekasi	Pemanfaatan Sewa Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Bawah Penguasaan Pemerinta Kota Bekasi untuk Pembangunan Masjid Jami Al-Muhajirin Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
15	Yayasan Fastabiquil Khoiraat	Perpanjangan Ke 3 (tiga) Pemanfaatan Sarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid, Taman Pendidikan Al'Quran (TPA) dan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Ma'ruf Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
16	PT. Towerindo Konvergensi	Sewa Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) di Perumahan Harapan Jaya I Jalan Mahoni I RT. 04 RW. 10 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
17	PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia	Indonesia Tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell Dengan Metode Kamufase di Kota Bekasi
18	PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk	Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell dan Fiber Optik Dengan Metode Kamufase di Kota Bekasi
19	PT. Cipta Ekasari Mandiri	Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell dan Fiber Optik Dengan Metode Kamufase di Kota Bekasi
20	PT. Iforte Solusi Infotek	Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell dan Fiber Optik Dengan Metode Kamufase di Kota Bekasi
21	PT. Quartrto Internasional	Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell Hotel dengan Jaringan Serat Optik (<i>Fiber Network</i>)
22	PT. Solu Sindo Kreasi Pratama	Sewa Tanah Fasilitas Sosial di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) di Perumahan Pondok Ungu Permai 2 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
23	PT. Mora Telematika Indonesia	Pemanfaatan Sistem Acces Point Terintegrasi Berbasis Sistem Distribusi Antena Micro Selular (<i>Base Transceiver Station Backhaul</i>) Pada Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bekasi.
24	PT Tower Capital Indonesia	Pemasangan Jaringan Penguat Sinyal Dengan <i>Sistem Indoor Building System</i> dan <i>Base Transceiver System</i> (BTS) Pada Bangunan Milik Pemerintah Kota Bekasi Yang Berlokasi di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi Jalan Jend. A. Yani Nomor 1
25	PT. Fesamas Utama Jaya Abadi	Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi Sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Hotel dan Jaringan Fiber Optik di Kota Bekasi
Tahun 2015		
1	Pemerintah Kabupaten Kota Bekasi	Pengembangan pelayanan air bersih kepada masyarakat di kedua daerah
2	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Karawang	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur Untuk Wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang
3	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang
4	PT. Metropolitan Land, Tbk	Pembangunan SMAN 18 Kota Bekasi sebagai Wujud Nyata Program Corporate Social Responsibility (CSR)
5	PT. Indo Energi Baru	Pengelolaan Minyak Goreng Bekas (Minyak Jelantah) menjadi Biodiesel di Kota Bekasi.
6	PT. Aneka Sumber Daya Energi	Revitalisasi Proyek Pertokoan Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
7	PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Bekasi.
8	PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat area Bekasi	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Bekasi.
9	PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat area Gunung Putri	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Bekasi.
10	PT. Kertamukti Persada	Revitalisasi dan Pengelolaan Pertokoan Pondokgede Menjadi Pasar Semi Induk Pondokgede Kota Bekasi
11	Yayasan Avicenna Foundation	Perpanjangan Pemanfaatan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Avicenna Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
12	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi
13	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
14	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
15	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
16	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi
17	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
18	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi
19	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
20	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medansatria Kota Bekasi
21	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
22	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi
23	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
24	Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota	Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan EKS.Mess Pemda Pemerintah Kota Bekasi Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
25	PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH Jawa Barat Dan Banten	Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bekasi Untuk Kantor Kas Layanan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Bekasi Dan Ruang Ajungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten di Bangunan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur
26	Dewan Kemakmuran (DKM) Al-Hijrah	Pemanfaatan Sarana Perumahan Dibawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Masjid Al-Hijrah Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
		Utara Kota Bekasi
27	Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Raya Al-Muhajirin	Pemanfaatan Sarana Perumahan Dibawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Masjid Raya Al-Muhajirin Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
Tahun 2016		
1	Pemerintah Kabupaten Kota Bekasi	Pengembangan pelayanan air bersih kepada masyarakat di kedua daerah
2	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Karawang	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur Untuk Wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang
3	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang
4	PT. Metropolitan Land, Tbk	Pembangunan SMAN 18 Kota Bekasi sebagai Wujud Nyata Program Corporate Social Responsibility (CSR)
5	PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jakarta Raya	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Bekasi.
6	PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat area Bekasi	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Bekasi.
7	PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat area Gunung Putri	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Bekasi.
8	PT. Kertamukti Persada	Revitalisasi dan Pengelolaan Pertokoan Pondokgede Menjadi Pasar Semi Induk Pondokgede Kota Bekasi
9	Yayasan Al-Furqon Bintang Metropol	Perpanjangan Pemanfaatan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid Al Furqon Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
10	Kantor Kementerian agama Kota Bekasi	Pinjam Pakai Lahan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bekasi
11	Yayasan At-Taqwa Duta Kranji	Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid AtTa'qwa dan Raudhatul Athfal (RA) Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
12	Gereja Pantekosta Isa Al Masih	Perpanjangan Pemanfaatan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Gereja Pantekosta Isa Al Masih Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
13	Yayasan Pendidikan Harapan Baru (YPHB)	Perpanjangan Pemanfaatan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Harapan Baru Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
14	Yayasan Al Fatah Nurul Ihsan	Pemanfaatan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Masjid Al Fatah Nurul Ihsan dan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ) - Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
15	Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus	Perpanjangan Pemanfaatan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Sekolah Dasar (SD) Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
16	Dewan Kemakmuran Masjid AlGhaniy	Perpanjangan Pemanfaatan Sewa Lahan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Masjid AlGhaniy Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

No	Nama Mitra	Ruang lingkup
17	Yayasan Al-Jihad Kranggan	Perpanjangan Yang Ke 4 (Empat) Perjanjian Pemanfaatan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi
18	PT. Seni Pembangunan	Perubahan Pemanfaatan Tanah Sarana Perumahan Kepada PT. Seni Pembangunan Seluas 1000 m ² setelah dikurang Luas 100 m ² untuk Kebutuhan Pos Keamanan Terpadu Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
19	Panitia Pembangunan Masjid Al Ahdhar	Perjanjian Pemanfaatan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Masjid Al Ahdhar Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi
20	Yayasan Cendrawasih	Perpanjangan Yang Ke 4 (Empat) Pemanfaatan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Sekolah Dasar (SD) Cendrawasih Jaya Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
21	Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur	Perjanjian Pemanfaatan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Masjid An-Nur Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi
22	Yayasan Pendidikan Islam Baiturrahman Aren Jaya	Perpanjangan Yang Ke 2 (Dua) Pemanfaatan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Masjid Masjid dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baiturrahman Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
23	Rukun Warga 10 Perumnas 2	Pemanfaatan Lahan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Tempat Usaha Rukun Warga 10 Perumnas 2 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
24	Yayasan Al-Furqon Bintang Metropol	Pemanfaatan Lahan Sarana Perumahan Di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi Untuk Di Perumahan Bintang Metropol Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
25	Dewan Kemakmuran Masjid AlMujaddid	Sewa Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid Al Mujaddid Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
26	Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam	Perpanjangan Yang Ke-2 (Dua) Sewa Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Taman anak kanak (TK) Islam Darussalam dan Sekolah Dasar (SD) Islam Darussalam Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
27	Yayasan Bani Saleh	Perpanjangan Yang Ke-2 (Dua) Sewa Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain dan Day Care Labschool Stai Bani Saleh Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
28	Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB)	Perpanjangan Yang Ke 3 (Tiga) Sewa Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat "Immanuel" di Bekasi Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
29	Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Raudhatul Muhajirin	Sewa Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid Jami' Raudhatul Muhajirin Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
30	Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas	Sewa Lahan Sarana Perumahan di Bawah Penguasaan Pemerintah Kota Bekasi untuk Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi

B. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.3.10 Perhubungan

Kota Bekasi yang dikelilingi oleh daratan, mengandalkan sistem transportasi darat sebagai sarana perhubungan dengan wilayah lain disekitarnya. Salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat Kota Bekasi adalah kereta api. Berdasarkan data BPS dalam angka tahun 2018, berikut merupakan jumlah penumpang yang menggunakan kereta api selama satu tahun di Kota Bekasi dibandingkan dengan Kota Depok dan Tangerang pada tahun 2017.

Tabel 2.18 Jumlah Penumpang yang menggunakan kereta api tahun 2017

Kota	Stasiun	Jumlah Penumpang	Jumlah Penduduk
Bekasi		20.521.911	2,7 juta jiwa
	Bekasi	15.030.291	
	Kranji	5.491.620	
Depok		31.451.695	2,2 juta jiwa
	Universitas Indonesia	3.864.949	
	Pondok Cina	4.525.113	
	Depok Baru	11.772.140	
	Depok	4.437.241	
	Citayam	6.852.252	
Tangerang		11.651.635	2,1 juta jiwa

Sumber: Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang dalam angka 2018

Selama tahun 2017, Kota Bekasi yang dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa, terdapat sekitar 20,5 juta penumpang yang menggunakan angkutan kereta api melalui stasiun-stasiun yang ada di Kota Bekasi. Jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan kota Depok dengan jumlah penduduk sekitar 2,2 juta jiwa yang mencapai 31,4 juta dengan 5 stasiun. Namun jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan kota Tangerang (dengan 2,1 juta jiwa) yang hanya mencapai 11,6 juta penumpang per tahun.

Selain angkutan kereta api, moda angkutan lainnya adalah kendaraan bermotor. Berikut merupakan perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang.

Tabel 2.19 Perbandingan Panjang Jalan dengan jumlah Kendaraan

Kota	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan
Tangerang	1.402,64	784.314
Depok	476,15	1.144.311
Bekasi	3.193,04	1.593.978

Sumber: Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Depok dalam angka 2018

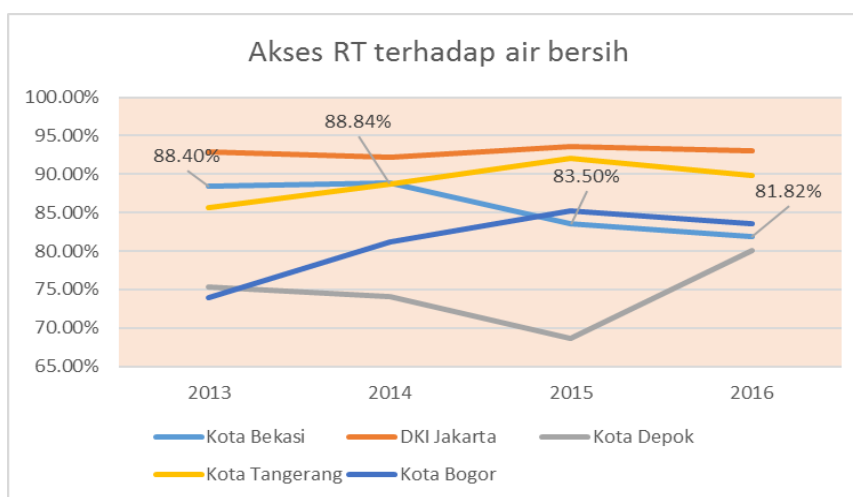
Adapun terkait jumlah penumpang yang menggunakan angkutan darat pada tahun 2016 sejumlah 801.772 orang dan pada tahun 2017 sejumlah 801.772 orang.

2.3.11 Lingkungan

Definisi daya saing sebagaimana dikemukakan Porter (1990), bahwa daya saing merupakan kemampuan suatu ekonomi yang memiliki produktivitas yang tinggi dan masyarakatnya memiliki kehidupan yang baik (*good of living*). Kehidupan masyarakat yang baik salah satu indikatornya tercermin dari, salah satunya, indikator akses terhadap air bersih dan sanitasi. Berikut merupakan gambaran akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi di Kota Bekasi dibandingkan dengan kota lain disekitarnya.

- Akses terhadap air bersih

Indikator yang mencerminkan infrastruktur pengelolaan lingkungan antara lain akses rumah tangga terhadap air bersih dan kepemilikan toilet rumah tangga pribadi yang mencerminkan sanitasi yang sehat. Berikut merupakan perbandingan akses rumah tangga terhadap air bersih di Kota Bekasi dibandingkan dengan kota di sekitarnya.



Sumber: data.worldbank.org, 2018

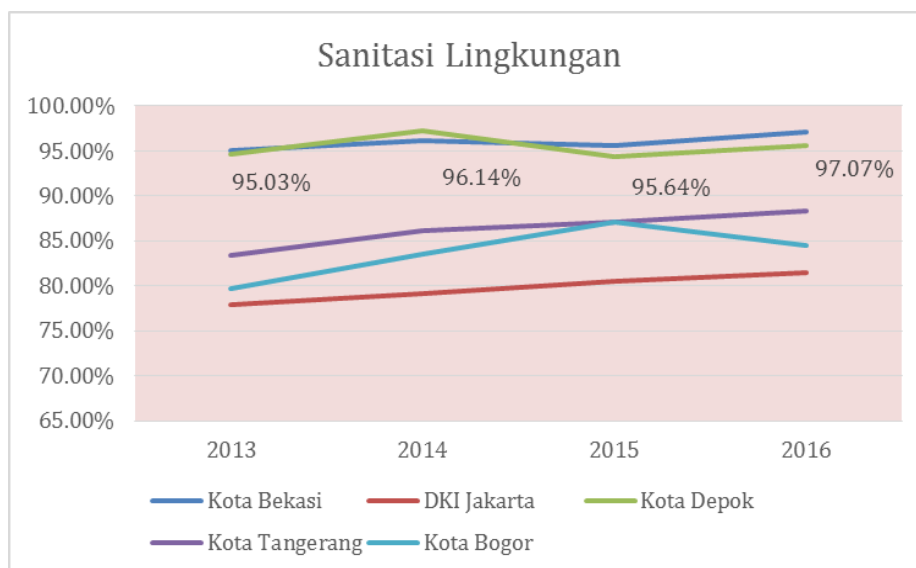
Gambar 2-40 Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih

Akses rumah tangga terhadap air bersih di Kota Bekasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya yang cenderung meningkat. Pada awal tahun 2013 akses terhadap air bersih di Kota Bekasi menempati peringkat ke-2 dengan persentase 88,40%, namun semakin lama akses terhadap air bersih semakin menurun hingga mencapai angka 81,82% di peringkat ke-4 dari kota yang dibandingkan. Bahkan jika dilihat trendnya, daerah lain seperti kota bogor dan Tangerang senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akses rumah tangga terhadap air bersih di Kota Bekasi juga lebih rendah dibandingkan di provinsi DKI Jakarta.

- Sanitasi lingkungan

Sanitation pada umumnya merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feces. Salah satu indikatornya

adalah perentase rumah tangga yang memiliki toilet pribadi sehingga tidak menggunakan toilet umum. Berikut merupakan grafik sanitasi lingkungan di Kota Bekasi.



Sumber: data.worldbank.org, 2018

Gambar 2-41 Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih

Sistem sanitasi lingkungan rumah tangga di Kota Bekasi sudah sangat baik jika dibandingkan dengan kota disekitarnya. Dari tahun 2013 hingga 2016 jumlah rumah tangga yang memiliki toilet sendiri mencapai kisaran 95%. Nilai ini seperti yang kondisi di Kota Depok, dan lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, dan Kota Tangerang.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Pendidikan

A. Sarana dan Prasarana Pendidikan

A.1 Ketersediaan Sekolah

Sekolah merupakan prasarana pendidikan utama untuk mencerdaskan bangsa. Ketersediaan prasarana pendidikan harus terus diusahakan sampai memenuhi ketentuan jumlah minimum agar rasio antara peserta didik dengan sarana dan prasarana sekolah mencapai nilai ideal bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

- **Rasio ketersediaan Sekolah pendidikan Dasar (SD/MI/ SMP/MTS)**

Pendidikan merupakan salah satu sarana prasarana yang harus dimiliki setiap daerah untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dalam memenuhi program belajar 9 tahun maka perlu disediakan sarana pendidikan pada tingkat dasar. Pendidikan dasar mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau

bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pada tahun 2017 maka jumlah SD sebesar 690 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 135 sekolah, SMP sebanyak 271 sekolah, serta MTs sebanyak 76 sekolah.

Perkembangan rasio ketersediaan sekolah untuk 10.000 jumlah penduduk usia sekolah tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

- Pendidikan dasar tingkat SD/MI mengalami penurunan dari 35,18 pada tahun 2015 menjadi 28,98 pada tahun 2017
- Pendidikan dasar tingkat SMP/MTS mengalami penurunan dari 28,89 pada tahun 2015 menjadi 22,15 pada tahun 2017.

Hal ini karena terjadi pertambahan penduduk usia sekolah tidak diikuti dengan pertambahan sekolah, namun demikian angka tersebut masih di atas standar yaitu 52 sekolah per 10.000 penduduk.

Secara lebih rinci data jumlah sekolah dan jumlah penduduk umur sekolah diperlihatkan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Rasio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar Kota Bekasi Tahun 2015-2017

Tahun	SD/MI			SMP/MTS		
	Sekolah	Penduduk (7-12 Th)	Rasio sekolah*)	Sekolah	Penduduk (13-15 Th)	Rasio sekolah*)
2017	810	279.505	29	347	156.669	22
2016	823	279.520	29	339	156.680	22
2015	812	230.786	35	325	112.478	29

Catatan: Rasio (Jumlah sekolah/Jumlah Penduduk) x 10.000

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018

• Rasio ketersediaan Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA)

Rasio ketersediaan sekolah tingkat menengah terhadap penduduk usia 16-19 tahun selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang makin kecil, dari 10 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 6 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2017. Secara lengkap terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Rasio Jumlah Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Kota Bekasi Tahun 2015-2017

Tahun	SMU/SMK/MA		
	Sekolah	Penduduk (16-19 Th)	Rasio sekolah*)
2017	142	110.033	6
2016	103	110.033	9
2015	92	96.173	10

Catatan: Rasio (jumlah sekolah/Jumlah Penduduk) x 10.000

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018

- **Rasio murid perkelas Sekolah Dasar (SD/MI/SMP/MTS)**

Rasio murid perkelas pendidikan dasar Kota Bekasi tahun 2016-2017 menunjukkan perkembangan baik dimana untuk tingkat SD/MI dari 42 murid/kelas menjadi 39 murid/kelas, sedangkan untuk tingkat SMP/MTS dari 40 murid/kelas menjadi 26 murid/kelas. Secara rinci terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Rasio Jumlah Murid terhadap Kelas Pendidikan Dasar (SD/MI; SMP/MTS) Kota Bekasi Tahun 2016-2017

Tahun	SD/MI			SMP/MTS		
	Kelas	Murid	Murid/Kelas	Kelas	Murid	Murid/Kelas
2017	6.512	255.720	39	3.840	99.416	26
2016	6.070	256.405	42	2.336	94.574	40

Sumber: BPS (2018)

A.2 Ketersediaan tenaga pengajar

Tenaga pengajar atau guru adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pendidikan, tanpa guru pendidikan tidak akan berjalan. Oleh karena itu ketersediaan guru sampai mencapai tingkat rasio tertentu antara jumlah murid dan jumlah guru menjadi sangat penting untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

- **Rasio guru murid Sekolah Dasar (SD/MI/SMP/MTS)**

Rasio guru terhadap murid di Kota Bekasi cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2013 hingga tahun 2016. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan rasio jumlah guru terhadap murid untuk tingkat pendidikan dasar seperti SD/Mi dan SMP/MTs. Untuk tingkat SD/MI di Kota Bekasi maka rasio jumlah guru terhadap murid pada tahun 2013 berkisar 1:16 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sekitar 1:23. Sedangkan rasio guru terhadap murid untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 berkisar 1:19 dan menurun pada 1:20 pada tahun 2017.

Berikut merupakan tabel rasio jumlah guru terhadap murid pendidikan dasar Kota Bekasi tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.23 Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Bekasi 2013-2017

Tahun	SD/MI			SMP/MTS		
	Guru	Murid	Murid/Guru	Guru	Murid	Murid/Guru
2017	12.191	283.209	23	6.040	119.227	20
2016	12.371	269.863	22	5.967	175.057	29
2015	10.218	281.909	28	5.919	114.458	19
2014	13.100	278.386	21	6.609	112.004	17
2013	12.881	207.427	16	5.644	106.136	19

Sumber: BPS (2018)

- **Rasio guru murid Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA)**

Perkembangan rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dari tahun 2013-2017 menunjukkan dinamika yang cenderung lebih baik dari 1 guru untuk 21 murid pada tahun 2013 menjadi 1 guru untuk 16 murid pada tahun 2017. Secara lengkap perkembangan rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Bekasi 2013-2017

Tahun	SMU/SMK/MA		
	Guru	Murid	Murid/Guru
2017	7.158	111.119	16
2016	7.235	110.441	15
2015	7.090	96.429	14
2014	4.964	100.978	20
2013	4.520	97.039	21

Sumber: BPS (2018)

B. Indikator Capaian Pelayanan pendidikan

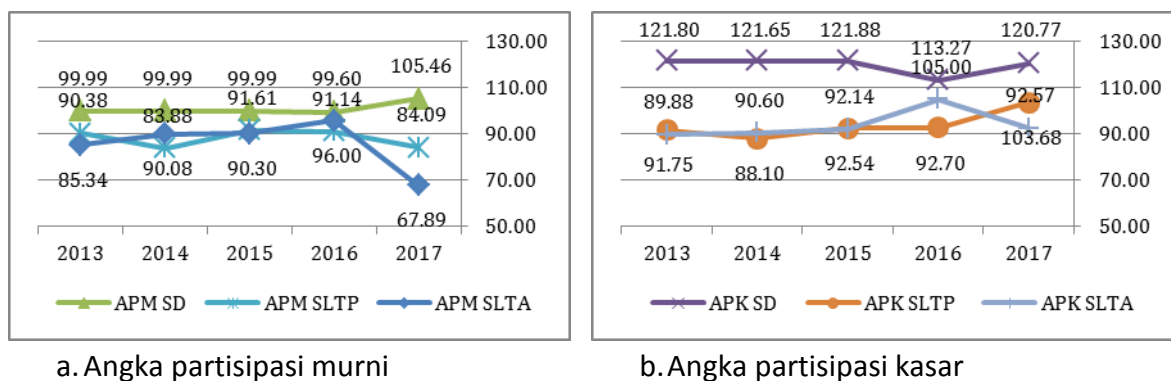
B.1 Angka Partisipasi Murni dan Kasar

Angka Partisipasi Murni (*Net Enrollment Ratio*) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Sedangkan angka partisipasi kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tabel berikut ini menunjukkan tren capaian APM dan APK Kota Bekasi dari tahun 2013-2017.

Tabel 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar 2013-2017

Tahun	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
	APM	APK	APM	APK	APM	APK
2017	105,46	120,77	84,09	103,68	67,89	92,57
2016	99,60	113,27	91,14	92,70	96,00	105,00
2015	99,99	121,88	91,61	92,54	90,30	92,14
2014	99,99	121,65	83,88	88,10	90,08	90,60
2013	99,99	121,80	90,38	91,75	85,34	89,88

Sumber: BPS Kota Bekasi 2018



Gambar 2-42 Grafik perkembangan angka partisipasi murni (a) dan angka partisipasi kasar (b) Kota Bekasi Tahun 2013 – 2017 (BPS 2018)

Dari Gambar 2-42 di atas terlihat bahwa secara umum baik APM maupun APK untuk semua tingkat pendidikan terdapat kenaikan pada tahun 2013 – 2015. Dari data terlihat bahwa partisipasi anak usia SD hampir semua sekolah (APM 100%), namun demikian terlihat selama 5 tahun terakhir yang masuk/bersekolah di SD usianya bukan usia SD dengan persentase hampir 20% setiap tahunnya. Sedangkan pada tingkatan pendidikan yang lebih tinggi terlihat untuk jenjang SLTA banyak usia SLTA yang tidak bersekolah dan kecenderungan mengalami peningkatan hal ini ditandai dengan menurunnya tingkat APM SLTA khususnya pada tahun 2017.

Kenaikan angka partisipasi disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya terutama usia sekolah dan adanya penduduk usia sekolah dari luar Kota Bekasi bersekolah di Kota Bekasi, serta didirikannya Unit Sekolah Baru (USB) untuk tingkat SMP/Mts dan 4 unit untuk tingkat SMA/SMK/MA di Kota Bekasi.

B.2 Angka Partisipasi Murni

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, APM Kota Bekasi pada tahun 2015 untuk semua jenjang pendidikan lebih tinggi.

Tabel 2.15A Capaian APM Menurut Jenjang Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, 2015

No	Keterangan	Jenjang			
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/ SMK	PT
1	Kota Bekasi	94,93	80,66	80,98	33,43
2	Jawa Barat	97,68	79,55	56,73	15,78

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (diolah)

Pada jenjang SD Sederajat, APM Kota Bekasi berada pada angka 94,93% artinya masih ada 5,07% anak usia 7-12 tahun di Kota Bekasi yang masih belum bersekolah, angka ini juga masih lebih rendah dibandingkan dengan APM Jawa Barat yang sudah mencapai angka 97,68%. Berikut ini perkembangan nilai APM SD sederajat pada tahun 2011-2015.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2-43 Perkembangan APM SD Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat

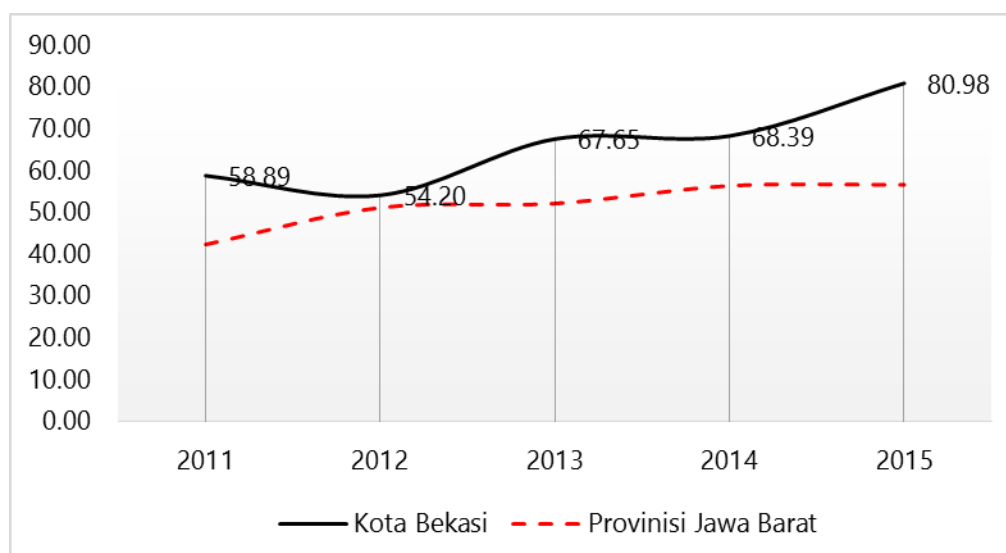
Pada indikator APM SD, nilai indikator Kota Bekasi masih berada di bawah nilai APM SD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2015. Pada tahun 2015, 5,07 anak usia 7-12 tahun di Kota Bekasi masih belum bersekolah. Hal sedikit berbeda terlihat pada jenjang SMP sederajat dimana nilai capaian Kota Bekasi sudah berada di atas nilai capaian Jawa Barat. Pada tahun 2015, APM SMP sederajat Kota Bekasi adalah 80,66% sedangkan Provinsi Jawa Barat masih berada pada angka 79,55%. Berikut ini perkembangan APM jenjang SMP sederajat Kota Bekasi dan Jawa Barat tahun 2011-2015.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2-44 Perkembangan APM SMP Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat

Disparitas APM SMP sederajat antara Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat relatif tidak terlalu besar, posisi Kota Bekasi selalu berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2011-2015. Pada jenjang pendidikan menengah, disparitas antara nilai capaian APM Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat menunjukkan posisi yang cukup besar. Pada tahun 2015, APM SMA Kota Bekasi mencapai 80,93% sedangkan Provinsi Jawa Barat baru mencapai 56,73%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2-45 Perkembangan APM SMA Kota Bekasi dan Provinsi Jabar Tahun 2011-2015

Posisi relatif capaian Kota Bekasi pada tahun 2011-2015 selalu berada di atas nilai capaian APM SM Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi murni pendidikan menengah di Kota Bekasi sudah jauh mengungguli nilai rata-rata provinsi.

B.3 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (*Gross Enrollment Ratio*) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah dengan jenjang yang diikuti misalnya pada jenjang SD tidak harus berusia 7-12 tahun, sehingga angka APK bisa melebihi 100%.

Tabel 2.26 APK Menurut Jenjang Kota Bekasi dan Jawa Barat Tahun 2015

No	Wilayah	Jenjang			
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/Paket C	PT
1	Kota Bekasi	106,11	94,51	107,34	35,84
2	Jawa Barat	109,42	90,07	70,23	17,76

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (diolah)

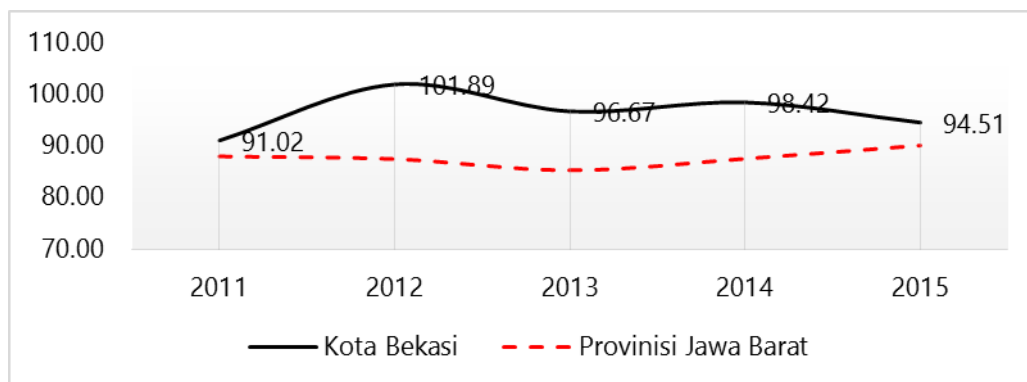
APK Kota Bekasi pada setiap jenjang tahun 2015 sudah jauh melampaui nilai APK Provinsi Jawa Barat kecuali pada jenjang SD sederajat. Pada jenjang SD sederajat, APK Kota Bekasi sebesar 106,11% angka ini lebih rendah dibandingkan dengan APK SD Provinsi Jawa Barat yaitu 109,42%, meskipun demikian nilai ini sudah berhasil melampaui target MDGs 2015 sebesar 100%. Pada kurun waktu 2011-2015, nilai APK jenjang SD sederajat Kota Bekasi menunjukkan tren yang menanjak, meskipun demikian peningkatan nilai APK jenjang SD masih di bawah perkembangan APK SD sederajat pada tingkat Provinsi Jawa Barat. Berikut ini perkembangan APK SD sederajat tahun 2011-2015.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2-46 Perkembangan APK SD Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015

Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai APK SD sederajat Kota Bekasi pada tahun 2014 dan 2015 berada di bawah nilai capaian provinsi dengan disparitas capaian yang meningkat. Pada jenjang SMP sederajat, posisi Kota Bekasi pada tahun 2011-2015 sudah berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian secara grafis terlihat bahwa ada penurunan nilai APK pada tahun 2012-2015.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2-47 Perkembangan APK SMP Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015

Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA sederajat Kota Bekasi tahun 2015 sudah berada di atas angka 100% sangat jauh bila dibandingkan dengan APK SMA sederajat Provinsi Jawa Barat yang masih berada pada angka 70,23%. Berikut ini perkembangan nilai APK SMA sederajat tahun 2011-2015.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2-48 Perkembangan APK SMA Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015

B.4 Angka Harapan Lama Sekolah/ *Expected Years School (EYS)*

Angka harapan lama sekolah/ *expected years school (EYS)* adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini merupakan indikator pemberntuk indeks pembangunan manusia (IPM) menggantikan indikator angka melek huruf pada perhitungan metode baru.

Tabel 2.27 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Bekasi	12,43	13,20	13,28	13,36	13,47
2	Jawa Barat	11,24	11,81	12,08	12,15	12,30

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2017

Nilai EYS Kota Bekasi pada kurun waktu 2012-2016 sudah berada di atas nilai capaian EYS Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2016, EYS Kota Bekasi berada pada angka 13,47 tahun artinya angka harapan sekolah penduduk Kota Bekasi sudah berada pada jenjang pendidikan tinggi sedangkan Jawa Barat dengan 12,30 tahun masih berada pada jenjang pendidikan menengah.

B.5 Angka Rata-Rata Lama Sekolah / *Mean Years School (MYS)*

Angka rata-rata lama sekolah yaitu jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). MYS masuk dalam indikator sub komposit IPM dalam dimensi pengetahuan bersama dengan indikator angka harapan lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kota Bekasi pada kurun waktu 2012-2016 terus menunjukkan peningkatan dan secara posisi sudah melampaui nilai capaian Provinsi Jawa Barat. Berikut ini nilai capaian MYS Kota Bekasi dan Jawa Barat pada tahun 2012-2016.

**Tabel 2.28 Perkembangan Nilai MYS Kota Bekasi dan Jawa Barat
Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kota Bekasi	10,46	10,49	10,55	10,71	10,78
2	Jawa Barat	7,52	7,58	7,71	7,86	7,95

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2017

B.6 Mutu Pendidikan

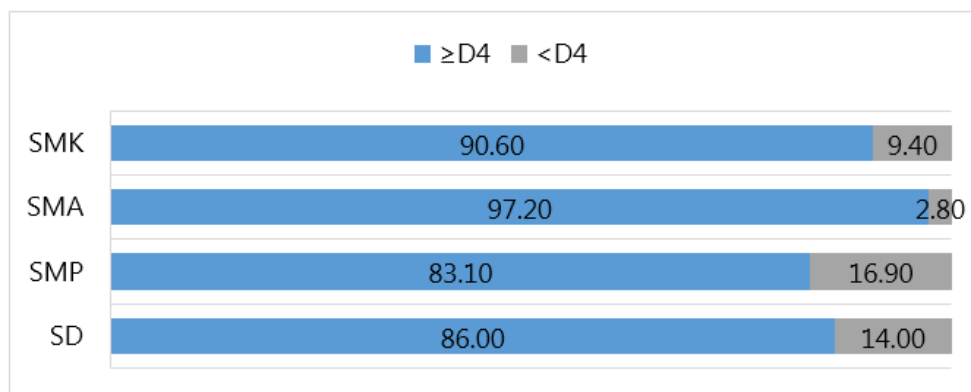
Dalam pembangunan pendidikan selain perluasan akses, juga harus mulai di dorong untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari mutu pendidik melalui hasil uji kompetensi dan kualifikasi pendidikan selain mutu sekolah yang tergambar dari hasil akreditasi yang diperoleh. Berikut ini kondisi akreditasi sekolah di Kota Bekasi tahun 2016.

Tabel 2.29 Kondisi Akreditasi Sekolah di Kota Bekasi Tahun 2016

No	Jenjang	Akreditasi			
		A	B	C	Belum
1	SD	43,20	5,90	0,00	50,90
2	SMP	49,60	12,40	0,40	37,60
3	SMA	24,50	6,10	1,00	68,40
4	SMK	76,60	23,40	0,00	0,00

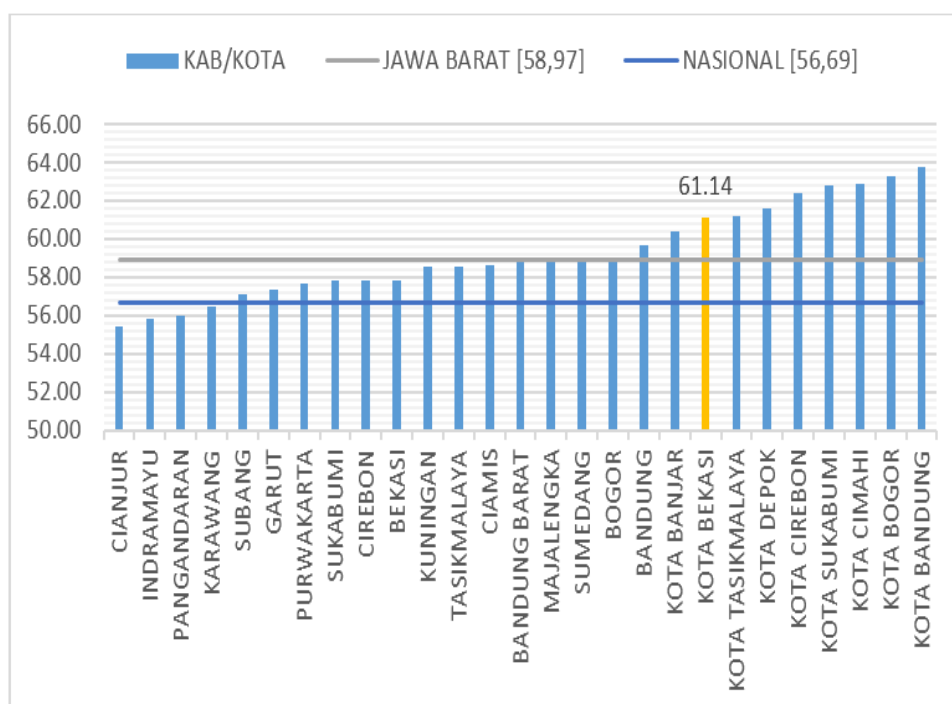
Sumber: Neraca Pendidikan Kemendikbud (diolah)

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui peningkatan mutu sekolah sehingga proses pembelajaran diharapkan dapat lebih berkualitas. Oleh karena itu, idealnya sekolah-sekolah yang ada sudah terakreditasi minimal B bahkan A. Indikator dalam renstra kemendikbud mendorong agar akreditasi sekolah minimal terakreditasi B. Pada tabel di atas terlihat bahwa masih banyak sekolah di Kota Bekasi yang masih terakreditasi C bahkan masih ada sekolah yang belum terakreditasi. Pada jenjang SD, hanya 49,10% sekolah yang sudah terakreditasi minimal B sedangkan sebagian besar (50,9%) masih belum terakreditasi. Pada jenjang SMP, baru 62% sekolah yang minimal terakreditasi B sedangkan 38% sekolah belum terakreditasi. Kondisi yang kurang baik ditunjukan jenjang SMA, hanya 30,60% SMA di Kota Bekasi yang terakreditasi minimal B sedangkan 69,40% lainnya masih terakreditasi C dan belum terakreditasi. Selain mutu sekolah, agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan maka mutu tenaga pendidik (guru) harus terus dikembangkan. Guru sebagai ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan siswa harus memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi akan dapat diperoleh melalui pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang mumpuni. Berikut ini kualifikasi pendidikan di Kota Bekasi pada tahun 2016 menurut jenjang.



Gambar 2-49 Proporsi Kualifikasi Guru Kota Bekasi 2016 (Ditjen Dikbud 2017)

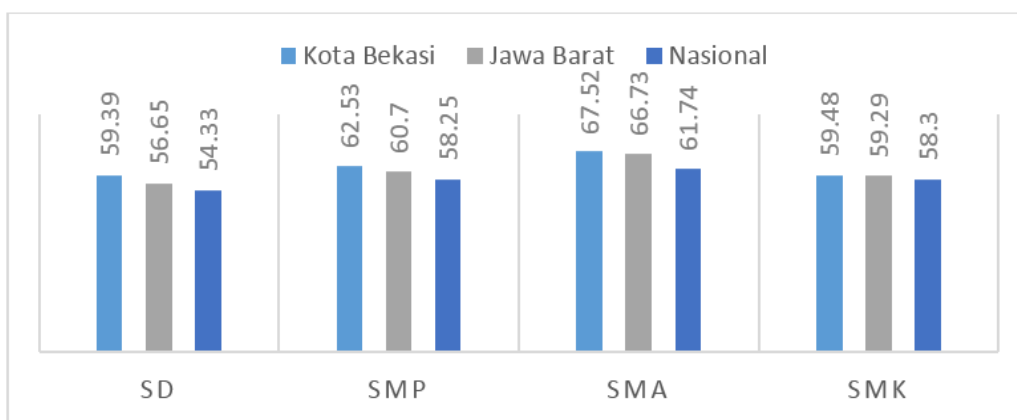
Kualifikasi pendidikan guru di Kota Bekasi menunjukkan kondisi yang cukup baik dimana mayoritas guru sudah memiliki kualifikasi pendidikan $\geq D4$ sesuai dengan standar pelayanan minimal, meskipun belum seluruhnya. Pada jenjang SMP dan SD persentase guru yang kualifikasi pendidikannya $< D4$ masih di atas angka 10%. Perlu adanya kajian khusus apakah guru yang berkualifikasi pendidikan, D4 tersebut guru senior yang sebentar lagi pensiun atau guru yang masih relatif muda. Guru yang relatif muda bisa ditingkatkan pendidikannya melalui tugas belajar sehingga berkualifikasi pendidikan minimal.



Gambar 2-50 Rata-Rata UKG Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 (Ditjen Dikbud, 2017)

Indikator lain yang menunjukkan mutu tenaga pendidik adalah hasil uji kompetensi yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015, rata-rata UKG Kota Bekasi berada pada urutan ke-8 tertinggi dengan 61,14 angka ini sudah berada

di atas rata-rata UKG Provinsi (58,97) dan Nasional (56,6). Berikut ini rata-rata uji kompetensi guru Kota Bekasi menurut jenjang pendidikan di Kota Bekasi pada tahun 2015.



Gambar 2-51 Rata-Rata Hasil UKG Kota Bekasi Menurut Jenjang Tahun 2015
(Ditjen Dikbud, 2017)

Gambar di atas menunjukkan rata-rata hasil UKG Kota Bekasi menurut jenjang pada tahun 2015. Dari setiap jenjang tidak ada hasil UKG yang sudah mencapai angka 70, nilai UKG paling tinggi hanya 67,52 pada jenjang SMA sedangkan yang paling rendah di jenjang SD dengan 59,39. Berdasarkan hasil evaluasi, kompetensi guru yang harus mendapatkan perhatian adalah kompetensi pedagogik bukan profesional. Seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang mumpuni sehingga kompetensi profesional yang dimiliki dapat ditransfer kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran.

2.4.2 Kesehatan

A. Sarana dan Prasarana Kesehatan

A.1 Sarana Kesehatan

Kota Bekasi dengan jumlah penduduk yang cukup besar tentu memerlukan pelayanan di bidang kesehatan yang memadai. Dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, pemerintah Kota Bekasi telah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Di Kota Bekasi terdapat 42 rumah sakit, 39 puskesmas, dan 8 puskesmas pembantu. Dari 47 puskesmas/puskesmas pembantu, hanya 5 puskesmas yang sudah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap meskipun jumlahnya sangat terbatas, seperti di Puskesmas Pondok Gede, Pejuang, Karang Kitri, Bojong Rawalumbu dan Bantar Gebang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30 Sarana Kesehatan Skala Kota Bekasi 2017

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Pondok Gede	2	3	1
Jatisampurna	3	2	
Pondok Melati	1	2	2
Jatiasih	1	2	
Bantar Gebang	1	2	2
Mustika Jaya	3	3	1
Bekasi Timur	10	4	
Rawalumbu	4	3	1
Bekasi Selatan	8	5	
Bekasi Barat	1	5	
Medan Satria	5	2	
Bekasi Utara	3	6	1
Kota Bekasi	42	39	8
Tahun 2016	38	39	16
Tahun 2015	38	31	24
Tahun 2014	37	31	24

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 2.31 Sarana Kesehatan Skala Kecamatan di Kota Bekasi

No.	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Puskesmas	31	31	31	39	39
2	Puskesmas Pembantu	24	24	24	16	8
3	Gudang Obat	1	1	1	1	1
4	Posyandu	1.538	1.541	1.542	1.542	1.542
5	RumahSakit	35	37	38	38	42
6	Balai Pengobatan/ Klinik dan Rumah Bersalin	449	451	386	408	408
7	Apotek	457	558	553	503	503

Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah sarana kesehatan skala kecamatan di Kota Bekasi, ada beberapa sarana kesehatan yang meningkat dan juga ada sarana kesehatan yang mengalami penurunan. Beberapa sarana kesehatan yang mengalami penurunan adalah Balai Pengobatan/Klinik dan Rumah Bersalin yang turun jumlahnya pada tahun 2015 dan kembali meningkat pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan sarana kesehatan lainnya yang mengalami penurunan adalah Apotek yang jumlahnya semakin menurun di tahun 2016 dan 2017. Hal tersebut juga dialami oleh Puskesmas Pembantu yang mengalami penurunan di tahun 2017.

A.2 Jaminan Kesehatan

Pemerintah Kota Bekasi sejak RPJMD 2013-2018 telah menyediakan layanan kartu sehat berbasis NIK yang mampu menjangkau pelayanan untuk seluruh warga Kota Bekasi yang memiliki KTP. Dengan adanya kartu Sehat Bekasi yang diperkuat dengan adanya BPJS maka dari sisi jaminan pelayanan kesehatan warga di Kota Bekasi termasuk tinggi. Setelah melewati tahun ke empat dan setahun lagi mencapai target *Universal Health Coverage* pada tahun 2019. Penyelenggaraan BPJS di Kota Bekasi per Mei 2017 telah menjangkau kepesertaan sebanyak 1.370.173 jiwa atau sekitar 50% dari jumlah total penduduk Kota Bekasi. Meliputi kepesertaan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah, perusahaan atau pekerja penerima upah dan peserta mandiri yaitu pekerja bukan penerima upah.

Data yang diperoleh dari BPJS terdapat Rumah Sakit swasta yang bekerjasama sejumlah 32 Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan, 110 fasilitas kesehatan dasar (primer) atau klinik pratama serta 3 optik dan 32 apotik di wilayah Kota Bekasi sudah bekerjasama dengan BPJS. Termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan milik pemerintah, yang dapat melayani warga dengan kepesertaan BPJS secara berjenjang dan komprehensif. Selain itu portabilitas dapat ke Rumah Sakit lain di seluruh Indonesia sebagai jejaring dengan menyesuaikan kewilayahan, dan berlaku universal saat terjadi kegawat darurat ataupun keadaan khusus.

Artinya Program JKN tersisa setahun lagi untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat kota dengan jaminan kesehatannya dicover oleh BPJS. Untuk itu peran masing masing Pemerintah Daerah untuk dapat mensosialisasikan dan mengajak warganya turut mensukseskan program Nasional berupa mendaftarkan semua warganya untuk menjadi peserta BPJS dalam bentuk bantuan atau subsidi premi dari Pemerintah bagi warga yang miskin melalui program JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta semua warga lainnya untuk secara mandiri membayarkan iuran atau premi kesehatan sebagai bentuk gotong royong sesuai Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dari data yang terangkum di Kota Bekasi terdapat sekitar 400.000 penduduk terdaftar JKN KIS sebagai kelompok masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan dibiayai melalui APBN, dan 12.833 dibiayai melalui APBD.

Dalam pelaksanaannya dari pelaporan masyarakat yang masuk ke Pemerintah Daerah Kota Bekasi, masih banyaknya warga yang kesulitan akses terhadap layanan intensif, untuk itu harus segera mendapat penanganan. Adapula dengan antrian yang panjang saat memerlukan tindakan untuk penanganan kasus khusus ke Rumah Sakit rujukan sekunder dan tertier. Hal itu dirasakan belum maksimal dalam aksesibilitas dan kualitas layanan masih kurang. Portabilitas untuk dapat mengakses layanan dari masyarakat ke Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit seringkali melibatkan langsung warga untuk mencari akses sendiri melalui portal informasi. Automatisasi rujukan belum berjalan dengan baik, walaupun sistem informasi telah disiapkan. Terjadinya miskomunikasi disebabkan karena edukasi kepada peserta masih rendah tentang hak dan kewajiban peserta dan provider, dan masih seringnya keluhan warga tentang pembatasan layanan berdasarkan kuota di beberapa rumah Sakit, sehingga masyarakat masih dimintakan iuran biaya.

Keluhan banyak juga dari Rumah Sakit (sebagai provider) tentang masih rendahnya tarif jasa layanan berdasarkan INA CBGs di Rumah Sakit dan bagi fasilitas kesehatan primer yang pembayarannya kapitasinya selama 4 tahun belum ada kenaikan dan dirasakan masih kurang, termasuk ketersediaan obat-obat essensial yg terbatas khususnya obat generik, dan obat yang masuk dalam formularium obat BPJS.

Sebagai tanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana Sumber Daya Manusia (SDM) terutama regulasi untuk mengatasi aksesibilitas , beberapa telah dilakukan dan sedang dilakukan untuk solusi diantaranya:

1. Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas layanan RSUD;
2. Peningkatan status Puskesmas rawat inap menjadi type D, serta Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas. Akan tetapi ini semua masih perlu waktu dan effort yang lebih, upaya percepatan untuk dapat beroperasi. Sedangkan kesiapan layanan kesehatan bagi warga sebagai hal yang tak bisa ditunda.
3. Memudahkan akses masyarakat ke layanan kesehatan khususnya layanan Rumah Sakit yang selama ini BPJS masih ada kendala aksibilitas pada kasus kasus kegawatan yang memerlukan respon penanganan lebih dan sangat cepat, termasuk rujukan transportasi dari rumah warga yang mengalami kegawatan medik ke fasilitas kesehatan.

Belum Adanya jaminan secara penuh dari BPJS terhadap semua akses kegawat-daruratan tersebut menjadikan suatu keprihatinan yang mendalam sehingga perlu dipikirkan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

Kartu Sehat Berbasis NIK (KS NIK) sebagai program yang baru dilaunching oleh WaliKota Bekasi DR. Rahmat Effendi pada tahun 2017 ini adalah pengembangan dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang selama beberapa tahun sebelumnya dicover pembiayaan APBD melalui program Surat Keterangan Tak Mampu (SKTM) bagi warga yang tak mampu dan rentan miskin karena penyakitnya.

Kartu Sehat berbasis NIK sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 27.A tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah bagi Keluarga tidak mampu berbasis kartu keluarga dan nomor induk kependudukan (NIK), Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 440/Kep.582.a-Dinkes/XII/2016 tentang Satuan Pelaksana dan Tim Pengendali Pelaksanaan Pelayanan Jamkesda bagi keluarga Tidak Mampu berbasis KK dan NIK di Kota Bekasi, Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 460/Kep.346.A-Dinsos/VII/2017 tentang Kepesertaan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Bekasi, dengan tujuan untuk memudahkan, memperpendek alur pelayanan, dan lebih khusus adanya kepastian akan layanan yang dibutuhkan, sebagai jaminan bagi warga oleh pemerintah Daerah.

Strateginya dengan mengembangkan kerjasama lebih luas, dari 33 Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS menjadi 42 Rumah Sakit khususnya dari 2 Rumah Sakit Type B yang bekerja sama dengan BPJS menjadi 5 Rumah Sakit, sebagai fasilitas yang dapat melayani kegawatan dan layanan intensif. Jika selama ini masih ditemukan

beberapa kendala untuk dapat dilayani di RS swasta, saat ini pemegang Kartu Sehat sudah tidak dibedakan dalam hal aksesibilitas, di lapangan berdasarkan pantauan lebih mudah dibanding pemegang kartu BPJS. Adapun jenis pelayanan kesehatan yang didapat oleh peserta jaminan kesehatan daerah, antara lain Pelayanan rawat jalan dokter spesialis, Pelayanan ambulance, Pelayanan rawat inap kelas 3, Pelayanan intensif seperti pelayanan IGD, ICU, PICU, NICU, dan Hemodialisa.

Dengan berbasis NIK, menjamin bagi semua warga Kota tanpa kecuali untuk dapat dilayani oleh Rumah Sakit yang bekerja sama baik di Dalam wilayah Kota Bekasi maupun di 20 Rumah Sakit sekitar di luar Kota Bekasi serta mengeliminir penyalahgunaan warga dari luar Kota Bekasi sehingga pemanfaatannya bisa maksimal, dengan jaminan tanpa Batasan jenis penyakit termasuk penyakit katastropik yaitu penyakit yang mengancam jiwa, perlu penanganan komprehensif dan berbiaya tinggi. Dengan sistem yang dimiliki berbasis NIK juga data yang dibutuhkan juga dapat diperoleh secara efektif untuk menilai atau mengevaluasi akuntabilitas program KS NIK oleh Satuan Perangkat Daerah Terkait selama setahun berjalan dan selanjutnya diperbaiki.

B. Indikator Kinerja Layanan Kesehatan

B.1 Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)*

Angka kematian bayi merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orangtua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Jumlah kematian bayi pada tahun 2016 adalah sebesar 48 kasus, lebih sedikit dibandingkan dengan kasus di tahun 2015 sebesar 76 meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 52 kasus.

Tabel 2.32 Jumlah Kematian Bayi Kota Bekasi Tahun 2014 - 2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Kematian Bayi	47	76	48	52
Kematian Balita	47	81	50	53
Total	94	157	98	105

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2015, 2016, 2017

Selanjutnya dapat disajikan indikator yang lebih rinci berkaitan dengan kesehatan bayi maupun Balita. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa AKB dari tahun 2013-2017 berada di sekitar 1, hanya di tahun 2015 sedikit melonjak di sekitar 1,5 yang berarti bahwa angka kematian bayi (AKB) Kota Bekasi adalah 1 di antara 1000 kelahiran hidup, yaitu terjadi kasus kematian bayi rata-rata per tahun 48 orang dari jumlah bayi lahir rata-rata per tahun sekitar 46 ribu orang. Pola dan besaran AKB ini juga diikuti oleh angka kematian balita, jumlah kematian balita per 1000 kelahiran hidup, yaitu di sekitar angka 1, sedikit meningkat di sekitar 1,6 pada tahun 2015. Dengan rendahnya AKB tersebut menyebabkan angka keberlangsungan hidup bayi (AKHB) menjadi besar di sekitar 99,9% artinya setiap bayi lahir di Kota Bekasi akan mempunyai probabilitas hidup sampai usia 1 tahun sebesar 99,9%.

Secara lebih rinci dapat dilihat bahwa kematian bayi tersebut sebagian besar terjadi pada saat bayi berumur sampai satu bulan (28 hari), yang sering disebut sebagai angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal, yaitu banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh factor-factor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Tabel 2.33 Beberapa Indikator Tentang Kematian Bayi dan Balita

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1,039	1,001	1,546	1,023	1,105
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu (Orang)	48	47	76	48	52
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Orang)	46.180	46.961	49.168	46.919	47.065
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	0,9990	0,9990	0,9985	0,9990	0,9989
Angka Kematian Bayi (AKB)/ Infant Mortality Rate (IMR)	1,039	1,001	1,546	1,023	1,105
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu (Orang)	48	47	76	48	52
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Orang)	46.180	46.961	49.168	46.919	47.065
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,061	1,001	1,647	1,066	1,126
Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu.	49	47	81	50	53
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	46.180	46.961	49.168	46.919	47.065
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	-	0,8731	1,3830	0,7673	1,0836
Jumlah Kematian Neonatal satu tahun tertentu (Orang)		41	68	36	51
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Orang)	46.180	46.961	49.168	46.919	47.065

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat bahwa data tahun 2013 untuk menghitung Angka Kematian Neonatal (AKN) masih bercampur dengan AKB, sehingga AKN baru bisa disajikan sejak tahun 2014. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai AKN mendekati AKB, artinya sebagian besar kematian bayi terjadi pada 1 bulan pertama sejak dilahirkan.

Tahun 2014 tercatat dari 47 bayi berumur kurang dari 1 tahun/ meninggal sebelum ulang tahun pertama, 41 bayi di antaranya meninggal sebelum berumur 1 bulan. Tahun 2015 68 bayi dari 76 bayi meninggal sebelum berumur 1 bulan, demikian juga untuk tahun 2016 (36 dari 48 bayi) dan tahun 2017 (51 dari 52 bayi).

Rendahnya angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita, dan angka kematian neonatal tidak terlepas dari upaya peningkatan kesehatan bayi, anak, ibu hamil, dan wanita usia subur. Tabel di atas menggambarkan seluruh kelurahan (kecuali tahun 2017) telah tercakup dalam *Universal Child Immunization* (UCI). UCI adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur, dan anak usia sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosisi BCG, 3 dosisi DPT, 4 dosisi polio, 4 dosisi hepatitis B, 1 dosisi campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosisi TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosisi DT, 1 dosisi campak, dan 2 dosisi TT.

Tabel 2.34 Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Bayi dan Balita

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	100	100	100	87,5
Jumlah Kelurahan UCI	56	56	56	56	49
Jumlah Seluruh Kelurahan	56	56	56	56	56
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	92	90	93,5	94	91
Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun (Orang)	47.581	48.138	48.561	48.749	47.462
Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama (Orang)	51.859	53.261	51.931	51.794	52.291
Cakupan balita pneumonia yg ditangani (%)	30,5	21,2	25,0	19,3	18,1
Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun (Orang)	6.408	5.650	6.352	5.033	4.561
Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Orang)	21.008	26.630	25.400	26.099	25.189
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yg tepat (%)	100	100	100	100	100
Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun (Orang)	2	9	5	13	14
Jumlah penderita positif dalam 1 th (Orang)	2	9	5	13	14
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani (Kasus)	1.388	1.510	1.886	1.504	2.450
Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada (Kasus)	1.388	1.510	1.886	1.504	2.450
Cakupan kunjungan bayi (%)	82,4	86,0	88,8	94,1	97,2
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Kunjungan)	38.061	40.375	43.650	44.147	45.747
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama (Orang)	46.180	46.961	49.168	46.919	47.065

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan pelayanan anak balita (%)	24,7	31,2	31,2	46,7	46,9
Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu (Orang)	65.758	66.567	80.988	92.248	93.592
Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama (Orang)	266.525	213.041	259.658	197.678	199.604

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Indikator lainnya, menunjukkan tentang persentase bayi yang diimunisasi (campak), penanganan balita penderita pneumonia, cakupan layanan bayi dan balita, semuanya menunjukkan angka yang sangat baik, hanya ada beberapa yang harus ditingkatkan, seperti cakupan pelayanan anak balita.

B2. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Angka Kematian Ibu merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya angka kematian ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu. Selama kurun waktu 2012-2017, angka kematian ibu di Kota Bekasi cenderung mengalami penurunan meskipun masih terdapat sedikit peningkatan dari tahun 2015 menuju tahun 2016 dan menurun lagi tahun 2017, sebesar 11 kasus yang terdiri dari 2 kasus kematian ibu hamil, 4 kasus kematian ibu bersalin, dan 5 kasus kematian ibu nifas.

Secara rinci Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat indikator-indikator terkait tentang ibu sebagai capaian dari program yang dijalankan dalam kurun 2012-2017. Angka Kematian Ibu (AKI) terlihat cenderung menurun dari 62,8 orang per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2013, menjadi 23,4 orang per 100 ribu kelahiran hidup tahun 2017.

Tabel 2.35 Banyaknya Angka Kematian Ibu di Kota Bekasi

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kematian Ibu Hamil	9	5	5	4	5	2
Kematian Ibu Bersalin	12	18	8	5	8	4
Kematian Ibu Nifas	7	6	8	5	3	5
Jumlah	28	29	21	14	16	11

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2015-2018

Tabel 2.36 Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Ibu

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	62,8	46,8	28,5	34,1	23,4
Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun (Orang)	29	22	14	16	11
Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama (Orang)	46.180	46.961	49.168	46.919	47.065
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Kasus)	9.803	10.703	3.599	4.399	5.781
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Orang)	9.803	10.703	3.599	4.399	5.781
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	83,8	84,9	90,1	88,3	88,0
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	45.603	47.505	49.157	46.924	47.152
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Orang)	54.450	55.924	54.530	53.151	53.591
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	82,5	85,5	91,5	89,0	92,1
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu (Orang)	47.054	50.086	52.291	49.565	51.732
Jml sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu sama (Orang)	57.041	58.586	57.125	55.682	56.143
Cakupan pelayanan nifas (%)	70,5	73,6	83,3	88,3	83,2
Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	38.398	41.176	45.397	46.924	44.571
Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Orang)	54.450	55.924	54.530	53.151	53.591

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Rendahnya angka kematian ibu tidak terlepas dari kinerja layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan yang cenderung sangat baik. Terlihat dari indikator-indikator yang lain, seperti cakupan komplikasi kebidanan, cakupan pelayanan tenaga kesehatan, cakupan kunjungan ibu hamil, dan cakupan layanan nifas.

B.3 Prevelensi Balita Gizi Buruk

Tabel di bawah ini memuat tentang Status Gizi Balita di Kota Bekasi, yang menunjukkan bahwa rata-rata balita di Kota Bekasi berada pada kondisi normal. Balita yang status gizinya gemuk mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengetahuan tentang obesitas pada balita.

Tabel 2.37 Status Gizi Balita di Kota Bekasi Tahun 2013 -2016

No	Status Gizi	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
1	Sangat Kurus(%)	0,19	0,16	0,13	0,21
2	Kurus(%)	5,23	4,24	3,61	3,49
3	Normal(%)	85,36	85,67	87,09	87,20
4	Gemuk(%)	9,23	9,92	9,17	9,11

Sumber:Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2016

Perbaikan status gizi balita tidak terlepas dari penanganan balita gizi buruk yang semuanya tertangani, seperti tersaji pada tabel berikut ini. Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan yang tertangani cenderung menurun, dari semula di tahun 2013 sebanyak 174 balita menjadi 141 balita di tahun 2017, walaupun sedikit meningkat di tahun 2015 sebanyak 194 balita. Semua kasus balita gizi buruk tertangani 100 persen.

Tabel 2.38 Cakupan Layanan Balita Gizi Buruk, 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerjapada kurun waktu tertentu (Orang)	174	137	194	142	141
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama (Orang)	174	137	194	142	141

Sumber:Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

B.4 Prevalensi Penyakit Menular

Tabel di bawah ini menunjukkan Jumlah Kasus TB Paru di Kota Bekasi. TB Paru BTA (+) mengalami peningkatan setiap tahunnya , hal ini disebabkan udara yang kurang bersih di Kota Bekasi yang mengakibatkan tingginya polusi di Kota Bekasi . Sedangkan TB Paru BTA (-) mengalami penurunan pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 dan meningkat lagi pada tahun 2017.

Tabel 2.39 Jumlah Kasus TB Paru di Kota Bekasi Tahun 2013–2017

Kasus	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
TB Paru BTA (+)	1.390	1.359	1.435	1.401	1.526
TB Paru BTA (-)	1.037	1.063	1.004	1.032	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat bahwa tingkat prevalensi TBC per 100 ribu penduduk di tahun 2013 sebesar 55, artinya setiap 100 ribu penduduk terdapat 55 orang yang menderita TBC. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC baru sekitar 50% dari perkiraan penderita baru. Presentasi penderita TBC yang diobati dan berhasil sembuh sekitar 74%, sehingga dengan penanganan yang baik ini, maka tingkat kematian cenderung menurun, dari 0,79 orang per 100 ribu penduduk di tahun 2014 menjadi 0,70 di tahun 2017.

Tabel 2.40 Beberapa Indikator Layanan Penyakit Menular, 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	50	48	-	-	-
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun (Orang)	1.390	1.359	1.435	1.401	1.526
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) Kurun waktu yang sama (Orang)	2.774	2.849			
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	55	-	-	-	-
Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) (Kasus)	1.432				
Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama (Orang)	2.592.819	2.663.011	2.733.240	2.803.283	2.873.484
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	0,54	-	-	-	-
Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS (Orang)	1.390	1.359	1.435	1.401	1.526
Jumlah pasien baru TB paru BTA diperkirakan ada dalam wilayah tersebut (Orang)	2.594				
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	74	76	77	73.9	74.4
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun (Orang)	1.122	1.054	1.045	958	1.059
Jumlah Pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama (Orang)	1.514	1.390	1.349	1.296	1.423
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	-	0,79	0,77	0,57	0,70
Jumlah Pasien TB yang meninggal selama pengobatan (Orang)		21	21	16	20
Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama (Orang)	2.592.819	2.663.011	2.733.240	2.803.283	2.873.484
Angka kejadian Malaria (%)	0,001	0,003	0,002	0,005	0,005
Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu (Orang)	2	9	5	13	14
Jumlah penduduk pada pertengahan tahun (Orang)	2.592.819	2.663.011	2.733.240	2.803.283	2.873.484
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002
Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	524	490	465	783	560
Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada	2.592.819	2.663.011	2.733.240	2.803.283	2.873.484

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
kurun waktu yang sama (Orang)					
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun (Orang)	1.415	821	987	3.813	699
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama (Orang)	1.415	821	987	3.813	699
Penderita diare yang ditangani (%)	57,6	50,5	63,9	29,9	22,5
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun (Orang)	49.736	28.794	37.370	22.626	17.462
Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) (Orang)	86.320	56.988	58.491	75.689	77.584
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1,45	1,13	1,64	2,00	2,21
Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan (Kasus)	10	8	12	15	17
Jumlah penduduk < 15 tahun (Orang)	691.106	710.822	730.827	750.259	769.430
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	91,3	91,3	90,8	94,3	95,4
Jumlah murid SD Kelas 1 dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	42.314	48.025	42.008	46.317	53.841
Jumlah murid SD Kelas 1 dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Orang)	46.337	52.604	46.251	49.127	56.437
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100
Pelayanan gawat darurat level 1 (Layanan)	35	37	38	38	42
Jumlah RS (Buah)	35	37	38	38	42
Cakupan kelurahan/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100
Jumlah KLB di kelurahan/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu (Kasus)	11	5	11	15	34
Jumlah KLB di kelurahan/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama (Kasus)	11	5	11	15	34

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Disamping penyakit TB Paru di atas, beberapa indicator penyakit menular lainnya menunjukkan kasus yang kecil dibandingkan jumlah penduduk, dengan penanganan yang baik, seperti penyakit malaria, diare, HIV/AIDS, demam berdarah, dan polio.

Upaya preventif juga dilakukan, dengan memperluas cakupan penjangkaran kesehatan anak SD kelas 1, dimana pada tahun 2017, dari sekitar 56 ribu murid SD kelas 1, sekitar 54 ribu orang yang telah diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan terlatih

(sekitar 95%), angka ini meningkat dari tahun 2013 yang cakupan layanannya hanya sekitar 91%.

Layanan gawat darurat level 1 juga menjadi perhatian untuk selalu dipertahankan tersedia dan ditingkatkan kualitasnya di semua rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Tahun 2013 seluruh rumah sakit (35 buah) tersedia layanan gawat darurat level 1, dan seiring waktu meningkat menjadi 42 layanan gawat darurat di 42 rumah sakit tahun 2017.

Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di 11 kelurahan telah ditangani seluruhnya kurang dari 24 jam, dengan penyelidikan epidemiologis.

Sarana dan prasarana kesehatan di Kota Bekasi menunjukkan kondisi yang cukup baik. Walaupun Pembantu Puskesmas belum tersedia di seluruh kelurahan, baru sekitar 25% tahun 2017, namun Puskesmas di tingkat kecamatan tersedia cukup, tahun 2017 tersedia 39 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan atau rata-rata terdapat 3,25 puskesmas per kecamatan.

Demikian juga untuk rumah sakit, tahun 2017 tersedia 42 rumah sakit untuk melayani 2,8 juta penduduk atau 1,5 rumah sakit melayani sekitar 100 ribu penduduk. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya 1,3 rumah sakit.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, juga ditunjang dengan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, walaupun ada kecenderungan menurun jumlahnya. Tahun 2013 sebanyak 5,6 dokter dan 6,5 tenaga medis melayani 100 ribu penduduk menurun menjadi 4,5 dokter dan 5,2 tenaga medis. Demikian juga pelayanan Posyandu yang cukup tersedia untuk melayani balita di Kota Bekasi.

Tabel 2.41 Beberapa Indikator Tentang Layanan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio posyandu per satuan balita	5,77	5,79	6,09	5,95	6,42
Jumlah posyandu (Buah)	1.538	1.543	1.546	1.552	1.616
Jumlah balita (Orang)	266.525	266.299	254.004	260.989	251.895
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,19	0,19	0,16	0,12	0,13
Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu (Buah)	504	506	435	349	369
Jumlah penduduk (Orang)	2.592.819	2.663.011	2.733.240	2.803.283	2.873.484
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (1000)	0,013	0,014	0,014	0,014	0,015
Jumlah rumah sakit (Buah)	35	37	38	38	42
Jumlah penduduk (Orang)	2.592.819	2.663.011	2.733.240	2.803.283	2.873.484
Rasio dokter per penduduk (1000)	0,0563	0,0552	0,0074	0,0261	0,0451
Jumlah dokter umum + spesialis (Orang)	1.459	1.471	202	732	1.297
Jumlah penduduk (Orang)	2.592.819	2.663.011	2.733.240	2.803.283	2.873.484
Rasio tenaga medis per satuan penduduk (1000)	0,0657	0,0645	0,0126	0,0303	0,0528
Jumlah tenaga medis (dr umum, drg, dr spesialis + drg spesialis) (Orang)	1.704	1.717	344	849	1.517
Jumlah penduduk (Orang)	2.592.819	2.663.011	2.733.240	2.803.283	2.873.484

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan puskesmas	2,58	2,58	2,58	2,58	3,25
Jumlah puskesmas	31	31	31	31	39
Jumlah seluruh kecamatan	12	12	12	12	12
Cakupan pembantu puskesmas	0,43	0,43	0,43	0,25	0,25
Jumlah pembantu puskesmas	24	24	24	14	14
Jumlah seluruh kelurahan	56	56	56	56	56

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

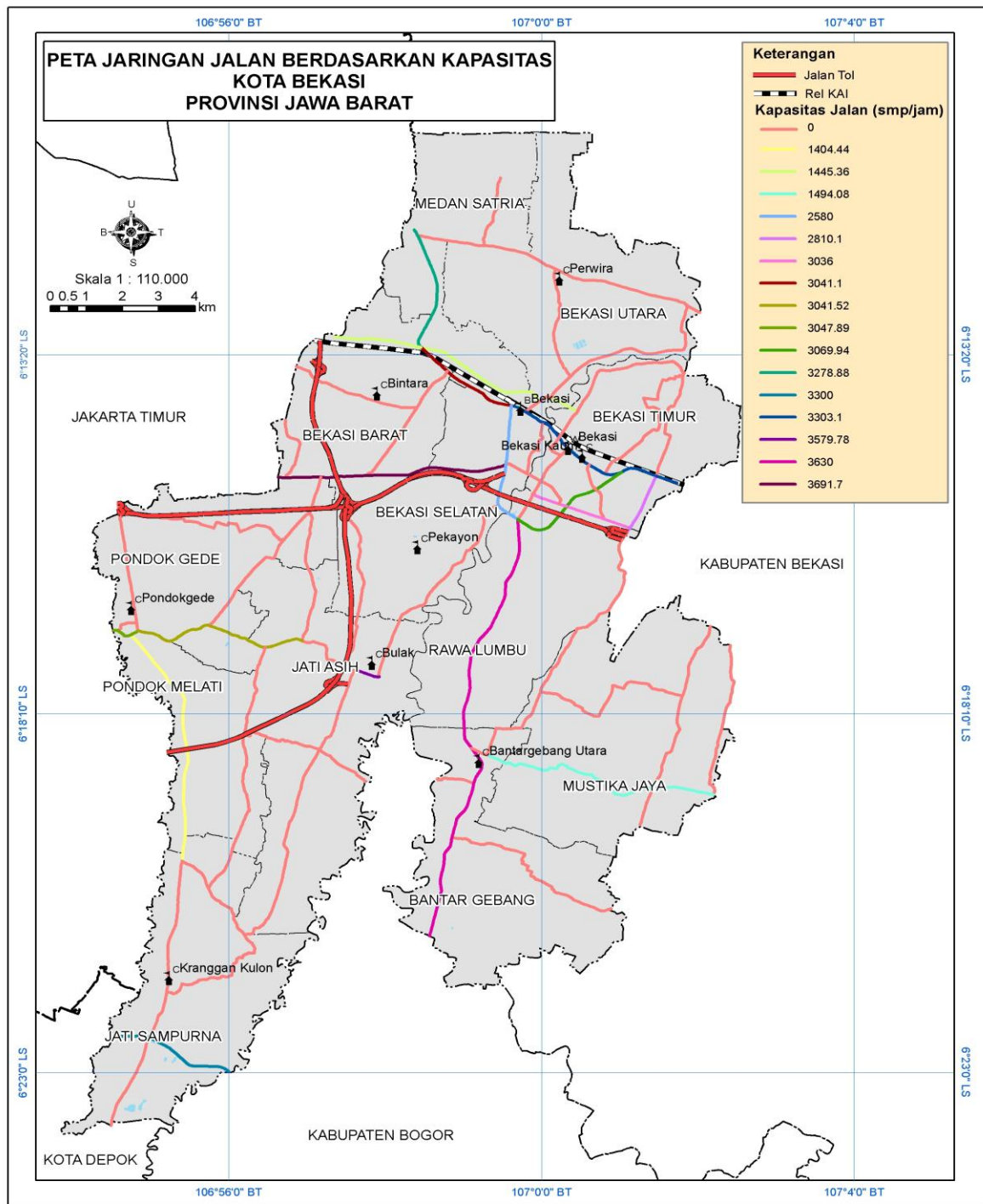
2.4.3 Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

A. Sistem Transportasi

A.1 Prasarana Fisik Jalan

Komponen utama pembentuk sistem transportasi makro di Kota Bekasi lainnya adalah sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan transportasi di Kota Bekasi seluruhnya merupakan sistem jaringan transportasi darat, seperti: jaringan jalan dan jalan kereta api. Sampai dengan Tahun 2016, panjang jalan di Kota Bekasi mencapai 3.193,037 km dengan rincian 132,182 km merupakan jalan primer dan 1.527,355 km jalan sekunder. Sedangkan jalan lingkungan yang terdapat di Kota Bekasi tahun 2012 adalah 1.533,50 km. Tingkat pertumbuhan dari tahun 2012 ke tahun 2013 pertumbuhannya hanya mencapai 800 m dalam 1 tahun atau sebesar 0.06% per tahun. Pola perkembangan yang relatif normal terjadi dari tahun 2008-2011 yakni rata-rata 3% per tahun atau sekitar 21 km per tahun.

Kapasitas ruas jalan didefinisikan sebagai arus lalu lintas maksimum yang dapat melintas dengan stabil pada suatu potongan melintang jalan pada keadaan (geometrik, pemisahan arah, komposisi lalu lintas, lingkungan) tertentu. Untuk jalan dua lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan per lajur. Kapasitas merupakan ukuran kinerja, pada kondisi yang bervariasi dan dapat diterapkan pada suatu lokasi tertentu atau pada suatu jaringan jalan yang sangat kompleks. Berhubung beragamnya geometrik jalan, kendaraan, pengendara dan kondisi lingkungan serta sifat saling keterkaitannya, kapasitas bervariasi menurut kondisi lingkungan. Hasil identifikasi terhadap data dan informasi terkait kapasitas jalan di Kota Bekasi dapat dilihat pada Gambar berikut.



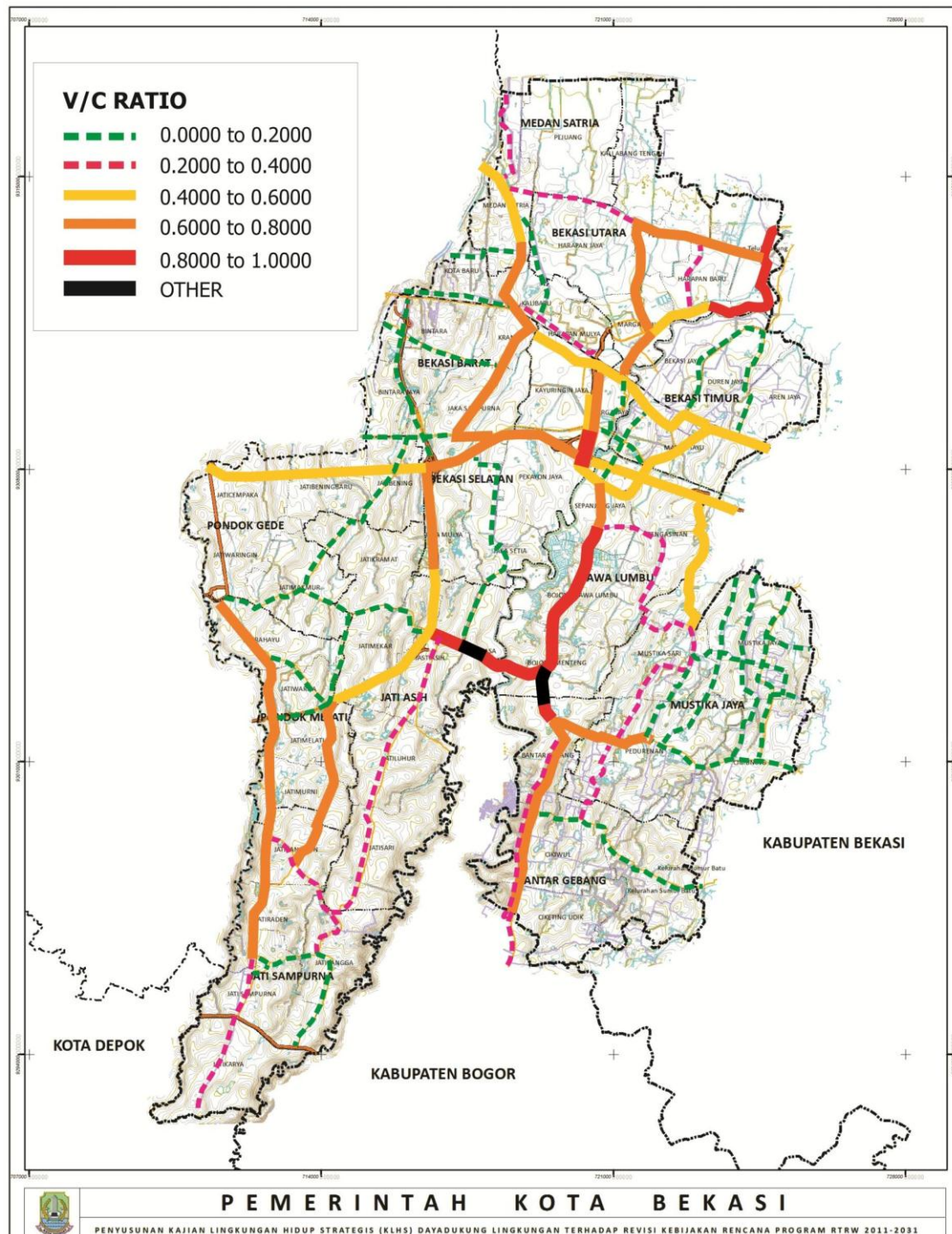
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi. 2014).

Gambar 2-52 Kapasitas Jaringan Jalan Utama Kota Bekasi

A.2 Indikator Kinerja Layanan Sistem Transportasi

Aspek penting terkait jaringan jalan adalah kinerja kapasitas dan tingkat pelayanan jalan (*Level of Service/LOS*) dalam memenuhi permintaan pergerakan di wilayah Kota Bekasi. Kapasitas ruas jalan didefinisikan sebagai arus lalu lintas maksimum yang dapat melintas dengan stabil pada suatu potongan melintang jalan pada keadaan (geometrik, pemisahan arah, komposisi lalu lintas, lingkungan) tertentu. Untuk jalan dua lajur dua

arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan per lajur. V/C Ratio atau Derajat kejenuhan adalah perbandingan dari volume (nilai arus) lalu lintas terhadap kapasitasnya. Ini merupakan gambaran apakah suatu ruas jalan mempunyai masalah atau tidak, berdasarkan asumsi jika ruas jalan makin dekat dengan kapasitasnya kemudahan bergerak makin terbatas.



Sumber: KLHS RTRW Kota Bekasi, 2017

Gambar 2-53 Peta V/C Rasio Jaringan Jalan Kota Bekasi

B. Sistem Penyediaan Air Minum

B.1 Prasarana Fisik Penyediaan air Minum

Jaringan sistem penyediaan air bersih sistem perpipaan PDAM di Kota Bekasi dapat dibagi menjadi beberapa sistem wilayah, yaitu:

- IPAB Teluk Buyung, IPA-2 eksisting kapasitasnya dari 500 di tambah 200 liter per detik.
- IPA Jati Ranga dan peningkatan sistem perpipaan PDAM.
- IPA Poncol kapasitasnya dari 480 liter per detik menjadi 864 liter per detik.
- IPA Rawa Tembaga dari 190 liter per detik menjadi 342 liter per detik.
- IPA Rawalumbu2 kapasitasnya 267 liter per detik.
- IPA Margahayu kapasitas 800 liter per detik dan peningkatannya dapat dilakukan secara bertahap.
- IPA Jatiasih kapasitas 100 liter per detik yang akan dibangun pada tahun 2016-2017.
- IPA Pondok Gede kapasitas 350 liter per detik yang akan dibangun pada tahun 2017-2018.
- IPA Mustikajaya kapasitas 200 liter per detik yang akan dibangun pada tahun 2018-2019.

Untuk PDAM Volume air yang terjual pada tahun 2015 sebesar 18.438.570 m³ (PDAM Tirta Bagasasi) dan 11.081.482 m³ (PDAM Tirta Patriot).

Sedangkan sistem perpipaan non PDAM di Kota Bekasi meliputi:

- Tirta Pondok Hijau
Tirta Pondok Hijau (BAMUS) adalah Pengelola air bersih sistem air minum non PDAM yang ada di Kota Bekasi. Tirta Pondok Hijau dikelola oleh warga setempat. Sumber air yang digunakan berasal dari sumur dalam. Saat ini kapasitas terpasang adalah sebanyak 15 l/dtk, dengan kapasitas produksi baru mencapai 5 l/dtk, jumlah sambungan langsung yang dimiliki oleh Tirta Pondok Hijau sebanyak 600 SL.
- Kemang Pratama 1 dan 2
Pengelola Perumahan Kemang Pratama 1 dan 2 saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air tersendiri untuk didistribusikan kepada warga di perumahan tersebut. Kapasitas instalasi saat ini adalah 15 l/dtk untuk Kemang Pratama 1 dan 30 l/dtk untuk Kemang Pratama 2, jumlah pelanggan mencapai 5700 SL. Sumber air diambil dari Kali Bekasi, namun saat ini kondisi dari Kali Bekasi sudah tercemar sehingga air yang dihasilkan kadang-kadang berwarna keruh dan berbau.
- Citra Grand
Pengelola perumahan Citra Grand saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air tersendiri untuk didistribusikan kepada warga di perumahan

tersebut. Kapasitas instalasi sebesar 30 l/dtk serta ada yang sedang dalam proses pembangunan instalasi sebesar 25 l/dtk. Sehingga total instalasi yang dimiliki oleh Citra Grand sebesar 55 l/dtk. Jumlah pelanggan sebesar 3000 SL. Instalasi Citra Gand menggunakan sumber air dari Sungai Cikeas.

- SPAM Bantar Gebang

SPAM Bantar Gebang adalah sistem penyediaan air minum non PDAM yang ada di Kecamatan Bantargebang. SPAM Bantar Gebang ini dikelola oleh warga setempat dengan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Sumber air yang digunakan berasal dari sumur dalam. Saat ini telah dibangun 6 titik sumur dalam yaitu 2 titik di Kelurahan Cikiwul, 2 titik di Kelurahan Sumur Batu dan 2 titik di Kelurahan Ciketing Udik. 1 sumur artesis tersebut digunakan untuk melayani 100 SL. Di tahun 2012, telah dibangun 2 titik penambahan sumur artesis yaitu 1 titik di Kelurahan Sumur Batu dan 1 titik di Kelurahan Ciketing Udik. Unit tambahan sumur tersebut direncanakan akan mulai beroperasi di tahun 2013. Dari informasi yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi melalui program sanitasi air bersih, akan membangun 2 titik sumur dalam yang berlokasi di Kelurahan Margajaya dan Kelurahan Margahayu.

B.2 Indikator Kinerja Layanan Penyediaan Air Minum

Beberapa kelurahan di Kota Bekasi belum terlayani jaringan PDAM, untuk lebih jelasnya mengenai sambungan jaringan air bersih dapat dilihat pada Tabel berikut.

Beberapa permasalahan terkait pelayanan sistem air bersih adalah:

- Menurunnya kualitas air baku yang tersedia sehingga mempengaruhi air hasil produksi.
- Penurunan kinerja dan keandalan akibat penurunan debit sumber air.
- Keterbatasan fasilitas produksi dan distribusi yang ada terhadap potensi sumber yang dimiliki (*idle* kapasitas).
- Terjadi selisih yang besar antara produksi air dan hasil pembacaan *water meter* pelanggan.
- *Water meter* banyak yang rusak/hilang.
- Tingginya kebocoran air pada pipa dan meter air pelanggan.
- Kualitas air pada saat pendistribusian belum memenuhi syarat.

Tabel 2.42 Daerah yang Belum Tersedianya Jaringan Air Bersih

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Wilayah	Sambungan
1	Pondok Gede	1	Jati Makmur	Belum ada sambungan	
		2	Jati Waringin	Belum ada sambungan	
		3	Jati Bening	Belum ada sambungan	
		4	Jati Cempaka	Belum ada sambungan	

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Wilayah	Sambungan
2	Jatisampurna	5	Jati Bening Baru	Belum ada sambungan	
		1	Jati Karya	Belum ada sambungan	
		2	Jatisampurna	Belum ada sambungan	
		3	Jati Rangka	Belum ada sambungan	
		4	Jati Ranggon	Belum ada sambungan	
3	Pondok Melati	5	Jati Raden	Belum ada sambungan	
		1	Jati Murni	Belum ada sambungan	
		2	Jati Melati	Belum ada sambungan	
		3	Jati Warna	Perumahan Puri Gading	901
4	Jatiasih	4	Jati Rahayu	Belum ada sambungan	
		1	Jati Sari	Belum ada sambungan	
		2	Jati Luhur	Belum ada sambungan	
		3	Jatirasa	Belum ada sambungan	
		4	Jatiasih	Belum ada sambungan	
		5	Jati Mekar	Belum ada sambungan	
5	Bantar Gebang	6	Jati Kramat	Belum ada sambungan	
		1	Ciketing Udik	Belum ada sambungan	
		2	Sumur Batu	Belum ada sambungan	
		3	Cikiwul	Belum ada sambungan	
6	Mustika Jaya	4	Bantargebang	Narogong	1.938
		1	Pedurenan	Belum ada sambungan	
		2	Cimuning	Belum ada sambungan	
		3	Mustika Jaya	Belum ada sambungan	
		4	Mustika Sari	Belum ada sambungan	

C. Sistem Persampahan

C.1 Prasarana Fisik

Kota Bekasi mempunyai fasilitas tempat pembuangan sampah akhir di Sumur Batu, namun kondisinya, di masa yang akan datang akan sulit menemukan lokasi tempat pembuangan sampah selain itu juga akan sangat mahal. Sampah yang dihasilkan kegiatan perkotaan di Kota Bekasi sebagian besar tergolong sampah domestik. Pengolahan Persampahan di Kota Bekasi dilakukan melalui beberapa mekanisme antara lain:

- **Konsep 3 R**
Di Kota Bekasi saat ini memiliki 133 titik komposting dan setiap hari dapat memproduksi 1 m³/hari. Berarti untuk satu bulan produksi kompos dapat dihasilkan $30 \times 121 \text{ m}^3 = 3.630 \text{ m}^3/\text{bulan}$. Pengurangan sampah melalui komposting sekitar 2,05% dari total produksi sampah.
- **Bank Sampah**
Terdapat sekitar 81 bank sampah sesuai dengan Keputusan WaliKota Bekasi Nomor 660.2/Kep.295-Dinsih/VI/2013 tentang Penetapan Bank Sampah di Kota Bekasi. Dalam kegiatan bank sampah ini sendiri pengelola harus memilah sampah menjadi beberapa golongan yang masih memiliki nilai ekonomi, kemudian di jual ke lapak-lapak. Hasil penjualan ini akan dimasukan ke rekening nasabah nantinya.

Dalam penerapannya hingga saat ini Pemerintah Kota Bekasi dibantu oleh warga Kota Bekasi sendiri telah memiliki insiatif untuk mengembangkan program 3 R dengan mendirikan gerakan peduli lingkungan (GPL) yang di dalamnya terdapat rumah kompos dan kegiatan yang menguntungkan yaitu bank sampah. Namun kegiatan ini belum banyak dilakukan walaupun sangat diperlukan untuk mereduksi sampah yang akan di buang ke TPA Sumur Batu.

Volume sampah yang masuk ke TPA Sumur Batu sebesar 1.311.882,36 m³ dengan rata-rata per hari 898,54 ton /hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.43 Tonase, Volume Sampah yang Masuk Ke TPA Sampah Sumur Batu Kota Bekasi 2015

No	Bulan	Ritase (Kali)	Berat Sampah/ Tonase (Ton)	Volume Sampah (m ³)	Rata-Rata (Ton/Hari)
1	Januari	11.015	27.456,91	109.863,64	885,99
2	Februari	9.667	26.225,31	104.901,24	936,61
3	Maret	10.939	27.554,33	110.217,32	888,84
4	April	10.963	27.632,57	110.530,28	921,08
5	Mei	10.564	27.588,10	110.352,40	889,93
6	Juni	10.663	27.590,39	110.361,56	919,67
7	Juli	10.019	27.059,86	108.239,44	872,89
8	Agustus	10.058	27.319,14	109.276,56	881,26
9	September	10.018	27.369,76	109.479,04	912,32
10	Oktober	9.737	27.389,91	109.559,64	883,54
11	November	9.860	27.363,30	10.453,20	912,11
12	Desember	9.895	27.412,01	109.648,04	884,25
	Kota Bekasi	123.398	327.970,59	1.311.882,36	898,54

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2016

C.2 Indikator Kinerja Layanan Persampahan

Tingkat pelayanan serta jumlah sampah yang terangkut ke TPA Sumur Batu oleh Dinas Kebersihan berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Bekasi yaitu sebesar 27% pada tahun 2016, jumlah pelayanan paling tinggi adalah Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Jatisampurna yaitu 28%, sedangkan tingkat pelayanan terendah di Kecamatan Bantar Gebang dimana tingkat pelayanan sebesar 10%, kecamatan lainnya tingkat pelayanannya hanya berkisar antara 12%-27%. Nilai pelayanan ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Kota Bekasi yang telah tergolong sebagai Kota Metropolitan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44 Tingkat Pelayanan Persampahan Kota Bekasi Tahun 2016

No	Kecamatan	Terangkut (m ³ /hari)	Pelayanan (%)
1	Pondok Gede	92	14
2	Jatisampurna	84	28
3	Pondok Melati	67	19
4	Jatiasih	67	12
5	Bantar Gebang	25	10
6	Mustikajaya	126	26
7	Bekasi Timur	92	15
8	Bekasi Selatan	92	16
9	Rawalumbu	149	28
10	Bekasi Barat	121	17
11	Medan Satria	115	27
12	Bekasi Utara	101	12
	Kota Bekasi	1.724	27

Sumber: Masterplan Persampahan Kota Bekasi

Permasalahan Persampahan di Kota Bekasi, yaitu:

- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
- Belum optimalnya kinerja pengelolaan layanan persampahan.
- Belum optimalnya kebijakan pengelolaan persampahan.
- Belum optimalnya investasi dalam layanan pengelolaan persampahan.
- Belum optimalnya stimulan dan atau insentif terkait kegiatan 3R (*Reuse Reduce dan Recycle*) pengurangan sampah setempat.
- Belum optimalnya kegiatan TPS 3R, bank sampah, dan pengolahan sampah menjadi bahan bakar (gas/minyak) dengan mengikut sertakan peran industri melalui CSR.
- Belum optimalnya armada pengumpul dan angkut sampah yang terpilah, dan menambah jumlah TPS, TPS 3R dan SPA (Stasiun Peralihan Antara).
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan 3R melalui sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan.
- Belum adanya pengawasan secara mendetail terhadap kegiatan pengelolaan persampahan mulai dari sumber hingga ke TPA.
- Sarana dan prasarana yang tersedia kurang, baik dari jumlah maupun kondisi.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan kebersihan.
- Kurangnya ketersediaan lahan untuk membangun TPS di sumber sampah (RT/RW) skala komunal sehingga pengumpulan sampah masih sistem *door to door* yang menyebabkan ketidakefektifan waktu pengumpulan.
- Pewadahan berupa bak sampah permanen yang ditempatkan di atas saluran drainase.

D. Sistem Pengolahan Limbah

D.1 Prasarana Fisik

Kota Bekasi juga memiliki sistem prasarana air limbah, yang terdiri dari sistem penanganan air limbah domestik dan sistem penanganan air limbah industri. Sistem penanganan air limbah domestik terdiri dari sistem penyaluran air bekas cuci (*grey water*); serta sistem penanganan air bekas kakus dan tinja (*black water*). Sedangkan sistem penanganan air limbah industri dilakukan dengan melalui proses pengolahan di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), terutama bagi limbah yang mengandung bahan beracun.

D.2 Indikator Kinerja Layanan Limbah

Permasalahan Air Limbah di Kota Bekasi, yaitu:

- Cakupan layanan penyedotan lumpur tinja 47% KK di 12 kecamatan yang ada ke IPLT/IPALD Sumur Batu.
- Cakupan kepemilikan jamban sehat keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 87,2%.
- Bersatunya aliran limbah dengan saluran drainase.
- Sistem pengelolaan air bekas kakus dan tinja (*Black Water*) di Kota Bekasi saat ini masih dilakukan secara on site (setempat), yaitu Kakus dan Septik Tank.

E. Sistem Drainase

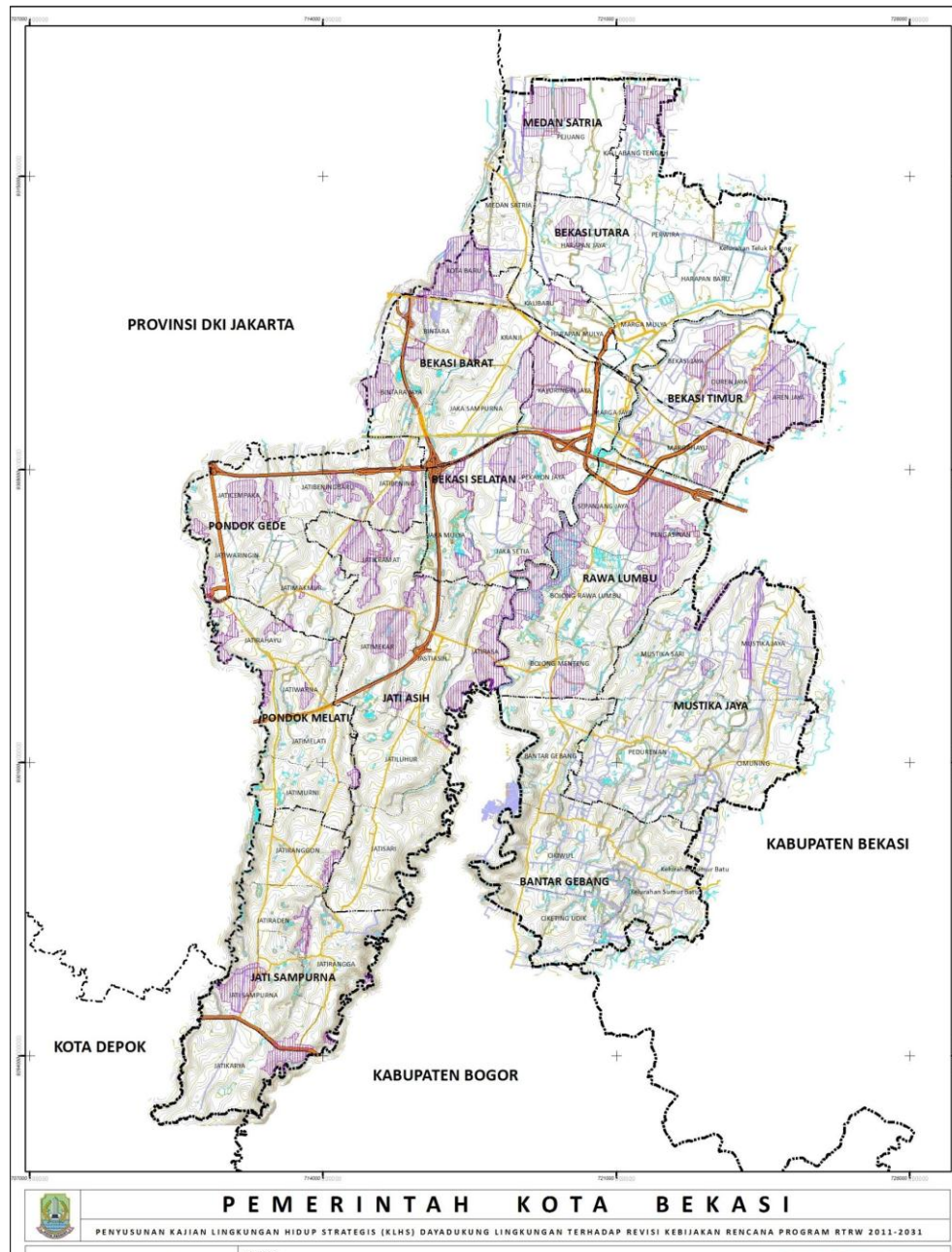
E.1 Prasarana Fisik

Kota Bekasi dilalui oleh 5 (lima) sistem drainase utama/primer yaitu Kali Cakung, Kali Bekasi, Kali Sunter, Kali Cikeas dan Kali Cileungsi. Kelima kali tersebut mempunyai daerah tangkapan air yang cukup luas dan bermuara ke arah utara dan berakhir di Laut Jawa. Sistem drainase Kota Bekasi saat ini mencakup wilayah seluas kurang lebih 9.035 Ha atau 43% dari luas wilayah kota. Terdapat saluran penerus/sekunder dari pusat daerah tangkapan dalam kota ke badan air penerima dengan lebar dan kedalaman saluran bervariasi. Kondisi sistem drainase yang ada telah banyak yang rusak dan kurang terpelihara. Di wilayah Kota Bekasi terdapat 4 kali besar yang berfungsi sebagai saluran primer, yaitu Kali Cileungsi, Kali Cikeas, Kali Bekasi, dan Kali Sunter. Kali Cileungsi dan Kali Cikeas bermuara di Kali Bekasi. Disamping itu terdapat sejumlah Kali yang bersumber di wilayah Kota Bekasi yang berfungsi sebagai saluran sekunder.

Pengelolaan empat sungai besar yang menjadi saluran primer tersebut menjadi wewenang dan tanggungjawab Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane dan Kali lainnya yang terletak di wilayah Kota Bekasi menjadi tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Kota Bekasi. Tiga (3) dari Saluran Primer tersebut di atas, yaitu Kali Cikeas, Kali Bekasi dan Kali Sunter.

E.2 Indikator Kinerja Layanan Sistem Drainase

Berdasarkan data tahun 2016 lokasi banjir Kota Bekasi sebanyak 85 titik dengan luas kurang lebih 2.873.38 Ha yang tersebar hampir di seluruh Kota Bekasi .



Gambar 2-54 Wilayah Potensi Banjir Kota Bekasi

Tiga sungai penyumbang banjir terbesar di Kota Bekasi adalah: Kali Bekasi, Kali Cikeas, dan Kali Sunter rutin menyumbang banjir tahunan di wilayah berikut:

1. Kecamatan Pondok Gede (Perumahan Bina Lindung)
2. Kecamatan Pondok Melati (Perumahan Chandra RW 15, Perumahan Pondok Melati Indah, Perumahan Nyai Putu Bawah).
3. Kecamatan Bekasi Selatan (Perumahan Jaka Kencana)

4. Kecamatan Jatiasih (Pondok Mitra Lestari, Jatiasih Indah, Kemang IFI Graha, Pondok Gede Permai, Villa Jati Rasa, Perumahan Mandosi).
5. Kecamatan Jatisampurna (Perumahan Citra Grand).

2.4.4 Penataan Ruang

A. Sarana, Prasarana dan Instrumen Penataan Ruang

Kota Bekasi telah memiliki Dokumen RTRW Kota Bekasi dan RDTR Kota Bekasi yang telah berkuat hukum (Perda). Dengan kedua dokumen rencana tersebut maka pelayanan umum terkait penataan ruang sudah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

B. Indikator Kinerja Penataan Ruang

B.1 Neraca Pemanfaatan Ruang

Stock guna lahan merupakan selisih antara luas alokasi ruang yang direncanakan dalam RTRW dan RDTR Kota dengan tingkat pemanfaatannya saat ini (lahan terpakai). Perubahan stock mencerminkan tingkat pemanfaatan atau transformasi dari alokasi kepada pemanfaatan atau transformasi dari rencana kepada penggunaan. Hasil analisis terhadap data dan informasi terkait diperoleh gambaran perkembangan stock guna lahan di Kota Bekasi seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45 Perubahan stock lahan di Kota Bekasi 2009- 2014

No	Kelas Lahan	Pola Ruang (ha)	Land Use		Stock		Perubahan Stock
			2009	2014	2009	2014	
1	Industri	658,16	567,43	942,64	90,73	-284,48	-193,75
2	Kawasan Lindung	1.875,32	109,32	225,14	1.766,00	1.650,18	115,82
3	Lahan Infrastruktur	357,26	10,60	142,27	346,65	214,98	131,67
4	Perdagangan dan Jasa	7.167,16	166,17	273,69	7.000,9	6.893,47	107,52
5	Permukiman	11.551,23	10.708,76	11.211,31	842,48	339,93	502,55
6	Total	21.609,13	21.609,13	21.609,13			

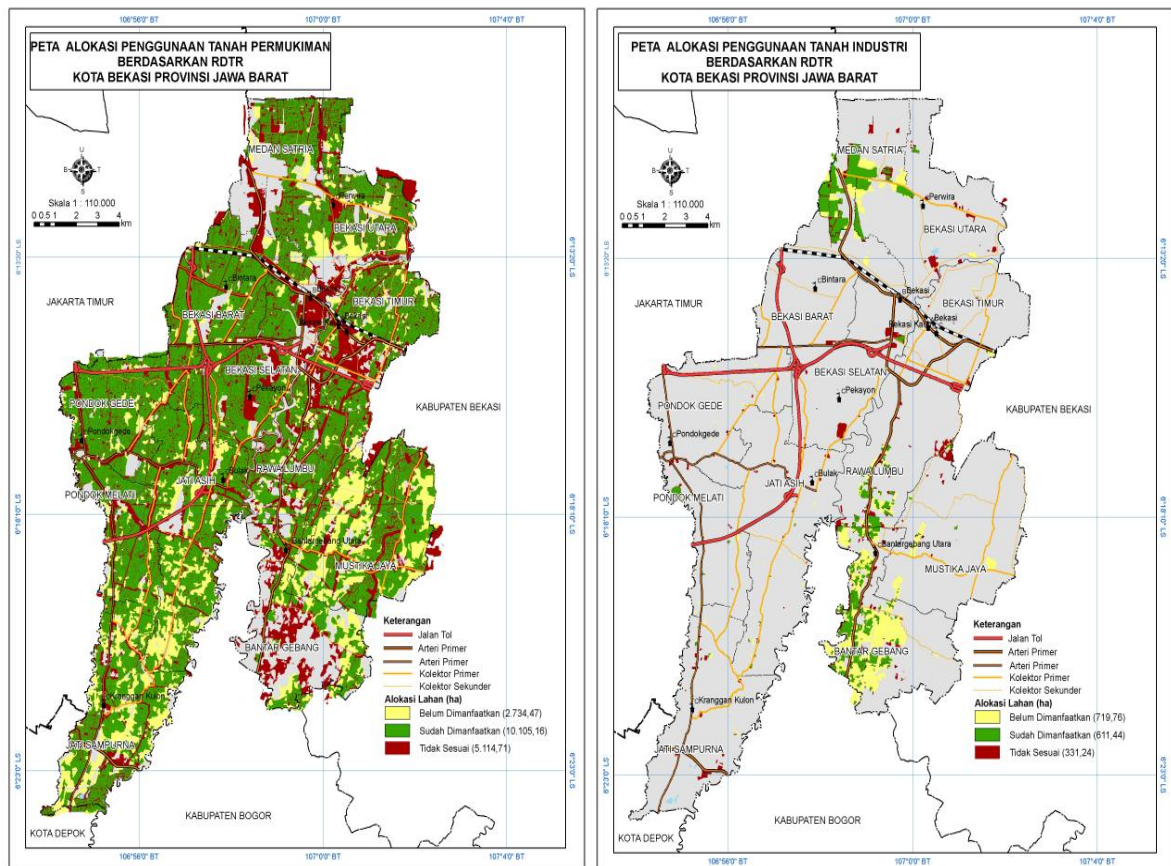
Sumber: 1. RTRW Kota Bekasi, 2. Citra Ikonos 2009 dan 2014.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perubahan stock terbesar terjadi pada lahan permukiman yang mencapai pengurangan stock hingga mencapai 502 ha pada periode 2009-2014. Perubahan terbesar kedua adalah stock lahan industri. Alokasi lahan industri berdasarkan RTRW Kota Bekasi hingga tahun 2014 telah terpakai seluruhnya, bahkan perkembangan lahan industri di wilayah ini telah melampaui alokasi yang ditetapkan berdasarkan rencana. Sementara stock lahan yang relatif masih besar adalah stock lahan perdagangan dan jasa. Pemanfaatan alokasi lahan perdagangan jasa berdasarkan rencana baru mencapai 3,8% hingga tahun 2014. Sedangkan tingkat

pemanfaatan lahan permukiman hingga tahun 2014 telah mencapai 97% dari alokasi yang direncanakan dalam RTRW Kota Bekasi.

B.2 Penyimpangan Pemanfaatan Ruang

Hasil evaluasi terkait penyimpangan pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 11% penyimpangan pemanfaatan ruang yang ada di Kota Bekasi (LKPJ, 2017).



Sumber: Diolah dari RDTR Kota dan Data Citra Ikonos. 2014

Gambar 2-55 Kesesuaian rencana alokasi ruang dengan pemanfaatannya

2.4.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A Ketersediaan Perumahan

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diidentifikasi selama kurun waktu 2009-2014 peningkatan pemanfaatan lahan terbesar di wilayah Kota Bekasi terjadi pada lahan permukiman dengan luas perubahan rata-rata pertahun sebesar 100 ha. Sementara pengurangan lahan terbesar terjadi pada lahan pertanian lahan basah dengan rata-rata perubahan sebesar 101 ha per tahun.

Tabel 2.46 Perubahan Penggunaan Lahan Kota Bekasi 2009-2014

No	Kelas Lahan	Penggunaan Lahan 2014 (ha)	Penggunaan Lahan 2009 (ha)	Perubahan 2009-2014 (ha)	Perubahan/th
1	Badan Air	166,12	125,09	41,03	8,21
2	Hutan Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri	948,72	568,66	380,06	76,01
4	Kawasan Lindung	122,59	6,77	115,82	23,16
5	Lahan Infrastruktur	142,27	10,60	131,67	26,33
6	Perdagangan dan Jasa	273,69	166,17	107,52	21,50
7	Perkebunan	1.234,87	1.500,07	-265,20	-53,04
8	Permukiman	15.218,40	14.715,09	503,31	100,66
9	Pertanian Lahan Basah	1.413,93	1.923,59	-509,66	-101,93
10	Pertanian Lahan Kering	2.091,23	2.595,80	-504,57	-100,91

Sumber: Novianti (2017).

B. Indikator Kinerja Pelayanan Perumahan

B.1 Backlog Perumahan

Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi berada pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kondisi perkembangan penduduk tersebut mengakibatkan permintaan lahan permukiman yang tinggi. Rata-rata permintaan lahan permukiman di Kota Bekasi diperkirakan mencapai 105 ha per tahun. Permintaan lahan permukiman yang tinggi mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan lahan terbuka. Sebagian dari proses alih fungsi lahan tersebut bertentangan dengan RTRW Kota Bekasi. Ketidaksesuaian perkembangan lahan permukiman tidak hanya terjadi pada alokasi lahan tetapi juga pada arah dan pola penyebarannya.

B.2 Perumahan Kumuh dan Tidak Layak Huni

Tahun 2016, luas Kawasan Kumuh Kota Bekasi 423,73 ha yang tersebar pada 122 titik lokasi. Berdasarkan peta tutupan lahan tahun 2014, lokasi Kawasan Kumuh pada umumnya berada pada kawasan perumahan tidak terstruktur (perumahan perkampungan) dengan kepadatan bangunan tinggi. Selama pembangunan pada periode 2013-2018, kawasan kumuh yang tertangani mencapai 58%.

2.4.6 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ini dijalankan untuk menjamin kebutuhan dasar penduduk terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan. Indikator yang diharapkan dapat dicapai adalah: jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas), tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan), layanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap terhadap wilayah kebakaran, dan penegakan Perda.

2.4.7 Sosial

A. Sarana Pelayanan Sosial

Dinas Sosial Kota Bekasi sudah mengajukan rencana pembangunan gedung rehabilitasi terpadu milik Pemkot Bekasi, dalam APBD Kota Bekasi tahun 2018. Kepala Dinsos Kota Bekasi Junaedi mengatakan, gedung tersebut rencananya berlokasi di Kawasan Pedurenan, Mustikajaya dan sekarang masih dalam pembahasan. Keberadaan gedung rehabilitasi terpadu dipandang mendesak, lantaran panti rehabilitasi yang ada sudah penuh. Selain itu, Dinsos Kota Bekasi tidak hanya melayani orang sakit semata, namun juga orang terlantar hingga orang dengan gangguan kejiwaan. “Walaupun memang secara teknis orang sakit adalah domainnya Dinas Kesehatan, namun kita terpadu antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam menangani orang-orang yang sakit dan terlantar. Sebelum adanya gedung rehabilitasi terpadu, Dinsos Kota Bekasi menampung orang yang terlantar di rumah singgah, orang sakit di RSUD, serta mereka yang terjaring rasia seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSK ditampung di PSBK Pangudiluhur atau Pasar Rebo (DKI Jakarta).

B. Indikator Kinerja Layanan Sosial

Tabel 2.47 Evaluasi Capaian Indikator RPJMD Urusan Sosial, Tahun 2014-2016

No	Indikator	Target			Capaian		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	80	82	85	80	74	85
2	Tingkat kemiskinan	5,87	5,72	5,62	5,25	5,46	5,06
3	Indeks Gini	$0,3 \leq G \leq 0,5$	$0,3 \leq G \leq 0,5$	$0,3 \leq G \leq 0,5$	0,33	0,41	0,39
4	Penanganan bencana alam	80	90	100	100	100	100

Sumber: Backgroundstudy Bidang PMM, 2017

Kewenangan kota dalam urusan sosial ada 6 yaitu: (1) pemberdayaan sosial (2) penanganan warga migran korban kekerasan; (3) rehabilitasi sosial; (4) perlindungan dan jaminan sosial; (5) penanganan bencana dan (6) taman makam pahlawan. Berikut ini evaluasi capaian indikator urusan sosial terhadap target RPJMD Kota Bekasi tahun 2014-2016.

Tabel 2.48 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
	Mantan Warga Binaan	Korban NAPZA	Keluarga Bermasalah	Keluarga Fakir Miskin	Korban Bencana Sosial / Pengungsi	Keluarga Berumah Tak Layak Huni
Pondok Gede	-	-	2	644	-	-
Jatisampurna	-	-	-	1.249	-	103
Pondok Melati	-	-	-	1.570	-	57
Jatiasih	9	16	18	2.484	-	278
Bantar Gebang	0	-	3	437	-	99
Mustika Jaya	11	-	4	167	-	82
Bekasi Timur	-	2	-	1.247	-	16
Rawalumbu	4	5	13	105	-	48
Bekasi Selatan	1	5	2	3.798	-	68
Bekasi Barat	-	1.246	53	1	-	-
Medan Satria	-	2	-	148	-	22
Bekasi Utara	1	18	1	1.759	-	187
TOTAL	26	1.294	96	13.636	-	960
Up Date					147	

Tabel 2.49 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kecamatan (lanjutan)

Kecamatan	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						Total
	Korban Bencana Alam	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Pengidap HIV/AIDS (ODHA)	Keluarga Rentan	Trafficking	
Pondok Gede	116	119	-	-	-	-	1.055
Jatisampurna	-	65	-	-	-	-	1.547
Pondok Melati	14	36	-	1	-	-	1.785
Jatiasih	2.323	158	3	-	2	2	5.787
Bantar Gebang	93	64	-	-	-	3	816
Mustika Jaya	148	87	-	-	6	-	697
Bekasi Timur	30	52	-	-	-	-	1.807
Rawalumbu	157	83	-	-	1	-	460
Bekasi Selatan	134	151	-	37	5	-	4.776
Bekasi Barat	23	59	3	1	-	-	1.471
Medan Satria	-	64	-	-	6	-	282
Bekasi Utara	134	187	-	22	3	-	2.820
TOTAL	3.172	1.125	6	61	23	5	23.303
Up Date			63	150			46.730

Dari empat indikator RPJMD di atas pada urusan sosial, seluruh indikator sudah mencapai target RPJMD kecuali penanganan PMKS pada tahun 2015. Meskipun nilai capaian sudah cukup baik, berdasarkan hasil FGD, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan urusan sosial yaitu: (1)

Penanggulangan kemiskinan mengalami pelambatan; (2) Ketimpangan cenderung tinggi; (3) Tingginya jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); (4) Terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi sosial; dan (5) Masih belum optimalnya fungsi masyarakat bagi penduduk yang rentan seperti penyandang cacat atau disabilitas.

Tabel 2.50 Beberapa Indikator Urusan Sosial 2016-2017

Indikator	2016	2017
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	38,94
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan		27.273
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan		70.033
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	35,01	38,94
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun	24.522	27.273
Jumlah PMKS yang Seharusnya memperoleh bantuan sosial dalam 1 Th	70.033	70.033
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sejenis	25,00	25,00
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) Tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE	200	200
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) Tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat	800	800
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	28,41	25,00
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun		3.965
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun		15.860

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian beberapa program/kegiatan sosial belum terlalu menggembirakan. Dari jumlah PMKS (70 ribu) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial, baru sekitar 27 ribu yang diberikan bantuan (38%). Dari 800 PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat (seperti KUBE) baru 200 tersentuh program (25%). Demikian juga untuk penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial, baru dapat memberikan jaminan sosial sekitar 25% dari keseluruhan (3.965 orang dari 15.860 orang).

2.4.8 Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mencatat di tahun 2017 jumlah perusahaan sebanyak 1.503 meningkat dari jumlah tahun 2013 yang 1.110 perusahaan. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 8-10% perusahaan yang mengalami sengketa pengusaha-pekerja (tahun 2013-2017 berkisar 79-161 perusahaan), dan hanya sebagian yang mencatatkan kasus tersebut (16-96 perusahaan). Berdasarkan catatan kasus tersebut,

pemerintah Kota Bekasi dapat menyelesaikan semuanya (100%) dengan Perjanjian Bersama (PB).

Tabel 2.51 Beberapa Indikator Urusan Tenaga Kerja 2013-2017

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Angka sengketa pengusaha-pekerja per th (%)	8,83	10,36	7,12	10,56	10,71
Jumlah sengketa pengusaha pekerja	98	115	79	128	161
Jumlah perusahaan	1.110	1.110	1.110	1.212	1.503
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	100	82,29	100	100	100
Σ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	82	79	82	18	16
Σ kasus yang dicatatkan	82	96	82	18	16
Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	78,29	29,91	48,03	45,00	0
Σ perusahaan yang telah diperiksa	869	367	365	270	
Σ perusahaan yang terdaftar	1.110	1.227	760	600	
Besaran Pengujian Peralatan di Perush (%)	33,36	36,23	83,82	33,91	0
Σ peralatan yang telah diuji	1.111	1.092	922	784	
Σ peralatan yang telah terdaftar	3.330	3.014	1.100	2.312	
Keselamatan dan perlindungan (%)	69,46	44,95	99,10	92,33	0
Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n	771	499	1.100	1.119	
Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n	1.110	1.110	1.110	1.212	
Besaran pekerja/buruh peserta Jamsostek (%)	43,71	60,45	91,04	91,19	91,23
Σ pekerja/buruh JAMSOSTEK	120.361	166.449	136.192	145.167	145.268
Σ pekerja/buruh	275.360	275.360	149.596	159.200	159.230
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	44,32	60,54	81,58	42,67	42,75
Σ pencari kerja yang ditempatkan	17.711	16.128	20.191	11.225	10.697
Σ pencari kerja yang terdaftar	39.966	26.639	24.749	26.305	25.020
Rasio lulusan S1/S2/S3 (Pencaker) (%)	24,11	11,00	5,97	7,01	9,33
Jumlah lulusan S1/S2/S3 (Pencaker)	9.637	2.930	1.477	1.845	2.334
Jumlah penduduk (Pencaker)	39.966	26.639	24.749	26.305	25.020
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	18,87	50,00	78,50	54,96	96,15
Σ tenaga kerja yang dilatih	200	200	420	72	100
Σ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	1.060	400	535	131	104
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	68,38	64,00	53,33	36,92	80,00
Σ tenaga kerja yang dilatih	80	64	64	48	80
Σ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	117	100	120	130	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	44,20	75,00	64,29	61,35	100,00
Σ tenaga kerja yang dilatih	80	90	90	100	240
Σ pendaftar pelatihan kewirausahaan	181	120	140	163	240

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2018

Pemerintah Kota Bekasi juga secara rutin memeriksa perusahaan yang terdaftar, namun dari tahun ke tahun kemampuan memeriksa makin menurun, kalau tahun 2013 mampu memeriksa 78,29% perusahaan yang terdaftar (869 dari 1.110 perusahaan) di tahun-tahun berikutnya hanya bisa diperiksa 29,91-48,03%. Demikian juga pengujian peralatan di perusahaan, prestasi tertinggi dicapai tahun 2015 yang mampu menguji 83,82% peralatan yang terdaftar (922 dari 1100 perusahaan), sedangkan di tahun yang lain capaiannya hanya di kisaran 33-36%.

Hal-hal yang cukup menggembirakan adalah hampir semua perusahaan menerapkan sistem keselamatan dan perlindungan kerja (K3), tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 99,1% (1100 dari 1110 perusahaan), sedikit menurun di tahun 2016 (92,3%) dan cukup di rendah di tahun 2013-2014 yang hanya 69% dan 44%. Demikian juga berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), hampir semua pekerja/buruh sudah terdaftar sebagai peserta Jamsostek, tahun 2015-2017 tercatat 91% pekerja/buruh yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek (145.268 dari 159.230 pekerja/buruh), meningkat tajam dibandingkan tahun 2013-2014 yang hanya 43 dan 60%.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mencatat jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 39.966 orang tahun 2013 dan cenderung menurun sampai 25.020 orang di tahun 2017. Dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan sebanyak 17.711 orang (44,32%) dan 10.697 orang (42,75%). Presentasi penempatan pencari kerja tertinggi pada tahun 2015 sebesar 81,58%. Tingkat pendidikan pencari kerja tersebut, 24,11% di antaranya S1/S2/S3 (tahun 2013) dan menjadi hanya 9,33% di tahun 2017.

Untuk meningkatkan ketrampilan pencari kerja, beberapa program pelatihan diberikan agar para pencari kerja siap masuk pasar kerja, ada pelatihan kewirausahaan, pelatihan berbasis masyarakat, dan pelatihan berbasis kompetensi. Dari tahun ke tahun program ini terus ditingkatkan cakupannya. Pada pelatihan kewirausahaan cakupannya meningkat dari 44,20% tahun 2013 menjadi 100% di tahun 2017. Demikian juga untuk pelatihan berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 68,38% dan 18,87% (tahun 2013) menjadi 80% dan 9,15% di tahun 2017.

2.4.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peran perempuan dalam pemerintahan, swasta, politik terus didorong dengan memberikan peluang yang sama (laki-laki dan perempuan) dalam mengaktualisasi diri di semua lini kehidupan. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah di sekitar 49 ribu orang, sedangkan yang bekerja di lembaga swasta sekitar 160 ribu orang. Di bidang politik jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan sebesar 16% (8 orang dari 50 orang).

Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi

pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan. Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah dari tingkat Pusat dan Daerah.

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak –haknya yang sama sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya itu diwujudkan dalam kebijakan negara maupun dalam kebijakan informal yang dipelopori oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan kendala-kendala yang struktural maupun kultural yang terjadi pada masyarakat. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut masing-masing elemen masyarakat dan individu mempunyai sensitifitas gender dan program-program Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender.

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan ” sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki-laki. Namun kenyataannya masih dijumpai bahwa status perempuan dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki”.

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

Untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setrara dengan laki-laki
Untuk membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan bertaqwa serta terlindungi.

Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan

- Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan;
- Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- Meningkatkan kualitas perandan kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan;
- Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender;
- Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.

Kebijakan Dasar Pemberdayaan Perempuan :

1. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dilakukan melalui *"one door policy"* atau kebijakan satu pintu;
2. Peningkatan kualitas SDM perempuan;
3. Pembaharuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
5. Penegakkan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan;
6. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
7. Pempampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan;
8. Peningkatan peran serta masyarakat;
9. Perluasan jangkauan pemberdayaan perempuan;
10. Peningkatan penerapan komitmen internasional.

Tabel 2.52 Beberapa Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah		44.217	49.070	49.070	44.969
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	0	16,00	16,00	16,00	16,00
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan		8	8	8	8
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD		50	50	50	50
Jumlah Pekerja perempuan di lembaga swasta		62.706	157.346	172.226	160.842
Rasio KDRT (%)	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Jumlah KDRT	215	231	213	230	205
Jumlah rumah tangga	532.152	532.904	533.552		
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	215	336	313	202	403
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	215	336	313	202	403

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	229	237	230	259	270
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	229	237	230	259	270
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0	0	0	100	100
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	0	0	0	15	22
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	0	0	0	15	22
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100
Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	229	237	230	259	270
Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	229	237	230	259	270
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0	100	100	100	100
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	0	8	3	13	23
Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	0	8	3	13	23

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi faktor yang penting dalam rangka membentuk keluarga harmonis, semakin kecil kejadian KDRT maka akan semakin memperkuat keluarga. Kasus KDRT di Kota Bekasi tahun 2013-2017 tercatat di sekitar 205-231 kasus KDRT dari sekitar 533 ribu rumah tangga.

Cakupan layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dari tahun 2013 – 2017 sebesar 100%. Pada tahun 2013 ada sebanyak 215 kasus kekerasan perempuan dan anak dan semua dapat ditangani dengan baik, demikian juga tahun 2017 terdapat 207 kasus dan semua dapat diselesaikan 100%.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas pada tahun 2013-2017 sebesar 100%, tercatat tahun 2013 sebanyak 229 kasus yang meningkat tahun 2017 menjadi 270 kasus, dan semua dapat dilayani kesehatannya.

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baru tercatat di tahun 2016 sebesar 15 kasus dan meningkat tahun 2017 menjadi 22 kasus, dan semua dapat diselesaikan semua dengan baik (100%).

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2013 tercatat 229 perempuan/anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum, meningkat di tahun 2017 menjadi 270 perempuan/anak yang mendapat bantuan hukum. Dan dari tahun ke tahun, cakupan layanan hukum untuk perempuan/anak korban kekerasan mencapai 100%.

Perempuan dan anak korban kekerasan selanjutnya dikembalikan kepada keluarga/keluarga lain/masyarakat atau disebut reintegrasi sosial. Kasus seperti ini tercatat di tahun 2014 sebanyak 8 kasus dan meningkat menjadi 23 kasus di tahun 2017. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sepanjang tahun 2014-2017 mencapai angka 100%.

2.4.10 Pangan

Dinas Ketahanan Pangan mencatat bahwa Ketersediaan Pangan Utama tahun 2017 sebesar 82,17 Kg/jiwa, angka ini diperoleh dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 236.101.634 Kg dengan jumlah penduduk 2.873.484 jiwa.

Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Tahun 2017 tercatat 26 sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di Kota Bekasi dari 48 total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di Kota Bekasi (54,17%).

Hanya satu indikator yang tidak tersedia data, yaitu Ketersediaan energi dan protein perkapita.

2.4.11 Pertanahan

Ada tiga indikator untuk urusan pertanahan, yaitu: persentase luas lahan yang bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian ijin lokasi.

2.4.12 Lingkungan Hidup

A. Indikator Lingkungan Hidup

Kewenangan akan urusan Lingkungan Hidup di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran K, soal Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Ada 11 poin sub bidang Urusan Lingkungan Hidup yang dapat dikelola atau diberikan kewenangan dan menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota adalah:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup. Kabupaten/Kota membuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kabupaten/Kota membuat KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Kabupaten/Kota;

3. Keanekaragaman Hayati (Kehati). Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Kehati di Kabupaten/Kota;
4. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. Kabupaten/Kota (a) menetapkan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/kota, (b) peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota;
5. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota;
6. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;
7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pengaduan Lingkungan Hidup. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: (a) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (b) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah Kabupaten/Kota; dan
9. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Kabupaten/Kota menyediakan (a) penyimpanan sementara LB3, dan (b) pengumpulan LB3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Kabupaten/Kota melakukan Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten/Kota;
11. Persampahan, yang meliputi: (a) pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, (b) penerbitan izin pen-daur-ulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, (c) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta

Kinerja urusan Lingkungan Hidup Kota Bekasi dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Sesuai dengan **Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota**, Kota Bekasi telah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pada tahun 2017 dan saat ini telah masuk dalam proses legislasi di DPRD untuk di Perda kan tahun 2018 ini. Dengan demikian dokumen RPPLH belum terintegrasi secara formal ke dalam

rencana pembangunan Kota Bekasi, namun informal substansi lingkungan hidup telah mewarnai rencana pembangunan Kota Bekasi. Bersamaan dengan rencana penerbitan Perda RPPLH, juga diusulkan Raperda Keanekaragaman Hayati (Kehati).

Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang lain adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yaitu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Payung hukum pelaksanaan KLHS adalah UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan **PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**, serta Permen LHK Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Disamping itu juga diterbitkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 **tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD**.

Kota Bekasi telah menyusun KLHS untuk RPJMD periode 2013-2018. Tahun ini kembali disusun KLHS untuk RPJMD 2018-2023 sesuai dengan Permendagri **No. 7/2018**.

Indikator lainnya adalah Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) tidak dilaksanakan karena di Kota Bekasi tidak ada MHA. Demikian juga Diklat lingkungan hidup bagi masyarakat, pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota Bekasi, dan peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) belum dilaksanakan.

Tabel 2.53 Beberapa Indikator Urusan Lingkungan Hidup

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	tidak ada	0	0	0	0
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	0	0
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	tidak ada				
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (perusahaan)	0	0	0	0	166
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah	0	0	0	0	0

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
kabupaten/kota.					
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		43,50	49,20	42,00	36,80
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara (Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU))					96,76
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	22,38	22,38	22,38	22,39	22,38
Tutupan Hutan	0,0001	0,0001	0,0001	0,000138	0,0001
Timbulan sampah yang ditangani (%)	58,68	61,49	60,29	61,26	47,51
Volume timbunan sampah yang ditangani	1.110.078	1.336.928	1.311.882	1.336.928	1.336.928
Total timbunan sampah	1.891.900	2.174.204	2.175.777	2.182.316	2.813.796
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0	0	0	0	0
Persentase cakupan area pelayanan	0	0	0	0	0
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	0	0	0	0	0
Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Tidak ada	0	0	0	0
Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	tidak ada	0	0	0	0
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Dalam hal Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan upaya-upaya yang positif. Salah satunya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pihak yang telah mengajukan ijin lingkungan. Tahun 2017 tercatat ada 166 ijin lingkungan yang diberikan kepada perusahaan, berupa dokumen: UKL-UPL, Amdal, Ka Andal, DPLH, DELH, dan Addendum. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pengawasan terhadap 166 perusahaan tersebut dan hasilnya semua perusahaan yang mengantongi ijin lingkungan tersebut dinyatakan Tertib Administrasi. Pada tahun yang sama terdapat 38 perusahaan yang mendapat ijin mengelola limbah B3 dan ada 7 perusahaan yang diberikan ijin pembuangan limbah cair.

Upaya lainnya adalah melakukan beberapa pengukuran indikator lingkungan hidup, seperti: indek kualitas air, indek kualitas udara, dan indek tutupan lahan. Indikator-indikator ini akan memberikan peringatan tentang perlu/tidaknya ada tindakan segera untuk memperbaiki kondisi lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehat. Tabel di atas menggambarkan indek kualitas air tahun 2014-2017 di sekitar angka 40, indek tutupan lahan di sekitar 22,3, dan indek kualitas udara melalui Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) tahun 2017 sebesar 96,76 dalam kategori cukup/sedang.

Saat ini Indeks standar kualitas udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia adalah Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45/MENLH/1997 Tentang Indeks Standar

Pencemar Udara. Dalam keputusan tersebut yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan diantaranya: bahwa untuk memberikan kemudahan dari keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara perlu disusun Indeks Standar Pencemar Udara. Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Indeks Standar Pencemar Udara ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi. Rentang Indeks Standar Pencemar Udara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54 Kriteria Indeks Standar Pencemar Udara

Kategori	Nilai	Keterangan
Baik	0 – 50	Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika
Sedang	51 – 100	Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika
Tidak Sehat	101 – 199	Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika
Sangat Tidak Sehat	200 - 299	Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar
Berbahaya	300 - 3000	Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi

Sumber: KEPMEN LH No. KEP-45/MENLH/10/1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara

Selanjutnya, indikator lingkungan hidup yang penting adalah tentang pengelolaan sampah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka produksi sampah rumah tangga juga ikut meningkat. Kalau tahun 2013 jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa dengan volume produksi sampah sekitar 1,9 juta m³ meningkat menjadi 2,8 juta jiwa dan 2,8 juta m³ sampah. Dari produksi sampah yang semakin meningkat tersebut, tidak diiringi dengan baiknya tingkat penanganan timbulan sampah. Tercatat tahun 2013 hanya 58,68% sampah yang tertangani dengan baik (setara dengan 1,11 juta m³), tahun 2017 kondisinya menurun hanya bisa terlayani 47,5%. Turunnya kinerja pelayanan sampah ini, disamping faktor pertumbuhan penduduk juga disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana lingkungan hidup. Rincian dari indikator di atas pada umumnya belum dilakukan oleh OPD terkait, seperti: sampah yang berkurang dengan gerakan 3R, ijin pengelolaan sampah oleh swasta, fasilitas pengurangan sampah di perkotaan, pengelolaan sampah, dan sebagainya.

2.4.13 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ada tujuh indikator untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu: Rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Cakupan penerbitan akta kelahiran.

Tabel 2.55 Capaian indikator Dukcapil dari tahun 2015 – 2017

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017
1	Rasio penduduk ber-KTP	Rasio	98,30	76,08	80,77	n.a
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	53,76	87,27	54,54	n.a
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	na	68,14	71,59	n.a
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	n.a	n.a	n.a	n.a
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	n.a	n.a	n.a	n.a
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,30	76,08	n.a	n.a
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran.	%	73,40	87,27	n.a	n.a

Sumber: LKPJ Kota Bekasi tahun 2018

Rasio penduduk ber-KTP, rasio berakte kelahiran, dan pasangan berakte nikah di Kota Bekasi berada diatas 1. Hal ini mengindikasikan terjadi permasalahan dalam administrasi kependudukan, karena bisa jadi terdapat penduduk di luar Kota Bekasi yang mendaftarkan KTP, akte kelahiran dan akte nikah di Kota Bekasi. Cakupan penertiban KTP di Kota Bekasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 penertiban KTP sudah mencapai 98,30%, namun pada tahun 2015 menurun menjadi 76,08%. Adapun cakupan penertiban akta kelahiran mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 hanya mencapai sekitar 73,40% yang selanjutnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan signifikan hingga 87,27%. Fluktuasi ini menunjukkan belum efektifnya upaya untuk mengendalikan masyarakat dalam membuat akte kelahiran.

2.4.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk menjalankan urusan penduduk dan keluarga berencana, ada beberapa indikator penting yang harus dicapai. Salah satu indikator tersebut adalah infrastruktur dan suprastruktur pengendalian penduduk dan KB. Tabel berikut ini akan menguraikan capaian kinerja urusan ini berdasarkan indikatornya. Pada kurun waktu 2013-2017 belum ada Perda/Perkada yang mengatur tentang pengendalian penduduk, demikian juga karena belum tersedia data profil penduduk maka belum bisa digunakan oleh OPD lain dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Urusan pengendalian penduduk dan KB telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, ada pembagian peran antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah menyusun *grand design* (rancangan induk) Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2011-2035 tingkat nasional telah selesai dan

diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemendukkesra) pada bulan Desember 2012. GDPK ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Keputusan Menkokesra tersebut mengamanahkan penyusunan lima buah grand design: grand design pengendalian kuantitas penduduk, grand design peningkatan kualitas penduduk, grand design pembangunan keluarga, grand design penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan grand design pembangunan data basis kependudukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai *leading sector* penyusunan grand design pengendalian kuantitas penduduk tingkat nasional.

Selanjutnya pemerintah provinsi dan kab/kota menyusun rancangan induk pengendalian penduduk sesuai pembagian kewenangan di atas. Sejauh ini Kota Bekasi telah menyusun dokumen tersebut dan telah disosialisasikan ke seluruh OPD, sehingga dianggap seluruh OPD telah memanfaatkan dokumen tersebut dalam perencanaan pembangunan. Kerjasama pendidikan formal dan informal tentang kependudukan belum dilaksanakan.

Program pengendalian penduduk di Kota Bekasi tahun 2013-2017 menunjukkan capaian yang cukup baik dengan ditandai dengan rata-rata jumlah anak sekitar 1,6 orang per keluarga. Capaian ini tidak terlepas dari peranserta OPD dalam mewujudkan program Kampung KB, 14 dari 43 OPD (32,56%) mendukung program ini. Jumlah petugas KB (PLKB) yang sebanyak 73 orang telah seluruhnya didayagunakan dalam perencanaan pembangunan. Rasio akseptor KB mencapai angka di sekitar 80, artinya setiap 100 pasangan usia subur (PUS), 80 orang di antaranya menjadi peserta KB. Demikian juga untuk rasio pengguna kontrasepsi pada usia subur 15-49 tahun mencapai angka 80, artinya padaadaa setiap 100 orang wanita menikah usia 15-49 th terdapat 80 orang pengguna kontrasepsi. Sejalan dengan hal tersebut, hanya terdapat sekitar 10% PUS yang ingin ber KB tidak terlayani (*unmet need*) dan sekitar 30% PUS menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKPJ), serta sekitar 15% tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

Tabel 2.56 Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Nama Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	belum ada	0	0	0	0
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	belum ada data profil penduduk	0	0	0	0
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	belum ada	0	0	0	100

Nama Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jml perangkat daerah yg menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk					43
Jumlah semua perangkat daerah	0	0	0	0	43
Jml kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, dan non formal yang melakukan pendidikan kependudukan	blm ada	0	0	0	0
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,58	1,55	1,73	1,70	1,69
Jumlah anak	875.262	881.885	889.497	897.429	905.993
Jumlah keluarga	553.933	567.739	514.740	527.407	536.396
Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0	0	0	0	32,56
Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB				2	14
Jumlah semua perangkat daerah					43
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	73	74	76	70	62
Jumlah PKB/PLKB	73	74	76	70	62
Ratio Akseptor KB	73,72	75,36	81,01	81,10	76,89
Jumlah Akseptor KB	352.283	371.207	402.706	370.969	317.991
Jumlah pasangan usia subur	477.854	492.552	497.089	457.440	413.587
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	73,72	75,33	81,01	81,10	76,89
Jumlah peserta KB aktif	352.283	371.027	402.706	370.969	317.991
Jumlah pasangan usia subur	477.854	492.552	497.089	457.440	413.587
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1,89	2,48	0	0	0
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	9.012	12.204			
Jumlah pasangan usia subur	477.854	492.552	497.089	457.440	413.587
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	16,37	9,65	7,78	9,17	10,24
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	78.221	47.508	38.692	41.925	42.354
Jumlah pasangan usia subur	477.854	492.552	497.089	457.440	413.587
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	30,11	29,47	28,26	30,93	31,04
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	106.068	109.399	113.812	114.731	98.692
Jumlah akseptor KB	352.283	371.207	402.706	370.969	317.991
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	12,13	19,89	14,71	11,30	16,74
Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	42.723	73.837	59.249	41.925	53.242
Jumlah akseptor KB	352.283	371.207	402.706	370.969	317.991
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa	144,64	146,43	146,43	148,21	151,79

Nama Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
(PPKBD) setiap desa/kelurahan					
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	81	82	82	83	85
Jumlah desa/kelurahan	56	56	56	56	56
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	80,89	66,04	53,53	80,60	78,74
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	27.607	20.488	10.086	10.374	11.602
Jumlah anggota kelompok BKB	34.128	31.022	18.841	12.871	14.735
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	17,65	17,18	26,39	27,22	35,86
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	18.509	31.022	18.841	18.864	20.232
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	104.876	180.585	71.381	69.311	56.427
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	85,36	85,86	52,66	70,80	72,37
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	21.029	20.488	5.201	5.549	6.472
Jumlah anggota kelompok BKR	24.637	23.862	9.877	7.838	8.943
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	45,06	52,06	39,62	75,73	75,02
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	5.456	5.981	3.325	3.329	3.953
Jumlah anggota kelompok BKL	12.109	11.488	8.393	4.396	5.269
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0	0	0	25.00
Jumlah PPKS				2	3
Jumlah kecamatan					12
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	82,21	85,25	84,41	84,19	86,61
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	402	474	839	740	802
Jumlah anggota kelompok UPPKS	489	556	994	879	926
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	60,09	161,84	62,59	177,01	394,95
Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	39.774	129.445	33.222	76.465	186.544
Perkiraan Permintaan Masyarakat	66.191	79.982	53.079	43.198	47.232
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	-	89,29	125,00	151,79	151,79
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	tidak ada	50	70	85	85
Jumlah Faskes dan jejaring	56	56	56	56	56

Nama Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	886	702	648	716	823
Jumlah kelompok kegiatan	886	702	648	716	823

Sumber: Dinas PPKB, 2018

Untuk meningkatkan layanan KB telah dibentuk Pembina Pembantu KB Desa (PPKBD) yang tersedia hampir 2 orang tiap desa, dari 56 kelurahan terdapat sekitar 85 orang PPKBD. Disamping itu juga dilakukan pembinaan keluarga sejahtera, mulai dari pembinaan balita, remaja, dan lansia. Demikian juga dilakukan perbaikan ekonomi keluarga, dan mendirikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang baru didirikan di 3 dari 12 kecamatan yang ada (25%).

Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan program Bina Keluarga Remaja (BKR) masing-masing telah mencakup 80% dari seluruh keluarga. Sedangkan program Bina Keluarga Lansia (BKL) baru mencakup sekitar 50% dari seluruh keluarga.

2.4.15 Perhubungan

Urusan perhubungan digambarkan melalui 10 indikator, mulai indikator tentang penumpang, ijin travel, ijin kir kendaraan umum, jumlah pelabuhan/terminal, pemasangan rambu-rambu, jumlah barang yang terangkut, layanan penumpang dan sebagainya. Tabel berikut ini akan menggambarkan kinerja layanan umum untuk urusan perhubungan.

Tabel 2.57 Beberapa Indikator Urusan Perhubungan

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah arus penumpang angkutan umum					
Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun	1.453.986	1.243.783	1.251.352	989.179	479.301
Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	1.455.716	1.451.738	1.475.808	1.359.863	658.211
Rasio ijin trayek	0	0	0	0	0
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	664	2.512	2.357	1.673	655
Jumlah penduduk					
Jumlah uji kir angkutan umum	39.893	43.679	48.660	57.320	61.594
Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor. baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	39.893	43.679	48.660	57.320	61.594
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	3	3	3	3

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	3	3	3	3
Persentase layanan angkutan darat	0	0	0	0.75	0.55
Jumlah angkutan darat	6.497	6.450	6.405	6.385	6.303
Jumlah penumpang angkutan darat				853.572	1.137.152
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	0	0	0	0	0
Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n					
Jumlah angkutan umum pada Tahun n	39.893	43.679	48.660	57.320	61.594
Pemasangan Rambu- rambu	0	0	0	0	0
Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n			1.197	730	409
Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia			180m2. 15 lokasi	250 m2. 4 lokasi. 558 m	2058,36m2 4 lokasi. 558 m
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	2.909.702	2.695.521	2.727.160	2.349.042	1.137.152
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	2.909.702	2.695.521	2.727.160	2.349.042	1.137.152
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum					
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	2.909.702	2.695.521	2.727.160	2.349.042	1.137.152
Jumlah orang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun	2.909.702	2.695.521	2.727.160	2.349.042	1.137.152
Jumlah barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun					

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018

2.4.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Ada tujuh indikator untuk urusan koperasi, usah kecil dan menengah, yaitu: persentase koperasi aktif, persentase UKM aktif, persentase BPR/LKM aktif, persentase UKM, persentase wirausaha muda, cakupan pembinaankeompok pedagang informal, dan cakupan bina kelompok pengrajin.

2.4.17 Penanaman Modal

Pada kurun waktu 2013-2017 telah terjadi kenaikan jumlah investor yang semula 66 menjadi 217 investor, walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Sejalan dengan kenaikan jumlah investor, juga diikuti dengan kenaikan nilai investasi. Rasio daya serap tenaga kerja berkisar antara 0,93 – 0,98 artinya setiap 100 PMA/PMDN akan menyerap tenaga kerja 93-98 orang. Indikator yang lain, menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN, dari 14.820M di tahun 2013 menjadi 53.200M di tahun 2017.

Urusan penanaman modal dijalankan oleh Dinas PM dan PTSP dengan capaian seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58 Beberapa Indikator Urusan Penanaman Modal

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	66	114	340	375	217
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.529.660	5.178.564	9.892.062	32.558.856	16.499.936
Rasio daya serap tenaga kerja	0,98	0,97	0,93	0,94	0,95
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	3.717	3.822	4.300	5.366	4.061
Jumlah seluruh PMA/PMDN	3.783	3.936	4.640	5.741	4.278
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	14.820	10.658	24.592	46.201	53.200
Realisasi PMDN Tahun evaluasi (Juta)	5.126.645	5.423.839	6.731.170	8.688.493	10.014.890
Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi (juta)	4.464.951	4.901.446	5.402.591	5.942.850	6.537.140
Realisasi PMDN sebelum evaluasi (juta)	4.464.951	4.901.446	5.402.591	5.942.850	6.537.140

Sumber: Dinas PM dan PTSP Kota Bekasi, 2018

2.4.18 Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dijelaskan dalam tabel berikut ini. Di Kota Bekasi pada kurun waktu 2013-2017, terdapat 94 organisasi pemuda.

Dalam hal pembinaan olahraga, telah dilakukan pembinaan terhadap 40 dan 43 cabang olahraga dari 47 cabang olahraga yang terdaftar (91,49%). Jumlah pelatih yang terdaftar sebanyak 78 orang dengan jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 26 orang, dan cabang olahraga yang berprestasi sebanyak 30.

Tabel 2.59 Beberapa Indikator Urusan Pemuda dan Olahraga

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah seluruh organisasi pemuda	94	94	94	94	94
Cakupan pembinaan olahraga	85,11	85,11	85,11	85,11	91,49
Jumlah cabang olahraga yang dibina	40	40	40	40	43
Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	47	47	47	47	47
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0	0	0	0	0
Jumlah pelatih bersertifikat					
Jumlah seluruh pelatih	78	78	78	78	78
Jumlah atlet berprestasi	0	3	0	19	26
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.		3		19	26
Jumlah prestasi olahraga	0	0	0	19	30
Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun				19	30

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018

2.4.19 Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

Urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di Kota Bekasi dijalankan oleh Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, dengan indikator di sepanjang tahun 2013-2017 digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60 Beberapa Indikator Urusan Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian

Nama Indkator	2016	2017
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	16,67	16,67
Jumlah KIM	2	2
Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	12	12
Cakupan Layanan Telekomunikasi	100,00	100,00
Luas Wilayah Yang Tercoverage	210,49	210,49
Luas Wilayah Keseluruhan	210,49	210,49
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada
Buku "Kota Dalam Angka"	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada	Ada
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	91,30
Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah		42
Jumlah total perangkat daerah		46

Sumber: Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian

Cakupan telekomunikasi telah melayani seluruh wilayah, namun demikian belum dilakukan pembinaan yang intensif terhadap kelompok masyarakat. Dari 12 kecamatan baru terbentuk 2 Kelompok Komunikasi Masyarakat (KIM) di 2 kecamatan atau 16,67%.

Telah tersedia sistem data dan statistik yang terintegrasi dengan digambarkan bahwa telah tersedia buku Kota Bekasi Dalam Angka dan PDRB.

OPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah mencapai 91,3% di tahun 2017 (42 dari 46 OPD).

2.4.20 Perpustakaan

Urusan perpustakaan dijalankan oleh Dinas Perpustakaan Daerah. Peran perpustakaan sangat penting untuk menyediakan sumber informasi yang valid dan lengkap terhadap penduduk Kota Bekasi. Dengan tersedianya sumber informasi maka masyarakat dapat memanfaatkan untuk beberapa kepentingan yang berbeda. Pelajar dan mahasiswa akan menggunakan perpustakaan sebagai wahana untuk melengkapi buku teks. Ibu rumah tangga akan mendapatkan sumber bacaan yang variatif, dan sebagainya.

Pada tabel di bawah ini digambarkan mengenai indikator-indikator urusan perpustakaan sebagai berikut.

Tabel 2.61 Beberapa Indikator Urusan Perpustakaan

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0	0,0067	0,0056	0,0063	0,0082
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Th	5.791	14.665	12.231	15.679	20.685
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani (usia 5-64 th)		2.199.603	2.171.733	2.475.900	2.537.818
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,303	0,283	0,270	0,278	0,281
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	7.858	10.316	12.438	13.207	13.607
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	25.948	36.406	46.060	47.582	48.382
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	5.791	14.665	12.231	15.679	20.685
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	7.858	10.316	12.438	13.207	13.607
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	0	0	0	0	2

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2018

Jumlah pengunjung meningkat cukup besar, dimana tahun 2013 perpustakaan hanya dikunjungi sekitar 5 ribu orang menjadi 20 ribu di tahun 2017. Jika dibandingkan jumlah penduduk yang harus dilayani (umur 5-64 th), maka perpustakaan ini baru melayani sekitar 0,82%.

Jumlah koleksi judul buku juga meningkat dari 7.858 judul buku tahun 2013 menjadi 13.607 judul buku di tahun 2017, dengan jumlah buku di tahun yang sama 25.948 buku meningkat menjadi 48.382 buku. Dengan demikian setiap judul buku rata-rata tersedia 3 buah buku.

Dinas perpustakaan daerah, didukung oleh tersedianya jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikasi.

2.4.21 Kearsipan

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka mendukung kegiatan e-government dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber

informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan arah kebijakan yang dilakukan yaitu:

- 1) Meningkatkan pembinaan kearsipan dinamis, tidak hanya pada SKPD tetapi desa/kelurahan maupun lembaga-lembaga lain agar sistem pengelolaan kearsipan berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
- 2) Memberi kesadaran atau pemahaman agar terciptanya arsip yang bernilai guna, untuk dan atau sebagai alat bukti hukum yang sah sebagai pedoman kerja lembaga pencipta arsip.
- 3) Memberikan pengertian bahwa arsip adalah pusat refrensi dan ingatan organisasi, sumber informasi alat bukti, serta alat pengawasan sebagai bahan pertanggung jawaban nasional tentang perencanaan pengorganisasian, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan penyelenggaraan suatu kegiatan yang menentukan eksistensi organisasi dalam kehidupan bernegara.
- 4) Membentuk Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada masa mendatang berkaitan dengan pelayanan kearsipan dan kemanfaatan arsip untuk mencapai sistem kearsipan yang berkualitas
- 5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan mencukupi kebutuhannya dengan koordinasi dan konsultasi serta berupaya melaksanakan ketrampilan pengelola kearsipan.

Dalam kurun waktu 2013-2017, indikator urusan kearsipan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Tahun 2014 baru 11,63% menjadi 30,43% di tahun 2017 (14 dari 46 PD).

Program peningkatan sumberdaya manusia pengelola kearsipan dijalankan di semua PD tahun 2017 (46 PD), sebelumnya bertahap dilakukan di 28, 22, dan 43 PD tahun 2014-2016. Rata-rata kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 2 kegiatan.

Tabel 2.62 Beberapa Indikator Urusan Kearsipan

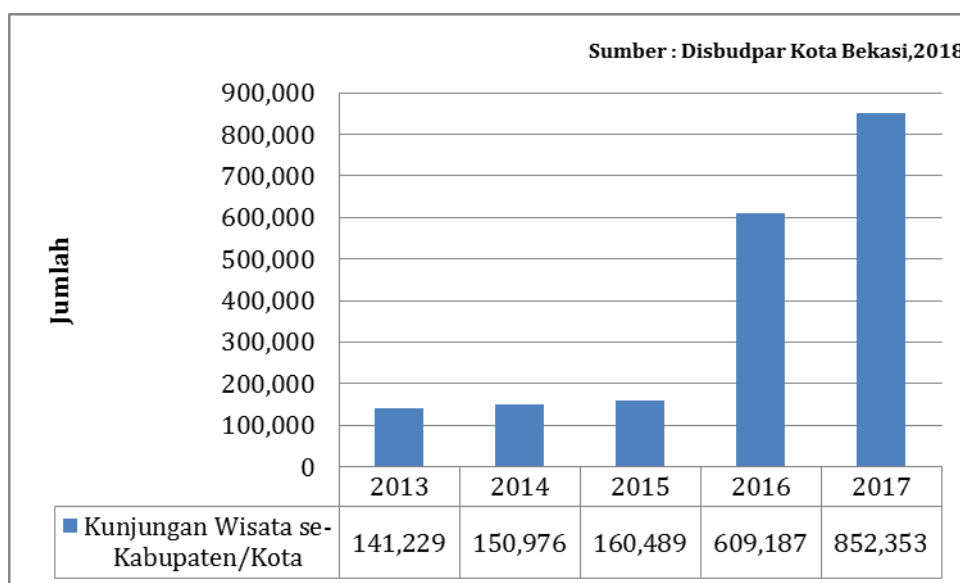
Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	0,00	11,63	20,93	23,26	30,43
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	0	5	9	10	14
Jumlah Perangkat Daerah	0	43	43	43	46
Peningkatan SDM pengelola kearsipan		28	22	43	46
Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	2	1	2	2

Sumber: Dinas Kearsipan Daerah Kota Bekasi, 2018

2.4.22 Pariwisata dan Kebudayaan

Kota Bekasi merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter sebagai destinasi wisata perkotaan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan variasi produk wisata kota (*urban tourism*), seperti wisata: wisata keluarga, wisata belanja, wisata sejarah, wisata pendidikan dan budaya serta wisata industri.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir jumlah wisatawan mengalami peningkatan, jumlah kunjungan wisata di Kota Bekasi mencapai 852.353 wisatawan pada tahun 2017, meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2013 (141.229 wisatawan).



Gambar 2-57 Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kota Bekasi 2013-2017

Namun kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bekasi tergolong sangat kecil, hanya 0,02% dari PAD Kota atau senilai Rp.263.899.673,- pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan ditahun 2017 dengan nilai pendapatan dari sektor pariwisata mencapai Rp.308.437.146.

Tabel berikut ini juga menunjukkan bahwa dalam kurun 2013-2017 lama kunjungan wisatawan di Kota Bekasi hanya 1-2 hari. Hal ini diduga karena obyek wisata yang di sajikan terutama adalah wisata perkotaan (*urban tourism*) dan belum ditunjang dengan jenis wisata yang lain. Dengan pendeknya lama kunjungan wisatawan mempengaruhi pula pada PAD sektor pariwisata.

Untuk urusan Kebudayaan, tabel berikut ini menjelaskan tentang indikator-indikatornya. Terlihat bahwa ada 16 festival seni dan budaya di tahun 2017, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Bekasi memiliki beberapa benda, situs dan kawasan cagar budaya sebanyak 69 buah di tahun 2017 dan hanya 8 buah yang dilestarikan (12%). Ke delapan lokasi kawasan cagar budaya tersebut juga dikelola secara terpadu. Hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata minat khusus di Bekasi.

Tabel 2.63 Beberapa Indikator Urusan Pariwisata

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kunjungan Wisata se-Kab/Kota	141.229	150.976	160.489	609.187	852.353
Lama kunjungan Wisata	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
PAD sektor pariwisata (%)	0	0	0	0,0156	0,0175
PAD sektor pariwisata				263.899.672	308.437.146
Total PAD (Juta)				1.686.661	1.766.290

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018

Tabel 2.64 Beberapa Indikator Urusan Kebudayaan

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya				13	16
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0,471	0,471	0,471	0,471	0,116
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	8	8	8	8
Total Benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	17	17	17	17	69
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018

2.4.23 Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Ada enam indikator untuk urusan pertanian, yaitu: Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB, Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB, Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB, Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, dan Cakupan bina kelompok petani. Belum adanya data terkait indikator urusan pertanian di atas, maka tidak dapat didiskripsikan di sini.

Ada enam indikator untuk urusan kelautan dan perikanan, yaitu: Produksi perikanan, budidaya (ikan hias), Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nelayan, Produksi perikanan kelompok nelayan, Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial.

2.4.24 Perindustrian dan Perdagangan

Ada satu indikator untuk urusan perindustrian, yaitu: Cakupan bina kelompok pengrajin. Belum adanya data terkait indikator urusan perindustrian di atas, maka tidak dapat didiskripsikan di sini. Ada dua indikator untuk urusan perdagangan, yaitu: ekspor bersih perdagangan yang merupakan selisih dari total ekspor dan total impor, serta Cakupan bina kelompok usaha/pedagang informal.

2.4.25 Perencanaan Pembangunan

Penunjang urusan Perencanaan Pembangunan mempunyai peran yang sangat strategis, karena seluruh aktivitas pembangunan direncanakan, dimonitor, dan dievaluasi melalui urusan perencanaan pembangunan ini. OPD yang menjalankan urusan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi.

Tabel berikut ini menjelaskan tentang indikator-indikator perencanaan pembangunan. Pada kurun waktu 2013-2017, dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta RTRW, tersedia dan telah ditetapkan melalui Perda/Perkada.

Tabel 2.65 Beberapa Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	96	100	100	105	97
Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	103	113	130	126	115
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	107	113	130	120	119
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	95	92	100
Jumlah program APBD Tahun berkenaan	103	113	123	116	115
Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	103	113	130	126	115
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	100	100	100	100	100
Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	22	22	22	22	22
Jumlah Program yang ada di Dokumen RTRW	22	22	22	22	22

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2018

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD berkisar di antara 96-105%, artinya jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan bisa lebih banyak daripada jumlah program RKPD tahun berkenaan (tahun 2013: 107 vs 103 program, dan tahun 2017: 119 vs 115 program). Jumlah program RPJMD lebih sedikit daripada RKPD (tahun 2016: 120 vs 126 program), dan tahun 2014 dan 2015 program RPJMD dan RKPD sama banyak.

Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD dalam kurun waktu 2013-2017 tercapai 100%, kecuali tahun 2015 dan 2016 yang mencapai 95% dan 92%.

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW tahun 2013-2017 mencapai 100%. Angka ini diperoleh dari Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dan Jumlah Program yang ada di Dokumen RTRW.

2.4.26 Keuangan

Ada sembilan indikator untuk urusan keuangan, yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan, Persentase SILPA, Persentase program yang tidak terlaksana, Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana, Persentase belanja pendidikan (20%),

Persentase belanja kesehatan (10%), Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, Bagi hasil kabupaten/kota dan desa, Penetapan APBD. Secara lebih rinci pembahasan aspek keuangan dapat dilihat pada Bab 3.

2.4.27 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Ada enam indikator untuk urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, yaitu: Rata-rata lama pegawai mendapatkan Diklat, Persentase ASN yang mengikuti Diklat formal, Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat struktural, Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, dan Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

Tabel 2.66 Perkembangan Indikator ASN Kota Bekasi 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan Diklat, 2013-2017	Hari	5	5	5	5	5
2	Persentase ASN yang mengikuti Diklat formal, 2013-2017	%	14,13	8,31	10,82	6,27	8,64
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat struktural, 2013-2017	%	87,33	92,23	91,59	93,40	93,97
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, 2013-2017	orang	36	36	31	36	39
5	Jumlah jabatan administrator pada instansi pemerintah, 2013-2017	orang	169	170	172	155	192
6	Persentase pelanggaran pegawai, 2013-2017	%	0,22	0,61	0,62	1,78	0,78
7	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah, 2013-2017	orang	7.384	7.328	7.357	7.619	6.243

2.4.28 Penelitian dan Pengembangan

Ada empat indikator untuk urusan penelitian dan pengembangan, yaitu: Persentase implementasi rencana kelitbangan, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Sampai saat ini indikator kinerja kelitbangan masih relatif rendah sejalan dengan pagu anggaran program yang relatif rendah.

2.4.29 Pengawasan

Ada tiga indikator untuk urusan pengawasan, yaitu: Persentase tindak lanjut temuan, Persentase pelanggaran pegawai, dan Jumlah temuan BPK.

2.4.30 Sekretariat Dewan

Ada tiga indikator untuk penunjang urusan sekretariat dewan, yaitu: Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD; Tersusun dan terintegrasinya

program pengawasan dalam dokumen RPJMD dan RKPD; dan Tersusun dan terintegrasinya program pengawasan dalam dokumen anggaran Sekwan.

2.5. Evaluasi Capaian Hasil Pembangunan

2.5.1 Anaisis Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Kinerja Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (Permendagri 86/2017)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelayanan Dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.⁶

Dalam menjalankan ketentuan pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih mengacu terhadap definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM tersebut harus didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.⁷

Pelayanan Dasar yang dilakukan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bekasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain:⁸ (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di atas sekaligus merupakan jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah

⁶ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

⁸ Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Kota Bekasi yang harus mencakup Materi muatan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: 9 (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; dan (3) Penerima Pelayanan Dasar. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis yang dimaksud di atas, ditetapkan oleh Kementerian terkait setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, misalnya bidang pendidikan mengacu terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.67 Penjelasan SPM Dasar menurut bidang

No.	Bidang	Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
1.	Pendidikan	a. Pendidikan anak usia dini. b. Pendidikan dasar. c. Pendidikan kesetaraan.
2.	Kesehatan	a. pelayanan kesehatan ibu hamil. b. pelayanan kesehatan ibu bersalin. c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir. d. pelayanan kesehatan bayi baru lahir. e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota. b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota.
5.	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. b. pelayanan informasi rawan bencana. c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.
6	Sosial	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti. b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti. c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.

⁹ Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Manurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian terkait dilakukan melalui 4 (empat) tahapan: (1) Pengumpulan data; (2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.¹⁰ Sedangkan Laporan Standar Pelayanan Minimal termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: (1) Hasil penerapan SPM; (2) Kendala penerapan SPM; dan (3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.¹¹

Khusus bagi Pemerintah Provinsi, Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota. Hasil laporan penerapan SPM dijadikan dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan berbagai tindakan yaitu:¹²

Tabel 2.68 Jenis Tindakan Menurut Tingkatan Pemerintah.

No	Stakeholder	Jenis Tindakan Yang Dilakukan
1.	Pemerintah Pusat	1. Perumusan kebijakan nasional. 2. Pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Pemerintah Daerah	1. Penilaian kinerja perangkat daerah. 2. Pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. 3. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan SPM yaitu bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, dengan adanya atas dasar prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, ditegaskan bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Dalam mendukung penyelenggaraan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

¹⁰ Pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

¹¹ Pasal 17, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

¹² Pasal 18, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berbagai jenis Pelayanan Dasar untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Ayat (2) Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 yang terdiri atas:¹³

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;
4. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. Pelayanan kesehatan balita;
8. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. Pasisitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawan bencana;
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar yang dilakukan melalui layanan di atas harus sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Dalam menentukan kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar maka harus dilakukan perhitungan secara akurat dengan cara menghitung selisih kebutuhan terhadap

¹³ Pasal 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Kemudian hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 8, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD, yang mana Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar tersebut merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.¹⁵ Kemudian, Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.¹⁶

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar bahwa Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang sudah dibuat sekaligus menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Selanjutnya, implementasi pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk: (1) Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (2) Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya sesuai dengan Standar Teknis SPM. Sedangkan dalam hal kerjasama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Tercapainya kesuksesan penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu didukung dengan dilakukannya koordinasi yang melibatkan berbagai stakeholder, dimana Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM secara nasional, Gubernur berwenang mengoordinasikan

¹⁴ Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

¹⁵ Pasal 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

¹⁶ Pasal 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

¹⁷ Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

¹⁸ Pasal 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

pelaksanaan penerapan SPM di daerah provinsi, sedangkan Bupati/Wali Kota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah kabupaten/kota. Selain itu juga, perlu dibentuk Tim Penerapan SPM daerah provinsi dan kabupaten/kota.¹⁹ Konteks koordinasi yang dilakukan meliputi: (1) Penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan (2) Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.²⁰

Dalam hal pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal Permendagri nomor 100 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

¹⁹ Pasal 13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

²⁰ Pasal 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Sesuai Standar Pelayanan Minimum dan Target Pembangunan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1. Pertumbuhan PDRB	6,04%	5,61%	5,56%	6,09%	5,73%	5%	Tercapai (+)
2. Perubahan Inflasi	No Data	7,68%	2,22%	2,47%	3,0%	3%	Tercapai (+)
3. PDRB per kapita	22.453.733,25	24.260.798,44	26.066.217,87	27.593.519,21	29.139.315,23	Meningkat	Tercapai (+)
4. Indeks Gini	0,37	0,33	0,41	0,39	n,a	Berkurang	Tercapai (+)
7. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	94,67	94,75	94,54	94,94	95,21	Meningkat	Tercapai (+)
8. Rasio kesenjangan kemiskinan	0,73	0,75	0,68	0,69	0,82	Berkurang	Tercapai (+)
9. Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	5,33	5,25	5,46	5,06	4,79	Berkurang	Tercapai (+)
10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,63	78,84	79,63	79,95	80,30	Meningkat	Tercapai (+)
12. Angka rata-rata lama sekolah	10,49	10,55	10,71	10,78	10,93	Meningkat	Tercapai (+)
13. Angka usia harapan hidup	74,17	74,18	74,48	74,55	74,63	Meningkat	Tercapai (+)
14. Persentase balita gizi buruk	0,10	0,25	0,08			Berkurang	Tercapai (+)
15. Prevalensi balita gizi kurang	2,72	2,86	2,17			Berkurang	Tercapai (+)
16. Cakupan Desa Siaga Aktif	47			32		Meningkat	Tidak Tercapai (-)
17. Angka partisipasi angkatan kerja	63,59	64,25	60,16	60,16	66,38	Meningkat	Tercapai (+)
18. Tingkat partisipasi angkatan kerja	61,53	62,21	58,26	58,26	64,35	Meningkat	Tercapai (+)
19. Angka pencari kerja	9,59	9,36	9,36	9,36	9,32	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
20. Rasio penduduk yang bekerja	90,41	90,64	90,64	90,64	90,68	Meningkat	Tercapai (+)
21. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	-1,57	-0,78	9,33	6,08		Meningkat	Tercapai (+)
22. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	55,63	56,39	52,80	52,80	58,35	Meningkat	Tercapai (+)
23. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	120.300	116.911	110.983			Berkurang	Tercapai (+)
24. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72	72	74	76	78	80	Tercapai (+)
25. Persentase PAD terhadap pendapatan	32,73	34,63	37,92	39,31	40,31	Meningkat	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
26. Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai (+)
27. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75,8	84,7	85	89,2		Meningkat	Tercapai (+)
28. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0,67	0,65	0,62	0,6		Meningkat	Tidak Tercapai (-)
29. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	36,34	36,05	35,19	34,61		Meningkat	Tidak Tercapai (-)
ASPEK DAYA SAING							
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp. 000)	89.701,30	90.878,29	93.944,40	92.466,84		Meningkat	Tercapai (+)
2. Nilai tukar petani	107,23	103,79	103,19			Meningkat	Tidak Tercapai (-)
3. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	77,14	75,62	75,38	74,34	74,14	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
4. Produktivitas total daerah	42,72	42,50	46,46	49,29	44,53	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
5. Indeks keterbukaan ekonomi	0,18	0,16	0,12			Meningkat	Tidak Tercapai (-)
6. Angka kriminalitas (Crime rate) tertangani (%)	0,0187	0,0197	0,0192	0,0187	0,0654	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
7. Rasio ketergantungan (Dependency ratio)	40,88	40,96	41,06	41,11	41,77	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN WAJIB							
1. Pendidikan							
1.1 Angka partisipasi kasar							
1.1.1 Angka Partisipasi Kasar SD	121,80	121,65	121,88	113,27	120,77	100%	Tercapai (+)
1.1.2 Angka Partisipasi Kasar SMP	91,75	88,10	92,54	92,70	103,68	100%	Tercapai (+)
1.1.3 Angka Partisipasi Kasar SMA	89,88	90,60	92,14	105,00	92,57	100%	Tidak Tercapai (-)
1.2 Angka Partisipasi Murini SD	99,99	99,99	99,99	99,60	105,46	100%	Tidak Tercapai (-)
1.3 Angka Partisipasi Murini SMP	90,38	83,88	91,61	91,14	84,09	100%	Tidak Tercapai (-)
1.4. Angka Partisipasi Murini SMA	85,34	90,08	90,30	96,00	67,89	100%	Tidak Tercapai (-)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
2. Kesehatan							
2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1,039	1,001	1,546	1,023	1,105	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
2.2. Angka kelangsungan hidup bayi	0,999	0,999	0,9985	0,999	0,9989	Berkurang	Tercapai (+)
2.3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,061	1,001	1,647	1,066	1,126	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
2.4 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	-	0,8731	1,383	0,7673	1,0836	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
2.5 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	62,8	46,8	28,5	34,1	23,4	Berkurang	Tercapai (+)
2.6 Rasio posyandu per satuan balita	5,77	5,79	6,09	5,95	6,42	Meningkat	Tercapai (+)
2.7 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,19	0,19	0,16	0,12	0,13	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
2.8 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,013	0,014	0,014	0,014	0,015	Meningkat	Tercapai (+)
2.9 Rasio dokter per penduduk	0,0563	0,0552	0,0074	0,0261	0,0451	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
2.10 Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,0657	0,0645	0,0126	0,0303	0,0528	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
2.11 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100	100%	Tercapai (+)
2.12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	83,8	84,9	90,1	88,3	88	100%	Tidak Tercapai (-)
2.13 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	87,5	100%	Tidak Tercapai (-)
2.14 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100%	Tercapai (+)
2.15 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	-	0,79	0,77	0,57	0,7	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
2.16 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	74	76	77	73,9	74,4	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
2.17. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	Berkurang	Tercapai (+)
2.18. Penderita diare yang ditangani	57,6	50,5	63,9	29,9	22,5	Berkurang	Tercapai (+)
2.19. Angka kejadian Malaria	0,001	0,003	0,002	0,005	0,005	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
2.20. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0002	Berkurang	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
2.21. Cakupan kunjungan bayi	82,4	86	88,8	94,1	97,2	Meningkat	Tercapai (+)
2.22. Cakupan puskesmas	2,58	2,58	2,58	2,58	3,25	Meningkat	Tercapai (+)
2.23. Cakupan pembantu puskesmas	0,43	0,43	0,43	0,25	0,25	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
2.24. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	82,5	85,5	91,5	89	92,1	100%	Tidak Tercapai (-)
2.25. Cakupan pelayanan nifas	70,5	73,6	83,3	88,3	83,2	100%	Tidak Tercapai (-)
2.25. Cakupan pelayanan anak balita	24,7	31,2	31,2	46,7	46,9	100%	Tidak Tercapai (-)
2.26. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100%	Tercapai (+)
2.27. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100%	Tercapai (+)
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1. Pekerjaan Umum:							
3.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	97,00%	98,06%	94,99%	95,13%	95,32%	100%	Tidak Tercapai (-)
3.1.2. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	97,00%	98,06%	94,99%	95,13%	95,32%	100%	Tidak Tercapai (-)
3.1.3. Persentase penduduk berakses air minum	69%	78%	82,50%	92,86%	98,50%	100%	Tidak Tercapai (-)
3.1.4. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	39%	39%	39%	39%	39%	100%	Tidak Tercapai (-)
3.1.5. Persentase areal kawasan kumuh	1%	0,8	0,9	0,9	0,59	0%	Tidak Tercapai (-)
3.2. Penataan Ruang:							
3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	11,51%	11,51%	11,04%	11,15%	11,29%	30%	Tidak Tercapai (-)
3.2.2. Ketaatan terhadap RTRW	85%	85%	88.00%	89.00%	89.00%	100%	Tidak Tercapai (-)
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1. Rasio rumah layak huni	NA	NA	NA	NA	100%	100%	Tercapai (+)
4.2. Rasio permukiman layak huni	NA	NA	NA	NA	98%	100%	Tidak Tercapai

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
							(-)
4.3. Persentase pemukiman yang tertata	NA	NA	NA	NA	98%	100%	Tidak Tercapai (-)
4.4. Persentase lingkungan pemukiman kumuh	NA	NA	NA	NA	1%	0%	Tidak Tercapai (-)
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	60	60	65	65	70	100%	Tidak Tercapai (-)
5.2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	No Data	48%	100%	No Data	68%	100%	Tidak Tercapai (-)
5.3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	No Data	48%	100%	No Data	68%	100%	Tidak Tercapai (-)
5.4 Persentase Penegakan PERDA	60	60	60	60	60	100%	Tidak Tercapai (-)
6. Sosial							
6.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	36	36	36	36	36	100%	Tidak Tercapai (-)
6.2. Persentase PMKS yang tertangani	No Data	80%	74%	85%	62%	100%	Tidak Tercapai (-)
6.4. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sejenis							
6.7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	No Data	0%	0%	No Data	100%	100%	Tercapai (+)
ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN WAJIB							
1. Tenaga Kerja							
1.1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	8,83	10,36	7,12	10,56	10,71	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
1.2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	82,29	100	100	100	Berkurang	Tercapai (+)
1.3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	44,32	60,54	81,58	42,67	42,75	40%	Tercapai (+)
1.4. Keselamatan dan perlindungan	69,46	44,95	99,10	92,33	92,33	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
1.4.1 Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun	771	499	1,1	1,119	1,119	Meningkat	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
n							
1.5. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	43,71	60,45	91,04	91,19	91,23	50%	Tercapai (+)
1.5.1 1 pekerja/buruh JAMSOSTEK	120.361	166.449	136.192	145.167	145.268	Meningkat	Tercapai (+)
1.6. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	78,29	29,91	48,03	45,00		45%	Tercapai (+)
1.7. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	33,36	36,23	83,82	33,91		50%	Tercapai (+)
1.8. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18,87	50,00	78,50	54,96	96,15	60%	Tercapai (+)
1.9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	68,38	64,00	53,33	36,92	80,00	Meningkat	Tercapai (+)
1.10. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	44,20	75,00	64,29	61,35	100,00	60%	Tercapai (+)
1.11. Rasio lulusan S1/S2/S3	24,11	11,00	5,97	7,01	9,33	Meningkat	Tercapai (+)
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah							
2.1.1 Jumlah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah		44.217	49.07	49.07	44.969	Meningkat	Tercapai (+)
2.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD		16,00	16,00	16,00	16,00	Meningkat	Tercapai (+)
2.3 Jumlah Pekerja perempuan di lembaga swasta		62.706	157.346	172.226	160.842	Meningkat	Tercapai (+)
2.4. Rasio KDRT	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	Berkurang	Tercapai (+)
2.5. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	Tercapai (+)
2.6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	Tercapai (+)
2.7 Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	229	237	230	259	270	Meningkat	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
2.8 Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	229	237	230	259	270	Meningkat	Tercapai (+)
2.9. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	NA	NA	100,00	100,00	100,00	50%	Tercapai (+)
2.10. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		NA!	100,00	100,00	100,00	50%	Tercapai (+)
2.11 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan		8	3	13	23	Meningkat	Tercapai (+)
2.12. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan			75	75	89	100%	Tidak Tercapai (-)
3. Pangan							
3.1. Ketersediaan pangan utama					82,17	100	Tercapai (+)
3.2. Ketersediaan energi dan protein perkapita					91	90%	Tercapai (+)
3.3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan					80	80%	Tercapai (+)
4. Pertanian							
4.1 Penyelesaian kasus tanah Negara	60%	65%	75%	82	100	100	Tercapai (+)
5. Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
5.1. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	0	0	1	1	2	Lengkap	Tercapai (+)
5.2. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	43,50	43,50	49,20	42,00	36,80	100	Tidak Tercapai (-)
5.3. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	82	82	82	82	82	100	Tidak Tercapai (-)
5.4. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	22,38	22,38	22,38	22,39	22,38	30	Tidak Tercapai (-)
5.5. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	No Data	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	P1	Adipura	Tidak Tercapai (-)
5.6 Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai (+)
5.7 Timbulan sampah yang ditangani	58,68	61,49	60,29	61,26	47,51	100	Tidak Tercapai (-)
5.8. Volume timbunan sampah yang ditangani	1.110.078	1.336.928	1.311.882	1.336.928	1.336.928	Meningkat	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
5.9 Total timbunan sampah	1.891.900	2.174.204	2.175.777	2.182.316	2.813.796	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
5.10 Persentase jumlah sampah yang tertangani	58,67%	58,20%	60,29%	37%	64%	100	Tidak Tercapai (-)
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1. Cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk	NA	NA	NA	NA	94,03%	100%	Tidak Tercapai (-)
6.2. Cakupan bayi berakte kelahiran	NA	NA	NA	NA	66,33%	100%	Tidak Tercapai (-)
6.3. Cakupan pasangan berakte nikah	NA	NA	NA	NA	60,31%	100%	Tidak Tercapai (-)
6.4. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	NA	NA	NA	NA	94,03%	100%	Tidak Tercapai (-)
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1. Persentase LSM aktif	NA	NA	NA	NA	76%	100%	Tidak Tercapai (-)
7.2 Jumlah LPM aktif	NA	NA	NA	NA	85%	100%	Tidak Tercapai (-)
7.3 Persentase PKK aktif	NA	NA	NA	NA	87%	100%	Tidak Tercapai (-)
7.4 Persentase Posyandu aktif	NA	NA	NA	NA	75%	100%	Tidak Tercapai (-)
7.5 Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	No Data	No Data	No Data	No Data	40%	40%	Tidak Tercapai (-)
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,58	1,55	1,73	1,70	1,69	<2	
8.2. Ratio Akseptor KB	73,72	75,36	81,01	81,10	76,89	Meningkat	Tercapai (+)
8.3 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	16,37	9,65	7,78	9,17	10,24	Meningkat	Tercapai (+)
8.4. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	78.221	47.508	38.692	41.925	42.354	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
8.5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	30,11	29,47	28,26	30,93	31,04	Meningkat	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
(MKJP)							
8.6. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	12,13	19,89	14,71	11,30	16,74	Meningkat	Tercapai (+)
8.7. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	80,89	66,04	53,53	80,60	78,74	Meningkat	Tercapai (+)
8.8. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	85,36	85,86	52,66	70,80	72,37	Meningkat	Tercapai (+)
8.9. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	45,06	52,06	39,62	75,73	75,02	Meningkat	Tercapai (+)
8.10. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0	0	0	25,00	Meningkat	Tercapai (+)
8.11. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk			100,00	100,00	100,00	100.00	Tercapai (+)
8.12. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	82,21	85,25	84,41	84,19	86,61	100%	Tidak Tercapai (-)
8.13. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	144,64	146,43	146,43	148,21	151,79	Meningkat	Tercapai (+)
8.14. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	60,09	161,84	62,59	177,01	394,95	Meningkat	Tercapai (+)
8.15. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	-	89,29	125,00	151,79	151,79	100%	Tercapai (+)
8.16. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	Tercapai (+)
8.17. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	17,65	17,18	26,39	27,22	35,86	100%	Tidak Tercapai (-)
9. Perhubungan							
9.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum							
9.1.1. Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun	1.453.986	1.243.783	1.251.352	989.179	479.301	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
9.1.2. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	1.455.716	1.451.738	1.475.808	1.359.863	658.211	Meningkat	Tidak Tercapai (-)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
9.2. Rasio ijin trayek							
9.2.1. Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	664	2.512	2.357	1.673	655		
9.3. Jumlah uji kir angkutan umum	39.893	43.679	48.660	57.320	61.594	Meningkat	Tercapai (+)
9.4. Persentase layanan angkutan umum	27	29	29	30	32	Meningkat	Tercapai (+)
9.5 Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n			1.197	730	409		
9.6 Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia			180m2, 15 lokasi	250 m2, 4 lokasi, 558 m	2.058,36m2, 4 lokasi, 558 m		
9.7 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	2.909.702	2.695.521	2.727.160	2.349.042	1.137.152	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
10. Komunikasi dan Informatika							
10.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan				16,67	16,67	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi				100,00	100,00	100	Tercapai (+)
10.2.1. Luas Wilayah Yang Tercoverage				210,49	210,49	Meningkat	
10.2.2. Luas Wilayah Keseluruhan				210,49	210,49	Meningkat	
11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
11.1. Jumlah koperasi aktif				605	612	Meningkat	Tercapai (+)
11.2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif				987	1000	Meningkat	Tercapai (+)
11.3. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil				2054	2.086	Meningkat	Tercapai (+)
12. Penanaman Modal							
12.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	66	114	340	375	217	Meningkat	Tercapai (+)
12.1.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	66	114	340	375	217	Meningkat	Tercapai (+)
12.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.529.660	5.178.564	9.892.062	32.558.856	16.499.936	Meningkat	Tercapai (+)
12.2.1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.529.660	5.178.564	9.892.062	32.558.856	16.499.936	Meningkat	Tercapai (+)
12.3. Rasio daya serap tenaga kerja	0,98	0,97	0,93	0,94	0.95	1	Tidak Tercapai (-)
12.3.1. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	3.717	3.822	4.300	5.366	4.061	Meningkat	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
12.3.2. Jumlah seluruh PMA/PMDN	3.783	3.936	4.640	5.741	4.278	Meningkat	Tercapai (+)
12.4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	14.820	10.658	24.592	46.201	53.200	Meningkat	Tercapai (+)
12.4.1. Realisasi PMDN Tahun evaluasi	5.126.644.840.565	5.423.838.940.577	6.731.169.465.836	8.688.493.310.596	10.014.889.796.981	Meningkat	Tercapai (+)
12.4.2. Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi	4.464.951.116.501	4.901.446.228.151	5.402.590.850.966	5.942.849.936.063	6.537.139.939.669	Meningkat	Tercapai (+)
12.4.3. Realisasi PMDN sebelum evaluasi	4.464.951.116.501	4.901.446.228.151	5.402.590.850.966	5.942.849.936.063	6.537.139.939.669	Meningkat	Tercapai (+)
13. Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1.2. Jumlah seluruh organisasi pemuda	94	94	94	94	94	Meningkat	Tercapai (+)
13.3. Cakupan pembinaan olahraga	85,11	85,11	85,11	85,11	91,49	100	Tidak Tercapai (-)
13.6. Jumlah atlet berprestasi	0	3	0	19	26	Meningkat	Tercapai (+)
13.7. Jumlah prestasi olahraga	0	0	0	19	30	Meningkat	Tercapai (+)
14. Statistik							
14.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tersedia	Tidak Tercapai (-)
14.2. Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai (+)
14.3. Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Tercapai (+)
15. Persandian							
15.1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	91.30	100	Tidak Tercapai (-)
15.1.1. Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	42		
15.1.2. jumlah total perangkat daerah	NA	NA	NA	NA	46		
16. Kebudayaan							
16.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya							
16.1.1. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya				13	16	Meningkat	Tercapai (+)
16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	47,06	47,06	47,06	47,06	11,59	100%	Tidak Tercapai (-)
16.2.1. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	8	8	8	8		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
16.2.2. Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	17	17	17	17	69		
16.3. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai (+)
16.3.1. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	8	8	8	8	8		
17. Perpustakaan							
17.1. Prosentase jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		0,67	0,56	0,63	0,82	Meningkat	Tercapai (+)
17.1.1. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	5.791	14.665	12.231	15.679	20.685	Meningkat	Tercapai (+)
17.1.2. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani		2.199.603	2.171.733	2.475.900	2.537.818	Meningkat	Tercapai (+)
17.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,303	0,283	0,27	0,278	0,281	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
17.2.1. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	7.858	10.316	12.438	13.207	13.607	Meningkat	Tercapai (+)
17.2.2. Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	25.948	36.406	46.060	47.582	48.382	Meningkat	Tercapai (+)
17.3. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	5.791	14.665	12.231	15.679	20.685	Meningkat	Tercapai (+)
17.3.1. Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	7.858	10.316	12.438	13.207	13.607	Meningkat	Tercapai (+)
18. Kearsipan							
18.1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0	11,63	20,93	23,26	30,43	100	Tidak Tercapai (-)
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku	0	5	9	10	14		
Jumlah Perangkat Daerah	0	43	43	43	46		
18.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan		28	22	43	46	Meningkat	Tercapai (+)
URUSAN PILIHAN							
1. Pariwisata							
1.1.2 Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten/Kota	141.229	150.976	160.489	609.187	852.353	Meningkat	Tercapai (+)
1.2. Lama kunjungan Wisata (hari)	2	2,00	2,00	2,00	2,00	Meningkat	Tercapai (+)
1.3. PAD sektor pariwisata	NA	NA	NA	0.02	0.02	Meningkat	Tercapai (+)
1.3.1 PAD sektor pariwisata (Rp. Juta)	NA	NA	NA	264	308	Meningkat	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
1.3.2 Total PAD (Rp. Juta)	NA	NA	NA	1.686.661	1.766.290	Meningkat	Tercapai (+)
2. Pertanian							
2.1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0.67	0.65	0.62	0.60	0.60	Stabil	Tercapai (+)
2.2. Produktivitas sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	NA	903,07	NA	100,05	828.00	Meningkat	Tercapai (+)
2.3. Produktivitas sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,10%	0,10%	0,10%	0.18	0.18	Meningkat	Tercapai (+)
5. Perdagangan							
5.1 Kontribusi Sektor Perdagangan	24	23	22	22	22	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
5.1. Ekspor Bersih Perdagangan	US\$359,5 juta	0.00	0.00	US\$174,7 juta	US\$174,7 juta	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
5.1.1 Total ekspor	US\$570,7 juta			US\$357,9 juta	US\$357,9 juta	Meningkat	Tidak Tercapai (-)
5.1.2 Total import	US\$171,2 juta			US\$183,2 juta	US\$183,2 juta	Berkurang	Tidak Tercapai (-)
6. Perindustrian							
6.1. Kontribusi Sektor Industri	36,00	35,00	35,00	34,00	34,00	Meningkat	Tercapai (+)
6.1.1 Jumlah Industri	161	154	151	656	656	Meningkat	Tercapai (+)
6.1.2 Jumlah kelompok pengrajin							
1. Perencanaan Pembangunan							
1.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai (+)
1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai (+)
1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai (+)
1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai (+)
1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	96	100	100	105	97	100	Tercapai (+)
1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	95	92	100	100.00	Tercapai (+)

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	
	2013	2014	2015	2016	2017	SPM/Target Benchmark	Interpretasi
1.7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100	100.00	Tercapai (+)
2. Keuangan							
2.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai (+)
2.2. Persentase SILPA	14,50005472	13,2001906	NA	17,8508531	11,91	Berkurang	Tercapai (+)
2.5. Persentase belanja pendidikan (20%)	20,00	20,00	23,00	22,00	27,00	20.00	Tercapai (+)
2.6. Persentase belanja kesehatan (10%)	0,13	0,09	0,07	0,03	0,10	Meningkat	Tercapai (+)
2.7. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	0,93	0,85	1,15	1,10	0,98	Meningkat	Tercapai (+)

2.5.2 Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2013-2018

Analisis capaian kinerja Penyelenggaraan pemerintahan menggambarkan tingkat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD periode sebelumnya. Berikut merupakan capaian kinerja RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2017 berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 2.70 Ketercapaian Kinerja Pemerintahan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-					Target pada Akhir periode Perencanaa n	Keterangan Capaian Terhadap Target RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017		
Misi I: Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi anggaran dan kemampuan pendanaan daerah	Opini BPK terhadap akuntabilitas keuangan daerah	No Data	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	TERCAPAI
2	Tersedianya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	No Data	76,8	76,8	76	76	80	TIDAK TERCAPAI
3		Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan	74,17 %	98,30%	76,08%	88,70%	86,22%	76,60%	TERCAPAI
4	Tercapainya peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur sipil negara	Pencapaian IKK dalam EKPPD	No Data	No Data	2,951	3,060	No Data	3,237	
5	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan	Kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen rencana pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TERCAPAI
Misi II: Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota									
1	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	Panjang jalan dalam kondisi baik	97,00 %	98,06%	94,99%	95,13%	95,32%	96,28%	TERCAPAI
2	Terpenuhinya kebutuhan utilitas perkotaan yang berkualitas	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	No Data	72,49%	73,14%	74,02%	75,37%	70,62%	TERCAPAI
3		Pelayanan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)	92,00 %	86,27%	88,88%	105,55%	125,00%	100%	TERCAPAI
4	Berkurangnya ancaman banjir	Berkurangnya luasan genangan banjir	No Data	16,64%	25,35%	No Data	No Data	33,27%	

Bekasi Kota Cerdas , Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan

5	Terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Rumah layak huni	No Data	No Data	No Data	No Data	100%	99,33%	TERCAPAI
6		Kawasan Kumuh Yang Tertata	85%	58,33%	No Data	No Data	No Data	48%	
7		Rasio kapasitas TPU terhadap Jml penduduk (m2/jiwa)	No Data	3,3	No Data	No Data	38,9	0,35	TERCAPAI
8		Tingkat Tanggap Waktu (Respon Time Rate) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	No Data	48%	100%	No Data	68%	100%	TIDAK TERCAPAI
9	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Luasan Ruang Terbuka Hijau	No Data	11,51%	11,04%	11,15%	11,29%	12%	TIDAK TERCAPAI
10	Terciptanya tata ruang kota yang berkelanjutan	Penyimpangan pemanfaatan ruang	No Data	15%	15%	12,00%	11,00%	0,15%	TERCAPAI
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penegakan hukum lingkungan	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	100%	
12		Perolehan Adipura	No Data	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura	P1	Adipura	TIDAK TERCAPAI
13		Status mutu udara ambien (µg/m3)	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	172,5	
14		Status mutu air (kelas)	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	3	
15		Cakupan pelayanan Air minum	No Data	No Data	82,50%	92,86%	98,50%	38,2%	TERCAPAI
16	Terwujudnya Pengelolaan sampah yang holistik berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat	Persentase penanganan sampah	58,67 %	58,20%	60,29%	37%	64%	69%	TIDAK TERCAPAI
17	Tersedianya multi moda transportasi yang terintegrasi	Ketersediaan Prasarana sarana perhubungan	No Data	No Data	No Data	2%	45%	67%	TIDAK TERCAPAI
18	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Ketersediaan prasarana sarana lalu lintas	22,00 %	84,60%	97%	78%	85%	92%	TERCAPAI
Misi III: Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya									
1	Tersedianya prasarana dan sarana layanan pendidikan	Angka Rata-rata lama sekolah	10,49 Thn	10,55 Thn	10,71 Thn	10,78 Thn	10,93 Thn	11 Thn	TERCAPAI
2	sesuai kebutuhan yang berkualitas	APM Pendidikan anak usia dini (PAUD)	75,65 %	83,47%	84,86%	87,47%	No Data	50%	
3		APM SD/ sederajat	99,99 %	99,99%	99,99%	99,60%	119,62%	100%	TERCAPAI

Bekasi Kota Cerdas , Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan

4		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	90,38 %	83,88%	91,61%	91,14%	96,71%	93,68%	TERCAPAI
5		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	85,34 %	90,08%	90,30%	96,00%	Dialihkan ke Provinsi	75,28%	
6		Peningkatan pengunjung perpustakaan daerah per tahun	5791	14665 (153.24%)	12231 (-16.60%)	15679 (28.16%)	20685 (31.93%)	30%	TIDAK TERCAPAI
7	Tersedianya prasarana dan sarana layanan kesehatan	Angka harapan hidup	74,17 Tahun	74,18 Tahun	74,48 Tahun	74,55 Tahun	74,63 Tahun	70,18 Tahun	TERCAPAI
8	sesuai kebutuhan yang berkualitas	Angka kematian ibu melahirkan	No Data	46,8/100.000 kelahiran	28,5/100.000 kelahiran	34,1/100.000 kelahiran	No Data	44/100.000 kelahiran	
9		Angka kematian bayi	No Data	47	76	48	No Data	15/ 1000 kelahiran	
10		Prevalensi balita gizi buruk	No Data	0,16%	0,13%	0,20%	0,20%	0,15%	TERCAPAI
11		Kepemilikan Kartu Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	No Data	100%	
12	Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial	Kota Layak Anak (5 cluster 31 Indikator Hak Anak)	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	31 indikator	
13		Partisipasi perempuan di lembaga legislatif tingkat Kota	16,52 %	16%	16%	16%	18%	30%	TIDAK TERCAPAI
14		Persentase Pasangan Usia Subur ber KB	No Data	75,51%	78,47%	84,18%	85,00%	81,76%	TERCAPAI
15		Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	No Data	80%	74%	85%	62%	95%	TIDAK TERCAPAI
16	Terpelihara dan meningkatnya aktivitas seni dan budaya	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yg representatif	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	2 Gedung	
17	Tersedianya destinasi pariwisata perkotaan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Daerah	No Data	No Data	No Data	15,6%	No Data	17,70%	
18	Meningkatnya aktifitas kepemudaan	Pemuda pelopor yang berprestasi	No Data	16	10	0	5 TK, 2 TP, 1 TN	5 TK, 2 TP, 1 TN	TERCAPAI
19	Meningkatnya prestasi olahraga dan aktifitas olah	Cabang Olahraga Berprestasi	8	10	9	11	9	9	TERCAPAI

	raga di masyarakat								
Misi IV : Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif									
1	Meningkatnya investasi	Laju Peningkatan investasi	No Data	4.639.812.117.994	6.144.276.955.985	7.752.866.805.275	10.061.684.280.138	7.190.848.422.636	TERCAPAI
2		Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih	No Data	No Data	No Data	No Data	0	\$1.336.652.173.39	TIDAK TERCAPAI
3	Terkendalinya laju inflasi	Laju inflasi	No Data	7,68%	2,22%	2,47%	3,0%	<6%	TERCAPAI
4	Meningkatnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat	Koperasi aktif	No Data	495	524	553	581	572	TERCAPAI
5	Meningkatnya aktivitas UMKM dan Ekonomi lokal berbasis industri kreatif	UMKM Produktif	1261	1431	945	2043	1625	1725	TERCAPAI
6	Tersedianya prasarana dan sarana perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data	2200	
7		Pasar Tradisional Modern dan UMKM Center	0	0	0	1 PTM	0	1 PTM	TERCAPAI
8	Tersedianya kesempatan kerja	Penyediaan Lapangan Kerja	No Data	29,299	36,476	22,104	No Data	50,000	
9		Angka Pencari Kerja	No Data	9,36%	9,36%	9,20%	No Data	8,20%	
Misi V : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai									
1	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kasus perselisihan sara dan kelompok masyarakat	4	3	0	0	No Data	0	
2		Wilayah Tertib K3	No Data	No Data	No Data	No Data	20%	380kasus atau 5%	TERCAPAI
3		Penanganan bencana alam	No Data	0%	0%	No Data	100%	100%	TERCAPAI
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	No Data	No Data	No Data	No Data	40%	40%	TERCAPAI

Berdasarkan tabel diatas, jumlah indikator yang ditetapkan dalam RPJMD tahun sebelumnya sebanyak 55 indikator. Dari 55 indikator tersebut 26 indikator tercapai pada tahun 2017, 11 indikator tidak tercapai. Adapun untuk 18 indikator lainnya tidak dapat dinilai karena ketidaktersediaan data yang diperoleh. Berikut merupakan faktor penyebab ketercapaian indikator kinerja program RPJMD 2013-2017.

Faktor penyebab terpenuhinya atau terlampauinya target kinerja program, antara lain:

Tabel 2.71 Faktor Keberhasilan Terpenuhinya Atau Terlampauinya Target Kinerja Program

No	Indikator Kinerja	Faktor Keberhasilan
1	Opini BPK terhadap akuntabilitas keuangan daerah	Adanya transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan kerangka kerja sesuai dengan aturan yang berlaku
2	Kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen rencana pembangunan	Adanya keselarasan perencanaan pembangunan tingkat kota sampai PD
3	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Adanya optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan utilitas perkotaan
4	Pelayanan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Adanya optimalisasi program peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU)
5	Rumah layak huni	Keberhasilan dalam program Pengembangan Perumahan
6	Rasio kapasitas TPU terhadap Jml penduduk (m2/jiwa)	Keberhasilan dalam Program pengelolaan areal pemakaman
7	Penyimpangan pemanfaatan ruang	Optimalisasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 – 2031
8	Cakupan pelayanan Air minum	Menjalankan kerjasama dengan PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bagasasi dalam upaya pengawasan kualitas air minum, pengawasan kualitas air sumur dan depot air minum. Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) melalui e-monev Hygiene Sanitasi Pangan (HSP).
9	Angka Rata-rata lama sekolah	Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam program Wajib Belajar 12 tahun dan program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan sudah tepat dan memberikan hasil yang optimal.
10	APM SD/ sederajat	Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam program Wajib Belajar 12 tahun dan program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan sudah tepat dan memberikan hasil yang optimal.
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam program Wajib Belajar 12 tahun dan program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan sudah tepat dan memberikan hasil yang optimal.
12	Angka harapan hidup	Adanya peningkatan pelayanan kesehatan
13	Prevalensi balita gizi buruk	Adanya peningkatan pelayanan kesehatan
14	Persentase Pasangan Usia Subur ber KB	Adanya peningkatan pelayanan kesehatan
15	Pemuda pelopor yang berprestasi	Keberhasilan dalam program: • Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan • Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga • Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga
16	Cabang Olahraga Berprestasi	Keberhasilan dalam program: • Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

No	Indikator Kinerja	Faktor Keberhasilan
		• Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga • Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga
17	Laju Peningkatan investasi	Keberhasilan dalam program: • Program peningkatan pelayanan perizinan • Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
18	Laju inflasi	Tidak terjadi kelonjakan harga pangan di Kota Bekasi, hal ini dikarenakan oleh pelaksanaan kegiatan Bazaar yang Dinas Ketahanan Pangan
19	Koperasi aktif	• Keberhasilan dalam melakukan sosialisasi perkoperasian dilingkungan masyarakat • Tingginya minat/animo masyarakat membangun ekonomi rakyat dalam bentuk badan hukum koperasi • Program kegiatan penataan badan hokum sebagai jalan baik sehingga peningkatan jumlah koperasi lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif, dan pemacuan terhadap peningkatan kualitas koperasi dilaksanakan secara optimal • Perhatian pemerintah daerah dalam menunjang tumbuh kembangnya koperasi di Kota Bekasi, melalui penyediaan anggaran yang terus bertambah
20	Pasar Tradisional Modern dan UMKM Center	Tidak ada penjelasan
21	Penanganan bencana alam	Keberhasilan dalam program: • Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran • Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan • Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
22	Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	Keberhasilan dalam program: • Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan • Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan

Adapun ketidaktercapaian indikator kinerja RPJMD periode sebelumnya disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.72 Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program dan Pemecahan Masalahnya.

No.	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	*Target IKM pada LKPJ tahun 2017 (76) lebih rendah dibandingkan target IKM pada RPJMD tahun 2017 (78). Hal ini menyebabkan tidak terdapat penjelasan mengenai faktor penyebab tidak tercapainya indikator IKM	

No.	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
2	Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan	Masih ada yang belum melakukan perekaman KTP-elektronik dan masih ada yang KTP-elektronik yang belum dicetak	Melakukan sosialisasi dan jemput bola
3	Tingkat Tanggap Waktu (Respon Time Rate) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Terbatasnya SDM (Petugas Pemadam Kebakaran)	• Penambahan Personil 256 Orang dan Ruang Simulator untuk Melatih Kemampuan Personil, Ruang Sarana dan Alat-alat Olahraga • Peningkatan Profesional Sopir agar Kendaraan Tidak Cepat Rusak • Peningkatan Kualifikasi SDM (Pelatihan Teknis Damkar) • Peningkatan Kesejahteraan Pasukan Pemadam Kebakaran
4	Luasan Ruang Terbuka Hijau	*Target Luasan RTH pada LKPJ tahun 2017 (11%) lebih rendah dibandingkan target Luasan RTH pada RPJMD tahun 2017 (11,48%). Hal ini menyebabkan tidak terdapat penjelasan mengenai faktor penyebab tidak tercapainya indikator IKM	
5	Perolehan Adipura	Biaya yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan masih belum memenuhi kebutuhan ideal untuk menunjang pelayanan yang optimal untuk mencapai perolehan adipura	Meningkatkan kinerja pengolahan sampah di TPA dan penangan sampah liar di wilayah dan perlu segera dilakukan langkah-langkah yang menunjang kegiatan untuk memperoleh adipura dengan disertai anggaran yang cukup
6	Persentase penanganan sampah	Telah penuhnya TPA sumur batu dan belum tersedianya Zona buangan di TPA	• pembebasan lahan untuk pengembangan TPA dan konstruksi Zona pengembangan. • Meningkatkan pengolahan sampah di masyarakat. • Meningkatkan ritase pengangkutan dari sumber ke TPA
7	Ketersediaan Prasarana sarana perhubungan	Kurangnya pemeliharaan dan perawatan terminal induk, kurangnya shelter sarana penunjang retribusi parkir dan terminal	• Penataan lingkungan kerja terminal induk • Pembangunan shelter dan pengadaan sarana penunjang retribusi parkir dan terminal
8	Ketersediaan prasarana sarana lalu lintas	• Sarana lalu lintas (rambu, marka, petunjuk arah, traffic light dan lainnya) yang belum berfungsi dengan baik • penempatan petugas lalu lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor yang belum memadai	Adanya fasilitas sarana lalu lintas (rambu, marka, petunjuk arah, traffic light dan lainnya) serta penempatan penempatan petugas lalu lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor
9	Peningkatan pengunjung perpustakaan daerah per tahun	*Target peningkatan pengunjung perpustakaan pada LKPJ tahun 2017 (30% setara dengan 3.340 orang) lebih rendah dibandingkan target peningkatan pengunjung perpustakaan pada RPJMD tahun 2017 (30% setara dengan 19.000 orang). *Terdapat keanehan pada target capaian pada akhir periode RPJMD dimana target yang diberikan tidak masuk akal. Kondisi awal 2.569 orang sedangkan target akhir 19.000 orang. Hal ini menyebabkan tidak terdapat penjelasan mengenai faktor penyebab tidak tercapainya indikator IKM	Perlu ditelaah kembali untuk target RPJMD periode berikutnya

No.	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
10	Angka kematian ibu melahirkan	Tingkat kesadaran ibu hamil masih kurang	Gerakan Sayang Ibu, RW Siaga dan P4K.
11	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif tingkat Kota	Belum adanya Pilkada yang dilangsungkan di Kota Bekasi sehingga capaian setiap tahun masih sama	Pilkada akan dilaksanakan di tahun 2018 sehingga diharapkan capaian indikator program dapat meningkat
12	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	*Target penanganan PMKS pada LKPJ tahun 2017 (62%) lebih rendah dibandingkan target penanganan PMKS pada RPJMD tahun 2017 (86%). Hal ini menyebabkan tidak terdapat penjelasan mengenai faktor penyebab tidak tercapainya indikator IKM	
13	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih	Penetapan target peningkatan nilai ekspor dirasa terlalu tinggi melebihi laju pertumbuhan ekonomi	Target pada RPJMD hampir tidak mungkin untuk dicapai. Namun Disdagperin berusaha untuk tetap meningkatkan nilai ekspor melalui jejaring eksportir, dan kebijakan untuk melakukan pendataan dan pemblokiran terhadap pelaku usaha yang mengurus SKA di Kota Bekasi namun mendaftarkan ekspor di luar Kota Bekasi
14	UMKM Produktif	Tidak ada penjelasan	
15	Angka Pencari kerja	- Kelulusan SLTA yang sederajat banyak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan memerlukan biaya besar - Penempatan tenaga kerja di sektor formal terbatas - Pencari kerja untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan sesuai yang dibutuhkan, tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan - Keterampilan yang dimiliki pencari, kualitas dan pendidikan yang masih rendah - Jumlah pencari kerja dibanding dengan kesempatan kerja yang tersedia tidak seimbang	- Peningkatan keterampilan kerja para pencari kerja - Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri baik melalui program Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) - Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri - Pengembangan dan perluasan lapangan kerja sektor informal/usaha mandiri melalui pengembangan dan pemberian fasilitas yang mendorong sistem kewirausahaan - Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi - Melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dikelola oleh satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. - Mengadakan Job Fair (bursa kerja)

2.5.3 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Analisis Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Analisis pencapaian TPB di Kota Bekasi dilakukan dengan menyandingkan antara target/indikator TPB yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 dan Perpres 59/2017 dengan data TPB Kota Bekasi, sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori:

- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
- 3) Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah 15 TPB (TPB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17) dan TPB yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah TPB 7 (energi bersih dan terjangkau), dan TPB 14 (ekosistem laut), sedangkan Jumlah indikator yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi sebanyak 183 indikator. Indikator yang tersedia datanya adalah sebanyak 88 indikator dari Indikator yang tersedia datanya sebanyak 49 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, sebanyak 39 indikator belum mencapai target nasional (SB) dan sebanyak 95 indikator belum memiliki data (NA). Secara rinci analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kota Bekasi akan diuraikan sebagai berikut:

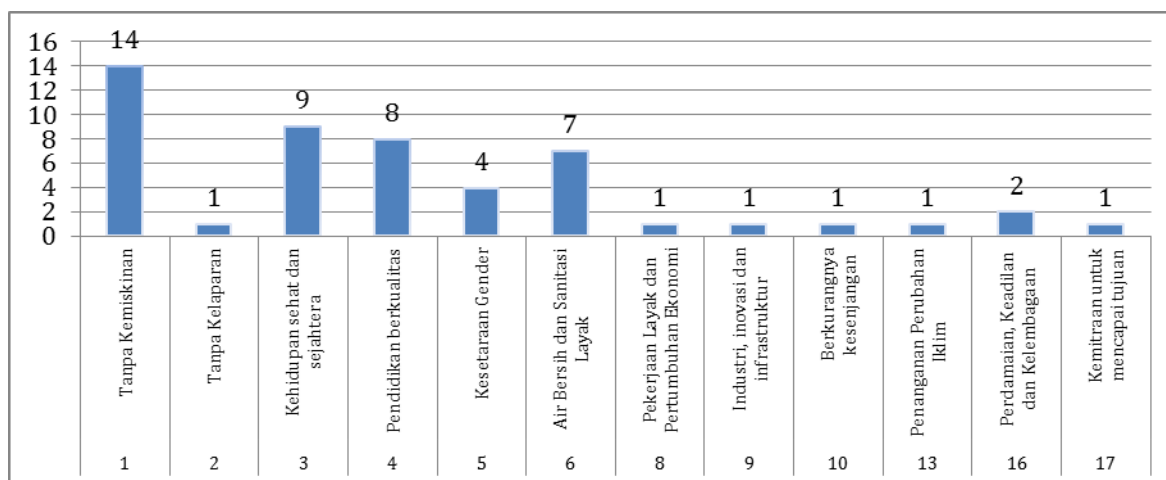
1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) di Kota Bekasi sebanyak 50 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.73. Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS
1	Tanpa Kemiskinan	14
2	Tanpa Kelaparan	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	9
4	Pendidikan Berkualitas	8
5	Kesetaraan Gender	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	1
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1
10	Berkurangnya Kesenjangan	1
11	Penanganan Perubahan Iklim	1
12	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	2
13	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1
	Jumlah	50

Sumber: LAKIP Sektor 2017, SAKIP 2017, LKPI 2013-2018 dan Hasil Analisis Tahun 2018



Sumber: LAKIP Sektor 2017, SAKIP 2017, LKPJ 2013-2018 dan Hasil Analisis Tahun 2018

Gambar 2-58 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi

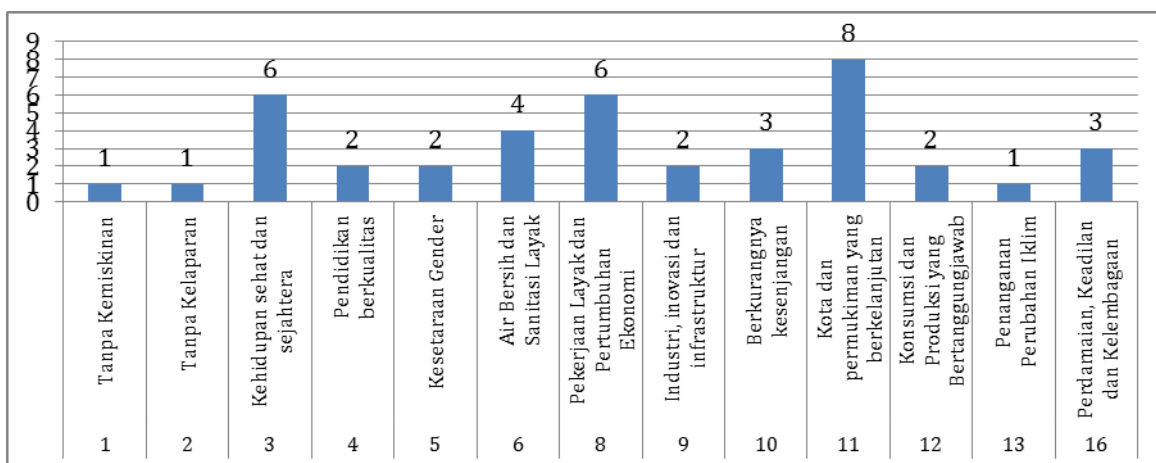
2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Nasional (SB)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kota Bekasi sebanyak 42 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.74 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi

No	Tujuan	SB
1	Tanpa Kemiskinan	1
2	Tanpa Kelaparan	1
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	6
4	Pendidikan berkualitas	2
5	Kesetaraan Gender	2
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4
7	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6
8	Industri, inovasi dan infrastruktur	2
9	Berkurangnya kesenjangan	3
10	Kota dan permukiman yang berkelanjutan	8
11	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	2
12	Penanganan Perubahan Iklim	1
13	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	3
14	Kemitraan untuk mencapai tujuan	1
Jumlah		42

Sumber: LAKIP Sektor 2017, SAKIP 2017, LKPJ 2013-2018, dan Hasil Analisis, Tahun 2018



Sumber: LAKIP Sektor 2017, SAKIP 2017, LKPI 2013-2018, dan Hasil Analisis, Tahun 2018

Gambar 2-59 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi

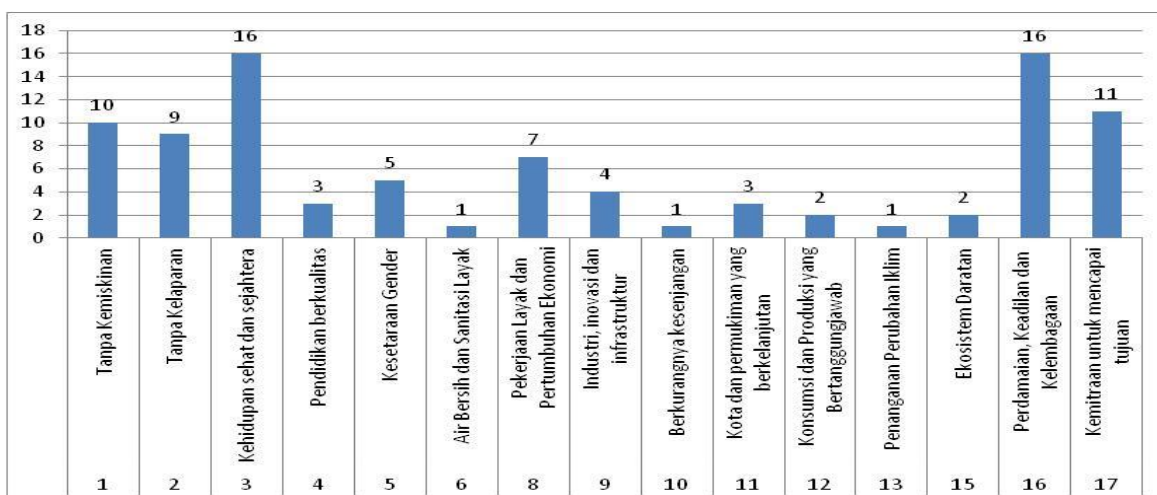
3. Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional, dan Indikator yang Tidak Memiliki Data (BB & NA);

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) dan indikator yang tidak memiliki data (NA) di Kota Bekasi sebanyak 91 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.75 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional, dan Indikator yang Tidak Memiliki Data di Kota Bekasi

No	Tujuan	BB & NA
1	Tanpa Kemiskinan	10
2	Tanpa Kelaparan	9
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	16
4	Pendidikan berkualitas	3
5	Kesetaraan Gender	5
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	7
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	4
10	Berkurangnya kesenjangan	1
11	Kota dan permukiman yang berkelanjutan	3
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	2
13	Penanganan Perubahan Iklim	1
15	Ekosistem Daratan	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	16
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	11
Jumlah		91

Sumber: LAKIP Sektor 2017, SAKIP 2017, LKPI 2013-2018, dan Hasil Analisis, Tahun 2018



Gambar 2-60 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional, dan Indikator yang Tidak Memiliki Data (BB dan NA) di Kota Bekasi

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan gambaran pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bekasi terdiri dari:

- 1) Indikator TPB yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah 15 tujuan (tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17).
- 2) Indikator TPB yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau), dan tujuan 14 (ekosistem laut).
- 3) Jumlah indikator yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi sebanyak 183 indikator. Indikator yang tersedia datanya adalah sebanyak 91 indikator, dengan kategori sebagai berikut:
 - Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 50 indikator.
 - Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 42 indikator.
 - Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) dan indikator yang belum memiliki data (NA) sebanyak 91 indikator.

Lebih jelasnya mengenai Capaian TPB di Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel capaian jumlah indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional.

Tabel 2.76 Capaian Jumlah Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional

No	Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan	Jumlah Target	Jumlah Indikator	Capaian Indikator		
				SS	SB	BB & NA
1	Tanpa Kemiskinan	4	25	14	1	10
2	Tanpa Kelaparan	3	11	1	1	9
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	11	31	9	6	16
4	Pendidikan berkualitas	6	13	8	2	3
5	Kesetaraan Gender	5	11	4	2	5
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	12	7	4	1

No	Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan	Jumlah Target	Jumlah Indikator	Capaian Indikator		
				SS	SB	BB & NA
7	Energi Bersih dan Terjangkau					
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan	5	14	1	6	7
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	3	7	1	2	4
10	Berkurangnya kesenjangan	3	5	1	3	1
11	Kota dan permukiman yang	7	11	0	8	3
12	Konsumsi dan Produksi yang	3	4	0	2	2
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	3	1	1	1
14	Ekosistem Lautan					
15	Ekosistem Daratan	2	2	0	1	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	7	21	2	3	16
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	10	13	1	1	11
	JUMLAH	76	183	50	42	91

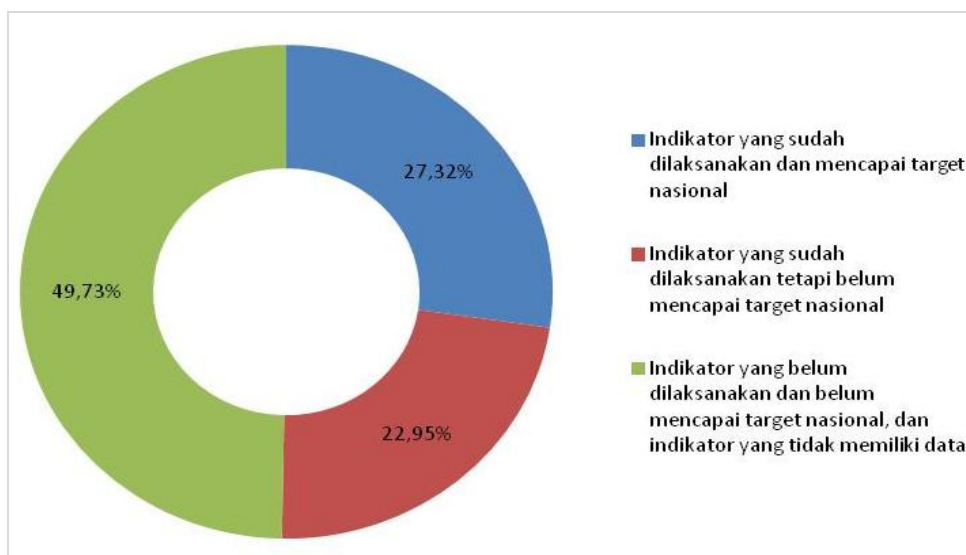
Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Kota Bekasi masih menghadapi tantangan yang panjang dalam pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukan bahwa indikator TPB di Kota Bekasi yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional baru mencapai 27,32% (50 indikator) dari total 183 indikator yang menjadi kewenangan kota. Capaian indikator TPB Kota Bekasi terhadap target nasional diperoleh proporsi seperti dalam tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 2.77 Capaian Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	Prosentase (%)
1	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	50	27,32
2	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	42	22,95
3	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	91	49,73
Total indikator yang menjadi kewenangan Kota Bekasi		183	100,00

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018



Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Gambar 2-61 Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional

A. Capaian Indikator TPB Pada Perangkat Daerah

Berdasar pada hasil analisis tiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bekasi dengan total sebesar 183 indikator yang terdiri dari 4 pencapaian yakni tercapainya target nasional (SS), indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), serta belum terdapat data terkait (NA). Capaian indikator Perangkat Daerah (PD) pada setiap pilar yaitu sebagai berikut.

1) Capaian Indikator TPB pada Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 91 indikator. Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.78 Capaian Indikator TPB Pada Perangkat Daerah Pada Pilar Sosial

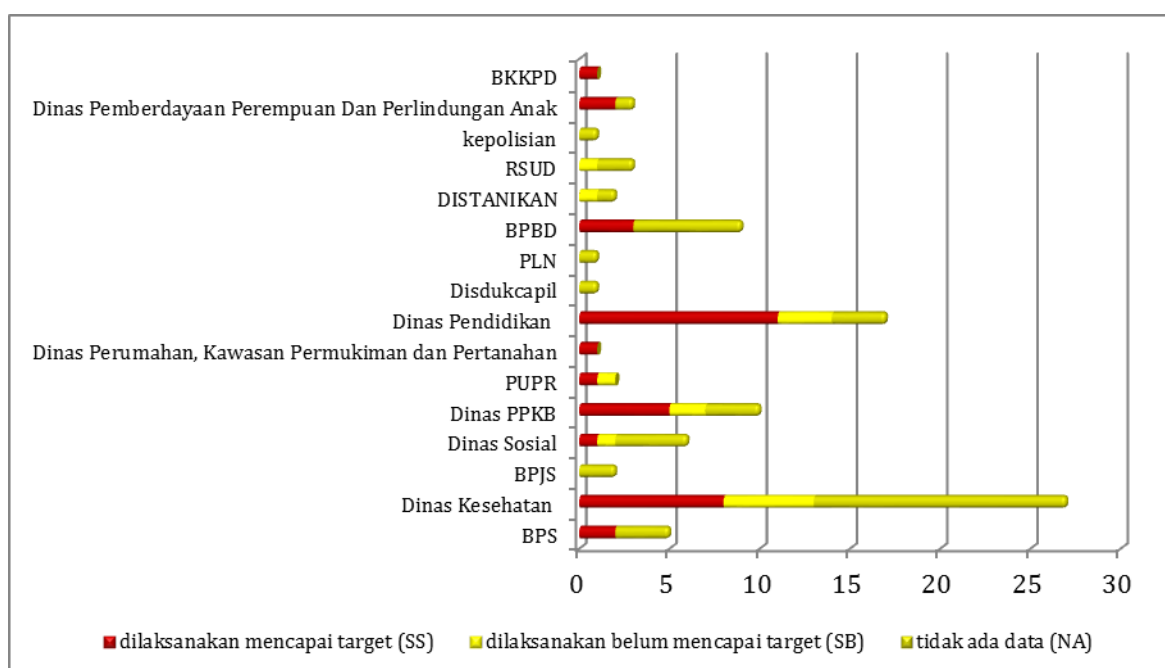
Dinas	dilaksanakan mencapai	dilaksanakan belum	tidak ada data (NA)	Jumlah
BPS	2	0	3	5
Dinas Kesehatan	8	5	14	27
BPJS	0	0	2	2
Dinas Sosial	1	1	4	6
Dinas PPKB	5	2	3	10
PUPR	1	1	0	2
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	0	0	1
Dinas Pendidikan	11	3	3	17

Dinas	dilaksanakan mencapai	dilaksanakan belum	tidak ada data (NA)	Jumlah
Disdukcapil	0	0	1	1
PLN	0	0	1	1
BPBD	3	0	6	9
DISTANIKAN	0	1	1	2
RSUD	0	1	2	3
kepolisian	0	0	1	1
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2	0	1	3
BKKPD	1	0	0	1
	35	14	42	91

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, ada 16 Perangkat Daerah (PD) yang memiliki wewenang dalam pilar sosial. Dari total 91 indikator di pilar sosial, terdapat 36 indikator atau 38,46% yang mencapai target nasional dalam RPJMD Kota Bekasi. Sebanyak 14 indikator atau 15,38% belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 42 indikator atau 46,15 % indikator yang tidak memiliki data.

Dari 16 PD tersebut, Dinas Pendidikan merupakan PD yang memiliki target indikator yang sudah dilaksanakan mencapai target (SS) terbanyak yaitu sebanyak 12 indikator. Grafik capaian indikator dalam sosial disajikan pada diagram berikut ini.



Gambar 2-62 Kontribusi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Sosial

2) Capaian Indikator TPB pada Perangkat Daerah Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 39 indikator. Capaian indikator TPB pilar ekonomi berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.79 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi perangkat daerah pada Pilar Ekonomi

Dinas	Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB)	Tidak Ada Data (NA)	Jumlah
BPS	4	4	1	9
Dinas Tenaga Kerja	0	2	4	6
Dinas Pariwisata dan Budaya	1	2	2	5
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	0	4	5
Dinas Lingkungan Hidup	0	0	2	2
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	2	0	2
BPJS	0	0	1	1
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	0	4	4
Disdukcapil	0	0	2	2
Bappeda	0	0	1	1
KSI	0	0	2	2
	6	10	23	39

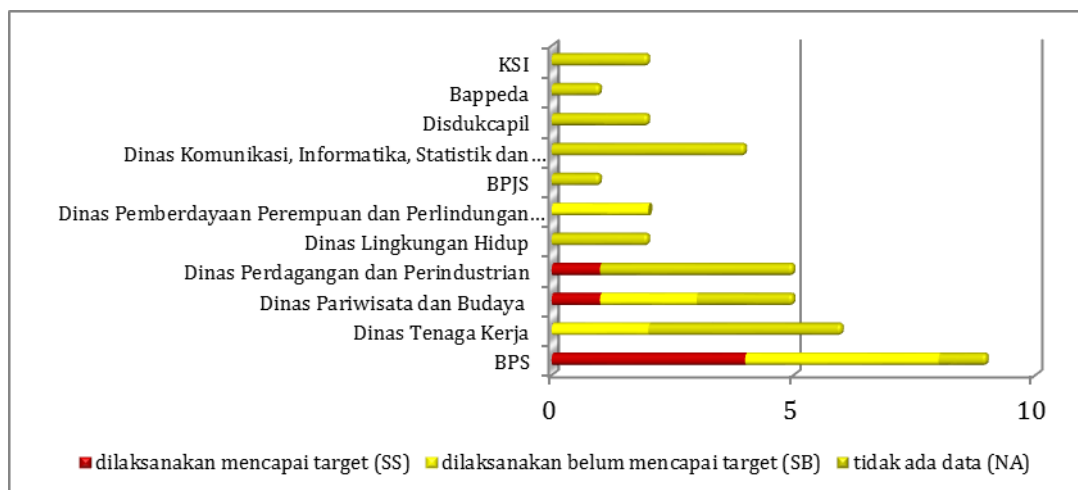
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, ada 11 Perangkat Daerah (PD) yang memiliki wewenang dalam pilar ekonomi. Dari total 39 indikator di pilar ekonomi, terdapat 6 indikator atau 15,38% yang mencapai target nasional. Sebanyak 10 indikator atau 25,64% belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 23 indikator atau 58,97% indikator belum memiliki data. Grafik capaian indikator dalam ekonomi disajikan pada diagram berikut ini.

3) Capaian Indikator TPB pada Perangkat Daerah Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 32 indikator. Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan capaian per PD pilar lingkungan, ada 14 Perangkat Daerah (PD) yang

memiliki wewenang dalam pilar lingkungan. Dari total 32 indikator di pilar lingkungan, terdapat 8 indikator yang mencapai target (25%), 15 indikator (46,88%) dilaksanakan belum mencapai target (SB), 9 indikator (28,13%) tidak ada target (NA). Persentase capaian indikator dalam pilar lingkungan disajikan pada diagram berikut ini.

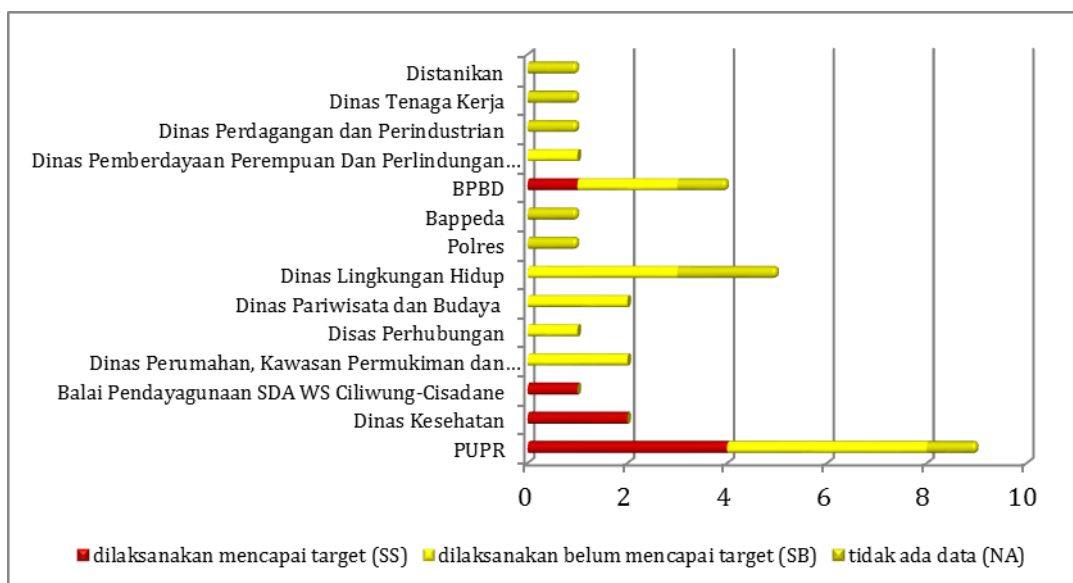


Gambar 2-63 Kontribusi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Ekonomi

Tabel 2.80 Capaian Indikator TPB Pada Perangkat Daerah Pada Pilar Lingkungan

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	tidak ada data (NA)	Jumlah
PUPR	4	4	1	9
Dinas Kesehatan	2	0	0	2
Balai Pemandangan SDA WS Ciliwung-Cisadane	1	0	0	1
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0	2	0	2
Disas Perhubungan	0	1	0	1
Dinas Pariwisata dan Budaya	0	2	0	2
Dinas Lingkungan Hidup	0	3	2	5
Polres	0	0	1	1
Bappeda	0	0	1	1
BPBD	1	2	1	4
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0	1	0	1
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0	0	1	1
Dinas Tenaga Kerja	0	0	1	1
Distanikan	0	0	1	1
	8	15	9	32

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018



Gambar 2-64 Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan

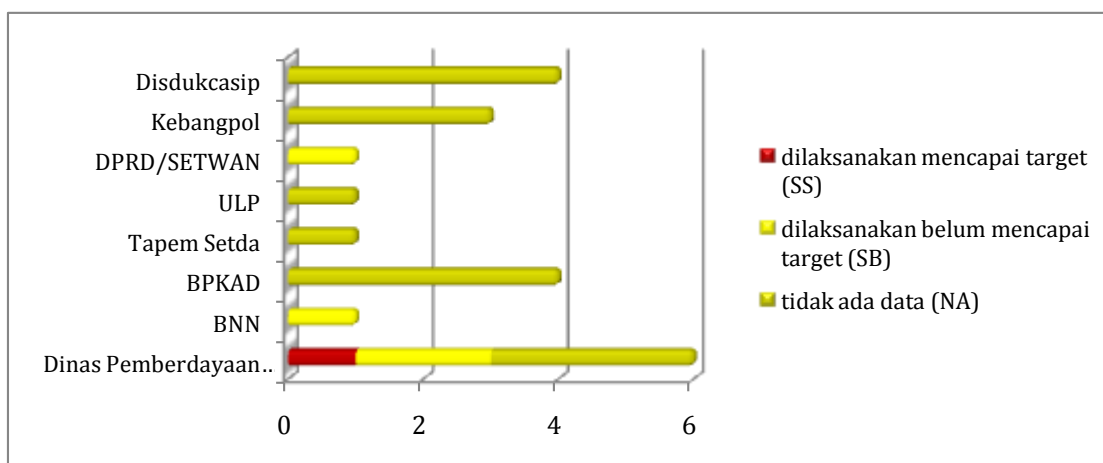
4) Capaian Indikator TPB pada Perangkat Daerah Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16 yakni perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Total untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 21 indikator. Dari total 21 indikator di pilar lingkungan, terdapat 1 indikator yang mencapai target (4,76%), 4 indikator (19,05%) dilaksanakan belum mencapai target (SB), 16 indikator (76,19%) tidak ada data (NA). Capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.81 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	tidak ada data (NA)	Jumlah
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1	2	3	6
BNN		1		1
BPKAD			4	4
Tapem Setda			1	1
ULP			1	1
DPRD/SETWAN		1		1
Kebangpol			3	3
Disdukcasip			4	4
	1	4	16	21

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2018



Gambar 2-65 Kontribusi Organisasi perangkat daerah dalam capaian indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola

B. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Daya Dukung Air

• Ketersediaan Air

Berdasarkan dari data curah hujan tahunan di Kota Bekasi yaitu sebesar 2.723 mm/tahun (Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2018). Dari nilai curah hujan maka dengan menggunakan pendekatan *water balance* dapat dihitung potensi ketersediaan air di Kota Bekasi untuk kondisi eksisting (tahun 2017). Perhitungan dari potensi ketersediaan air di Kota Bekasi berdasarkan tata guna lahan eksisting tahun 2017. Dari data luasan tutupan lahan di Kota Bekasi tersebut maka tutupan lahan paling luas adalah permukiman dan pusat kegiatan. Hal ini memperlihatkan bahwa Kota Bekasi menjadi pusat kegiatan perkotaan dan permukiman penduduk.

Untuk hasil perhitungan potensi sumber daya air di Kota Bekasi dengan menggunakan rumus neraca air konvensional dimana terdapat pengaruh dari jenis tutupan lahan terhadap infiltrasi maupun *run off*, maka secara lengkap disajikan neraca air per jenis penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.82 Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Eksisting

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (km ²)	Luasan (m ²)	Nilai C*	IK	R (L/detik)	I (L/detik)
1	Danau/Situ	0,15	145.516	0	1	-	23,87
2	Gedung/Bangunan	1,00	995.896	0,65	0,35	106,19	57,18
3	Perkebunan/Kebun	20,88	20.880.408	0,3	0,7	1.027,53	2.397,58
4	Permukiman dan Tempat Kegiatan	121,05	121.052.858	0,65	0,35	12.906,97	6.949,91
5	Sawah	26,47	26.471.763	0,1	0,9	434,23	3.908,06
6	Sawah Tadah hujan	0,10	95.846	0,1	0,9	1,57	14,15
7	Semak Belukar	1,72	1.723.366	0,25	0,75	70,67	212,02
8	Tanah Kosong	26,40	26.397.831	0,35	0,65	1.515,56	2.814,61
9	Tegalan/Ladang	14,31	14.307.343	0,2	0,8	469,38	1.877,52
10	Vegetasi Non Budidaya Lainnya	0,07	70.704	0,2	0,8	2,32	9,28
TOTAL		212,14	212.141.530	2,80	7,20	16.534,4	18.264,2

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Tabel 2.833 Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Rencana Pola Ruang

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (km ²)	Luasan (m ²)	Nilai C*	IK	R (L/detik)	I (L/detik)
1	Campuran	15,90	15.896.874	0,2	0,8	521,53	2.086,11
2	Danau	0,21	209.047	0	1	-	34,29
3	Gardu Induk	0,15	152.054	0,65	0,35	16,21	8,73
4	Industri Besar	9,27	9.274.009	0,9	0,1	1.369,13	152,13
5	Industri Kecil	0,09	89.297	0,5	0,5	7,32	7,32
6	Industri Menengah	4,20	4.200.244	0,7	0,3	482,29	206,70
7	IPAL	0,12	122.676	0	1	-	20,12
8	IPLB3	0,03	29.247	0	1	-	4,80
9	Jalan Arteri Primer	1,02	1.022.925	0,85	0,15	142,63	25,17
10	Jalan Arteri Sekunder	0,25	254.855	0,85	0,15	35,53	6,27
11	Jalan Baru	0,37	370.936	0,85	0,15	51,72	9,13
12	Jalan Kereta	0,08	78.994	0,85	0,15	11,01	1,94
13	Jalan Kolektor Primer	0,45	451.555	0,85	0,15	62,96	11,11
14	Jalan Kolektor Sekunder	0,21	211.823	0,85	0,15	29,53	5,21
15	Jalan Lokal	14,64	14.640.362	0,85	0,15	2.041,30	360,23
16	Jalan Tol	1,70	1.701.082	0,85	0,15	237,18	41,86
17	Kawasan Lindung Cagar Budaya	0,01	14.256	0,65	0,35	1,52	0,82
18	Komersial Skala Kawasan	9,63	9.628.952	0,65	0,35	1.026,66	552,82
19	Komersial Skala Kecamatan	0,72	723.444	0,65	0,35	77,14	41,53
20	Komersial Skala Regional/Kota	8,10	8.102.184	0,65	0,35	863,88	465,16
21	Pelebaran Jalan	1,46	1.457.169	0,85	0,15	203,17	35,85
22	Perkantoran Pemerintah	0,73	727.401	0,65	0,35	77,56	41,76
23	Pertahanan dan Keamanan	0,77	771.905	0,65	0,35	82,30	44,32
24	Pertambangan	0,04	39.394	0,65	0,35	4,20	2,26
25	Perumahan Kepadatan Rendah	13,65	13.645.800	0,4	0,6	895,35	1.343,03
26	Perumahan Kepadatan Sedang	34,75	34.748.301	0,5	0,5	2.849,96	2.849,96
27	Perumahan Kepadatan Tinggi	68,63	68.632.807	0,6	0,4	6.754,90	4.503,27
28	PerumahaRTH Jalur Hijaun Kepadatan Tinggi	0,00	238	0,6	0,4	0,02	0,02
29	PerumahRTH Jalur Hijauan Kepadatan Tinggi	0,00	778	0,6	0,4	0,08	0,05
30	RTH Jalur Hijau	1,13	1.134.496	0,15	0,85	27,91	158,18
31	RTH Pulau Jalan	0,00	164	0,15	0,85	0,00	0,02
32	RTH Kota	2,80	2.801.704	0,15	0,85	68,94	390,64
33	RTH Rekreasi	0,00	1.023	0,15	0,85	0,03	0,14

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (km ²)	Luasan (m ²)	Nilai C*	IK	R (L/detik)	I (L/detik)
34	RTH Sabuk Hijau (Buffer)	0,33	332.946	0,15	0,85	8,19	46,42
35	RTH Taman Kecamatan	1,18	1.175.797	0,15	0,85	28,93	163,94
36	RTH Taman Kelurahan	0,69	689.062	0,15	0,85	16,95	96,08
37	Sarana Kesehatan	0,06	57.679	0,65	0,35	6,15	3,31
38	Sarana Pendidikan	2,08	2.077.803	0,65	0,35	221,54	119,29
39	Sarana Peribadatan	0,48	484.601	0,65	0,35	51,67	27,82
40	Sarana Rekreasi dan Olahraga	0,41	409.818	0,65	0,35	43,70	23,53
41	Sarana Sosial dan Budaya	0,02	23.414	0,65	0,35	2,50	1,34
42	Sarana Transportasi	0,14	144.607	0,65	0,35	15,42	8,30
43	Sempadan Jalan Kereta	0,32	317.856	0,35	0,65	18,25	33,89
44	Sempadan Situ/Danau	0,11	109.314	0,35	0,65	6,28	11,66
45	Sempadan Sungai	4,96	4.957.100	0,35	0,65	284,60	528,54
46	Sempadan SUTET	1,87	1.870.803	0,35	0,65	107,41	199,47
47	Situ	0,24	238.955	0	1	-	39,20
48	Sungai dan Saluran	2,33	2.331.922	0	1	-	382,52
49	Tampungan Air	0,43	431.787	0	1	-	70,83
50	TPA	2,09	2.087.661	0,35	0,65	119,86	222,59
51	TPU	1,61	1.612.877	0,3	0,7	79,37	185,20
52	(blank)	0,00	0	1	0	0,00	-
TOTAL		210,49	210.490.000,00	25,85	26,15	18.952,79	15.574,89

Sumber: Rencana Pola Ruang Kota Bekasi Tahun, 2018

Dengan melihat hasil analisa potensi ketersediaan air di Kota Bekasi dapat dilihat bahwa berdasarkan luasan tata guna lahan eksisting dan luasan guna lahan pola ruang RTRW Kota Bekasi terdapat perubahan persentase infiltrasi dan *run off*.

Dimana menurut luasan guna lahan eksisting, nilai *run off* sebesar 47,5% (16.534,4 L/detik) sedangkan infiltrasi sebesar 52,5% (18.264,2 L/detik). Jika menurut luasan guna lahan dari rencana pola ruang RTRW Kota Bekasi tersebut maka nilai *run off* sebesar 54,9% (18.592,8 L/detik) sedangkan infiltrasi sebesar 45,1% (15.574,9 L/detik). Terjadi peningkatan nilai *run off* sebesar 7,4%, hal ini memperlihatkan bahwa terjadi air larian akibat peningkatan lahan terbangun dari rencana pola ruang Kota Bekasi.

Hal ini mengakibatkan potensi ketersediaan air permukaan lebih besar dibandingkan potensi ketersediaan air tanah. Perlu adanya peningkatan pengelolaan terhadap air permukaan di masa mendatang di Kota Bekasi karena banyaknya perubahan lahan menjadi lahan terbangun.

• **Kebutuhan Air**

Untuk memenuhi kebutuhan air secara minimal yang harus dipenuhi untuk setiap masyarakat Kota Bekasi. Asumsi kebutuhan air dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Permen PU 01/2014 bahwa kebutuhan air bersih domestik minimal yaitu 60 Liter/orang/hari, sedangkan asumsi 20% untuk kebutuhan air bersih non domestik (sekolah, kantor, tempat ibadah, dll). Kebutuhan perkapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kota Bekasi. Asumsi untuk kebutuhan air dengan melihat kondisi kebocoran air dari pelayanan PDAM sebesar 25% dari kebutuhan air domestik. Adapun untuk jumlah kebutuhan air di Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.84 Kebutuhan Air di Kota Bekasi

TAHUN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Air Domestik		Kebutuhan Air Non Domestik	
		L/hari	L/detik	L/hari	L/detik
2021	3.253.179	337.354.688	3.904,57	101.206.406	1.171,37
2026	3.750.804	438.844.071	5.079,21	131.653.221	1.523,76
2031	4.325.535	588.272.783	6.808,71	176.481.835	2.042,61

Lanjutan Tabel Kebutuhan Air di Kota Bekasi

TAHUN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebocoran 25%		TOTAL	
		L/hari	L/detik	L/hari	(L/detik)
2021	3.253.179	109.640.273,47	1.268,98	548201367,36	6.344,92
2026	3.750.804	142.624.323,15	1.650,74	713121615,74	8.253,72
2031	4.325.535	191.188.654,33	2.212,83	955943271,66	11.064,16

Sumber: Hasil Analisis, 2018

• **Status Daya Dukung Air**

Evaluasi ketersediaan dan kebutuhan air bertujuan untuk mengetahui apakah air yang tersedia dari debit curah hujan mencukupi untuk kebutuhan pemakaian air oleh masyarakat di Kota Bekasi baik untuk domestik maupun non domestik. Adapun uraian dari ketersediaan air dan kebutuhan air di Kota Bekasi didapat dari nilai rata-rata ketersediaan air tanah dan air permukaan terhadap kebutuhan air domestik dan non domestik. Hasil perbandingan untuk ketersediaan dan kebutuhan air di Kota Bekasi menunjukkan bahwa kondisi daya dukung air saat ini masih mencukupi ataupun surplus. Berdasarkan perhitungan proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air maka dalam perhitungan tahun 2021, 2026 dan 2031 masih dalam kondisi surplus, artinya masih memenuhi daya dukung air.

Tabel 2.855 Proyeksi Status Daya Dukung Air Kota Bekasi Tahun 2017-2036

TAHUN	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Air			Total Kebutuhan Air (L/Detik)	Ketersediaan Air		Status Daya Dukung Air
		Kebutuhan Air Domestik (L/detik)	Kebutuhan Air Non Domestik (L/detik)	Kebocoran 25% (L/Detik)		Air Permukaan (L/Detik)	Air Tanah (L/Detik)	
2017	3.253.179	3.449	1.035	1.121	5.604,37	16.534,42	18.264,17	memenuhi daya dukung
2021	3.253.179	3.905	1.171	1.269	6.344,92	16.534,42	18.264,17	memenuhi daya dukung
2026	3.750.804	5.079	1.524	1.651	8.253,72	18.952,79	15.574,89	memenuhi daya dukung
2031	4.325.535	6.809	2.043	2.213	11.064,16	18.952,79	15.574,89	memenuhi daya dukung

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Daya Dukung Lahan

- Analisis Ketersediaan Lahan**

Perhitungan daya dukung lahan di Kota Bekasi dengan data yang diperlukan dalam perhitungan ketersediaan lahan yaitu produksi aktual tiap jenis komoditi (Pi) dan harga beras di tingkat produsen (Hb), harga satuan tiap komoditi di tingkat produsen (Hi), dan produktivitas beras di Kota Bekasi (Pt). Data yang digunakan berasal dari jenis-jenis komoditas pangan yang berada di Kota Bekasi, yang terdiri dari pertanian, perkebunan dan buah-buahan. Secara lengkap, perhitungan nilai produksi total dari komoditas pangan tersebut di Kota Bekasi sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.86 Hasil Perhitungan Nilai Produksi Total Kota Bekasi

No	Jenis Komoditas	Produksi Aktual		Harga Satuan Komoditas (Rp/kg)	Nilai Produksi (Rp)
		Ton	Kg		
1	Padi sawah	30.438,7	30.438.700	5.500	167.412.850.000
2	Padi gogo	-	-		-
3	Jagung	828,0	828.000	9.000	7.452.000.000
4	Ubi kayu	249,8	249.750	6.000	1.498.500.000
5	Ubi jalar	49,1	49.080	5.000	245.400.000
6	Bayam	4.807,5	4.807.500	5.000	24.037.500.000
7	Cabe besar	435,0	435.000	30.000	13.050.000.000
8	Kacang panjang	101,7	101.700	6.000	610.200.000
9	Ketimun	90,0	90.000	8.000	720.000.000
10	Kangkung	4.532,4	4.532.420	5.000	22.662.100.000
11	Sawi	2.664,0	2.664.000	3.000	7.992.000.000

No	Jenis Komoditas	Produksi Aktual		Harga Satuan Komoditas (Rp/kg)	Nilai Produksi (Rp)
		Ton	Kg		
12	Terong	83,2	83.200	8.000	665.600.000
13	Durian	659,1	659.090	75.000	49.431.750.000
14	Duku	68,8	68.800	8.000	550.400.000
15	Jambu biji	345,6	345.590	5.600	1.935.304.000
16	Jeruk Siem	28,6	28.600	11.900	340.340.000
17	Mangga	1.491,8	1.491.750	15.000	22.376.250.000
18	Pepaya	1.602,6	1.602.610	7.000	11.218.270.000
19	Pisang	419,6	419.630	7.000	2.937.410.000
20	Rambutan	1.395,2	1.395.150	12.000	16.741.800.000
21	Sawo	775,3	775.310	13.000	10.079.030.000
TOTAL					361.956.704.000

Sumber: Hasil Analisis (2018) dari Kota Bekasi Dalam Angka (2018)

Perhitungan ketersediaan lahan (SL) berdasarkan persamaan sebagai berikut:

$$SL = \frac{Rp\ 361.965.704.000}{Rp\ 12.000} \times \frac{1}{63.020 \frac{kg}{ha}} = 479\ Ha$$

Jadi ketersediaan lahan (SL) di Kota Bekasi yaitu 479 Ha.

• Analisis Kebutuhan Lahan

Kebutuhan lahan diperoleh dengan cara mengalikan jumlah penduduk (N) dengan kebutuhan lahan untuk hidup layak (KHL). Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal. Menurut Permen LH No. 17 Tahun 2009, untuk kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/tahun. Seperti yang telah diketahui diatas, produktivitas beras di Kota Bekasi adalah 30.438.700 kg/ha/tahun. Perhitungan kebutuhan lahan untuk hidup layak adalah sebagai berikut:

$$KHL = \frac{1\ ton \frac{beras}{orang/tahun}}{23.002.330 \frac{kg}{ha}/tahun}$$

$$= 0,0159\ Ha/orang$$

Jadi kebutuhan lahan untuk hidup layak di Kota Bekasi adalah 0,0159Ha/orang.

Kebutuhan lahan diperoleh dengan cara mengalikan jumlah penduduk (N) dengan kebutuhan lahan untuk hidup layak (KHL). Perhitungan kebutuhan lahan (DL) pada tahun saat ini dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 3.253.179 jiwa, dengan menggunakan persamaan:

$$DL = 3.253.179\ jiwa \times 0,0159\ jiwa/Ha$$

$$= 51.623,31Ha$$

Jadi kebutuhan lahan (DL) untuk Kota Bekasi pada tahun 2021 adalah 51.623,31 Ha.

- **Status Daya Dukung Lahan**

Dengan melihat hasil perhitungan untuk ketersediaan dan kebutuhan lahan di Kota Bekasi didapatkan hasil yaitu:

- Ketersediaan lahan (S_L) : 479Ha
- Kebutuhan lahan (D_L) : 51.623,31Ha

Dengan demikian, status daya dukung lahan secara keseluruhan wilayah Kota Bekasi diperoleh pada tahun 2017, maka nilai $SL < DL$ (479 Ha < 51.623,31 Ha) atau dinyatakan defisit atau tidak memenuhi daya dukung. Artinya bahwa dalam lingkup wilayah, maka Kota Bekasi ini tidak memiliki daya dukung lahan yang baik, sehingga dalam keadaan produktifitas pangan yang ada tidak dapat memenuhi ketersediaan pangan untuk kebutuhan daerahnya sendiri.

Begitu juga dengan proyeksi penduduk di tahun 2021 hingga 2031 masih berada dalam kondisi defisit, dimana kebutuhan lahan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan lahan yang ada di Kota Bekasi untuk lahan pertanian dan komoditas pangan lainnya.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam mengelola keuangan daerah, Kota Bekasi telah melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Peninjauan terhadap kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk dapat mengetahui potensi sumber daya keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Peninjauan ini dilakukan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi selama lima tahun terakhir. Kinerja keuangan masa lalu ini mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD ini menguraikan perkembangan kinerja tiga komponen keuangan daerah, yaitu kinerja pengelolaan Pendapatan Daerah, kinerja pengelolaan Belanja Daerah, dan kinerja pengelolaan Pembiayaan Daerah.

A. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2017

Terdapat 3 komponen Pendapatan Daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas beberapa jenis pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- **Dana Perimbangan**

Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan terdiri atas dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

- **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang disajikan dalam Tabel 3.1 menginformasikan target dan realisasi pendapatan daerah. Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa selama periode 2013-2017 pendapatan daerah cenderung meningkat.

Pada periode tahun 2013-2017, kinerja realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi belum mencapai 100 persen atau kurang dari target. Kinerja realisasi Pendapatan daerah tertinggi dicapai pada tahun 2013 yakni sebesar 99,58 persen. Sedangkan kinerja terendahnya terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 87,51 persen. Kinerja realisasi pendapatan daerah yang kurang dari 100 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi belum berhasil menghimpun sumber-sumber pendapatannya untuk memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun rencana.

Secara lebih rinci target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini.

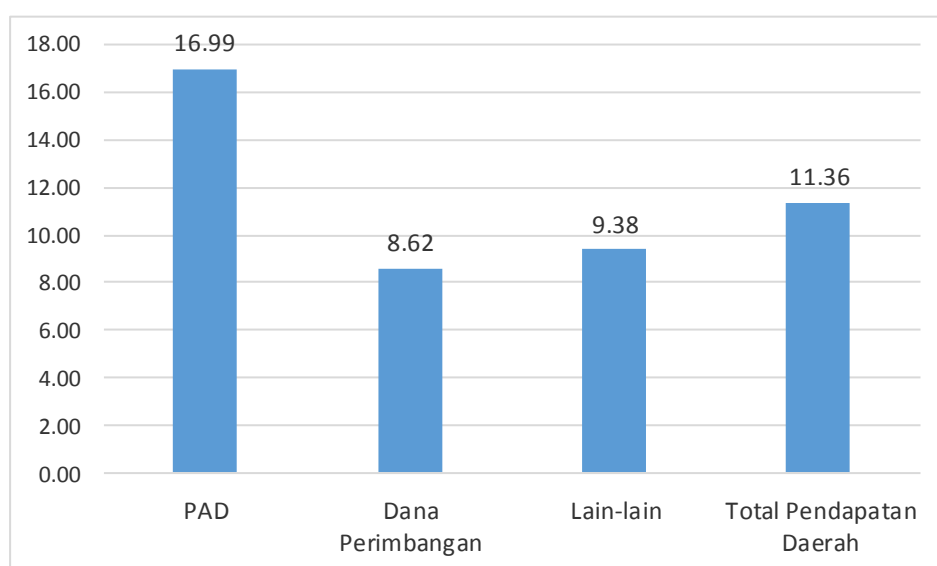
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. TARGET PENDAPATAN DAERAH						
1.	PENDAPATAN	2.973.216.093.959	3.569.307.346.689,40	3.976.356.352.496,00	4.290.326.129.657,00	5.186.116.074.099,02
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	950.661.955.902	1.170.134.918.800,00	1.384.239.968.547,00	1.686.660.486.524,00	2.352.903.540.287,02
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	718.251.958.508	852.916.735.500,00	1.006.583.747.200,00	1.240.204.065.300,00	1.505.318.277.800,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	47.603.065.200	49.087.421.850,00	69.008.240.200,00	94.743.140.600,00	220.403.765.300,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	11.345.698.260	11.827.021.850,00	11.368.264.400,00	14.347.038.600,00	21.199.094.400,00
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	173.461.233.934	256.303.739.600,00	297.279.716.747,00	337.366.242.024,00	605.982.402.787,02
1.2.	Dana Perimbangan	1.207.004.623.100	1.345.695.937.116,00	1.380.385.469.000,00	1.592.275.828.878,00	1.693.703.520.463,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	119.579.126.100	140.858.604.116,00	143.098.719.000,00	167.728.648.336,00	175.912.640.463,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.051.235.707.000	1.133.417.253.000,00	1.198.049.800.000,00	1.099.677.780.342,00	1.212.033.531.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	36.189.790.000	71.420.080.000,00	39.236.950.000,00	324.869.400.200,00	305.757.349.000,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	815.549.514.957	1.053.476.490.773,40	1.211.730.914.949,00	1.011.389.814.255,00	1.139.509.013.349,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	7.000.000.000,00	4.100.000.000,00	6.000.000.000,00	5.266.440.190,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	492.355.919.697	643.947.414.413,40	683.302.520.509,00	727.544.244.255,00	746.355.907.159,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	213.125.791.500	252.836.721.000,00	334.951.260,00	-	52.941.282.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	110.067.803.760	149.692.355.360,00	277.514.338.000,00	277.845.570.000,00	334.945.384.000,00
B. REALISASI PENDAPATAN DAERAH						
1.	PENDAPATAN	2.960.580.369.588	3.480.340.735.518	3.956.308.126.353	4.213.639.966.189	4.538.278.383.793
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	969.664.481.362	1.205.243.336.069	1.504.510.666.968	1.595.714.960.272	1.799.361.410.779
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	723.511.938.746	845.771.913.123	1.030.224.055.885	1.135.209.599.150	1.393.559.087.917
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	44.393.113.029	50.386.438.478	78.218.815.857	81.714.614.106	84.195.635.300
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	11.364.027.452	11.745.573.968	11.368.258.534	12.154.959.812	9.424.723.876
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	190.395.402.135	297.339.410.500	384.699.536.692	366.635.787.204	312.181.963.686
1.2.	Dana Perimbangan	1.193.018.165.096	1.286.650.122.476	1.332.517.465.266	1.652.830.067.172	1.636.851.654.218
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	123.113.143.096	131.806.845.476	103.078.105.266	153.164.992.065	144.271.830.855
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.051.235.707.000	1.133.417.253.000	1.198.049.800.000	1.144.353.778.228	1.212.033.531.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	18.669.315.000	21.426.024.000	31.389.560.000	355.311.296.879	280.546.292.363
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	797.897.723.130	988.447.276.973	1.119.279.994.119	965.094.938.745	1.102.065.318.796
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	10.320.000.000	3.857.000.000	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	483.240.620.677	614.453.342.270	673.988.192.639	715.262.630.045	743.133.859.796
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	213.125.791.500	252.836.721.000	275.366.338.000	-	26.470.641.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	101.531.310.953	110.837.213.703	166.068.463.480	249.832.308.700	332.460.818.000
C. KINERJA PENDAPATAN DAERAH		99,58	97,51	99,50	98,21	87,51

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, diolah 2018

Berdasarkan pertumbuhan rata-rata per tahun masing-masing komponen pendapatan daerah, terlihat bahwa PAD tumbuh paling tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan komponen lainnya. Selama periode 2013-2017, pendapatan daerah Kota Bekasi rata-rata tumbuh sebesar 11,36 persen yang disebabkan oleh pertumbuhan rata-rata komponen PAD sebesar 16,99 persen, Dana Perimbangan sebesar 8,62 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 9,38 persen. Pertumbuhan rata-rata komponen PAD yang lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya menunjukkan makin berkembangnya kemandirian Kota Bekasi dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya.

Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah dan masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Bekasi tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 3-1.



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 3-1 Pertumbuhan Rata-Rata PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain dan Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2013-2017 (%)

Proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi periode 2013-2017 memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan proporsi PAD serta penurunan proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan rata-rata komponen PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya.

Proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2013 sebesar 32,75% meningkat menjadi 39,65% pada tahun 2017. Berdasarkan rata-rata proporsi komponen PAD tahun 2013 sampai tahun 2017 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu 72,37%. Sisanya terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 22,04%, Hasil Retribusi Daerah sebesar 4,75%, dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,84%.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah menurun dari 40,10% pada tahun 2013 menjadi 36,07% pada tahun 2017. Berdasarkan rata-rata proporsi

komponen Dana Perimbangan tahun 2013 sampai tahun 2017 terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum yaitu sebesar 81,88%. Sisanya terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 9,28% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 8,84%.

Proporsi komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah menurun dari 26,96% pada tahun 2013 menjadi 24,28% pada tahun 2017. Berdasarkan rata-rata proporsi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2013 sampai tahun 2017 terbesar berasal dari Bagi Hasil Pajak/Non Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yaitu sebesar 64,89%. Sisanya terdiri dari Bantuan Keuangan dari Povinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 18,97%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 15,86%, Pendapatan Hibah sebesar 0,28%, dan Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 0,01%.

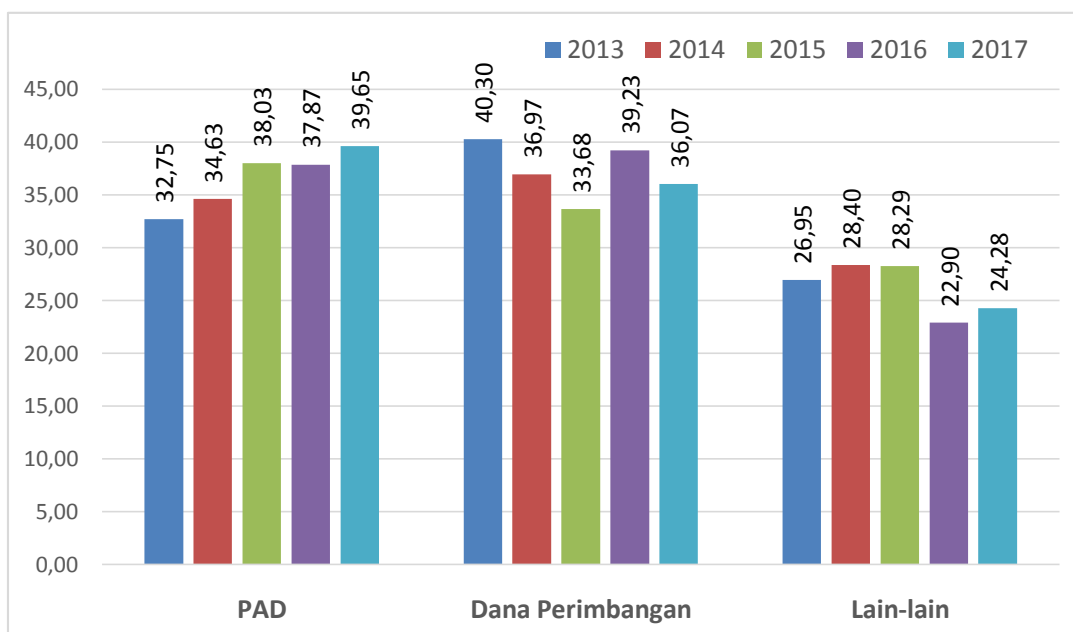
Apabila tahun 2013 PAD Kota Bekasi baru sebesar Rp. 969.664.481.363,- secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun menjadi Rp. 1.799.361.410.779,- pada tahun 2017. Meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi berarti meningkatnya kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Secara rinci proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi periode 2013-2017 terlihat pada Tabel 3.2. dan Gambar 3-2.

Tabel 3.2 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2013-2017 (Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Jumlah Pendapatan Daerah
2013	969.664.481.363	1.193.018.165.096	797.897.723.130	2.960.580.369.589
2014	1.205.243.336.069	1.286.650.122.476	988.447.276.973	3.480.340.735.518
2015	1.504.510.666.968	1.332.517.465.266	1.119.279.994.119	3.956.308.126.353
2016	1.595.714.960.272	1.652.830.067.172	965.094.938.745	4.290.326.129.657
2017	1.799.361.410.779	1.636.851.654.218	1.102.065.318.796	4.538.278.383.793

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, diolah 2018.



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 3-2 Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2013-2017 (%)

B. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah Kota Bekasi, 2013-2017

Belanja daerah Kota Bekasi terdiri dari komponen:

- 1) Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- 2) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja daerah Kota Bekasi yang disajikan dalam Tabel 3.3 menginformasikan pagu atau target dan realisasi belanja daerah. Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017 belanja daerah cenderung meningkat.

Kinerja realisasi belanja daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah selalu berada di di bawah pagu atau targetnya. Kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2013, yakni sebesar 87,69 persen dari pagu/target, sedangkan terendah pada tahun 2014 yakni sebesar 78,97 persen dari pagu/target. Realisasi belanja yang lebih kecil dari target/pagu anggarannya seperti ini disebut sebagai *favourable variance*. Hal ini disatu sisi bisa jadi menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi disisi lain sebaliknya, bisa jadi karena kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga kurang tepat dalam mengestimasi belanja, atau adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana.

Kinerja Belanja Daerah Kota Bekasi periode tahun 2013-2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

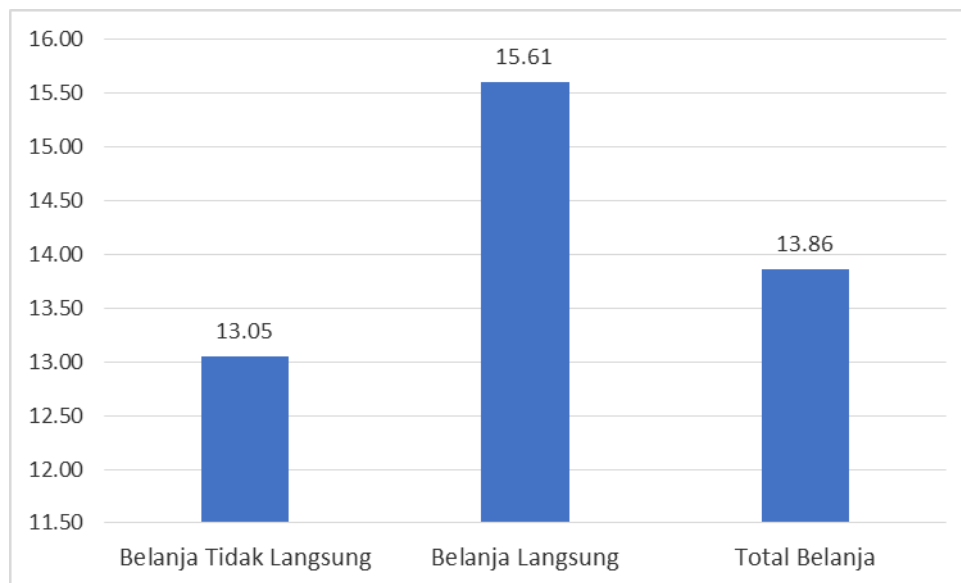
Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2017

No (1)	Uraian (2)	Tahun 2013 (3)	Tahun 2014 (4)	Tahun 2015 (5)	Tahun 2016 (6)	Tahun 2017 (7)
A. TARGET BELANJA DAERAH						
2.	BELANJA DAERAH	3.375.314.866.143	3.935.251.952.821	4.691.313.300.821	5.035.435.715.577	5.709.432.093.083
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.661.240.635.092	1.920.525.976.764	1.989.788.255.704	2.279.665.666.267	2.711.403.495.536
2.1.1	Belanja Pegawai	1.513.952.009.371	1.805.680.183.764	1.909.981.669.904	2.147.512.534.966	2.553.411.399.162
2.1.2	Belanja Bunga	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
2.1.3	Belanja Subsidi			0	0	1.700.000.000
2.1.4	Belanja Hibah	93.411.858.000	83.815.635.000	49.007.192.000	82.631.660.000	71.809.638.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.936.000.000	24.261.323.200	25.000.000.000	39.801.797.000	80.030.621.474
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	905.019.000	968.834.800	1.058.182.800	1.058.182.800	1.151.836.900
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	21.735.748.721	5.500.000.000	4.441.211.000	8.361.491.501	3.000.000.000
2.2.	Belanja Langsung	1.714.074.231.051	2.014.725.976.057	2.701.525.045.117	2.755.770.049.310	2.998.028.597.547
2.2.1	Belanja Pegawai					
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	617.048.923.753	892.099.490.648	1.032.093.832.004	1.011.300.868.281	1.416.635.165.368
2.2.3	Belanja Modal	1.097.025.307.298	1.122.626.485.409	1.669.431.213.113	1.744.469.181.029	1.581.393.432.179
B. REALISASI BELANJA DAERAH						
2.	BELANJA	2.959.889.954.879	3.107.838.415.647	3.882.237.460.467	4.404.495.132.194	4.936.233.095.851
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.532.759.643.777	1.680.002.606.996	1.805.074.682.311	2.092.843.378.499	2.494.915.375.319
2.1.1	Belanja Pegawai	1.414.572.740.918	1.588.325.325.041	1.736.078.211.220	1.983.237.700.201	2.359.002.998.502
2.1.2	Belanja Bunga	194.880.507	154.866.047	120.138.622	63.246.793	35.569.285
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	87.670.003.277	65.547.098.467	45.761.627.000	74.297.227.000	56.483.844.800
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27.933.692.500	22.271.620.000	21.126.000.000	29.254.800.000	78.005.600.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	857.113.700	940.892.652	1.058.182.433	964.438.170	1.151.746.170
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.531.212.875	2.762.804.789	930.523.036	5.025.966.335	235.616.562
2.2.	Belanja Langsung	1.427.130.311.102	1.427.835.808.651	2.077.162.778.156	2.311.651.753.695	2.441.317.720.532
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	538.707.878.192	708.357.486.697	827.208.108.778	883.617.229.289	1.218.939.408.262
2.2.3	Belanja Modal	888.422.432.910	719.478.321.954	1.249.954.669.378	1.428.034.524.406	1.222.378.312.270
C. KINERJA BELANJA DAERAH (%)		87,69	78,97	82,75	87,47	86,46

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, diolah 2018.

Pada periode tahun 2013-2017, pertumbuhan tertinggi realisasi belanja daerah terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 24,92% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 5,00%. Sedangkan pertumbuhan rata-rata belanja daerah pada periode tahun 2013-2017 sebesar 13,86% per tahun.

Pertumbuhan rata-rata belanja tidak langsung sebesar 13,05% per tahun dan belanja langsung sebesar 15,61% per tahun. Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Bekasi dari tahun 2013-2017 yang cukup tinggi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini berarti bahwa besaran alokasi belanja daerah Kota Bekasi, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan program dan kegiatan makin meningkat.



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 3-3 Pertumbuhan Rata-rata Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Belanja Daerah Kota Bekasi, 2013-2017

Proporsi realisasi komponen belanja terhadap Belanja Daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan proporsi Belanja Tidak Langsung cenderung turun dan proporsi Belanja Langsungnya cenderung meningkat. Hal ini berarti bahwa proporsi belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan meningkat dari tahun ke tahun.

Perkembangan komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap belanja daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 3.4.

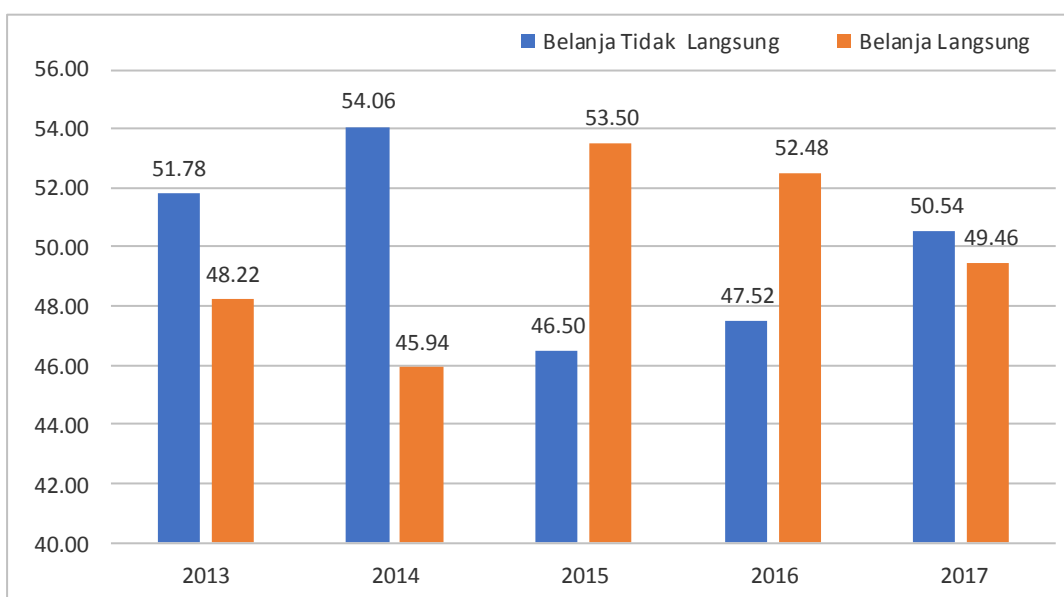
Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi 2013-2017 (Dalam Rupiah dan%)

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Jumlah Belanja Daerah
2013	1.532.759.643.777	1.427.130.311.102	2.959.889.954.879
2014	1.680.002.606.996	1.427.835.808.651	3.107.838.415.647
2015	1.805.704.682.311	2.077.162.778.156	3.882.237.460.467
2016	2.092.843.378.499	2.311.651.753.695	4.404.495.132.194
2017	2.494.915.375.319	2.441.317.720.532	4.936.233.095.851

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, diolah 2018

Proporsi komponen belanja tidak langsung pada tahun 2013 sebesar Rp1.532.759.643.777,- atau 51,78% menjadi Rp2.494.915.375.319,- atau 50,54% pada 2017. Sementara proporsi belanja langsung meningkat dari Rp1.427.130.311.102,- atau 48,22% pada tahun 2013 menjadi Rp2.441.317.720.532,- atau 49,46% pada tahun 2017.

Perkembangan proporsi komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja daerah Kota Bekasi periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di atas dan Gambar 3-4. di bawah.



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 3-4 Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi, 2013-2017

C. Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah Kota Bekasi periode 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi. Pendapatan daerah tumbuh rata-rata sebesar 11,36 persen per tahun. Sedangkan belanja daerah tumbuh rata-rata sebesar 13,86 persen per tahun.

Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah Kota Bekasi tahun 2013-2017 disumbang oleh pertumbuhan rata-rata pertahun PAD sebesar 16,99 persen, dana perimbangan sebesar 8,62 persen dan lain-lain sebesar 9,38 persen. Pertumbuhan PAD Kota Bekasi disumbang oleh pertumbuhan rata-rata per tahun dari Pajak Daerah sebesar 17,91 persen, Retribusi Daerah sebesar 19,06 dan lain-lain sebesar 16,50 persen, serta turunnya hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar 3,85 persen.

Pertumbuhan rata-rata per tahun Dana Perimbangan disumbang oleh tumbuhnya rata-rata per tahun hasil pajak/bukan pajak sebesar 7,01 persen, DAU sebesar 3,07 persen dan DAK sebesar 268,04 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata per tahun lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan oleh tumbuhnya dana bagi hasil pajak sebesar 11,72 persen, dan bantuan dari provinsi sebesar 35,63 persen.

Sementara, pertumbuhan rata-rata per tahun belanja daerah disumbang oleh tumbuhnya rata-rata per tahun belanja tidak langsung sebesar 13,05 persen dan belanja langsung sebesar 15,61 persen. Tumbuhnya komponen belanja tidak langsung disumbang oleh belanja pegawai tumbuh dengan rata-rata per tahun 13,05 persen, belanja bunga 13,69 persen, bantuan sosial sebesar 44,93 persen, bantuan keuangan sebesar 8,20 persen dan belanja tak terduga 89,73 persen, serta turunnya belanja bunga rata-rata per tahun sebesar 33,52 persen. Pertumbuhan rata-rata per tahun komponen belanja langsung disebabkan oleh pertumbuhan rata-rata belanja langsung penunjang urusan sebesar 23,26 persen dan belanja langsung urusan sebesar 13,64 persen. Pertumbuhan rata-rata pendapatan dan belanja daerah Kota Bekasi periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Kinerja neraca daerah Kota Bekasi periode lalu dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PENDAPATAN	2.960.580.369.588	3.480.340.735.518	3.956.308.126.353	4.213.639.966.189	4.538.278.383.793	11,36
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	969.664.481.362	1.205.243.336.069	1.504.510.666.968	1.595.714.960.272	1.799.361.410.779	16,99
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	723.511.938.746	845.771.913.123	1.030.224.055.885	1.135.209.599.150	1.393.559.087.917	17,91
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	44.393.113.029	50.386.438.478	78.218.815.857	81.714.614.106	84.195.635.300	19,06
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	11.364.027.452	11.745.573.968	11.368.258.534	12.154.959.812	9.424.723.876	-3,85
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	190.395.402.135	297.339.410.500	384.699.536.692	366.635.787.204	312.181.963.686	16,50
1.2.	Dana Perimbangan	1.193.018.165.096	1.286.650.122.476	1.332.517.465.266	1.652.830.067.172	1.636.851.654.218	8,62
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	123.113.143.096	131.806.845.476	103.078.105.266	153.164.992.065	144.271.830.855	7,01
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.051.235.707.000	1.133.417.253.000	1.198.049.800.000	1.144.353.778.228	1.212.033.531.000	3,74
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	18.669.315.000	21.426.024.000	31.389.560.000	355.311.296.879	280.546.292.363	268,04
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	797.897.723.130	988.447.276.973	1.119.279.994.119	965.094.938.745	1.102.065.318.796	9,38
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	10.320.000.000	3.857.000.000	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	483.240.620.677	614.453.342.270	673.988.192.639	715.262.630.045	743.133.859.796	11,72
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	213.125.791.500	252.836.721.000	275.366.338.000	-	26.470.641.000	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	101.531.310.953	110.837.213.703	166.068.463.480	249.832.308.700	332.460.818.000	35,63
2.	BELANJA	2.959.889.954.879	3.107.838.415.647	3.882.237.460.467	4.404.495.132.194	4.936.233.095.851	13,86
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.532.759.643.777	1.680.002.606.996	1.805.074.682.311	2.092.843.378.499	2.494.915.375.319	13,05
2.1.1	Belanja Pegawai	1.414.572.740.918	1.588.325.325.041	1.736.078.211.220	1.983.237.700.201	2.359.002.998.502	13,69
2.1.2	Belanja Bunga	194.880.507	154.866.047	120.138.622	63.246.793	35.569.285	-33,52
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	87.670.003.277	65.547.098.467	45.761.627.000	74.297.227.000	56.483.844.800	-4,26
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27.933.692.500	22.271.620.000	21.126.000.000	29.254.800.000	78.005.600.000	44,93
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	857.113.700	940.892.652	1.058.182.433	964.438.170	1.151.746.170	8,20
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.531.212.875	2.762.804.789	930.523.036	5.025.966.335	235.616.562	89,73
2.2.	Belanja Langsung	1.427.130.311.102	1.427.835.808.651	2.077.162.778.156	2.311.651.753.695	2.441.317.720.532	15,61
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	538.707.878.192	708.357.486.697	827.208.108.778	883.617.229.289	1.218.939.408.262	23,26
2.2.3	Belanja Modal	888.422.432.910	719.478.321.954	1.249.954.669.378	1.428.034.524.406	1.222.378.312.270	13,64

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuh an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	PEMBIAYAAN	407.521.362.843	374.428.224.364	(23.644.929.334)	766.927.585.816	522.184.500.110	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	429.185.663.081	410.240.594.252	4.224.440.554	786.239.955.720	587.746.870.030	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	429.185.663.081	410.240.594.252	(53.332)	786.239.955.720	587.746.870.030	
3.1.2	Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah			4.224.493.886			
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Provinsi						
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	21.664.300.238	35.812.369.888	27.557.000.000	19.312.369.904	65.562.369.920	
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	21.257.792.000	35.500.000.000	27.244.630.112	19.000.000.000	55.250.000.000	
3.2.2	Dana Bergulir					10.000.000.000	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	406.508.238	312.369.888	312.369.888	312.369.904	312.369.920	
3.2.4	Pembayaran Utang RSUD				-		
3.2.5	Pembayaran Hutang Kepada Rekanan				-		

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, diolah 2018

Tabel 3.6 Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	Rata-rata Pertumbuhan
1	ASET	7.082.243.848.883	7.776.755.170.073	8.497.526.233.636	10.002.095.297.618	10.572.349.633.584	10,62%
1.1.	ASET LANCAR	508.177.436.365	270.035.243.876	311.853.299.196	380.451.043.185	345.759.139.295	-4,62%
1.1.1.	Kas	14.310.875.989	32.513.986.251	53.409.124.943	28.744.739.552	-5.947.164.338	6,15%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0,00%
1.1.3.	Piutang	452.504.732.787	192.492.946.256	192.822.305.750	553.142.480.226	553.142.480.226	32,39%
1.1.4.	Piutang Lain-lain	18.935.006.330	20.783.481.232	50.678.686.212	16.360.897.171	16.360.897.171	21,47%
1.1.5.	Persediaan	22.426.821.260	24.244.830.138	14.943.182.291	38.417.688.191	38.417.688.191	31,71%
1.1.6.	Penyisihan Piutang	0	0	0	-257.433.189.866	-257.433.189.866	0,00%
1.1.7.	Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	1.218.427.911	1.218.427.911	0,00%
1.2.	ASET TETAP	5.950.039.628.486	6.535.465.553.489	7.077.524.971.341	8.729.571.316.659	9.965.657.939.287	13,91%
1.2.1.	Tanah	1.263.598.705.680	1.232.636.330.490	3.142.949.917.238	3.306.513.509.463	3.409.664.043.093	40,21%
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	701.172.378.521	793.160.004.928	938.359.845.738	1.176.974.563.366	1.426.087.062.545	19,51%
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	1.524.212.186.413	1.883.098.730.347	2.104.408.928.269	2.631.613.029.632	2.817.021.147.021	16,85%
1.2.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.136.492.503.875	2.534.962.712.707	3.165.660.825.253	3.801.233.517.398	4.496.691.893.397	20,48%
1.2.5.	Aset tetap Lainnya	61.015.365.539	66.020.115.886	70.306.569.303	86.275.496.843	89.232.593.274	10,21%
1.2.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	263.548.488.459	25.587.659.131	178.844.280.831	178.844.280.831	178.844.280.831	127,16%
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan	0	0	-2.523.005.395.292	-2.451.883.080.874	-2.451.883.080.874	-0,70%
1.3.	ASET LAINNYA	74.459.872.670	52.388.583.110	40.196.034.567	46.131.640.788	46.131.640.788	-9,54%
1.4.	Investasi Jangka Panjang	148.371.478.316	203.913.297.055	214.800.914.214	214.800.914.214	214.800.914.214	10,69%
2.	KEWAJIBAN	43.369.935.784	34.000.250.347	75.653.813.105	60.924.518.848	62.653.015.253	21,07%
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	42.276.641.208	33.219.325.650	74.949.860.547	61.949.062.695	61.949.062.695	21,71%

2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	1.093.294.576	780.924.697	703.952.558	500.155.685	703.952.558	-6,66%
3.	EKUITAS	7.038.873.913.099	7.742.754.919.727	8.421.872.420.531	11.050.906.057.009	14.033.662.905.962	19,24%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.082.243.848.883	7.776.755.170.073	8.497.526.233.636	11.113.559.072.262	14.096.315.921.215	19,17%

Sumber: LKPJ WaliKota Bekasi 2013-2018, diolah

Dari Tabel 3.6 tersebut dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Kota Bekasi secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 10,62%, sehingga mencapai nilai Rp10.572.349.633.584,- di tahun 2017. Sedangkan untuk kewajiban yang harus dipenuhi, secara rata-rata meningkat sebesar 21,07%, yaitu sebesar Rp62.653.015.253,- pada tahun 2017

Adapun kinerja rasio neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio utang dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Likuiditas					
	- Rasio Lancar	12,020	8,129	4,161	6,141	5,581
	- Rasio Kas	0,339	0,979	0,713	0,464	-0,096
	- Rasio Cepat	11,490	7,399	3,961	5,521	4,961
	- Rasio Modal kerja terhadap Total Aset	0,066	0,030	0,028	0,032	0,027
2	Rasio Solvabilitas	163,298	228,726	112,321	164,172	168,744
3	Rasio Utang					
	- Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,006	0,004	0,009	0,006	0,004
	- Rasio Utang terhadap Aset Modal	0,007	0,005	0,011	0,007	0,006

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Analisis rasio keuangan untuk pemerintah daerah memiliki keterbatasan dibandingkan dengan sektor bisnis, akibat tidak adanya sejumlah informasi yang biasa digunakan di sektor bisnis seperti laba. Namun ada beberapa rasio yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu:

1. Rasio Likuiditas, yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya:
 - ❖ Rasio lancar untuk pemerintah Kota Bekasi menunjukkan angka yang cukup baik, dengan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar sebesar 5,581:1 pada tahun anggaran 2017. Angka perbandingan yang selalu di atas 2:1 sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki aset lancar yang cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya.
 - ❖ Rasio Kas menunjukkan angka yang kurang baik, yaitu sebesar -0,096:1 pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya.
 - ❖ Rasio Cepat menunjukkan angka yang cukup baik yaitu 4,961:1 pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa aktiva lancar yang ada setelah dikurangi dengan persediaan sudah cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya.

- ❖ Rasio Modal kerja terhadap Total Aset menunjukkan proporsi dari modal kerja (aset lancar dikurang utang lancar) terhadap total aset sebesar 0,027 pada tahun 2017, yang sedikit menurun dari angka tahun sebelumnya sebesar 0,032. Rasio ini menunjukkan bahwa masih terdapat 2,7% aset yang bersifat likuid dari total aset pemerintah Kota Bekasi setelah melunasi utang jangka pendeknya.
- 2. Rasio Solvabilitas menunjukkan perbandingan antara total aset dengan total utang yang cukup besar, yaitu sebesar 168,774:1 pada tahun 2017. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Bekasi dapat memenuhi seluruh kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2016, setelah sebelumnya terdapat penurunan yang cukup besar dari tahun 2014 ke 2015.
- 3. Rasio utang:
 - ❖ Rasio Utang terhadap Ekuitas menunjukkan angka yang cukup baik yaitu sebesar 0,004 pada tahun 2016. Angka ini menunjukkan bahwa nilai total utang pemerintah Kota Bekasi hanya sebesar 0,4% dari total ekuitas yang dimiliki, sehingga kewajiban yang harus dilunasi tidak terlalu membebani pemerintah. Angka tersebut menunjukkan penurunan rasio utang dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 0,006.
 - ❖ Rasio Utang terhadap Aset Modal juga menunjukkan angka yang cukup baik yaitu sebesar 0,006 pada tahun 2017. Angka ini menunjukkan bahwa nilai total utang pemerintah Kota Bekasi hanya sebesar 0,6% dari total aset modal yang dimiliki, sehingga kewajiban yang harus dilunasi tidak terlalu membebani pemerintah. Angka tersebut menunjukkan penurunan rasio utang dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 0,007.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pertumbuhan rata-rata PAD yang lebih tinggi daripada pertumbuhan komponen pendapatan daerah lainnya menunjukkan dijalankannya kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu yang berupaya meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada bantuan pemerintah pusat. Pertumbuhan rata-rata PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan komponen lainnya menyebabkan adanya peningkatan proporsi PAD dan penurunan proporsi komponen dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama kurun waktu 2013-2017, terjadi peningkatan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja pegawai) terhadap total pengeluaran, dari 47,44 persen

pada tahun 2013 menjadi 44,83 persen pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 47,16 persen pada tahun 2017. Secara nominal belanja pemenuhan kebutuhan aparatur juga meningkat dari Rp1.414.572.740.918,- pada tahun 2013 menjadi Rp1.983.237.700.201,- pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi Rp2.359.002.998.502,- pada tahun 2017.

Realisasi Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tersebut dijabarkan pada tabel 3. di bawah ini. Sedangkan Tabel 3.9 menunjukkan proporsi belanja untuk pemenuhan aparatur Kota Bekasi selama tahun 2013-2017.

Tabel 3.8 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bekasi

Tahun Anggaran	Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase terhadap Total Pengeluaran
	(Rp)	(Rp)	(%)
	(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
2013	1.414.572.740.918	2.981.554.255.117	47,44%
2014	1.588.325.325.041	3.143.650.785.535	50,52%
2015	1.736.078.211.220	3.882.549.830.355	44,71%
2016	1.983.237.700.201	4.423.807.502.099	44,83%
2017	2.359.002.998.502	5.001.795.465.771	47,16%

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, diolah 2018

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi menunjukkan peningkatan dari Rp2.960.580.369.589,- pada tahun 2013 menjadi Rp4.213.639.966.190,- pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi Rp4.538.278.383.793,- pada tahun 2017. Sementara pengeluaran daerah Kota Bekasi juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 pengeluaran daerah sebesar Rp2.981.554.255.117,- terdiri atas belanja daerah sebesar Rp2.959.889.954.879,- dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp21.664.300.238,-

Pada tahun 2016, pengeluaran daerah meningkat menjadi Rp4.423.807.502.099,- yang terdiri atas belanja daerah sebesar Rp4.404.495.132.195,- dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp19.312.369.904,- Pada tahun 2017 pengeluaran daerah Kota Bekasi kembali meningkat menjadi Rp4.414.048.595.742,- yang merupakan belanja daerah. Dengan komposisi pendapatan daerah dan pengeluaran daerah seperti tersebut, maka pada tahun 2015 masih terdapat surplus sebesar Rp46.513.665.886,-. Sementara pada tahun 2016 dan 2017 terdapat defisit riil yang cukup besar yaitu senilai Rp210.167.535.909,- dan Rp463.517.081.978,-. Defisit riil anggaran Kota Bekasi periode 2013-2017 terlihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Defisit Riil Anggaran Kota Bekasi, 2013-2017

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.960.580.369.589	3.480.340.735.519	3.956.308.126.353	4.213.639.966.190	4.538.278.383.793
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	2.959.889.954.879	3.107.838.415.647	3.882.237.460.467	4.404.495.132.195	4.936.233.095.851
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.664.300.238	35.812.369.888	27.557.000.000	19.312.369.904	65.562.369.920
	Defisit Riil	(20.973.885.528)	336.689.949.984	46.513.665.886	(210.167.535.909)	(463.517.081.978)

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, diolah 2018

Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Anggaran Kota Bekasi, 2013-2017

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	410.240.594.253		746.952.936.446		43.511.506.328		587.746.870.030		306.540.601.875	
2.	SiLPA tahun sebelumnya	429.185.663.082	105%	410.240.594.253	55%	53.332	0%	786.239.955.720	134%	587.746.870.030	192%
3.	Pelampauan Penerimaan PAD	80.778.094.467	20%	19.079.342.160	3%	-	0%	-	0%	-	0%
4.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	54.655.993.157	13%	17.067.061.627	2%	-	0%	-	0%	-	0%
5.	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	121.643.719.656	30%	15.699.791.827	2%	-	0%	-	0%	-	0%
6.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	415.395.295.114	101%	423.928.105.547	57%	-	0%	679.957.406.977	116%	566.756.312.274	185%
7.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselamatkan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
8.	Kegiatan Lanjutan	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, diolah 2018

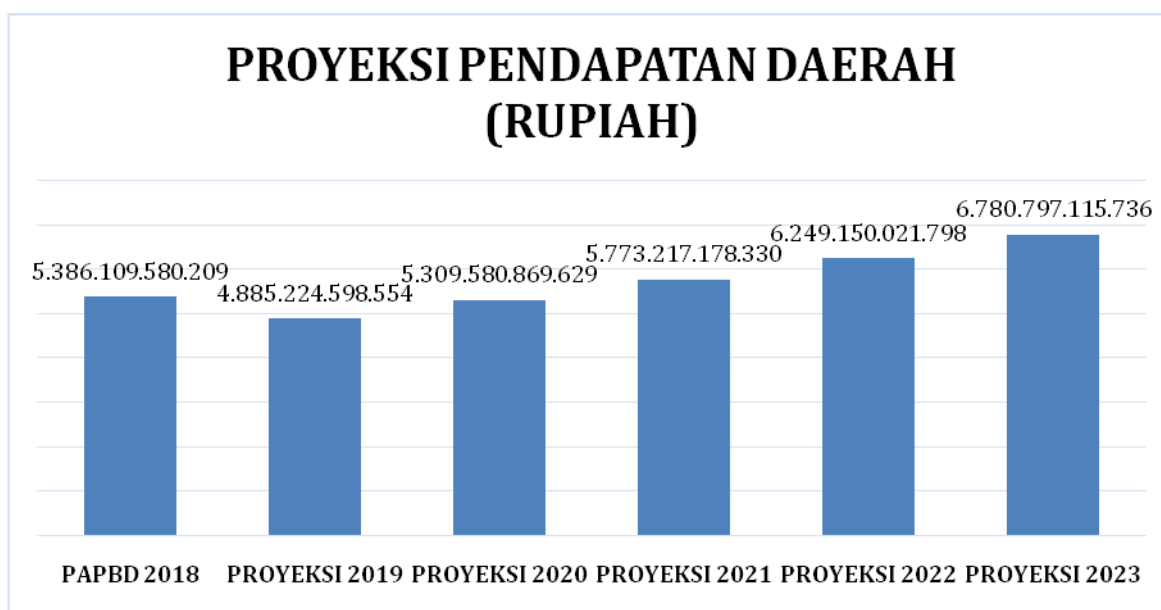
3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun ke depan (2019- 2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A. Pendapatan

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Gambar 3-5. Dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah ini perlu mempertimbangkan beberapa asumsi terkait dengan pertumbuhan pendapatan Kota Bekasi selama beberapa tahun ke belakang, potensi pendapatan daerah yang dapat diperoleh Pemerintah Kota Bekasi selama lima tahun ke depan, dan kebijakan keuangan pemerintah pusat, serta kondisi ekonomi makro Kota Bekasi.



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 3-5 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023

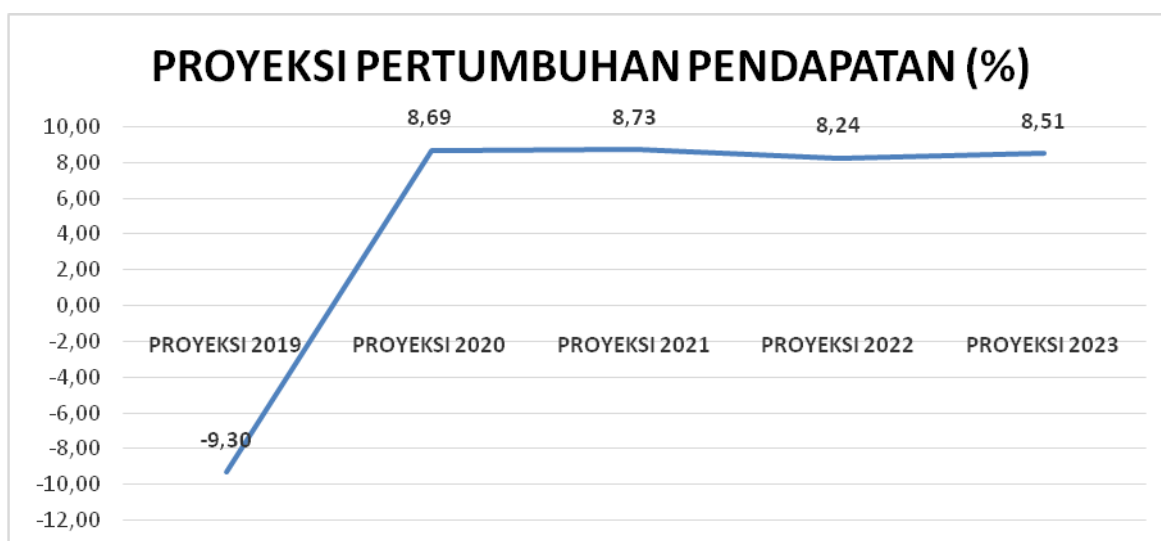
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2019-2023 ini belum memasukkan komponen Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

Pendapatan daerah tahun 2019 diperkirakan menurun dibandingkan tahun 2018. Proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi pada 2019 diperkirakan sebesar Rp4.885.224.598.554,- atau turun sebesar 9,30 persen. Tahun 2020, pendapatan daerah

Kota Bekasi diproyeksikan akan tumbuh sebesar 8,69 persen menjadi Rp5.309.580.869.629,-. Selanjutnya, pendapatan Kota Bekasi diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 8,73 persen pada tahun 2021, 8,24 persen pada tahun 2022, dan 8,51 persen pada tahun 2023. Proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bekasi tahun 2019-2023 dapat dilihat Gambar 3-6.

Untuk mencapai proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi, perlu beberapa kebijakan yang dilakukan di masa mendatang, antara lain:

- 1) Peningkatan pendapatan daerah dari komponen PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, terutama pajak restoran, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Identifikasi objek-objek wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah secara lebih profesional.
- 5) Intensifikasi pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah.



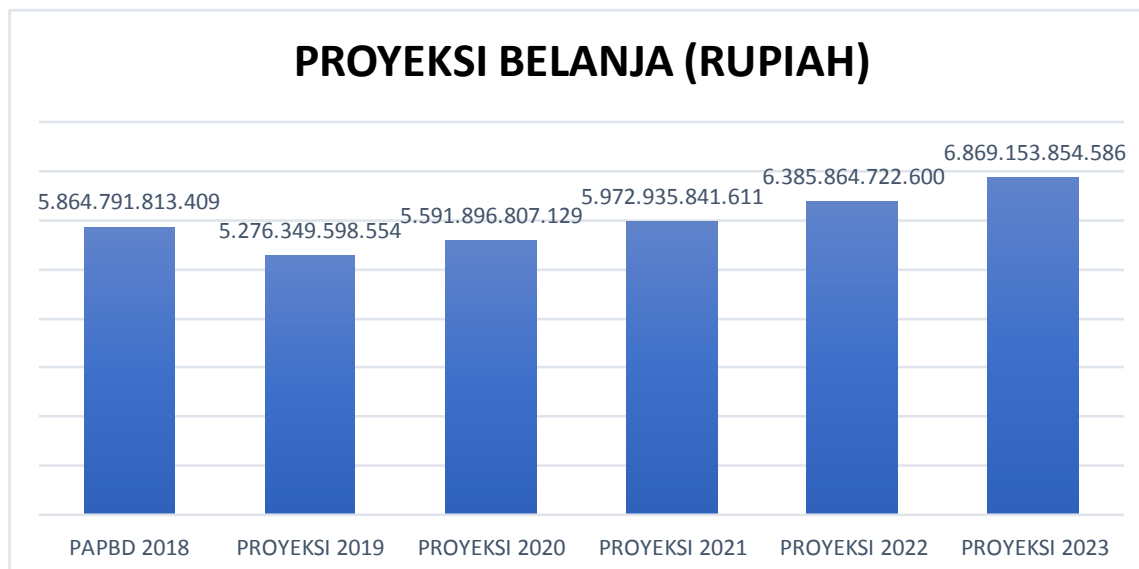
Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 3-6 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023 (%)

B. Belanja

Proyeksi belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Akan tetapi, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi selama ini berpegang pada prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, belanja daerah Kota Bekasi disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bekasi.

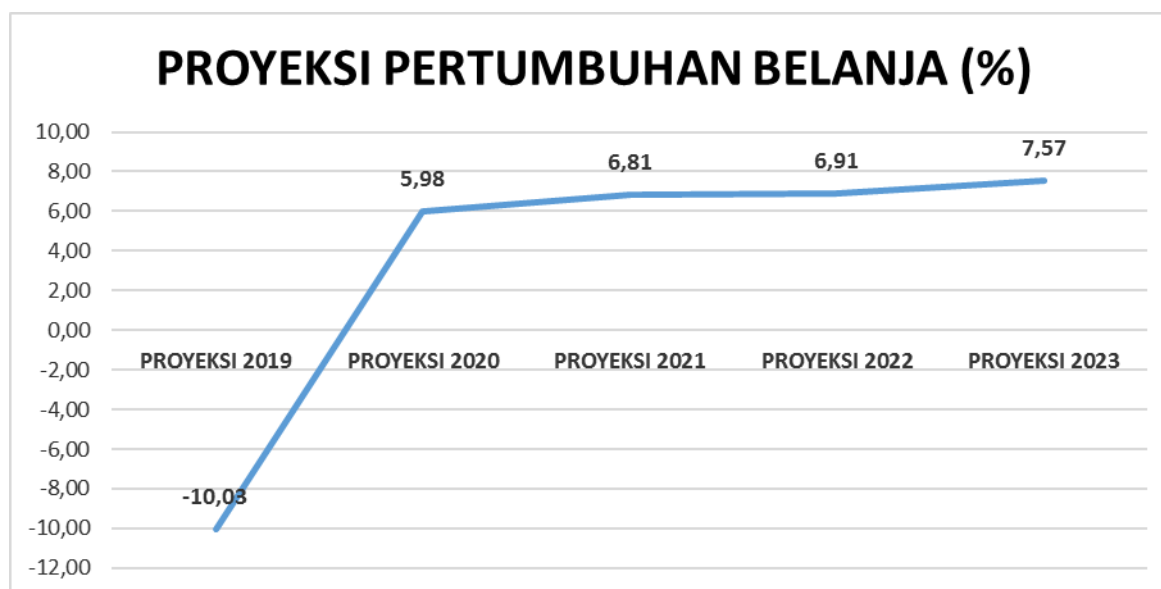
Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut, belanja daerah Kota Bekasi pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp5.276.349.598.554,- dan akan meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp5.591.896.807.129,-. Belanja daerah akan tumbuh menjadi Rp6.869.153.854.586,- pada tahun 2023. Proyeksi belanja Daerah Kota Bekasi kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 3-7.



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 3-7 Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi, 2019-2023

Untuk proyeksi pertumbuhan belanja Daerah Kota Bekasi kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 3-8.



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 3-8 Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Bekasi, 2019-2023 (%)

Belanja bantuan keuangan pada Tabel 3.11, termasuk dialokasikan untuk bantuan keuangan kepada partai politik. Pengalokasian belanja bantuan partai politik diberikan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp 1.459.737.000 setiap tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Alokasi ini diberikan berdasarkan nilai Bantuan Keuangan Partai Politik pada APBD Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya, pengalokasian ini dijadikan pedoman bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

C. Pembiayaan

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui pembentukan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD adalah:

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung. Untuk itu perlu dilakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal tersebut.
- b. Dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD;
- c. Penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- d. Penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah,
- e. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD;
- f. Penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan, sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi dimungkinkan memanfaatkan surplus APBD untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD yang ada. Tujuan melakukan penyertaan modal pada BUMD adalah untuk memanfaatkan adanya surplus APBD, mengembangkan jangkauan pelayanan BUMD, dan menambah sumber pendapatan daerah.

Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SILPA periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Direncanakan proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SILPA tahun 2018-2023 sebesar minus 25,25%.

Tabel 3.11 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi, Tahun 2019-2023 (Rupiah)

No.	TAHUN	PAPBD 2018	PROYEKSI 2019	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.431.127.344.183	2.701.048.134.804	3.016.195.582.691	3.365.162.627.045	3.720.692.742.949	4.125.916.972.945
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.742.132.421.869	2.093.474.784.986	2.297.325.105.221	2.522.670.082.438	2.772.865.125.938	3.106.580.947.732
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	115.472.947.750	171.543.755.990	186.683.622.745	211.331.116.953	216.347.631.049	167.894.666.433
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.532.767.100	12.328.428.165	12.574.996.728	12.952.246.630	13.340.814.029	13.874.446.590
1.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	554.989.207.464	423.701.165.664	519.611.857.998	618.209.181.024	718.139.171.933	837.566.912.190
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.678.443.847.626	1.418.936.700.000	1.489.883.535.000	1.564.377.711.750	1.642.596.597.338	1.724.726.427.204
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	160.691.330.626	152.938.932.000	160.585.878.600	168.615.172.530	177.045.931.157	185.898.227.714
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.212.033.531.000	1.265.997.768.000	1.329.297.656.400	1.395.762.539.220	1.465.550.666.181	1.538.828.199.490
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	305.718.986.000					
1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.276.538.388.400	765.239.763.750	803.501.751.938	843.676.839.534	885.860.681.511	930.153.715.587
I	PENDAPATAN DAERAH	5.386.109.580.209	4.885.224.598.554	5.309.580.869.629	5.773.217.178.330	6.249.150.021.798	6.780.797.115.736
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.468.161.925.310	2.899.662.655.481	2.714.538.156.192	2.971.525.794.115	3.257.075.262.259	3.570.402.459.428
2.1.1	Belanja Pegawai	2.285.104.292.510	2.088.835.144.953	2.360.383.713.797	2.596.422.085.177	2.856.064.293.694	3.141.670.723.064
2.1.2	Belanja Bunga	300.000.000	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja Subsidi	6.800.000.000	5.000.000.000	5.350.000.000	5.671.000.000	6.067.970.000	6.492.727.900
2.1.4	Belanja Hibah	99.699.450.000	159.212.386.000	170.357.253.020	180.578.688.201	193.219.196.375	206.744.540.122
2.1.5	Belanja Bantuan sosial	72.200.000.000	97.264.960.000	104.073.507.200	110.317.917.632	118.040.171.866	126.302.983.897
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	1.058.182.800	64.835.216.986	69.373.682.175	73.536.103.106	78.683.630.323	84.191.484.446
2.1.7	Belanja Tidak terduga	3.000.000.000	484.514.947.542	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.2.	BELANJA LANGSUNG	3.396.629.888.099	2.376.686.943.073	2.877.358.650.937	3.001.410.047.496	3.128.789.460.342	3.298.751.395.158
2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	311.162.910.177	201.092.856.725	243.454.979.473	253.951.039.876	264.728.685.662	279.109.263.259
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.788.487.552.684	1.300.626.493.565	1.574.615.833.947	1.642.502.155.029	1.712.209.711.409	1.805.220.276.374
2.2.3	Belanja Modal	1.296.979.425.238	874.967.592.783	1.059.287.837.517	1.104.956.852.591	1.151.851.063.270	1.214.421.855.526

No.	TAHUN	PAPBD 2018	PROYEKSI 2019	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023
II	BELANJA DAERAH	5.864.791.813.409	5.276.349.598.554	5.591.896.807.129	5.972.935.841.611	6.385.864.722.600	6.869.153.854.586
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	550.000.000.000	411.125.000.000	307.315.937.500	229.718.663.281	171.714.700.803	128.356.738.850
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	550.000.000.000	411.125.000.000	307.315.937.500	229.718.663.281	171.714.700.803	128.356.738.850
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	71.317.766.800	20.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	35.000.000.000	40.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	65.987.397.000	20.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	35.000.000.000	40.000.000.000
3.2.2	Dana Bergulir	5.000.000.000	0	0	0	0	0
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	330.369.800	0	0	0	0	0
III	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO (3.1-3.2)	478.682.233.200	391.125.000.000	282.315.937.500	199.718.663.281	136.714.700.803	88.356.738.850

Sumber: Hasil Proyeksi, 2018

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan**A. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

Bagian ini menguraikan penghitungan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Berdasarkan hasil penghitungan, total penerimaan diproyeksikan meningkat dari Rp4.885.224.598.554,- pada Proyeksi APBD Tahun 2019 menjadi Rp6.780.797.115.736,- pada Tahun 2023.

Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja tidak langsung akan diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi pada Tahun 2023 sebesar Rp3.298.751.395.158,-.

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi periode tahun 2018 – 2023 disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan	4.885.224.598.554	5.309.580.869.629	5.773.217.178.330	6.249.150.021.798	6.780.797.115.736
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	411.125.000.000	307.315.937.500	229.718.663.281	171.714.700.803	128.356.738.850
	Total Penerimaan	5.296.349.598.554	5.616.896.807.129	6.002.935.841.611	6.420.864.722.600	6.909.153.854.586
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	2.899.662.655.481	2.714.538.156.192	2.971.525.794.115	3.257.075.262.259	3.570.402.459.428
5.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	35.000.000.000	40.000.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.376.686.943.073	2.877.358.650.937	3.001.410.047.496	3.128.789.460.342	3.298.751.395.158

Sumber: Hasil Proyeksi, 2018

B. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia bagi kepentingan masyarakat dan untuk pencapaian efektifitas program. Dalam menentukan alokasi anggaran perlu skala prioritas dan kebutuhan karena adanya keterbatasan anggaran.

Prioritas alokasi anggaran dalam penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua). Prioritas I dialokasikan untuk belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Sedangkan Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bekasi 2019-2023 disajikan pada Tabel 3.13.

3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan seluruhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pembiayaan lain-lain. Sumber pembiayaan Non APBD tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Total Pembiayaan APBN selama periode 2013-2017 adalah sebesar 970.393.336.735. Pembiayaan tersebut merupakan Dana BOS Pusat dan Bantuan Sosial, dengan nilai terbesar sejumlah 241.338.293.710 pada tahun 2015. Kota Bekasi tidak memperoleh pendanaan dari Provinsi, sedangkan untuk Pembiayaan lain-lain senilai total 1.747.132.830.001 selama periode 2013-2017. Nilai total untuk seluruh Pembiayaan Non APBD di Kota Bekasi selama 5 tahun adalah sebesar 2.717.526.166.736.

Tabel 3.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bekasi 2019-2023

No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	2.376.686.943.073	2.877.358.650.937	3.001.410.047.496	3.128.789.460.342	3.298.751.395.158
	Prioritas I	827.780.589.000	869.169.618.450	873.515.466.542	877.883.043.875	882.272.459.094
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	770.808.569.000	809.348.997.450	813.395.742.437	817.462.721.149	821.550.034.755
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.106.750.000	51.562.087.500	51.819.897.938	52.078.997.427	52.339.392.414
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	4.445.270.000	4.667.533.500	4.690.871.168	4.714.325.523	4.737.897.151
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.570.000.000	1.648.500.000	1.656.742.500	1.665.026.213	1.673.351.344
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.850.000.000	1.942.500.000	1.952.212.500	1.961.973.563	1.971.783.430
	Prioritas II	1.548.906.354.073	2.008.189.032.487	2.127.894.580.953	2.250.906.416.467	2.416.478.936.064

Sumber: Hasil Proyeksi, 2018

Tabel 3.14 Data Pembiayaan Non APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 S/D 2017

No	Tahun	Pembiayaan APBN		Pembiayaan lain-lain		Nilai Total
		Uraian	Nilai	Keterangan	Nilai	
1	2013	Dana BOS Pusat	151.628.450.488			
Jumlah			151.628.450.488		-	151.628.450.488
2	2014	Dana BOS Pusat	150.292.892.537			
Jumlah			150.292.892.537		-	150.292.892.537
3	2015	Bantuan Sosial	7.651.996.922	Dana Kapitasi JKN dan Non Kapitasi	52.717.506.000	
		Dana BOS Pusat	233.686.296.788	Dana CSR dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	1.941.943.281	
				Sumbangan Dana Pendidikan	39.771.368.296	
Jumlah			241.338.293.710		94.430.817.577	335.769.111.287
4	2016	Dana BOS Pusat	235.073.500.000	Dana Kapitasi JKN dan Non Kapitasi	57.060.649.053	
				Pendapatan Lain Dana BOS	115.660.044	
				Sumbangan Dana Pendidikan	49.616.493.196	
				PSU Kawasan Perumahan	559.602.219.000	
Jumlah			235.073.500.000		666.395.021.293	901.468.521.293
5	2017	Dana BOS Pusat	192.060.200.000	Pendapatan Lain Dana BOS	128.319.715	
				Dana Kapitasi JKN dan Non Kapitasi	52.681.495.427	
				PSU Kawasan Perumahan	887.578.191.600	
				Penerimaan Hibah Langsung	45.918.984.390	
Jumlah			192.060.200.000		986.306.991.132	1.178.367.191.132
Jumlah Total			970.393.336.735		1.747.132.830.001	2.717.526.166.736

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2018

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BEKASI 2018-2023

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian penting dari dokumen RPJMD karena akan menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bekasi. Penyajian Permasalahan dan isu-isu strategis diharapkan dapat menjelaskan butir-butir penting yang akan menentukan kinerja pembangunan Kota Bekasi dalam 5 (lima) tahun mendatang.

4.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dan yang telah direncanakan sebelumnya, serta antara kesenjangan antara kondisi yang ingin dicapai pada masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja pembangunan daerah pada masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 (dua) kategori permasalahan yang perlu diidentifikasi yakni permasalahan pembangunan daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yang keduanya saling terkait satu dengan lainnya.

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

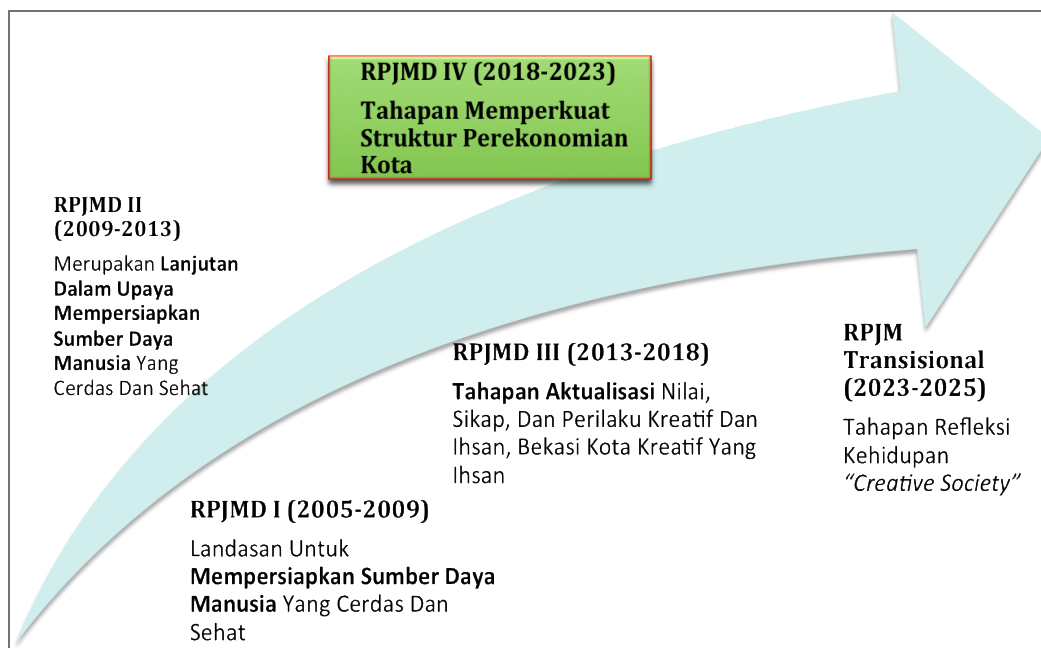
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 258 terkait pembangunan daerah, menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses, dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan

data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Permasalahan pembangunan daerah Kota Bekasi pada periode RPJMD 2018-2023 diidentifikasi berdasarkan *gap* antara tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Bekasi 2005-2025 khususnya tujuan dan sasaran pembangunan pada tahap ke 4 yakni RPJMD 2018-2023 serta diintegrasikan dengan permasalahan yang merupakan *gap* ketidaktercapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya serta permasalahan kekinian yang dihadapi Kota Bekasi yang bersumber dari perubahan lingkungan strategis eksternal maupun internal. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja pembangunan daerah yang diidentifikasi permasalahannya meliputi 3 (tiga) aspek utama pembangunan daerah yakni kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum.

A. Permasalahan Terkait Tema Pembangunan Tahap ke 4 (2018-2023) RPJPD Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 - 2025 adalah: **“Bekasi Kota Kreatif yang Ihsan”** Upaya mewujudkan visi tersebut dilakukan pentahapan pembangunan dalam 5 (lima) tahunan dengan fokus tiap tahapan seperti terlihat pada Gambar 4-1.



Sumber Perda No 10 tahun 2013

Gambar 4-1 Tahapan Pembangunan Kota Bekasi

RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 merupakan tahapan ke 4 dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Bekasi. Tahap ini bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian kota agar semakin kokoh dan kompetitif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian. Berdasarkan amanah tersebut maka tujuan pembangunan pada Periode 2018-2023 adalah memperkuat perekonomian Kota Bekasi agar makin kompetitif dan mandiri.

Struktur perekonomian kota adalah komposisi dan pola dari berbagai komponen ekonomi seperti: produksi, lapangan kerja, konsumsi, perdagangan, dan produk regional (Thakur, 2011). Upaya memperkuat struktur perekonomian kota perlu memahami kinerja dari komponen-komponen struktur ekonomi kota sebagai pintu masuk perumusan kebijakannya. Secara garis besar komponen utama dari struktur perekonomian kota data dilihat pada Gambar 4-2.



Sumber: Thakur, 2011, diolah 2018.

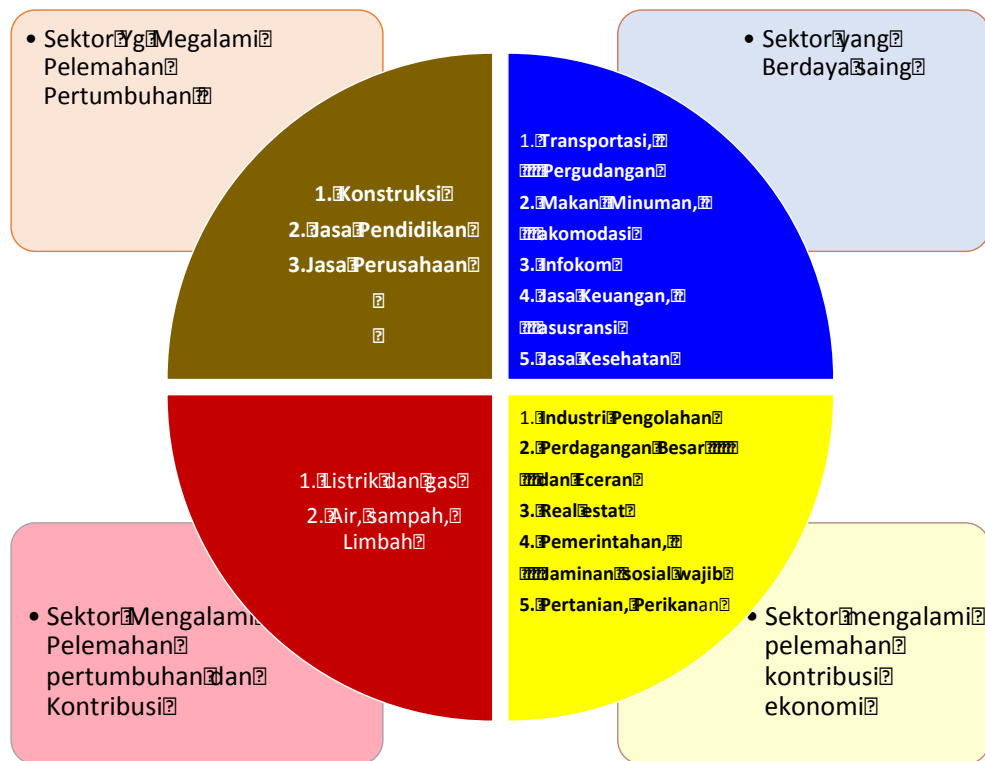
Gambar 4-2 Garis Besar Komponen Struktur Perekonomian Kota

Upaya untuk membangun dan memperkuat struktur perekonomian Kota Bekasi sesuai amanah RPJPD 2005-2025 dapat diawali dengan mengkaji permasalahan yang dihadapi pada tiap-tiap komponen tersebut. Pembahasan permasalahan pada tiap komponen struktur ekonomi kota dijabarkan pada pembahasan berikut ini:

B. Permasalahan Tingkat Produktivitas Sektor Ekonomi Kota.

Mengacu pada hasil kajian kinerja pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi kota pada bab 2 terdahulu, diperoleh gambaran bahwa dari 16 sektor ekonomi utama Kota Bekasi terdapat 2 (dua) sektor yang menunjukkan permasalahan berupa penurunan/pelemahan kinerja pertumbuhan dan penurunan kontribusi, yakni sektor

utilitas (listrik, gas dan air minum) dan sektor jasa pelayanan umum seperti persampahan dan pengolahan limbah.



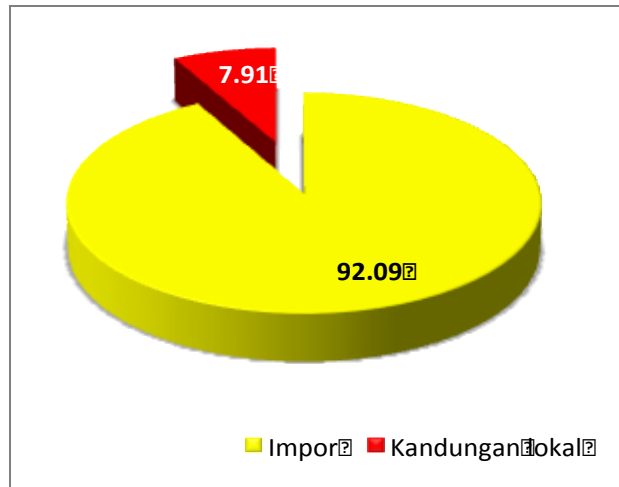
Gambar 4-3 Kinerja Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi

Permasalahan juga teridentifikasi dari pelemahan kontribusi sektor- sektor yang saat ini menjadi basis ekonomi Kota Bekasi, yakni **sektor industri pengolahan dan perdagangan**. Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang menyumbang output ekonomi kota terbesar (56% terhadap PDRB) serta penghasil pertumbuhan ekonomi terbesar Kota Bekasi saat ini. Ternyata sektor ini dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami penurunan kontribusi walaupun pertumbuhannya masih positif. Kondisi ini akan menjadi masalah bila kontribusi yang menurun tersebut diikuti laju pertumbuhan yang menurun sehingga bisa berdampak luas, di antaranya terjadinya peningkatan jumlah pencari kerja. Sementara sektor jasa pendidikan dan perusahaan dikhawatirkan akan mengalami penurunan kinerja daya saing di masa depan mengingat laju pertumbuhannya yang cenderung terus menurun.

• Permasalahan Struktur Input Ekonomi Kota

Struktur ekonomi Kota Bekasi yang terbentuk, membutuhkan input berupa bahan baku untuk dapat menghasilkan output ekonominya. Berdasarkan analisis data PDRB maupun tabel I-O Kota Bekasi, maka dapat diidentifikasi bahwa kandungan lokal dari input yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi utama di Kota Bekasi relatif rendah.

Kandungan lokal hanya mencapai sekitar 8% dari total kebutuhan input ekonomi Kota Bekasi, sementara sisanya berasal dari luar kota atau impor.



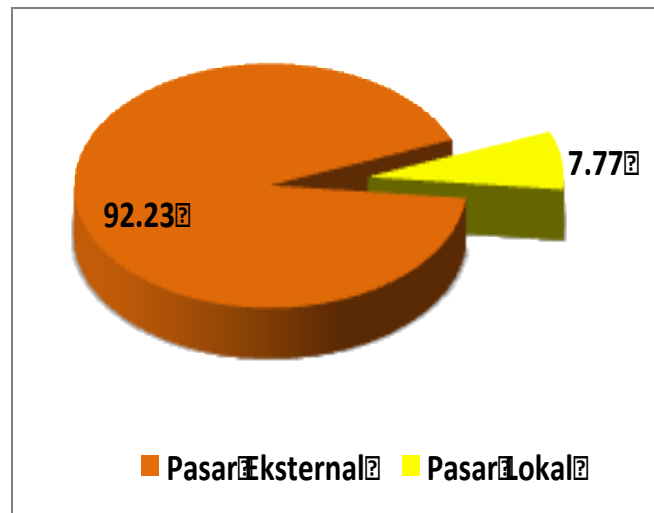
Sumber: PDRB Kota Bekasi 2010-2016, Tabel I-O Kota Bekasi, diolah 2018.

Gambar 4-4 Struktur Input Ekonomi Kota Bekasi

Kandungan lokal yang rendah berpotensi menyebabkan rendahnya nilai tambah dari kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang akan berdampak terhadap rendahnya kesejahteraan dan pembangunan Kota Bekasi. Ketergantungan impor juga berpotensi menjadikan Kota Bekasi rentan terhadap dinamika harga-harga yang berlaku di luar kota. Oleh karena itu rendahnya kandungan lokal dalam struktur input ekonomi Kota Bekasi perlu diwaspadai sebagai permasalahan pembangunan ekonomi kota di masa mendatang.

- **Permasalahan Struktur Pasar Ekonomi Kota**

Kinerja ekonomi Kota Bekasi juga dipengaruhi oleh struktur pasar produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi Kota Bekasi. Struktur pasar yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yakni pasar domestik dan pasar eksternal, mencerminkan sejauh mana keterkaitan ekonomi internal dan eksternal ekonomi Kota Bekasi. Dominasi yang besar terhadap pasar domestik berpotensi memperkuat struktur ekonomi yang ada saat ini sehingga memperkuat kemandirian. Sedangkan pasar eksternal yang dominan, selain berpotensi memperkuat keterkaitan ekonomi dengan ekonomi yang lebih luas, di sisi lain juga memiliki resiko ketidakpastian pasar yang tidak bisa diprediksi. Hasil analisis data terkait pasar produk kegiatan ekonomi Kota Bekasi menunjukkan bahwa pasar eksternal mendominasi struktur pasar ekonomi Kota Bekasi selama ini. Hal ini bisa berarti bahwa di satu sisi kondisi ekonomi Kota Bekasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan ekonomi yang lebih luas, di sisi lain kondisi ini akan memberikan ketidakpastian pasar yang besar dan tidak bisa diprediksi.



Sumber: PDRB Kota Bekasi 2010-2016, Tabel I-O Kota Bekasi, diolah 2018

Gambar 4-5 Struktur Pasar Produk Ekonomi Kota Bekasi

Kondisi ideal struktur pasar yang baik adalah struktur pasar yang lebih seimbang antara pasar domestik dengan pasar eksternal. Output sektor ekonomi Kota Bekasi idealnya dapat digunakan sebagai input sektor lain di Kota Bekasi sehingga membentuk *multiplier effect* bagi ekonomi Kota Bekasi yang lebih besar. Dominasi pasar eksternal yang tinggi mengakibatkan *multiplier effect* dari kegiatan ekonomi yang ada saat ini lebih banyak dirasakan di luar wilayah Kota Bekasi.

Tabel 4.1 Struktur Permintaan Akhir Ekonomi Kota Bekasi

Kode	Nama Sektor	Kontribusi sebagai Demand Produk Ekonomi Lokal	Distribusi Terhadap PDRB*)
301	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,97%	75,47%
302	Pengeluaran Pemerintah	0,40%	5,09%
303	Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,92%	11,65%
304	Perubahan Stok	0,48%	6,04%
305	Ekspor	92,23%	1,75%
309	Jumlah Permintaan Akhir	100,00%	

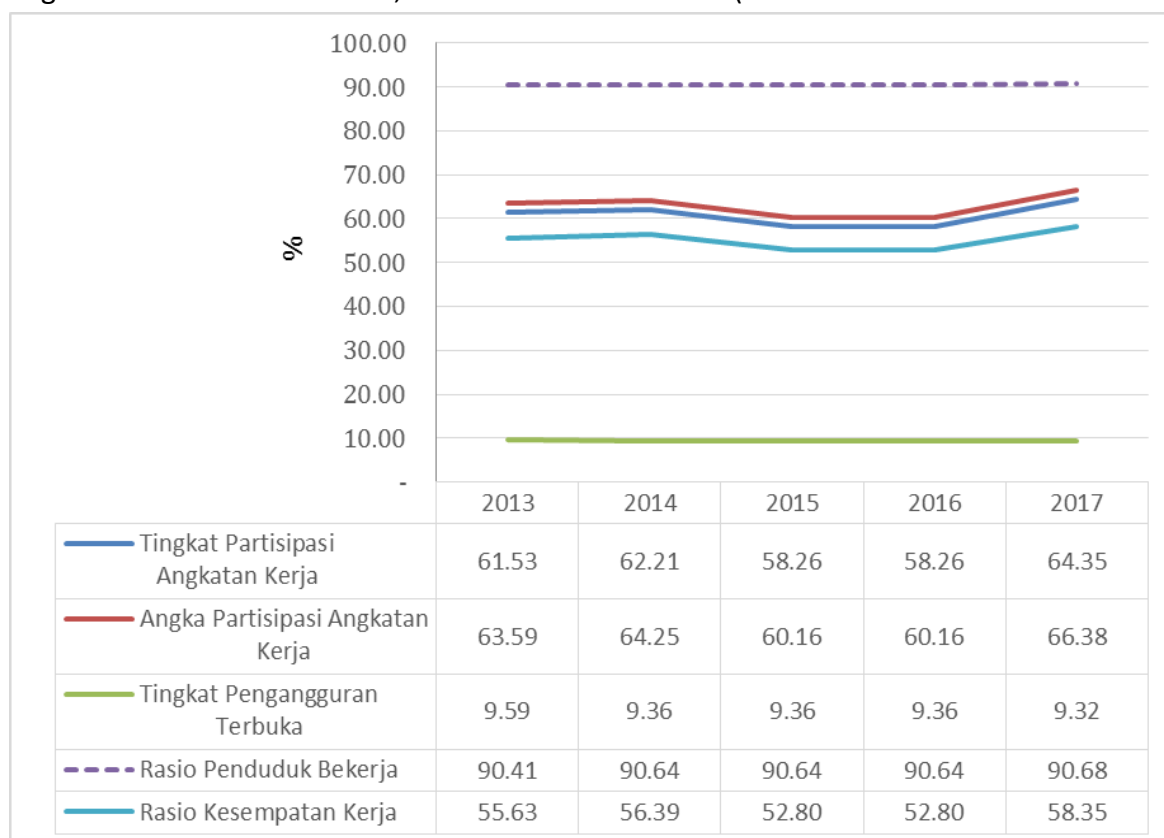
Bila didalami lebih lanjut terkait struktur pasar domestik ekonomi Kota Bekasi, dapat diidentifikasi bahwa permintaan produk dari kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang berasal dari wilayah Kota Bekasi didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 5,97%. Sementara belanja pemerintah hanya menyerap sebesar 0,4% dari output kegiatan ekonomi Kota Bekasi. Kontribusi konsumsi masyarakat pada pembentukan nilai tambah Kota Bekasi (PDRB) mencapai 75%, sementara pengeluaran pemerintah hanya mencapai 5%. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur input-output ekonomi Kota Bekasi kurang

memiliki keterkaitan yang kuat, sehingga produk kegiatan ekonomi Kota Bekasi tidak termanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif lainnya di Kota Bekasi.

• Permasalahan Terkait Struktur Tenaga Kerja

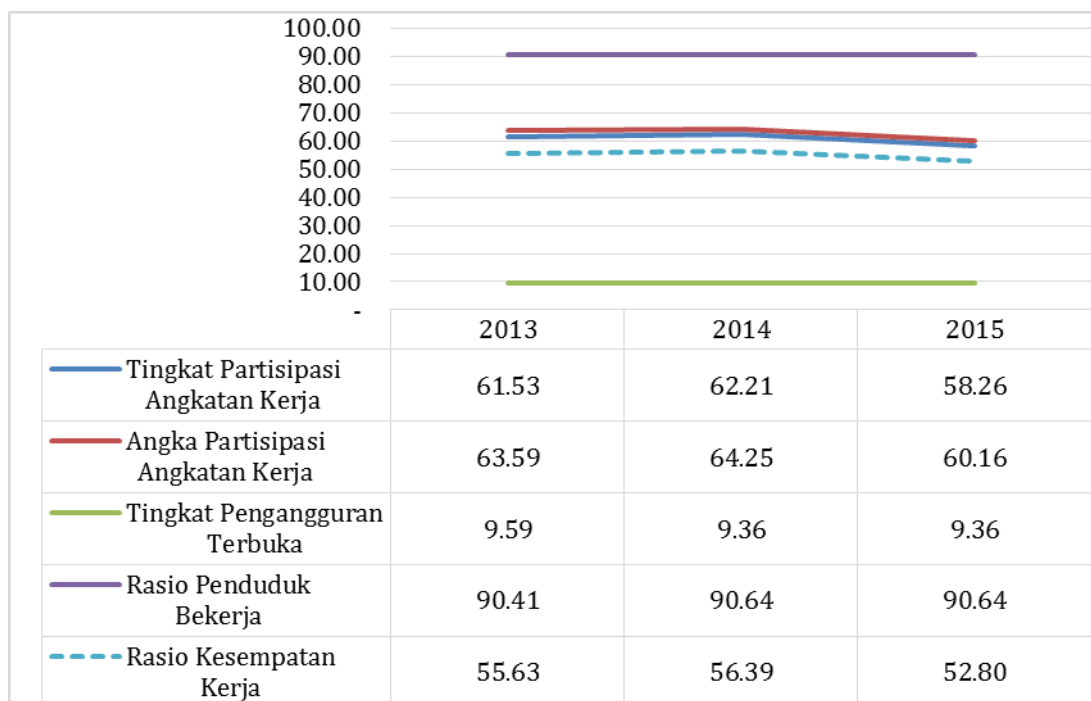
Seperti telah dibahas pada bab 2 gambaran umum kondisi daerah Kota Bekasi, salah satu indikator struktur tenaga kerja Kota Bekasi adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan/kemudahan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, sehingga untuk mendapatkannya relatif mudah.

Seperti halnya perkembangan angka partisipasi angkatan kerja, selama jangka waktu 2013-2015 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bekasi juga mengalami fluktuasi. Pada awalnya terjadi peningkatan dari 61,53% menjadi 62,21%. Namun memasuki tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 58,26% (lihat kembali



Gambar 2-21). Dibandingkan Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia, tren TPAK kedua wilayah ini memang sama-sama fluktuatif. Akan tetapi, kedua wilayah ini memiliki TPAK yang lebih tinggi dibandingkan Kota Bekasi. Pada tahun 2015, TPAK di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 60,34% (BPS Provinsi Jawa Barat, 2017). Sedangkan TPAK nasional lebih tinggi lagi, yakni 67,63% (BPS, 2017).

Angka pencari kerja di Kota Bekasi cenderung menurun dari 9,59% tahun 2013 menjadi 9,36% tahun 2015. Menurunnya persentase angka pencari kerja ini bukan disebabkan oleh meningkatnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap penganggur terbuka, tetapi lebih dikarenakan meningkatnya persentase penduduk bukan angkatan kerja selama kurun waktu bersamaan, yakni dari 39,37% tahun 2013 menjadi 41,74% tahun 2015. Dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, angka pencari kerja di Kota Bekasi juga lebih tinggi, dimana pada tahun 2015 kedua wilayah pembanding tersebut mencatat angka pencari kerja masing-masing sebesar 8,56% dan 6,00% (BPS, 2017). Kondisi struktur tenaga kerja tersebut menunjukkan adanya permasalahan berupa keterbatasan kesempatan kerja yang mencerminkan terbatasnya daya serap ekonomi Kota Bekasi dalam menyerap tambahan angkatan kerja di Kota Bekasi.



Sumber: BPS Kota Bekasi, Kota Bekasi Dalam Angka, beberapa seri

Gambar 4-6 Kinerja Struktur Tenaga Kerja Kota Bekasi

• Permasalahan Sektor Ekonomi Kota

Struktur perekonomian yang kuat dibentuk oleh keterkaitan input dan output yang kuat antara sektor yang berperan di hulu dan sektor yang berperan di hilir. Secara teknokratis, kekuatan keterkaitan antar sektor dapat diukur melalui kinerja keterkaitan input dan output dalam tabel Input-Output sektor ekonomi Kota Bekasi. Salah satu keunggulan dalam analisis Input-Output adalah dapat diketahuinya tingkat keterkaitan antar sektor baik ke depan (*forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*).

Sektor yang memiliki daya penyebaran tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan atau daya dorong cukup kuat dibandingkan

sektor lainnya. Sebaliknya sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi berarti sektor tersebut mempunyai ketergantungan (kepekaan) yang tinggi terhadap sektor lain. Secara teori indeks daya penyebaran memberikan indikasi bahwa sektor-sektor yang memiliki indeks daya penyebaran > 1 , berarti daya penyebaran sektor tersebut di atas rata-rata penyebaran secara keseluruhan. Pengertian yang sama berlaku untuk indeks derajat kepekaan lebih dari satu, berarti derajat kepekaan sektor tersebut di atas derajat kepekaan rata-rata secara keseluruhan.

Tabel 4.2 Indeks Derajat Kepekaan Ekonomi Kota Bekasi

Urutan	Kode Sektor	Sektor	Indeks Derajat Kepekaan (Forward Linkage)
1	15	Listrik	6,1129
2	8	Ind. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	3,0098
3	5	Pertambangan dan penggalian	1,9529
4	29	Jasa Perusahaan	1,5736
5	36	Jasa Reparasi Kendaraan	1,545
6	10	Ind. Kimia, Karet, Plastik	1,4042
7	39	Perorangan dan Rumah Tangga	1,0634
8	6	Ind. Makanan dan Minuman	1,0011
9	14	Ind. Barang lainnya	0,9275
10	28	Sewa Bangunan	0,9198

Sumber: Tabel I-O Kota Bekasi, diolah 2018.

Berdasarkan indeks daya penyebarannya maka terlihat bahwa sektor yang berkaitan dengan utilitas kota (listrik) merupakan sektor yang memiliki daya dorong tinggi bagi ekonomi Kota Bekasi. Sektor lain yang memiliki keterkaitan ke depan (hilir) adalah industri barang dari kayu, jasa perusahaan, jasa reparasi kendaraan, industri kimia, karet, dan plastik serta industri makanan dan minuman. Kondisi ini mencerminkan bahwa dari sisi jumlah dan jenisnya, sektor-sektor utama Kota Bekasi (industri dan perdagangan, jasa) memiliki keterkaitan ke depan yang relatif terbatas atau memiliki sektor hilir yang terbatas.

Sementara berdasarkan hasil analisis keterkaitan ke belakangnya, terlihat bahwa nilai indeks yang dimiliki sektor ekonomi Kota Bekasi relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kota Bekasi terbatas dalam menggunakan produk yang dihasilkan oleh sektor ekonomi lainnya di Kota Bekasi. Sektor-sektor yang memiliki indeks keterkaitan ke belakang yang relatif sedang adalah sektor

jasa, baik jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, hiburan, dan rekreasi. Sektor industri di Kota Bekasi memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang rendah. Hal ini sejalan dengan tingkat impor yang tinggi dalam struktur input ekonomi Kota Bekasi.

Tabel 4.3 Indeks Derajat Penyebaran Ekonomi Kota Bekasi

Urutan	Kode Sektor	Sektor	Indeks Daya Penyebaran (Backward Linkage)
1	31	Jasa Pendidikan Pemerintah	0,001
2	27	Jasa Perusahaan	0,001
3	35	Hiburan dan Rekreasi	0,001
4	33	Jasa Pendidikan Swasta	0,001
5	39	Perorangan dan Rumah Tangga	0,0009
6	34	Jasa Kesehatan Swasta	0,0009
7	37	Salon	0,0008
8	21	Angkutan Rel	0,0008
9	18	Perdagangan	0,0008
10	15	Listrik	0,0008

Sumber: Tabel I-O Kota Bekasi, diolah 2018.

• Permasalahan Distribusi Ekonomi Kota

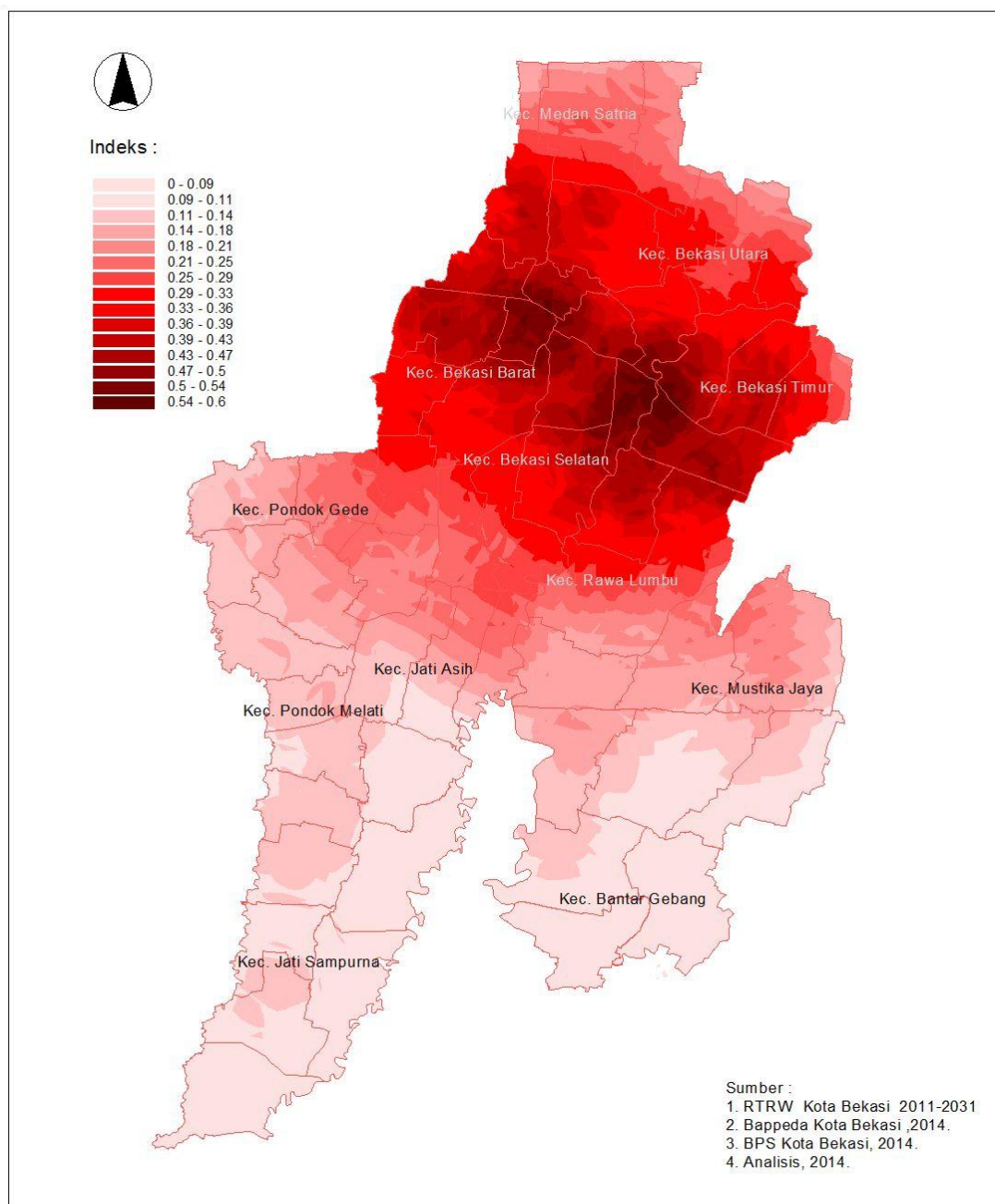
Secara makro, tingkat ketimpangan ekonomi wilayah Kota Bekasi termasuk pada kategori sedang. Indeks gini rasio Kota Bekasi mengalami fluktuasi selama periode 2013-2016. Pada tahun 2013, indeks gini rasio mencapai angka 0,371 dan berhasil ditekan hingga 0,329 setahun kemudian. Akan tetapi, pada tahun 2015 melonjak mencapai angka 0,410 dan pada tahun berikutnya turun menjadi 0,392. Secara keseluruhan, sepanjang periode kajian indeks gini rasio di Kota Bekasi berada pada angka rata-rata 0,376, yang berarti termasuk kategori ketimpangan sedang.

Sementara bila dilihat secara spasial, perbedaan perkembangan ekonomi wilayah dapat terlihat dari perbedaan kelengkapan fasilitas sosial ekonomi, aksesibilitas hingga pola penggunaan tanahnya. Hasil analisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan kecamatan, menunjukkan bahwa tingkat perkembangan wilayah yang paling cepat terakumulasi di wilayah tengah dan utara. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara spasial masih terindikasi adanya distribusi perkembangan wilayah yang belum merata.

Berdasarkan analisis di atas, maka secara ringkas dapat diidentifikasi permasalahan dan tantangan strategis yang dihadapi Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh sesuai tema pembangunan pada RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kandungan lokal kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang dapat menghasilkan *gap* kemandirian ekonomi Kota Bekasi di masa yang akan datang.
2. Rendahnya daya serap pasar domestik terhadap produk dari kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang dapat mengakibatkan *gap* berupa tidak tercapainya nilai tambah kegiatan ekonomi kota yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
3. Terbatasnya kesempatan kerja dari struktur ekonomi yang ada saat ini yang dapat menghasilkan *gap* kinerja ekonomi kota dalam hal pemenuhan lapangan

- kerja bagi tambahan angkatan kerja di Kota Bekasi.
4. Rendahnya keterkaitan input-output kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang sehingga menghasilkan *multiplier effect* yang kurang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
 5. Masih terdapat ketidakmerataan distribusi perkembangan ekonomi secara makro maupun secara spasial. Indeks gini rasio masih dalam kategori sedang sehingga membutuhkan upaya peningkatan pemerataan pendapatan. Sementara secara spasial distribusi perkembangan masih terlihat terakumulasi pada wilayah tengah dan utara.



Gambar 4-7 Derajat Tingkat Perkembangan Wilayah Kota Bekasi

C. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sesuai amanah UU Pemerintahan Daerah salah satu indikator pembangunan daerah adalah kinerja kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjabarkan indikator-indikator kesejahteraan secara lebih rinci seperti telah dibahas pada Bab 2 Dokumen ini. Permasalahan aspek kesejahteraan masyarakat pada bagian ini merupakan hasil identifikasi terhadap indikator kesejahteraan masyarakat skala kota yang mencerminkan *outcome* serta dampak (*impact*) dari pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini. Beberapa indikator kesejahteraan telah dibahas pada permasalahan tema pembangunan Kota Bekasi 2018-2023, oleh karena itu indikator yang disajikan pada bagian ini terbatas pada indikator yang lebih mengarah pada kesejahteraan sosial. Beberapa indikator permasalahan yang berhasil diidentifikasi antara lain:

- **Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di Kota Bekasi hingga tahun 2016 mencapai 4,97% dari total penduduk Kota Bekasi. Tingkat kemiskinan tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Namun upaya untuk mengurangi kemiskinan masih perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi yang lebih merata. Salah satu aspek penting dari tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan yang mencerminkan seberapa dalam perbedaan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Penjelasan pada bab 2 menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan kemiskinan Kota Bekasi berfluktuasi pada kisaran 0,67-0,82 selama periode 2013-2017. Indeks kesenjangan kemiskinan dengan nilai tersebut menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat miskin Kota Bekasi relatif besar di bawah garis kemiskinan, atau dapat dikatakan sekitar 60-80% tingkat pendapatan penduduk miskin Kota Bekasi berada di bawah kemiskinan secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan masalah laten yang perlu terus diantisipasi oleh pemerintah Kota Bekasi pada masa mendatang.

- **Pencari Kerja**

Angka Pencari Kerja di Kota Bekasi hingga tahun 2017 sebesar 9,36%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan Angka Pencari Kerja di Provinsi Jawa Barat dan nasional. Angka Pencari Kerja berkaitan erat dengan pertambahan angkatan kerja serta kesempatan kerja. Sebagaimana telah dibahas pada Bab 2, rasio kesempatan kerja di Kota Bekasi pada awalnya meluas dari 55,63% tahun 2013 menjadi 56,39% pada tahun 2014. Akan tetapi, seiring dengan penurunan laju pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2015 rasio kesempatan kerja di kota ini menurun hingga 52,80%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja di Kota Bekasi saat ini berhadapan dengan penurunan kesempatan kerja. *Gap* tersebut pada gilirannya dapat meningkatkan Angka Pencari Kerja di Kota Bekasi.

- **Keluarga Pra Sejahtera**

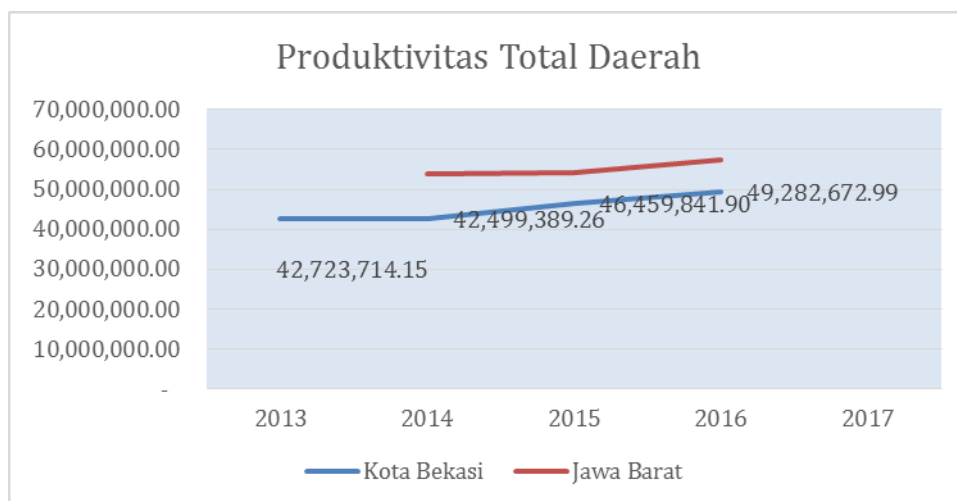
Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dapat dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu Pra Sejahtera (sangat miskin), Sejahtera Tahap I (miskin), Sejahtera Tahap II (hampir miskin), Sejahtera Tahap III (tidak miskin), dan Sejahtera Tahap III Plus. Selama kurun waktu 2013-2015, persentase jumlah Keluarga Pra Sejahtera ditambah Keluarga Sejahtera I dibandingkan jumlah seluruh keluarga di Kota Bekasi, memperlihatkan penurunan (lihat Gambar 2-24), yakni dari 21,88% (120.300 keluarga) menjadi 21,29% (110.983 keluarga). Penurunan ini mengindikasikan bahwa secara eksplisit kesejahteraan keluarga di Kota Bekasi mulai meningkat menuju tahapan Keluarga Sejahtera II dan seterusnya. Dengan kata lain, ekonomi masyarakat di Kota Bekasi semakin membaik. Namun demikian proporsi Keluarga Pra Sejahtera I yang masih di atas 20% merupakan masalah yang perlu diantisipasi Pemerintah Kota Bekasi pada masa mendatang.

D. Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Daya saing daerah merupakan salah satu tinjauan tingkat keberhasilan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap 10 (sepuluh) indikator daya saing daerah sesuai permendagri 86/2017, terdapat 1(satu) indikator yang menunjukkan kinerja yang belum optimal yakni produktivitas total daerah. Dalam pembahasan ini selain permasalahan terkait indikator daya saing yang sesuai permendagri 86/2017 tersebut, pembahasan dilengkapi dengan indikator daya saing daerah berdasarkan referensi lainnya seperti indikator daya saing daerah dari KPPOD dan lain sebagainya. Berikut pembahasan permasalahan terkait aspek daya saing daerah di Kota Bekasi:

- **Produktivitas Total Daerah**

Produktivitas total daerah menunjukkan seberapa produktif angkatan kerja yang bekerja pada setiap sektor dan nilai tambah pada sektor tiap PDRB. Tingkat produktivitas total Kota Bekasi disajikan dalam Gambar 4-8 di bawah ini.



Sumber: PDRB Kota Bekasi 2012-2016

Gambar 4-8 Perkembangan Produktivitas Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa produktivitas total daerah semakin meningkat. Namun demikian, produktivitas total daerah Kota Bekasi masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Bekasi.

- **Kapasitas Keuangan Daerah**

Salah satu aspek daya saing daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan data keuangan yang diperoleh maka pada tahun 2018, keuangan Pemerintah Kota Bekasi berpotensi mengalami defisit. Hal ini terjadi karena beberapa target pendapatan daerah tidak tercapai. Permasalahan keuangan daerah ini penting untuk mendapatkan perhatian mengingat kemampuan Pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi layanan masyarakat baik berupa pembangunan infrastruktur maupun jasa layanan umum sering dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah pada tiap tahunnya.

- **Kinerja BUMD**

Salah satu komponen penting pada aspek daya saing daerah yang terkait keuangan daerah adalah kinerja BUMD. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kinerja laporan keuangan 4 (empat) BUMD Kota Bekasi, yakni PDAM Tirta Patriot, PD Migas, BPR Syariah, dan Mitra Patriot, teridentifikasi bahwa kontribusi keempat BUMD terhadap pendapatan Kota Bekasi masing kurang optimal. Permasalahan lain yang teridentifikasi dari kinerja BUMD Kota Bekasi adalah menyangkut penatausahaan dan pengelolaan aset bersifat tetap yang belum memadai.

- **Keamanan**

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bekasi tidak mengalami banyak perubahan signifikan dan cenderung *stagnan* antara tahun 2012 hingga tahun 2015. Pada tahun 2012 dan 2015 angka kriminalitas yang terselesaikan sama-sama sejumlah 1,87 sedangkan tahun 2013 dan 2014 memiliki nilai yang identik yaitu 1,92. Namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup dramatis hingga mencapai angka 6,54 atau hampir 3,5 kali angka di tahun sebelumnya. Peningkatan angka ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah kriminalitas yang tertangani di tahun tersebut yaitu 1.833 perkara dibandingkan tahun 2015 yang hanya berjumlah 511 perkara. Gambaran perkembangan kejadian kriminal di Kota Bekasi yang cenderung meningkat menunjukkan adanya permasalahan keamanan yang dapat mengakibatkan menurunnya daya saing daerah Kota Bekasi.

- **Ketergantungan Penduduk**

Rasio ketergantungan menunjukkan rasio antara penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk produktif dalam satu tahun tertentu. Kategori penduduk produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan penduduk di luar usia tersebut dikategorikan sebagai penduduk tidak produktif. Data jumlah penduduk berdasarkan usia tersebut tersedia di dokumen Kota Bekasi dalam Angka. Pada tahun 2013 rasio ketergantungan penduduk berada pada angka 40,88%, kemudian perlahan mulai meningkat menjadi 40,96% pada tahun 2014, 41,06% pada tahun 2015, dan 41,11% pada tahun 2016.

- **Iklim Investasi**

Setiap tahunnya iklim investasi di Kota Bekasi terus merangkak. Bahkan realisasi investasi di Kota Patriot ini telah menembus Rp17 Triliun pada 2017. Angka ini melebihi target yang dipatok Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp10 triliun untuk periode 2017-2018. Perolehan nilai investasi yang diperoleh terdiri dari pembangunan sejumlah pengembang properti, perusahaan barang dan jasa, serta retail. Pada tahun 2016 lalu, jumlah pengembang properti mencapai 36 pengembang, kemudian naik pada 2017 menjadi 47 pengembang dengan 147 Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Peningkatannya sekitar 20 sampai 30 persen untuk sisi pengembang properti seperti apartemen, hunian dan hotel. Permasalahan iklim investasi Kota Bekasi bersumber dari keterbatasan lahan untuk pengembangan, dukungan infrastruktur kota serta layanan perizinan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi melalui pembangunan pada periode RPJMD 2013-2018, namun penguatan tetap dibutuhkan untuk mendukung penguatan struktur perekonomian Kota Bekasi.

- **Aksesibilitas dan Sistem Logistik**

Aksesibilitas dan sistem logistik kota merupakan salah satu komponen yang mendukung daya saing daerah. Berdasarkan gambaran terkait sistem transportasi kota, maka secara struktural Kota Bekasi berpotensi memiliki aksesibilitas yang baik untuk mendukung pergerakan dalam dan luar kota. Namun permasalahan muncul dari ketidakseimbangan antara penggunaan kendaraan pribadi dengan angkutan umum yang mengakibatkan kapasitas jaringan jalan terlampaui. Sebagai akibatnya tingkat pelayanan jaringan jalan di Kota Bekasi menjadi rendah dan pada akhirnya mengakibatkan pergerakan menjadi terhambat. Tingkat pelayanan jalan yang semakin menurun juga dipengaruhi oleh sistem logistik (pergerakan angkutan barang) yang belum terencana dengan baik. Pemisahan sistem angkutan orang dan barang belum dilakukan secara optimal sehingga percampuran sistem pergerakan mengakibatkan sistem logistik kota belum optimal kinerjanya.

E. Permasalahan terkait Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan aspek pembangunan daerah yang sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memenuhinya, paling tidak sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan peraturan perundangan. Berdasarkan Permendagri 86/2017 terdapat sekitar 327 indikator aspek pelayanan umum yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan indikator tersebut, pembahasan permasalahan pada bagian ini lebih berfokus pada upaya menyajikan permasalahan yang termasuk kategori indikator *outcome* atau *impact* dari aspek pelayanan umum. Hasil identifikasi permasalahan aspek pelayanan umum antara lain meliputi:

- **Kualitas Pendidikan**

Indikator layanan pendidikan di Kota Bekasi menunjukkan kinerja yang baik secara kuantitatif. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi pada tahun 2017 adalah 10,93 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Bekasi usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 10,93 tahun masa sekolah atau hampir menyelesaikan pendidikan setara kelas XI. Angka rata-rata lama sekolah yang telah dicapai Kota Bekasi ini jauh lebih unggul dibandingkan Provinsi Jawa Barat (8,14 tahun) dan Indonesia (8,10 tahun). APK Kota Bekasi pada setiap jenjang tahun 2015 sudah jauh melampaui nilai APK Provinsi Jawa Barat kecuali pada jenjang SD sederajat. Pada jenjang SD sederajat, APK Kota Bekasi sebesar 106,11% angka ini lebih rendah dibandingkan dengan APK SD Provinsi Jawa Barat yaitu 109,42%, meskipun demikian nilai ini sudah berhasil melampaui target MDGs 2015 sebesar 100%. Pada kurun waktu 2011-2015, nilai APK jenjang SD sederajat Kota Bekasi menunjukkan tren yang menanjak, meskipun demikian peningkatan nilai APK jenjang SD masih di bawah perkembangan APK SD sederajat pada tingkat Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Kondisi tersebut, maka permasalahan pelayanan pendidikan Kota Bekasi

sudah tidak berada pada masalah Standar Pelayanan Minimal seperti masalah aksesibilitas pendidikan tetapi lebih kepada permasalahan kualitas pendidikan terutama pada masalah pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kota Bekasi. Data Dinas Pendidikan (2017) menunjukkan bahwa secara nasional lulusan siswa Kota Bekasi masih berada pada Kategori cukup (nilai 6-7). Untuk itu permasalahan kualitas pendidikan ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan pelayanan pendidikan pada tahun mendatang.

- **Kualitas Pelayanan Kesehatan**

Tingkat pelayanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi telah terpenuhi secara luas dengan adanya Kartu Sehat Bekasi berbais NIK. Dengan demikian, dari sisi aksesibilitas warga terhadap layanan kesehatan di Kota Bekasi dapat dikatakan sudah baik. Berbagai indikator umum layanan kesehatan seperti angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan di Kota Bekasi berada pada nilai yang rendah sehingga mencerminkan tingkat kesehatan warga yang sudah baik, Permasalahan layanan kesehatan yang dihadapi adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi sesuai standar pelayanan yang lebih tinggi, tidak berhenti pada standar pelayan minimum. Beberapa aspek pelayanan kesehatan yang masih menunjukkan permasalahan antara lain teridentifikasi pada aspek pengelolaan atau manajemen pelayanan, baik pada tingkat pemerintah kota maupun tingkat operasional pada masing-masing sarana/pusat layanan kesehatan. Dengan visi Bekasi 2025 yang kreatif dan ihsan sesuai RPJPD 2005-2025, maka pengembangan layanan kesehatan di Kota Bekasi perlu mengarah pada tingkat pelayanan yang lebih inovatif sesuai standar internasional.

- **Tingkat Pelayanan Prasarana dan Sarana Kota**

- a. **Tingkat Pelayanan Sistem Transportasi Kota**

Aspek penting terkait sistem transportasi adalah kinerja kapasitas dan tingkat pelayanan jalan (Level Of Service/LOS) dalam memenuhi permintaan pergerakan di wilayah Kota Bekasi. Indikator LoS identik dengan tingkat kemacetan pada ruas jalan tertentu. Kapasitas ruas jalan didefinisikan sebagai arus lalu lintas maksimum yang dapat melintas dengan stabil pada suatu potongan melintang jalan pada keadaan (geometrik, pemisahan arah, komposisi lalu lintas, lingkungan) tertentu. Untuk jalan dua lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan per lajur. V/C Ratio atau derajat kejenuhan adalah perbandingan dari volume (nilai arus) lalu lintas terhadap kapasitasnya. Ini merupakan gambaran apakah suatu ruas jalan mempunyai masalah atau tidak, berdasarkan asumsi jika ruas jalan makin dekat dengan kapasitasnya kemudahan bergerak makin terbatas.

b. Tingkat Pelayanan Sistem *Drainase* Kota

Salah satu indikator kinerja sistem *drainase* kota adalah luas genangan dan cakupan wilayah banjir di Kota Bekasi. Berdasarkan data tahun 2016 lokasi banjir Kota Bekasi sebanyak 85 titik dengan luas kurang lebih 2.873.38 Ha yang tersebar hampir di seluruh Kota Bekasi. Tiga sungai penyumbang banjir terbesar di Kota Bekasi adalah: Kali Bekasi, Kali Cikeas, dan Kali Sunter rutin menyumbang banjir tahunan di wilayah berikut:

1. Kecamatan Pondok Gede (Perumahan Bina Lindung)
2. Kecamatan Pondok Melati (Perumahan Chandra RW 15, Perumahan Pondok Melati Indah, Perumahan Nyai Putu Bawah).
3. Kecamatan Bekasi Selatan (Perumahan Jaka Kencana)
4. Kecamatan Jatiasih (Pondok Mitra Lestari, Jatiasih Indah, Kemang IFI Graha, Pondok Gede Permai, Villa Jati Rasa, Perumahan Mandosi).
5. Kecamatan Jatisampurna (Perumahan Citra Grand).

c. Tingkat Pelayanan Sistem Persampahan Kota

Tingkat pelayanan serta jumlah sampah yang terangkut ke TPA Sumur Batu oleh Dinas Kebersihan berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Bekasi yaitu sebesar 27% pada tahun 2016, jumlah pelayanan paling tinggi adalah Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Jatisampurna yaitu 28%, sedangkan tingkat pelayanan terendah di Kecamatan Bantar Gebang dimana tingkat pelayanan sebesar 10%, kecamatan lainnya tingkat pelayanannya hanya berkisar antara 12%-27%. Nilai pelayanan ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Kota Bekasi yang telah tergolong sebagai Kota Metropolitan.

d. Tingkat Pelayanan Sistem Pengolahan Limbah Kota

Permasalahan pengolahan Air Limbah di Kota Bekasi antara lain meliputi:

- Cakupan layanan penyedotan lumpur tinja 47% KK di 12 kecamatan yang ada ke IPLT/IPALD Sumur Batu.
- Cakupan kepemilikan jamban sehat keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 87,2%.
- Bersatunya aliran limbah dengan saluran *drainase*.
- Sistem pengelolaan air bekas kakus dan tinja (*Black Water*) di Kota Bekasi saat ini masih dilakukan secara *on site* (setempat), yaitu Kakus dan Septik Tank.

• Ketersediaan Perumahan

Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi berada pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kondisi perkembangan penduduk tersebut mengakibatkan permintaan lahan permukiman yang tinggi. Rata-rata permintaan lahan permukiman di Kota Bekasi diperkirakan mencapai 105 ha per tahun. Permintaan lahan permukiman yang tinggi

mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan lahan terbuka. Sebagian dari proses alih fungsi lahan tersebut bertentangan dengan RTRW Kota Bekasi. Ketidaksesuaian perkembangan lahan permukiman tidak hanya terjadi pada alokasi lahan tetapi juga pada arah dan pola penyebarannya.

Luas Kawasan Kumuh Kota Bekasi 423,73 ha yang tersebar pada 122 titik lokasi kawasan kumuh. Berdasarkan peta tutupan lahan tahun 2014, lokasi Kawasan Kumuh pada umumnya berada pada kawasan perumahan tidak terstruktur (perumahan perkampungan) dengan kepadatan bangunan tinggi. Selama pembangunan pada periode 2013-2018, kawasan kumuh yang tertangani mencapai 58%.

- **Kinerja Layanan Penataan Ruang**

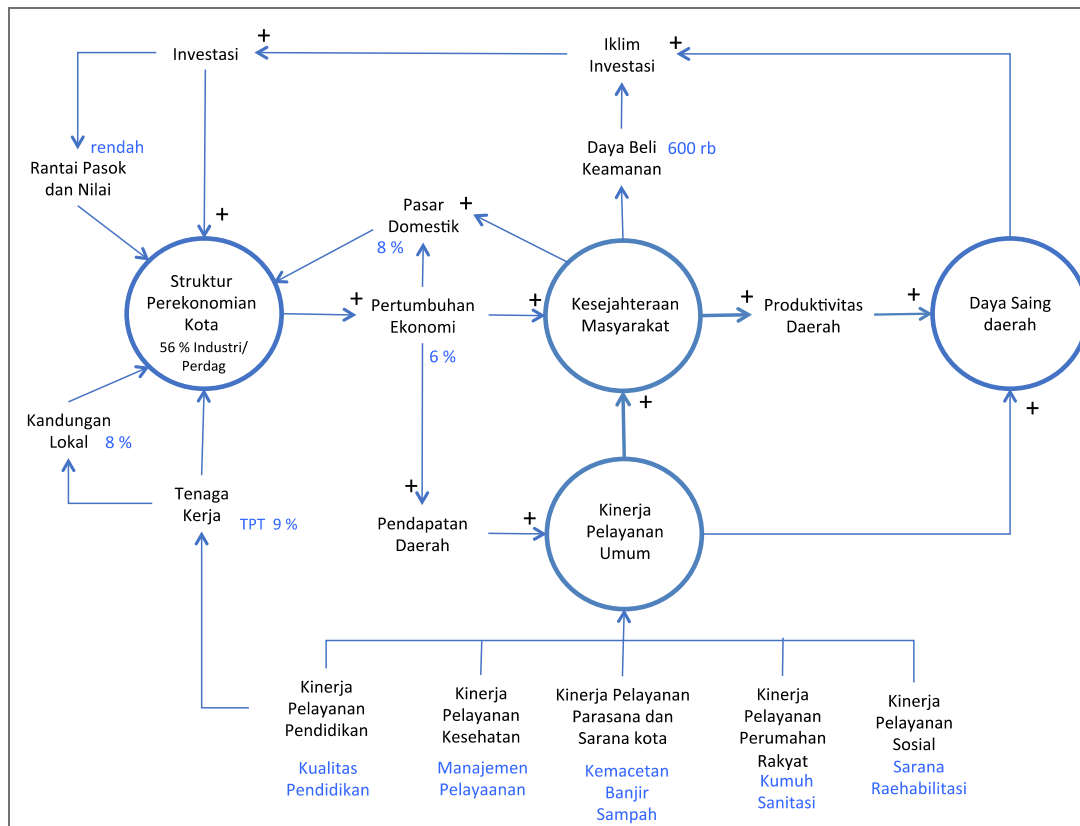
Stock guna lahan merupakan selisih antara luas alokasi ruang yang direncanakan dalam RTRW dan RDTR Kota dengan tingkat pemanfaatannya saat ini (lahan terpakai). Perubahan *stock* mencerminkan tingkat pemanfaatan atau transformasi dari alokasi kepada pemanfaatan atau transformasi dari rencana kepada penggunaan. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa perubahan *stock* terbesar terjadi pada lahan permukiman yang mencapai pengurangan *stock* hingga mencapai 502 ha pada periode 2009-2014. Perubahan terbesar kedua adalah *stock* lahan industri. Alokasi lahan industri berdasarkan RTRW Kota Bekasi hingga tahun 2014 telah terpakai seluruhnya, bahkan perkembangan lahan industri di wilayah ini telah melampaui alokasi yang ditetapkan berdasarkan rencana. Sementara *stock* lahan yang relatif masih besar adalah *stock* lahan perdagangan dan jasa. Pemanfaatan alokasi lahan perdagangan jasa berdasarkan rencana baru mencapai 3,8% hingga tahun 2014. Sedangkan tingkat pemanfaatan lahan permukiman hingga tahun 2014 telah mencapai 97% dari alokasi yang direncanakan dalam RTRW Kota Bekasi. Hasil evaluasi terkait penyimpanan pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 11% penyimpangan pemanfaatan ruang yang ada di Kota Bekasi (LKPJ,2017).

- **Pelayanan Sosial**

Dari empat indikator pelayanan sosial yang direncanakan pada RPJMD 2013-2018 seluruh indikator sudah mencapai target RPJMD kecuali penanganan PMKS pada tahun 2015. Meskipun nilai capaian sudah cukup baik, berdasarkan hasil FGD, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan urusan sosial yaitu: (1) Penanggulangan kemiskinan mengalami pelambatan; (2) Ketimpangan cenderung tinggi; (3) Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (4) Terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi sosial; dan (5) Masih belum optimalnya fungsi masyarakat bagi penduduk yang rentan seperti penyandang cacat atau disabilitas.

F. Struktur Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bekasi

Permasalahan pada tiap aspek pembangunan daerah secara struktural memiliki kaitan satu dengan lainnya. Secara garis besar keterkaitan permasalahan yang melekat pada masing-masing aspek dapat digambarkan pada seperti Gambar 4-9.



Gambar 4-9 Struktur Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan Gambar 4-9 tersebut maka keterkaitan struktur permasalahan pada masing-masing aspek dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kesejahteraan masyarakat merupakan aspek pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur kunci keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari berbagai bidang maupun urusan. Beberapa aspek kesejahteraan masyarakat seperti tingkat kemiskinan, kesejahteraan keluarga, pencari kerja, kesempatan kerja dan indikator lainnya merupakan indikator kunci yang mencerminkan permasalahan yang harus dijadikan dasar perumusan tujuan pembangunan Kota Bekasi. Indikator kesejahteraan tersebut merupakan *outcome* atau *impact* dari pembangunan pada aspek atau urusan penyelenggaraan pemerintah pada berbagai bidang sesuai peraturan perundangan.
- Struktur perekonomian Kota Bekasi yang menjadi tema RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 sesuai amanah RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, merupakan salah satu komponen pembangunan kota yang berkontribusi pada capaian indikator kesejahteraan masyarakat kota. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari struktur ekonomi yang terbentuk merupakan salah satu indikator kunci

perekonomian kota yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Penguatan struktur perekonomian Kota Bekasi membutuhkan penguatan pada beberapa faktor ekonomi kota yang saat ini memiliki kelemahan antara lain kandungan lokal yang rendah, daya serap pasar domestik yang terbatas, rantai pasok antar sektor ekonomi yang rendah serta kesempatan kerja yang terbatas. Tingkat kesejahteraan masyarakat kota akan memberikan umpan balik terhadap perekonomian kota melalui peningkatan iklim investasi kota akibat meningkatnya daya beli dan keamanan sehingga mempengaruhi daya tarik investasi kota.

- Daya saing daerah merupakan komponen pembangunan daerah yang turut dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbentuk. Produktivitas daerah yang dihasilkan oleh kinerja struktur perekonomian kota serta produktivitas tenaga kerja kota, merupakan indikator daya saing daerah yang cukup penting. Daya saing daerah yang terbentuk akan memberikan umpan balik terhadap struktur perekonomian kota melalui peningkatan iklim investasi yang dihasilkan dari komponen daya saing daerah seperti daya dukung sarana dan prasarana kota, kesejahteraan sosial (keamanan, tingkat kriminalitas yang rendah) hingga daya beli masyarakat Kota Bekasi.
- Aspek Pelayanan Umum merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah yang menentukan kinerja dari aspek pembangunan daerah lainnya. Pelayanan umum yang merupakan area utama penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkontribusi terhadap kinerja kesejahteraan daerah melalui pemenuhan standar pelayanan minimal beberapa komponen pelayanan umum wajib, seperti kualitas pendidikan, kualitas layanan kesehatan, kualitas penyediaan sarana dan prasarana kota, kualitas penataan ruang, kinerja penyediaan perumahan, pelayanan sosial hingga reformasi birokrasi. Aspek kesejahteraan umum, daya saing daerah serta struktur ekonomi kota akan memberikan umpan balik terhadap aspek pelayanan umum berupa peningkatan pendapatan daerah yang menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan urusan pelayanan umum oleh pemerintah kota.

4.1.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan sesuai urusan pemerintah. Permasalahan yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil dari kajian masing-masing bidang/urusan yang ada di Pemerintahan Kota Bekasi terhadap kinerja capaian masing-masing urusan selama periode 2013-2018.

4.1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**a. Bidang Pendidikan**

Kewenangan pemerintah kota pada urusan pendidikan diubah melalui UU Nomor 23 Tahun 2014, ada 4 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kota terkait dengan urusan pendidikan yaitu: (1) Manajemen pendidikan; (2) Pendidik dan tenaga pendidikan; (3) perizinan pendidikan dan (4) Bahasa dan sastra. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD urusan pendidikan Kota Bekasi tahun 2014-2016 permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan yaitu:

- (1) Pemerataan akses dan partisipasi pendidikan masih belum optimal, tergambar dari nilai APM yang belum mencapai target.
- (2) Pendidikan belum berfokus kepada mutu dan daya saing, hal ini tergambar dari indikator dan program/kegiatan dalam RPJMD 2013-2018 yang masih berfokus kepada akses dan partisipasi.
- (3) Belum terpenuhinya beberapa aspek dalam standar nasional pendidikan misalnya sarana dan prasarana, rasio guru murid.
- (4) Belum optimalnya tata kelola satuan pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

Permasalahan terkait dengan urusan kesehatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bekasi yaitu:

- (1) Belum seluruh lembaga kesehatan terakreditasi.
- (2) Angka harapan hidup rata-rata masih berada di bawah beberapa kota besar di Indonesia.
- (3) Belum terintegrasinya sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi.
- (4) Rendahnya persentase pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
- (5) Gaya hidup dan lingkungan di Kota Bekasi menyebabkan berkembangnya penyakit akibat gaya hidup, tidak lagi penyakit menular.

c. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

Berdasarkan hasil evaluasi dalam studi pendahuluan menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sudah melampaui targetnya. Hanya terdapat 3 indikator kinerja yang realisasinya belum melampaui target capaian di tahun 2016. Adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi penentu dalam ketercapaian kinerja antara lain:

- (1) Rendahnya kapasitas jaringan *drainase*.
- (2) Adanya pendangkalan sungai.
- (3) Belum terpenuhinya proporsi RTH di Kota Bekasi.
- (4) Banyaknya hambatan sampang dan persimpangan.
- (5) Adanya alih fungsi lahan.
- (6) Sulitnya pengadaan lahan untuk pembangunan fisik Kota Bekasi.

- (7) Keterbatasan SDM dan keterbatasan anggaran menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan indikator kinerja untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (8) Ketidakjelasan terhadap definisi dan pengukuran indikator kinerja sehingga capaian realisasinya tidak dapat terukur dan tercapai.

Beberapa permasalahan umum yang terjadi lainnya adalah adanya irisan kewenangan antar instansi di Kota Bekasi dalam menjalankan indikator kinerja terkait penataan ruang.

d. Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Berdasarkan hasil evaluasi dalam studi pendahuluan menunjukkan bahwa data terkait ketercapaian tiap indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dikatakan sangat minim bahkan tidak ada. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya database terpusat terkait pengukuran kinerja dan akses data publik. Hasilnya, sangat sulit menilai apakah indikator yang ada saat ini sudah tercapai atau belum. Adanya inkonsistensi dalam penggunaan satuan pengukuran juga mengakibatkan sulitnya menentukan pencapaian dari beberapa indikator. Permasalahan yang dihadapi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, antara lain:

- (1) Belum terpenuhinya target septik tank rumah tangga, septik tank komunal, IPAL kawasan, dan prasarana sanitasi masyarakat.
- (2) Belum terpenuhinya cakupan layanan air bersih.
- (3) Kurangnya kapasitas penyediaan sumber air baku.
- (4) TPA hampir penuh sehingga terjadi antrian bongkar.
- (5) Masih adanya titik lokasi kawasan kumuh yang perlu diatasi.
- (6) Belum berkelanjutannya kawasan kumuh yang sudah ditata.
- (7) Tata kelola kawasan kumuh yang belum berkelanjutan.
- (8) Sarana prasarana permukiman belum memadai.

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Struktur perekonomian Kota Bekasi didominasi oleh sektor industri pengolahan dan salah satu tempat untuk berinvestasi. Stabilitas keamanan dan ketertiban mutlak harus dapat dijaga agar stabilitas ekonomi dan menarik investor untuk berinvestasi. Permasalahan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang ada di Kota Bekasi, yaitu:

- (1) Tingginya angka kriminalitas di Kota Bekasi.
- (2) Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat yang masih rendah.
- (3) *Zerro Accident* Konflik masyarakat di Kota Bekasi.

Pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat juga memiliki beberapa permasalahan terkait kebakaran dan yang dapat mengganggu perlindungan masyarakat, antara lain:

- (1) Kualitas SDM yang ahli dalam penanganan kebencanaan belum mencukupi.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana belum memadai.
- (3) Kemampuan masyarakat dalam tanggap darurat bencana.
- (4) Belum optimalnya cakupan pelayanan wilayah penanganan kebakaran.
- (5) Pos pelayanan kecamatan belum merata.
- (6) Terbatasnya tandon air/pasokan air.
- (7) Terbatasnya anggaran.
- (8) Belum terpenuhinya tingkat ketercapaian *response time* 15 menit.
- (9) Kurangnya komunikasi korban/masyarakat di sekitar wilayah TKP.
- (10) Kurangnya ketersediaan armada kebakaran.
- (11) Terbatasnya sarana pendukung peralatan dan perlengkapan pasukan pemadam.
- (12) Terbatasnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi kualifikasi.
- (13) Terbatasnya diklat aparatur.
- (14) Kesulitan menghadapi wilayah masyarakat rawan kebakaran dan potensi kebakaran.

f. Bidang Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi dalam studi Pendahuluan menunjukkan bahwa seluruh indikator sudah mencapai target RPJMD kecuali penanganan PMKS pada tahun 2015. Namun demikian, Pemerintah Kota Bekasi masih memiliki permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan sosial yaitu:

- (1) Penanggulangan kemiskinan mengalami pelambatan.
- (2) Ketimpangan cenderung tinggi.
- (3) Tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- (4) Terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi sosial.
- (5) Masih belum optimalnya fungsi masyarakat bagi penduduk yang rentan seperti penyandang cacat atau disabilitas.

4.1.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Bidang Tenaga kerja

Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bekasi dalam urusan ketenagakerjaan yaitu:

- (1) Jumlah angkatan kerja yang besar.
- (2) Terjadinya penambahan pencari kerja.
- (3) Kualitas tenaga kerja relatif rendah.
- (4) Kesempatan kerja masih terbatas.
- (5) Rendahnya produktivitas tenaga kerja.
- (6) Penerapan hubungan industrial dan pengupahan yang belum efektif.

b. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dihadapi oleh Kota Bekasi yaitu:

- (1) Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.
- (3) Tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap program perlindungan anak masih kurang.
- (4) Belum tersedianya rumah aman bagi korban/keluarga korban.
- (5) Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan.
- (6) Masih rendahnya peran serta perempuan dalam berpolitik.
- (7) Pembangunan perempuan lebih lambat dibandingkan dengan laki-laki.

c. Bidang pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pangan di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Keamanan pangan siap saji.
- (2) Pangan dan gizi.
- (3) Keluarga rawan pangan.
- (4) Keamanan pangan.
- (5) Inovasi pangan lokal yang sehat dan berkualitas.
- (6) Masih rendahnya ketersediaan pangan lokal.
- (7) Masih rendahnya ketersediaan cadangan pangan utama.
- (8) Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/beras.
- (9) Masih rendahnya ketersediaan pangan utama.
- (10) *Supply Chains*.
- (11) Penyusunan Raperda tentang ketahanan pangan.
- (12) Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).
- (13) Ketersediaan beras masih tergantung dari luar daerah.
- (14) Peningkatan sumber daya pangan.
- (15) Teknologi pengolahan pangan lokal.
- (16) Manajemen Analisa Usaha Olahan Pangan.
- (17) Pola Pangan Harapan Ideal.
- (18) Promosi hasil olahan pangan lokal dan diversifikasi pangan.
- (19) Pembentukan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- (20) Gerakan *One Day No Rice*.

d. Bidang pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pertanahan di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Tidak semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai.
- (2) Masalah sengketa tanah.
- (3) Administrasi tidak lengkap.
- (4) Tidak ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa.
- (5) Proses pembebasan tanah yang belum efisien.

e. Bidang lingkungan hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan lingkungan hidup di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Masih rendahnya Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Sampah.
- (2) Belum adanya pengelolaan sampah menjadi sumber energi terbarukan.
- (3) Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Tanah.
- (4) Optimalisasi Pengelolaan Persampahan.
- (5) Terpeliharanya Daerah Resapan Air dan Sumber Air.
- (6) Masih rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- (7) Penciptaan iklim usaha yang kondusif.

f. Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah terkait kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil terutama untuk penduduk miskin.

g. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

- (1) Terus meningkatnya jumlah penduduk.
- (2) Tingginya kepadatan penduduk.
- (3) Kualitas pelayanan belum maksimal sehingga Intensifikasi Pelayanan KB sangat penting.
- (4) Belum optimalnya ketahanan keluarga.

h. Bidang perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perhubungan di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Tingkat Pelayanan Jaringan Jalan (LOS) yang rendah.
- (2) Belum optimalnya angkutan umum dan massal di Kota Bekasi.

i. Bidang komunikasi dan informatika

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan komunikasi dan informatika di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Belum tersedianya infrastruktur jaringan telekomunikasi yang memadai.

- (2) Pelayanan publik yang belum didukung sepenuhnya oleh sistem TIK.

j. Bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Masih rendahnya daya saing KUMKM.
- (2) Rendahnya kemampuan dan sumber daya UMKM dalam penguasaan teknologi.
- (3) Pengembangan sarana promosi UMKM.
- (4) Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- (5) Belum semua pelaku UMKM mempunyai sertifikasi halal untuk produknya.
- (6) Koperasi sangat vital dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Kota Bekasi.
- (7) Koperasi sebagai *agent of development and change* dalam memperkuat perekonomian masyarakat.

k. Bidang penanaman modal

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan penanaman modal di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Belum optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan melalui Pengembangan Sistem *on line* dan pengembangan aplikasi terintegrasi.
- (2) Peningkatan Pemeliharaan Sistem dan Server, layanan provider secara rutin.
- (3) Penataan kebijakan investasi.
- (4) Masih rendahnya kinerja pelayanan investasi peningkatan nilai investasi dan terciptanya iklim investasi.
- (5) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang layanan DPMPPTSP.
- (6) Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal.
- (7) Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Peningkatan kapasitas SDM aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (9) Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan pengelolaan aset dinas.
- (10) Penataan ulang sistem aplikasi dan database penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.
- (11) Efektifitas pelaksanaan SOP Perizinan.
- (12) Peningkatan kerjasama promosi dan kerjasama investasi.
- (13) Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (14) Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan DPMPPTSP.

l. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan utama dalam bidang kepemudaan dan olahraga Kota Bekasi yaitu:

- (1) Kurangnya aktifitas rutin kepemudaan dan olah raga di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.
- (2) Masih kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga di setiap kecamatan.
- (3) Pembinaan olahraga terutama olah raga prestasi masih belum optimal hal ini tercermin dari minimnya prestasi olah raga pada tingkat nasional maupun internasional.

m. Bidang Statistik

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan statistik di Kota Bekasi yaitu belum didukungnya tata kelola pemerintahan dengan *data base* yang terintegrasi.

n. Bidang Persandian

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan persandian di Kota Bekasi yaitu belum didukungnya tata kelola pemerintahan dengan *data base* yang terintegrasi dan belum terjaminnya keamanan informasi.

o. Bidang Kebudayaan

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Masih rendahnya pemahaman nilai-nilai budaya di masyarakat.
- (2) Masih rendahnya pemahaman nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatan terhadap tradisi lokal.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana seni dan budaya di Kota Bekasi.
- (4) Sosialisasi seni, budaya, tradisi, dan sejarah lokal.
- (5) Pembinaan terhadap nilai seni, budaya, tradisi, dan sejarah lokal.
- (6) Pelestarian nilai-nilai seni, budaya, tradisi, dan sejarah lokal.

p. Bidang perpustakaan

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Terbatasnya jumlah dan koleksi perpustakaan.
- (2) Terbatasnya SDM perpustakaan.
- (3) Kurang *up date*-nya koleksi perpustakaan daerah.
- (4) Gedung yang belum representatif.
- (5) Pelayanan perpustakaan yang belum merata ke seluruh wilayah.
- (6) Pembinaan perpustakaan yang masih belum optimal.

q. Bidang kearsipan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan Kota Bekasi yaitu:

- (1) Tingginya volume arsip pada pencinta arsip dan LKD.
- (2) Terbatasnya tempat penyimpanan (*record center* dan tepat penyimpanan arsip aktif).
- (3) Terbatasnya arsiparis.
- (4) Rendahnya kesadaran komitmen aparaturnya untuk tertib arsip.
- (5) Belum tersedianya Perda Kearsipan.
- (6) Belum tersosialisasi secara merata, pengetahuan pengelolaan arsip dinamis dan statis secara baku pada perangkat daerah, pemahaman tata acara pengelolaan arsip dari mulai penciptaan sampai penyusutan.
- (7) Lokasi kantor Dinas yang jauh dari pusat Pemda Kota Bekasi, sehingga koordinasi tidak maksimal.

4.1.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Bidang pariwisata

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Penggalan dan pengembangan destinasi wisata.
- (2) Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.
- (3) Pengembangan destinasi wisata edukasi.
- (4) Pengembangan wisata belanja dan kuliner secara optimal.
- (5) Optimalisasi lahan untuk destinasi wisata buatan.
- (6) Sosialisasi destinasi wisata.
- (7) Optimalisasi pemanfaatan situs dan cagar budaya untuk wisata edukasi.
- (8) Optimalisasi Wisata Perkotaan (*Urban Tourism*).

b. Bidang pertanian

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan pertanian di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Penerapan *Urban Farming*.
- (2) Pemanfaatan lahan sempit untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.
- (3) Komoditi pertanian sehat sebagai upaya mewujudkan pelestarian alam (*Go Green*).
- (4) Jaringan promosi dan pemasaran produk pertanian masih kecil.
- (5) Pengembangan SDM pertanian, penyuluhan, dan peningkatan kesejahteraan petani.
- (6) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai upaya pengembangan sektor pertanian.
- (7) Optimalisasi kebun bibit untuk pengadaan bibit tanaman.
- (8) Tidak terpenuhinya kebutuhan Produk Peternakan di Kota Bekasi.

- (9) Jaminan keamanan pangan produk peternakan.
- (10) Potensi Ancaman Penyakit Hewan menular terutama yang bersifat *zoonosis*.
- (11) Pembinaan dan pendampingan belum maksimal.
- (12) Peningkatan usaha pembudidayaan.
- (13) Besarnya biaya pakan.
- (14) Keterbatasan akses permodalan.
- (15) Kurangnya tenaga penyuluhan pertanian perkotaan.

c. Bidang perdagangan

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran kemetrolagian dalam perlindungan konsumen.
- (2) Pembangunan gedung laboratorium dan instalasi uji kemetrolagian yang memadai.
- (3) Peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya).
- (4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro.
- (5) Peningkatan nilai ekspor daerah.
- (6) Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri.

d. Bidang perindustrian

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Bekasi yaitu:

- (1) Masih rendahnya daya saing industri.
- (2) Adanya keterbatasan lahan sebagai ruang usaha baru.
- (3) Peningkatan jumlah/rasio industri yang menerapkan SNI/ISO.
- (4) Pengembangan potensi industri kreatif Kota Bekasi.

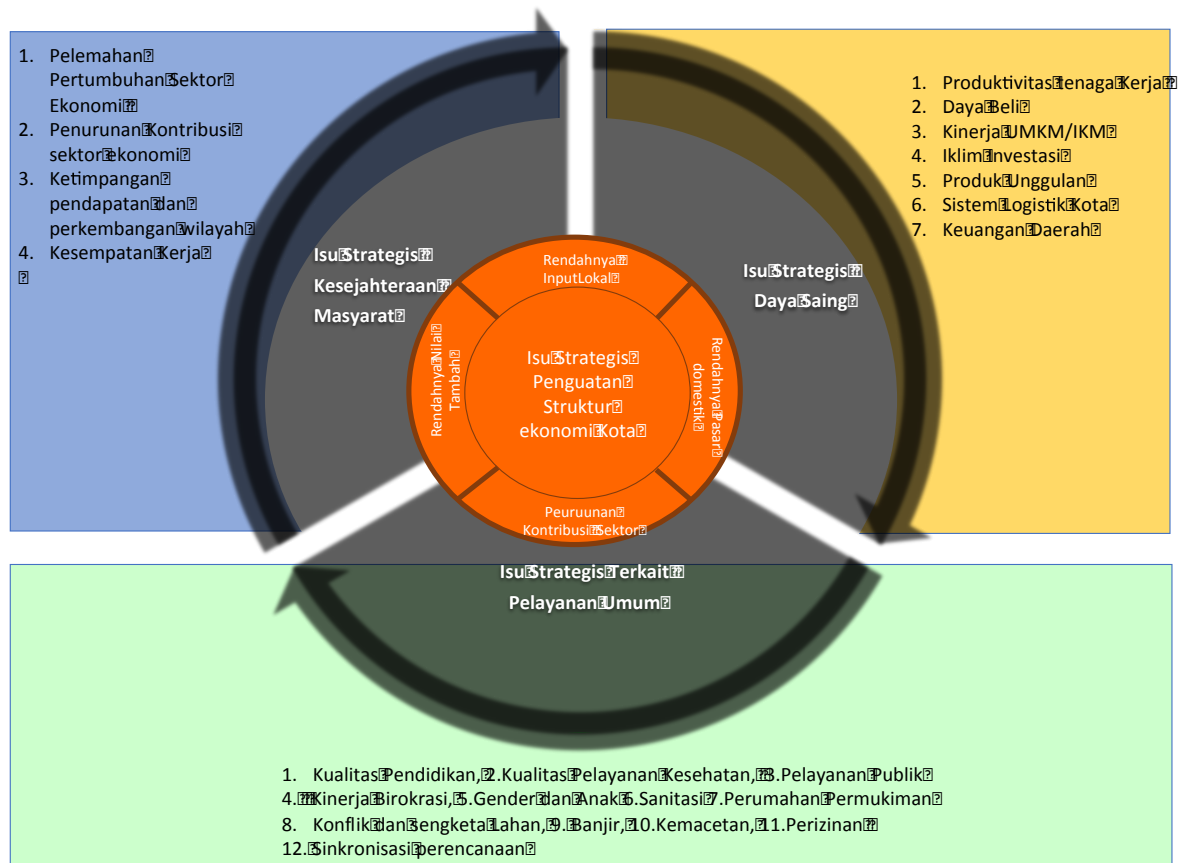
4.2 Isu Strategis Pembangunan

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan sehingga suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Penentuan isu strategis ini mengacu dari berbagai sumber yaitu: (1) *Background Study* tahun 2017, (2) isu strategis baik di tingkat Internasional, Nasional, maupun Provinsi yang mempengaruhi Kota Bekasi, (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar

yang mempengaruhi pembangunan Kota Bekasi; (4) Kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kota Bekasi; dan (5) KLHS RPJMD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka isu strategis pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 secara garis besar dapat dirumuskan seperti pada Gambar 4. 10. Isu strategis pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 menempatkan isu penguatan struktur ekonomi kota sebagai inti dari isu strategis pembangunan kota yang terintegrasi dengan isu strategis pada urusan pemerintah daerah yang meliputi aspek urusan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan pelayanan umum.



Gambar 4-10 Rumusan Isu Strategis Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

Penjelasan dari rumusan isu strategis pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1. Isu Strategis Penguatan Struktur Perekonomian Kota

Isu strategis penguatan struktur perekonomian Kota Bekasi meliputi:

- 1) Rendahnya kandungan lokal dalam sistem ekonomi kota saat ini.
- 2) Terbatasnya pasar domestik untuk produk ekonomi kota.
- 3) Rendahnya nilai tambah ekonomi kota.
- 4) Penurunan kontribusi dan laju pertumbuhan beberapa sektor ekonomi utama kota.

5) Rendahnya keterkaitan antar sektor hingga aspek geografi ekonomi yang belum merata.

Isu-isu strategis penguatan struktur perekonomian tersebut di atas jika tidak diantisipasi akan berpotensi menimbulkan dampak sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Lingkup Permasalahan isu Strategis Penguatan Struktur Perekonomian Kota Bekasi

NO	KOMPONEN/ASPEK	PERMASALAHAN YANG TERIDENTIFIKASI	POTENSI DAMPAK
1	Sektor Ekonomi	Stagnasi Pertumbuhan (Jenuh) produksi sektor dominan	Penurunan LPE, PHK, Pencari Kerja
2	Struktur Input	<i>Ketergantungan (dependency)</i> Eksternal Input	Potential loss Bagi ekonomi kota dari keuntungan penyediaan input produksi
3	Tenaga Kerja	Daya serap rendah	Pencari Kerja, sektor informal berkembang
4	Nilai Tambah	Bagian Niai tambah yang rendah bagi upah/gaji	Daya beli masyarakat/ tenaga kerja lokal rendah, konsumsi rendah
5	Pasar	Pasar eksternal yang <i>uncertainty</i> dengan persaingan ketat	Fluktuasi tingkat permintaan yang sulit diprediksi dan dikendalikan, kemampuan daya saing dituntut tinggi
6	Struktur Permin-taan/Penggerak Ekonomi	Ketergantungan ekspor-import yang besar	Fluktuasi harga tidak terkendali
7	Keterkaitan	Multiplier efek yang realtif rendah	Dampak terhadap kinerja perekonomian lokal rendah
8	<i>Geography</i>	Ketimpangan ekonomi antar wilayah	Kinerja ekonomi yang tidak merata, distribusi kesejahteraan belum seimbang

Sumber: Analisis, 2018.

Berdasarkan lingkup permasalahan terkait isu strategis perekonomian kota tersebut, maka selanjutnya dapat diidentifikasi alternatif solusi untuk tiap permasalahan tersebut seperti terlihat pada tabel 4.5. Salah satu alternatif solusi yang dapat dijadikan arah kebijakan dan strategi dalam mengatasi permasalahan penguatan struktur perekonomian Kota Bekasi pada periode 2018-2023 adalah dengan memperkuat dan mengembangkan “EKONOMI KREATIF” kota yang terpadu dengan penguatan komponen penguatan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi Kota. Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep ekonomi relatif baru yang mengintensifkan informasi, jaringan, dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia

sebagai faktor produksi yang utama. *Platform* ini biasanya didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya.

Tabel 4.5 Identifikasi Alternatif Solusi

NO	CRITICAL QUESTION	ALTERNATIF SOLUSI (SISI PEMERINTAH)	TEMA PEMBANGUNAN
1	Bagaimana mengantisipasi “Kejenuhan” Struktur Ekonomi Saat ?	Penguatan Daya tarik Investasi	Mempertahankan
		Infrastruktur Khusus	Meningkatkan
		Ketersediaan Lahan/ruang	Mengoptimalkan
2	Bagaimana memperkuat kandungan lokal dalam struktur input ekonomi Kota ?	Mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal – SDM- Ekonomi Kreatif-UMKM	Mengembangkan
		Jaringan kerjasama= UMKM-Industri	Memperkuat
3	Bagaimana memperkuat pasar domestik ekonomi Kota ?	Meningkatkan sektor berbasis konsumsi masyarakat lokal (termasuk jenis industri-kreatif)	Mengembangkan
		Branding, Market Learning	Memperkuat
4	Bagaimana meningkatkan nilai tambah ekonomi pada kesejahteraan tenaga kerja?	Mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya manusia lokal - Ekonomi Kreatif-UMKM	Mengembangkan
			Meningkatkan

Sumber: Analisis, 2018.

4.2.2. Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Isu strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi:

1) Penurunan Laju dan Kontribusi Sektor Ekonomi Utama Kota

Penurunan laju dan kontribusi sektor ekonomi kota terjadi pada beberapa sektor utama Kota Bekasi yang meliputi sektor industri pengolahan, perdagangan dan eceran, jasa perusahaan, sektor utilitas dan beberapa sektor lainnya, hanya 5 (lima) sektor yang menunjukkan kinerja ekonomi yang baik yakni sektor transportasi, informasi, dan komunikasi, jasa kesehatan, makanan dan minuman, serta jasa keuangan. Upaya mengatasi kelemahan pertumbuhan beberapa sektor utama tersebut perlu menjadi prioritas pembangunan ekonomi kota pada periode 2018-2023 guna memberikan landasan pada pencapaian visi jangka panjang Kota Bekasi (2025) yang Kreatif dan ihsan. Pelemahan kinerja ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi yang telah tercapai saat ini. Oleh karena itu, upaya terintegrasi dengan upaya memperkuat perekonomian kota menjadi salah satu alternatif solusi yang perlu didorong.

2) Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan kesejahteraan Kota Bekasi tercermin dari nilai indeks kedalaman kemiskinan Kota Bekasi yang relatif tinggi yakni 0,6-0,8 serta teridentifikasi dari perbedaan perkembangan wilayah antar kecamatan, di mana kecamatan di wilayah tengah dan utara memiliki tingkat perkembangan yang lebih baik. Walaupun tingkat kemiskinan Kota Bekasi secara prosentase hanya mencapai 4-5% namun, perkembangan penduduk yang tinggi disertai kinerja ekonomi yang relatif *stagnant* memiliki potensi peningkatan kemiskinan yang cukup tinggi. Indeks kedalaman kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Bekasi bersifat laten, artinya upaya untuk mengentaskan kemiskinan Kota Bekasi pada taraf yang lebih baik membutuhkan modal yang upaya yang cukup besar, baik dari sisi pemerintah maupun kinerja ekonomi makro kota.

Sementara dari sisi geografi dan spasial, perbedaan tingkat perkembangan kawasan yang dicirikan oleh perbedaan tingkat ketersediaan layanan sarana dan prasarana kota hingga kepadatan penduduk dan penggunaan lahan menunjukkan bahwa kecamatan di wilayah tengah dan utara memiliki tingkat perkembangan yang lebih baik. Untuk itu guna menjamin pemerataan pertumbuhan kota yang lebih baik, maka upaya pendistribusian sarana dan prasarana kota perlu dilakukan pada pembangunan kota di 2018-2023.

3) Keterbatasan Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja di Kota Bekasi relatif terbatas, hal ini tercermin dari fluktuasi tingkat partisipasi angkatan Kerja Kota Bekasi selama 2013-2023. Kesempatan kerja yang terbatas dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja Kota Bekasi menghasilkan Angka Pencari Kerja sebesar 9.36% pada tahun 2017 dan diprediksikan akan meningkat pada periode 2018-2023. Permasalahan kesempatan kerja perlu menjadi perhatian karena kesempatan kerja yang terbatas berdampak pada rendahnya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang pada gilirannya menurunkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Upaya membuka kesempatan kerja yang lebih luas di Kota Bekasi dapat terintegrasi dengan penguatan struktur perekonomian Kota Bekasi terutama pada fokus penguatan dan peningkatan ekonomi kreatif kota.

4.2.1. Isu Strategis Penguatan Daya Saing daerah

Isu strategis dalam penguatan daya saing daerah meliputi:

1) Rendahnya daya beli

Daya beli masyarakat Kota Bekasi berada pada kisaran 600-630 ribu per bulan, di mana berdasarkan pola perkembangannya selama ini, kondisi tersebut dapat dikategorikan pada kondisi "*middle income trap*" di mana masyarakat Kota Bekasi seakan tidak mampu bergerak pada kondisi daya beli yang lebih tinggi. Rendahnya daya beli masyarakat Kota Bekasi erat kaitannya dengan struktur perekonomian Kota Bekasi yang

nilai tambah ekonominya lebih banyak pada profit perusahaan sehingga nilai tambah bagi pekerja relatif kecil. Kondisi tersebut berpadu dengan tingkat harga-harga di Kota Bekasi sehingga menghasilkan daya beli masyarakat seperti tersebut di atas. Daya beli merupakan faktor penting penggerak ekonomi kota, oleh karena itu rendahnya daya beli dapat berimbas pada terbatasnya pasar domestik Kota Bekasi. Upaya meningkatkan daya beli masyarakat Kota Bekasi dapat dilakukan dengan mengembangkan kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah besar bagi para pelakunya. Integrasi upaya dengan penguatan struktur perekonomian kota perlu menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat Kota Bekasi.

2) Rendahnya Produktivitas Total Daerah

Produktivitas angkata kerja yang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional menunjukkan bahwa walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi cukup tinggi pada kisaran 5-6% namun produktivitas tenaga kerjanya relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan ekonomi Kota Bekasi masih didominasi oleh kekuatan ekonomi yang berbasis pada modal yang kuat seperti industri pengolahan. Oleh karena itu upaya meningkatkan produktivitas angkatan kerja adalah dengan memperkuat ekonomi yang berbasis pada kekuatan sumber daya manusia antara lain mengembangkan ekonomi kreatif Kota serta sektor UMKM lainnya.

3) Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Bekasi yang relatif kurang baik pada periode 2017-2018 perlu ditetapkan menjadi salah satu isu strategis pembangunan Kota Bekasi 2018-2023. Hal ini penting karena kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penentu ketercapaian target-target pembangunan Kota Bekasi yang telah dicanangkan sekaligus mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang dihadapi di masa depan. Dalam upaya meningkatkan kapasitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, maka peningkatan kinerja BUMD Kota Bekasi perlu menjadi salah satu isu strategis dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.

4) Peningkatan masalah keamanan dan iklim investasi

Daya saing daerah membutuhkan tingkat keamanan untuk mampu menarik investasi ke wilayah Kota Bekasi. Peningkatan kejadian kriminal yang terjadi di Kota Bekasi pada periode 2013-2017 perlu diantisipasi guna meningkatkan iklim investasi di Kota Bekasi. Upaya meningkatkan keamanan di Kota Bekasi dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang lebih inovatif sehingga pencegahan dan penanganan kejadian kriminal dapat dimitigasi secara dini dan diatasi secara cepat.

5) Keterbatasan Kapasitas Keuangan Daerah

Kapasitas keuangan daerah yang tercermin dari pendapatan asli daerah merupakan komponen penting daya saing daerah. PAD dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah sesuai standar pelayanan minimum yang disyaratkan. Kinerja PAD Kota Bekasi yang saat ini mendekati 2 Triliun diperkirakan akan meningkat secara terbatas hingga mencapai 2,6 Triliun pada tahun 2023, masih dirasakan kurang untuk mendukung kebutuhan pembangunan Kota Bekasi dengan penduduk 3 Juta pada 2023. Proporsi PAD pada total pendapatan pemerintah Kota Bekasi baru mencapai kisaran 30% sehingga sisanya masih mengandalkan sumber pendapatan lainnya. PAD erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi kota. Oleh karena itu, penataan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pengelolaan PAD hingga peningkatan iklim investasi dibutuhkan untuk mendukung perolehan PAD yang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Bekasi 2018-2023.

6. Penguatan daya saing KUMKM dan Industri kreatif

Sebagaimana arah pembangunan dalam RPJPD Kota Bekasi 2005 – 2025 untuk menuju kota kreatif pada tahun 2025, maka pondasi dan benih-benih industri kreatif harus sudah mulai dibangun sejak dini. Namun demikian, kondisi saat ini di Kota Bekasi masih belum banyak berkembang industri pada sektor ekonomi kreatif ini. Dibandingkan kota kreatif lain seperti Jogjakarta, *brand* industri kreatif di Kota Bekasi masih belum populer. Selain permasalahan khusus terkait industri kreatif, daya saing KUMKM juga masih lemah. Padahal sektor KUMKM merupakan pondasi pertahanan akhir ekonomi kota ketika mengalami ancaman krisis.

4.2.1. Isu Strategis Peningkatan Pelayanan Umum

Isu strategis dalam peningkatan pelayanan umum meliputi:

1) Kualitas Pendidikan yang Belum Merata

Permasalahan pelayanan pendidikan Kota Bekasi sudah tidak berada pada masalah standar pelayanan minimal seperti masalah aksesibilitas pendidikan tetapi lebih kepada permasalahan kualitas pendidikan terutama pada masalah pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kota Bekasi. Data Dinas Pendidikan (2017) menunjukkan bahwa secara nasional lulusan siswa Kota Bekasi masih berada pada Kategori cukup (nilai 6-7). Untuk itu maka permasalahan kualitas pendidikan ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan pelayanan pendidikan pada tahun mendatang. Tata Kelola layanan pendidikan menjadi alternatif solusi bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Bekasi.

2) Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Belum Optimal

Permasalahan layanan kesehatan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi sesuai standar pelayanan yang lebih tinggi, tidak berhenti pada standar pelayanan minimum. Beberapa aspek pelayanan kesehatan yang masih menunjukkan permasalahan antara lain teridentifikasi pada aspek pengelolaan atau manajemen pelayanan, baik pada tingkat pemerintah kota maupun pada tingkat operasional pada masing-masing sarana/pusat layanan kesehatan. Dengan visi Bekasi 2025 yang kreatif dan ihsan sesuai RPJPD 2005-2025, maka pengembangan layanan kesehatan di Kota Bekasi perlu mengarah pada tingkat pelayanan yang lebih inovatif sesuai standar internasional.

3) Rendahnya Kinerja Reformasi Birokrasi

Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, permasalahan terkait dengan isu ini yaitu: (1) Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas; (2) Masih ada kebutuhan payung hukum pada beberapa sektor; (3) Belum optimalnya pelaksanaan *e-government*; (4) Belum optimalnya monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan (5) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja.

4) Masih Terbatasnya Layanan Umum bagi Gender dan Anak

Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui beberapa kebijakan dan program-program. Namun pada prakteknya masih banyak menemui kendala dan tantangan. Kesetaraan *gender* (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sementara keadilan *gender* (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Pembangunan Manusia Berbasis *Gender* 2013, Kementerian PPA dan BPS). Indeks Pembangunan *Gender* (IPG) Kota Bekasi pada tahun 2015 adalah 92,99 angka ini menempati peringkat ke-5 tertinggi di Jawa Barat di bawah Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon dan Kabupaten Bandung angka ini menunjukkan bahwa kemampuan dasar perempuan di Kota Bekasi sudah masuk dalam lima daerah terbaik di Jawa Barat. Tantangan pengembangan *gender* dan hak anak di Kota Bekasi adalah bagaimana menyediakan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan peran *gender* dan hak anak secara lebih baik.

5) Kemacetan

V/C Ratio atau Derajat kejenuhan adalah perbandingan dari volume (nilai arus) lalu lintas terhadap kapasitasnya. Ini merupakan gambaran apakah suatu ruas jalan mempunyai masalah atau tidak, berdasarkan asumsi jika ruas jalan makin dekat dengan kapasitasnya kemudahan bergerak makin terbatas. Saat ini V/C rasio beberapa ruas jalan

di Kota Bekasi telah mendekati 1, artinya kemacetan sudah mulai menjadi masalah dalam sistem transportasi Kota Bekasi. Permasalahan muncul dari ketidakseimbangan antara penggunaan kendaraan pribadi dengan angkutan umum yang mengakibatkan kapasitas jaringan jalan terlampaui. Sebagai akibatnya tingkat pelayanan jaringan jalan di Kota Bekasi menjadi rendah dan pada akhirnya mengakibatkan pergerakan menjadi terhambat. Tingkat pelayanan jalan yang semakin menurun juga dipengaruhi oleh sistem logistik (pergerakan angkutan barang) yang belum terencana dengan baik. Pemisahan sistem angkutan orang dan barang belum dilakukan secara optimal sehingga percampuran sistem pergerakan mengakibatkan sistem logistik kota belum optimal kinerjanya.

6) Banjir

Berdasarkan data tahun 2016 lokasi banjir Kota Bekasi sebanyak 85 titik dengan luas kurang lebih 2.873.38 Ha yang tersebar hampir di seluruh Kota Bekasi. Tiga sungai penyumbang banjir terbesar di Kota Bekasi adalah: Kali Bekasi, Kali Cikeas, dan Kali Sunter rutin menyumbang banjir tahunan di wilayah berikut:

- Kecamatan Pondok Gede (Perumahan Bina Lindung).
- Kecamatan Pondok Melati (Perumahan Chandra RW 15, Perumahan Pondok Melati Indah, Perumahan Nyai Putu Bawah).
- Kecamatan Bekasi Selatan (Perumahan Jaka Kencana).
- Kecamatan Jatiasih (Pondok Mitra Lestari, Jatiasih Indah, Kemang IFI Graha, Pondok Gede Permai, Villa Jati Rasa, Perumahan Mandosi).
- Kecamatan Jatisampurna (Perumahan Citra Grand).

7) Backlog Perumahan dan Kekumuhan

Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi berada pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kondisi perkembangan penduduk tersebut mengakibatkan permintaan lahan permukiman yang tinggi. Rata-rata permintaan lahan permukiman di Kota Bekasi diperkirakan mencapai 105 ha per tahun. Permintaan lahan permukiman yang tinggi mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan lahan terbuka. Sebagian dari proses alih fungsi lahan tersebut bertentangan dengan RTRW Kota Bekasi. Ketidaksesuaian perkembangan lahan permukiman tidak hanya terjadi pada alokasi lahan tetapi juga pada arah dan pola penyebarannya.

Luas Kawasan Kumuh Kota Bekasi 423,73 ha yang tersebar pada 122 titik lokasi kawasan kumuh. Berdasarkan peta tutupan lahan tahun 2014, lokasi Kawasan Kumuh pada umumnya berada pada kawasan perumahan tidak terstruktur (perumahan perkampungan) dengan kepadatan bangunan tinggi. Selama pembangunan pada periode 2013-2018, kawasan kumuh yang tertangani mencapai 58%.

8) Sanitasi yang belum merata

Tingkat pelayanan serta jumlah sampah yang terangkut ke TPA Sumur Batu oleh Dinas Kebersihan berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Bekasi yaitu sebesar 27% pada tahun 2016, jumlah pelayanan paling tinggi adalah Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Jatisampurna yaitu 28%, sedangkan tingkat pelayanan terendah di Kecamatan Bantar Gebang di mana tingkat pelayanan sebesar 10%, kecamatan lainnya tingkat pelayanannya hanya berkisar antara 12%-27%. Nilai pelayanan ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Kota Bekasi yang telah tergolong sebagai Kota Metropolitan.

Sementara permasalahan pengolahan Air Limbah di Kota Bekasi antara lain meliputi:

- Cakupan layanan penyedotan lumpur tinja 47% KK di 12 kecamatan yang ada ke IPLT/IPALD Sumur Batu.
- Cakupan kepemilikan jamban sehat keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 87,2%.
- Bersatunya aliran limbah dengan saluran *drainase*.
- Sistem pengelolaan air bekas kakus dan tinja (*Black Water*) di Kota Bekasi saat ini masih dilakukan secara *on site* (setempat), yaitu: Kakus dan Septik Tank.

9) Konflik Lahan dan Penataan ruang

Tingkat pemanfaatan lahan permukiman hingga tahun 2014 telah mencapai 97% dari alokasi yang direncanakan dalam RTRW Kota Bekasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa *stock* lahan permukiman semakin terbatas, bila kondisi ini tidak diantisipasi maka perubahan dan konflik lahan akan sering terjadi di Kota Bekasi. Hasil evaluasi terkait penyimpangan pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 11% penyimpangan pemanfaatan ruang yang ada di Kota Bekasi (LKPJ,2017).

10) Perizinan

Permasalahan iklim investasi Kota Bekasi bersumber dari keterbatasan lahan untuk pengembangan, dukungan infrastruktur kota serta layanan perizinan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi melalui pembangunan pada periode RPJMD 2013-2018, namun penguatan tetap dibutuhkan untuk mendukung penguatan struktur perekonomian Kota Bekasi.

11) Pelayanan Sosial

Dari empat indikator pelayanan sosial yang direncanakan pada RPJMD 2013-2018 seluruh indikator sudah mencapai target RPJMD kecuali penanganan PMKS pada tahun 2015. Meskipun nilai capaian sudah cukup baik, berdasarkan hasil FGD, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan urusan sosial yaitu: (1) Penanggulangan kemiskinan mengalami pelambatan; (2) Ketimpangan cenderung tinggi; (3) Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

(4) Terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi sosial; dan (5) Masih belum optimalnya fungsi masyarakat bagi penduduk yang rentan seperti penyandang cacat atau disabilitas.

12) Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah.

Kenyamanan lingkungan merupakan hal yang penting untuk mendukung ketercapaian kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Aspek dasar lingkungan yakni air, udara, dan tanah merupakan prasyarat dasar untuk mencapai kenyamanan lingkungan sebagai daya dukung kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Sayangnya, kondisi tiga elemen tersebut di Kota Bekasi masih jauh di bawah standar. Bekasi yang dilalui oleh 4 sungai utama, yaitu Kali Bekasi, Kali Rawa Tembaga, Kali Cakung dan Kali Bancong memiliki parameter pencemaran (antara lain: kadar *Total Suspension Solid* (TSS), *Biology Oxygen Demand* (BOD), *Dissolved Oxygen* (DO), COD, Oksigen, lemak, Hg dan Fe) yang di luar ambang batas. Hal ini banyak disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik disekitar aliran sungai. Sebagaimana halnya air, tanah di Kota Bekasi juga mengalami pencemaran akibat limbah pabrik yang masuk ke dalam tanah. Selain itu udara di Kota Bekasi juga dirasa mengkhawatirkan. Nilai ISPU udara Kota Bekasi hampir melampaui batas aman yakni mencapai 47 poin (batas aman 50).

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang maju secara konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang dituju tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, melalui penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Pernyataan Visi Kota Bekasi adalah:

“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”

Penetapan visi tersebut di samping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada di Kota Bekasi Hulu. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bekasi yang **Cerdas** bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*Smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
2. Bekasi yang **Kreatif** bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.
3. Bekasi yang **Maju** mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.
4. Bekasi yang **Sejahtera**, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.

5. Bekasi yang **Ihsan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Misi Pertama adalah pengembangan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan, serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas, dan tanggung jawab berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: 1) partisipasi masyarakat; 2) tegaknya supremasi hukum; 3) transparansi; 4) kesetaraan; 5) daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); 6) berorientasi kepada visi; 7) akuntabilitas; 8) pengawasan; 9) efektivitas dan efisiensi; dan 10) profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja, dan penguatan integritas aparatur.

Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta terpenuhinya

kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga ditujukan untuk mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana yang meningkat dan serasi; untuk memenuhi kehidupan warga kota dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh, dan berkembang secara berkelanjutan.

Misi ketiga bermakna bahwa memiliki makna upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis-basis industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing kota Bekasi menjadi lebih meningkat.

Misi Keempat memiliki makna bahwa pembangunan dan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi.

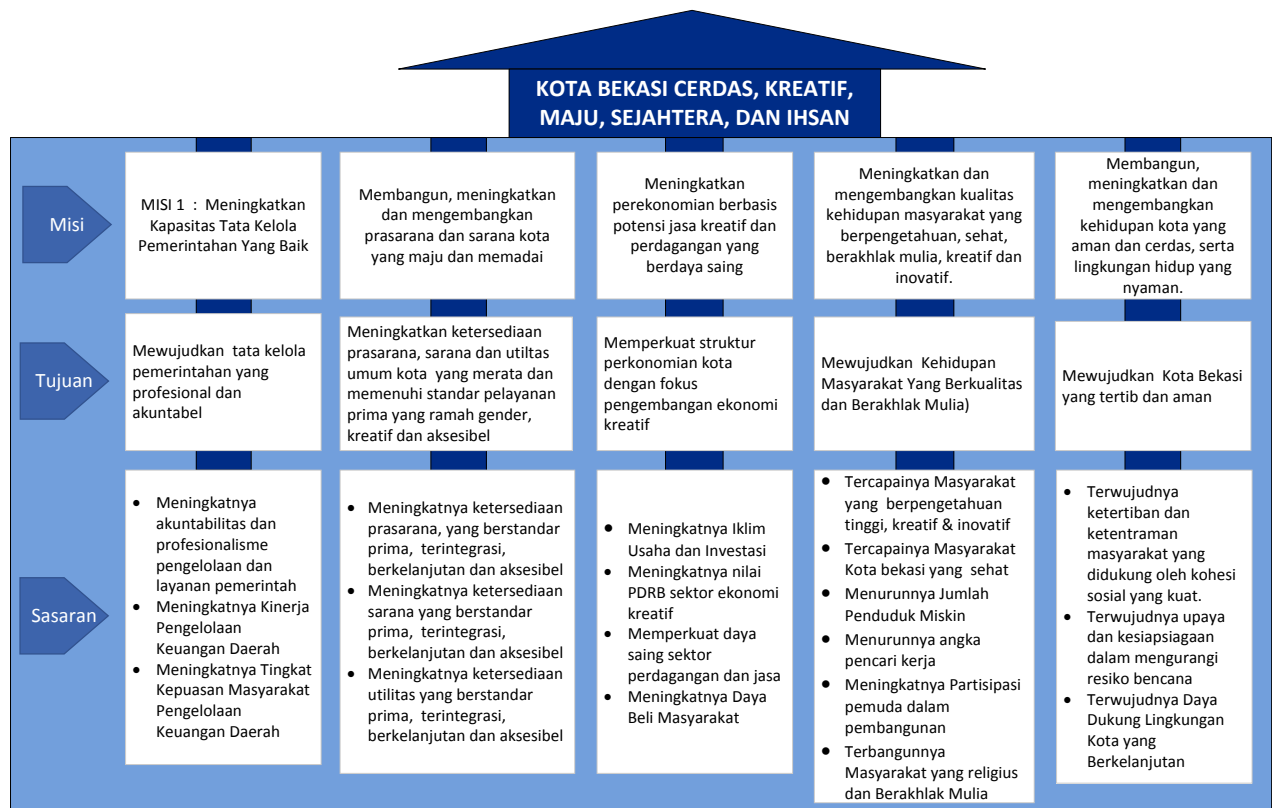
Misi Kelima bermakna bahwa di dalam era digital pembangunan kota Bekasi dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada warga Bekasi secara cepat, tepat, dan transparan, serta melaksanakan percepatan program-program kota Bekasi menuju kota cerdas (*Smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Pembangunan adalah tahap perumusan sasaran strategis dalam pembangunan Kota Bekasi dengan penetapan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bekasi yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rancangan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran adalah salah satu tahap perencanaan kebijakan yang strategis dalam menjabarkan Visi dan Misi pembangunan Kota Bekasi periode 2018-2023 ke dalam tahapan rencana pembangunan tahunan secara operasional.

Tujuan adalah rumusan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan Kota Bekasi. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Pembangunan dirumuskan dari penjelasan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi periode 2018-2023 akan dijabarkan ke dalam standar kinerja

yang harus dicapai pada sasaran pembangunan. Dengan memperhatikan penjelasan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi periode 2018-2023, maka tujuan pembangunan Kota Bekasi dirumuskan seperti terlihat pada gambar 5.1 dan Tabel 5.1.



Gambar 5-1 Arsitektur Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Tabel 5.1 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi 2019-2023

VISI- MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR	
					2019	2020	2021	2022	2023		
VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN											
MISI 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik											
1.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	a	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,36	65,86	67,5	69,5	71,5	73,5	73,5
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	1	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	62,49	64	65,8	67,6	69,4	72	72
		2	Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD	Nilai	3,1842	3,2193	3,2544	3,2895	3,3249	3,3597	3,3597
		3	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4	Persentase peningkatan PAD	%	1.999.018.742.158,68	35,12%	11,67%	11,57%	10,57%	10,89%	4.125.916.972.944,80
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	78,33	80,26	82,19	84,12	86,05	87,89	87,89
MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai											
2.1	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utiltas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel	a	Indeks Infrastruktur wilayah	Nilai	27,93	27,93	27,93	27,93	27,93	27,93	27,93

VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.1	Meningkatnya ketersediaan prasarana, yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel	1	Indeks Prasarana wilayah	Nilai	44,09	50,01	51,44	55,07	56,75	60,34	60,34
2.1.2.	Meningkatnya ketersediaan sarana yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel	2	Indeks Sarana wilayah	Nilai	17,05	16,36	23,86	20,08	19,54	21,13	21,13
2.1.3.	Meningkatnya ketersediaan utilitas yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel	3	Indeks Utilitas wilayah	Nilai	17,33	17,95	34,5	39,49	44,19	48,07	48,07
MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing											
3.1.	Memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif.	a	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73%	5,73%	5,90%	6,10%	6,30%	6,50%	6,50%
3.1.1	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	1	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp.10.460.053.504.800,-	10% (Rp. 11.506.058.855.280,-)	10% (Rp.12.656.664.740.808,00)	10% (Rp. 13.922.331.214.888,80)	10% (Rp. 15.314.564.336.377,70)	10% (Rp. 16.846.020.770.015,40)	Rp. 16.846.020.770.015,40
3.1.2	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	2	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif	%	N/A	N/A	5%	7%	11%	15%	15%

VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	
3.1.3	Memperkuat daya saing sektor perdagangan dan jasa	3	Persentase peningkatan nilai sektor perdagangan dan jasa	%	32,482,110.00 juta (th 2017)*	6%	6%	6%	6%	6%	Rp. 46,076,493.84 Juta *
3.1.4	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	4	Indeks Daya Beli	Nilai	83,29	84,01	84,37	84,73	85,09	85,45	85,45
MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.											
4.1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia	a	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,33	80,93	81,23	81,53	81,83	82,13	80,35
4.1.1	Tercapainya Masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	1	Indeks Pendidikan	Nilai	74,59	75,23	75,77	76,21	76,55	76,79	76,79
4.1.2	Tercapainya Masyarakat Kota bekasi yang sehat	2	Indeks Kesehatan	Nilai	75,21	75,39	75,57	75,75	75,93	76,11	76,11
4.1.3	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	3	Angka Kemiskinan	%	4,2	N/A	4,1	3,8	3,7	3,7	3,7
4.1.4	Menurunnya angka pencari kerja	4	Angka Pencari Kerja	%	9.32	9.07	8.96	8.87	8.79	8.72	8.72
4.1.5	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan	5	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Prestasi	N.A	10 TP, 2 TN	15 TP, 4 TN	20 TP, 6 TN	25 TP, 8 TN	30 TP, 10 TN, 1 TI	30 TP, 10 TN, 1 TI
4.1.6	Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak Mulia	6	Indeks Toleransi Beragama	Nilai	5,89	5,917	5,944	5,971	5,998	6,025	6,025

VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR	
					2019	2020	2021	2022	2023		
MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.											
5.1	Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	a	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45	6	5,5	5,5	5,5	6	73,5
		b	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132	127	122	118	113	113
5.1.1	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45	6	5,5	5,5	5,5	6	73,5
		2	Kasus Perselisihan Sara dan Kelompok Masyarakat yang diselesaikan	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.1.2	Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana	3	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132	127	122	118	113	113
5.2.	Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman	a	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	47,15	49	52	54	56	59	59
5.2.1	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	47,15	49	52	54	56	59	59

5.4. Prioritas Pembangunan Daerah Janji Politik

Janji politik sangat penting karena dari sanalah masyarakat dapat membaca tekad, visi, misi, dan intensi seseorang maju menjadi kandidat untuk menduduki jabatan tertentu. Kandidat yang tidak mempunyai janji politik adalah kandidat yang tidak mempunyai visi dan misi. Prioritas pembangunan yang merupakan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan janji politik yang perlu diwujudkan melalui suatu tahapan yang dimulai dari dokumen perencanaan. RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang disusun telah memperhatikan dan menterjemahkan janji-janji politik Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Bekasi. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan janji-janji politik Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Bekasi meliputi 45 (empat puluh lima) janji sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin;
2. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi;
3. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (smart school);
4. Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan Tahfidz Al-Qur'an;
5. Penguatan sistem tata kelola layanan Kartu Sehat (KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;
6. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (perwujudan *smart health*);
7. Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas;
8. Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
9. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM;
10. Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja;
11. Pembentukan "*Bekasi City Start-Up*", melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis untuk melahirkan wirausaha baru;
12. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako;
13. Pengembangan "*urban tourism*" untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;
14. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "*Bekasi City Techno Park*";
15. Pengembangan *creative society* melalui penyelenggaraan event "*Bekasi Creative*" di tingkat kota dan kecamatan.

16. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemasalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat;
17. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan.
18. Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan, kesehatan, dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial);
19. Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
20. Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
21. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi;
22. Pengembangan layanan publik berbasis IT;
23. Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;
24. Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok penggerak sosial lainnya;
25. Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi;
26. Pengembangan kawasan ramah bersepeda (*Bekasi City Bike*);
27. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.);
28. Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantar Gebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi;
29. Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya);
30. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi "*Smart Waste Management*", dan konversi "*Waste to Energy*";
31. Bedah rumah pada kawasan kumuh;
32. Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
33. Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;
34. Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;
35. Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco drainage*);
36. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
37. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan;

38. Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya;
39. Penyediaan angkutan publik massal;
40. Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
41. Pembangunan gedung *commuter transit parking* (stasiun KA dan LRT);
42. Pengenalan dan pemberlakuan *smart parking* di pusat perbelanjaan;
43. Pembangunan sarana transportasi *City Tourism*;
44. Pembangunan dan penataan jalur pejalan kaki dan jalur khusus sepeda; dan
45. Pengelolaan event "*car free day*" yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.

Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam Arah Kebijakan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 diuraikan sebagaimana Bab 6 RPJMD.

BAB 6

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengatur setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan menentukan rumusan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

6.1 Strategi Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

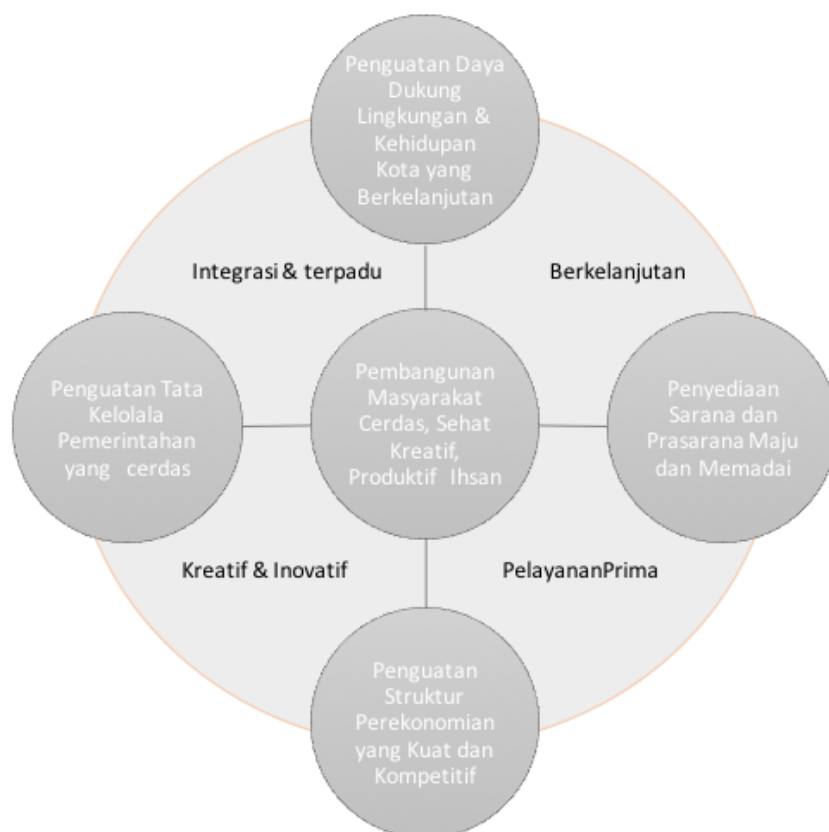
Perumusan strategi pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 mempertimbangkan aspek teknokratis dan politis yang tercermin dari integrasi antara strategi untuk mengatasi isu strategis pembangunan kota dengan strategi untuk mencapai visi, misi

tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Bekasi sesuai janji politik Kepala Daerah terpilih 2018-2023. Visi Kota Bekasi **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan,”** mengandung makna bahwa tahapan pengembangan Kota Bekasi pada Periode Pembangunan 2018-2023 adalah menuju kota cerdas yang tercermin pada kualitas kehidupan masyarakatnya yang kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Dengan demikian secara jelas tergambarkan dalam visi pembangunan Kota Bekasi, bahwa *platform* dari strategi pembangunan kota yang dapat digunakan adalah strategi pengembangan kota Cerdas.

Konsep kota cerdas (*smart city*) yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan *citizen centric* sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota. Arti “cerdas” menurut Nam & Pardo (dalam Djunaedi, 2014) adalah: (1) dalam bidang perencanaan kota, “cerdas” diartikan sebagai strategis, terutama dalam memilih prioritas, arah, kebijakan, dan sebagainya, dan (2) terkait teknologi, maka “cerdas” mengandung prinsip komputasi otomatis (*self-configuration, self-healing, self-protection, self-optimization*), ditunjukkan antara lain memiliki *sensors* dan *actuators*.

Secara sederhana sebuah kota cerdas (*smart city*) memiliki 6 dimensi, yaitu: (1) *Smart Economy*; (2) *Smart Mobility*; (3) *Smart Environment*; (4) *Smart People*; (5) *Smart Living*; dan (6) *Smart Governance*. Griffinger dkk (2007:10-14) menjelaskan 6 (enam) dimensi dalam konsep *smart city* sebagai dasar dari penerapan *smart city* yang kemudian digunakan dalam menghitung indeks *smart city* sebagai indikator kinerja kecerdasan suatu kota.

Platform strategi pengembangan kota cerdas yang dikembangkan dalam kerangka mewujudkan visi Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan,” adalah dengan menerapkan pendekatan perencanaan kota yang berfokus pada upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat melalui pengintegrasian beberapa elemen utama pembangunan kota yang ada yakni pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi. Kerangka strategi pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 tersebut telah tercermin dalam penjabaran visi Kota Bekasi pada misi pembangunannya. Visi kota Bekasi dikembangkan dalam 5 (lima) misi yang secara prinsip merupakan pilar-pilar pengembangan kota Bekasi yang cerdas yakni penguatan tata kelola pemerintahan, pemantapan sarana dan prasarana maju, penguatan dan pengembangan ekonomi kreatif, penguatan masyarakat yang kreatif, produktif, sejahtera, dan ihsan serta penguatan daya dukung lingkungan hidup.



Gambar 6-1 Kerangka Strategi Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

5 (lima) kerangka dasar strategi pembangunan yang sinergi dengan 5 (lima) misi pembangunan Kota memberikan gambaran fokus-fokus prioritas pembangunan yang perlu dikembangkan pada periode 2018-2023. Kelima strategi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi satu dengan lainnya pada setiap tahapan pembangunan. Penekanan bobot strategi disesuaikan dengan fokus prioritas pembangunan setiap tahunnya. Selanjutnya mengacu pada kerangka dasar strategi pembangunan Kota Bekasi tersebut, maka dirumuskan strategi rinci yang lebih operasional seperti dapat dilihat pada Tabel 6.1.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

6.2.1 Umum

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap dalam penyusunan dokumen RPJMD.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang

hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya sinergitas antara berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

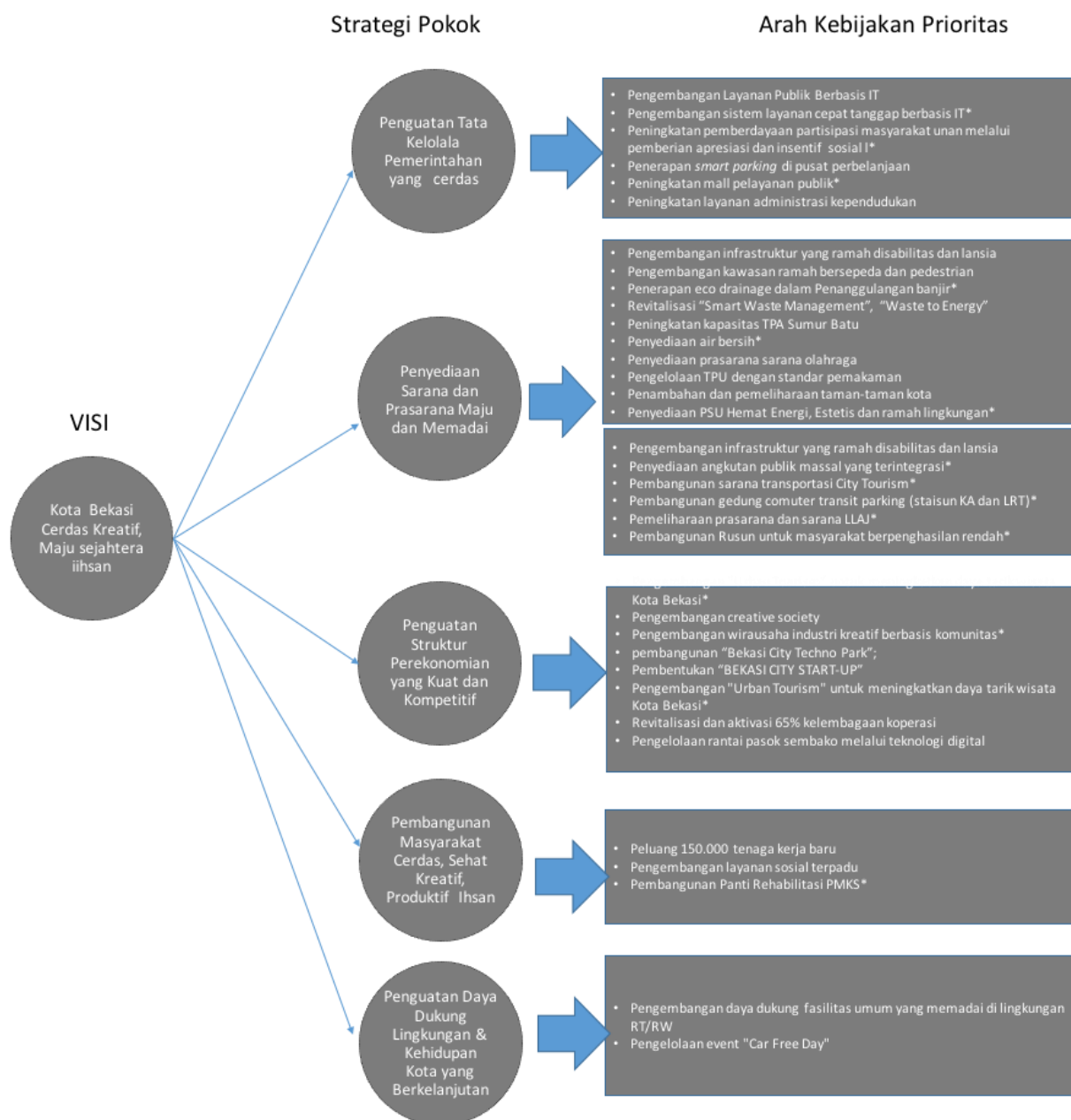
Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 dirumuskan berdasarkan pertimbangan akan kebutuhan dalam memenuhi atau mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalkannya. Rumusan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 mencerminkan upaya pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan sekaligus mengatasi isu strategis yang dihadapi Kota Bekasi pada periode 2018-2023. Hasil perumusan kebijakan Pembangunan kota Bekasi 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.3.

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan yang Menjadi Prioritas

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk mewujudkannya. Kerangka strategi yang dikembangkan dirumuskan dengan menerjemahkan visi misi kota dan mengintegrasikannya dengan *platform* strategi pengembangan kota cerdas. Selanjutnya dalam rangka memberikan arah yang lebih jelas terhadap pelaksanaan program pembangunan Kota Bekasi 2018-2023, maka perlu dirumuskan arah kebijakan yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan. Arah Kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pada pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 ditetapkan berdasarkan isu strategis

pembangunan kota, janji politik serta pertimbangan strategis lainnya yang dinilai penting. Hasil perumusan arah kebijakan yang menjadi prioritas dapat dilihat pada Gambar 6.2.



Gambar 6-2 Arah Kebijakan yang Menjadi Prioritas

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Bekasi 2018-2023

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Sasaran 1,1,: Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan tata kelola, pemanfaatan IT dan pengembangan SDM	Peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana,
			Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT *
			Pengembangan sistem layanan cepat tanggap terhadap penanganan sampah,limbah domestik, air minum, jalan, saluran, PJU dan kemacetan berbasis IT*
		2. Mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kinerja pembangunan	Pengembangan kelitbangan dan sistem inovasi daerah
		3. Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Peningkatan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara
		4. Meningkatkan tata kelola kearsipan melalui perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip serta pemanfaatan IT	Peningkatan kapasitas dan ketersediaan SDM, prasarana dan sarana serta pengembangan sistem informasi kearsipan
		5. Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi ketua RT RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok penggerak sosial lainnya*

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6. Meningkatkan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja
		7. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
		8. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
			Penerapan smart parking di pusat perbelanjaan*
		9. Meningkatkan kinerja BUMD	Peningkatan Tata Kelola Perusahaan
		10. Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan
			Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui mall pelayanan publik*
			Peningkatan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
			Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya Berbasis IT*

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai			
Tujuan 2: Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel	Sasaran 2,1,: Meningkatnya ketersediaan prasarana yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel	1. Menyediakan infrastruktur (jalan/jembatan) yang terintegrasi dan aksesibel	Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jembatan
			Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi*
			Pengembangan kawasan ramah bersepeda (Bekasi City Bike) dan penataan serta pengembangan pedestrian yang ramah pejalan kaki*
		2. Mengembangkan sistem transportasi perkotaan	Penyediaan angkutan publik massal yang terintegrasi*
			Pengembangan Transportasi massal melalui BUMD
			Pembangunan sarana transportasi City Tourism*
			Pembangunan gedung comuter transit parking (stasiun KA dan LRT)*
		3. Mengembangkan smart parking	Penerapan smart parking*
		4. Memelihara prasarana dan sarana LLAJ	Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ*
		5. Mengembangkan kawasan TOD	Pengembangan kawasan TOD terbangun
		6. Menyediakan infrastruktur (drainase) terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan	Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendali banjir yang terintegrasi
			Penerapan eco drainage dalam Penanggulangan banjir*
		7. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah	Penyediaan sanitasi yang aman melalui pengelolaan rumah tangga

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		8. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah	Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to Energy”*
		9. Meningkatkan prasarana pengelolaan persampahan	Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota
		10. Mengembangkan jaringan air minum	Penyediaan air bersih*
		11. Meningkatkan Kesigapan pemadam kebakaran	Pengembangan rencana sistem pemadam kebakaran yang efektif dan efisien
	Sasaran 2,2,: Meningkatnya ketersediaan sarana yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel	1. Menyediakan tempat pendidikan	Penyediaan sarana tempat pendidikan
		2. Menyediakan layanan kesehatan	Penyediaan sarana tempat layanan kesehatan
		3. Menyediakan layanan perdagangan	penyediaan sarana tempat perdagangan
		4. Mengembangkan fasos dan fasum	Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana social Penyediaan prasarana sarana olahraga dalam rangka pemasaran olah raga masyarakat yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat di tingkat kota dan lingkungan masyarakat*
		5. Menyediakan sarana pemakaman	Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;*

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6. Menyelenggarakan Penataan Ruang Daerah Dalam Rangka Mengembangkan Sistem Pusat Pelayanan Kota yang Mendukung Perwujudan Fungsi Kota Bekasi Sebagai Pusat Kekuatan Nansional	Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
		7. Menyediakan ruang terbuka hijau	Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.);*
		8. Penyediaan gedung kantor	penyediaan sarana gedung kantor yang representatif
		9. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman	Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah*
		10. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum	Penyediaan tanah untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan PSU
	Sasaran 2,3,: Meningkatnya ketersediaan utilitas yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel	1. Menyediakan sistem jaringan listrik dan telepon	Penyediaan sistem PSU terpadu (ducting) yang terbangun
			Penyediaan PSU Hemat Energi, Estetis dan ramah lingkungan
		2. Menyediakan sistem jaringan gas Kota	Penyediaan jaringan gas Kota
	MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing		
Tujuan 3: Memperkuat struktur perkonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif,	Sasaran 3,1,: Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	1. Meningkatkan Investasi Daerah	Menciptakan Iklim Usaha Yang Berdaya Saing
	Sasaran 3,2,: Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	1. Meningkatkan keunggulan, daya tarik dan promosi wisata	Pengembangan "Urban Tourism" untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi*
			Pengembangan creative society melalui penyelenggaraan event “BEKASI CREATIVE” di tingkat kota dan kecamatan*

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Meningkatkan daya saing industri kreatif	Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi City Techno Park”*
			Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas*
		3. Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro dan kecil	Pembentukan “BEKASI CITY START-UP”, melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru*
			Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi*
	Sasaran 3,3: Memperkuat daya saing sektor perdagangan dan jasa	1. Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako*
			Peningkatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri
	Sasaran 3,4: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1. Menjaga stabilitas Harga Komoditas	Penguatan Stock Ketersediaan Cadangan Pangan
			Pengendalian Inflasi
		2. Harmonisasi Tingkat Upah	Harmonisasi UMK
			Insentif dan Bantuan Peningkatan pendapatan
		3. Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Pelatihan dan Penyiapan Tenaga Kerja Terdidik
	MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif,		
Tujuan 4: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan	Sasaran 4,1,: Tercapainya Masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	1. Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Layanan Pendidikan	penigkatan efektivitas skema pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin*
			peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi*

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Berakhlak Mulia			peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (smart School)*
			Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan tahfidz Al-Quran*
		2. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap perpustakaan	Peningkatan Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Literasi
	Sasaran 4,2,; Tercapainya Masyarakat Kota bekasi yang sehat	1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui optimalisasi gernas dan PHBS*	Peningkatan gizi masyarakat
			Pemberian makanan tambahan/pendamping bagi anak usia sekolah
			Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan
			Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi dan balita
		2. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta jiwa	Peningkatan pengendalian terhadap penularan penyakit menular dan tidak menular serta jiwa
		3. Meningkatkan kualitas akses dan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan standar dan kapasitas layanan Kesehatan
			Penguatan sistem tata kelola layanan kartu sehat berbasis NIK yang selaras dengan jaminan Kesehatan masyarakat*
	Sasaran 4,3,; Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	1. Menurunkan kesenjangan antar penduduk miskin melalui peningkatan pendapatan dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin	Pengembangan layanan sosial terpadu (pendidikan, kesehatan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial) *
			Pembangunan Panti Rehabilitasi PMKS*
			Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan upaya pengendalian penduduk
			Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
	Sasaran 4,4,: Menurunnya angka pencari kerja	2. Pemerataan kesempatan kerja dan terciptanya perluasan fasilitas kerja, hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja	Peluang 150,000 tenaga kerja baru, melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja*
		3. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan meningkatkan kerjasama dengan unsur terkait	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan kerja sama dengan unsur terkait
	Sasaran 4,5,: Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan	4. Mewujudkan Pemuda yang berdaya saing	Pemberian kesempatan dan dukungan sumber daya dalam bentuk aktivitas peningkatan kemampuan pemuda
		5. Meningkatkan prestasi olahraga dan kualitas olahragawan	Peningkatan pembinaan olah raga pendidikan
			Peningkatan pembinaan organisasi olahraga
	Sasaran 4,6,: Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak Mulia	6. Meningkatkan kualitas hidup dan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan pemenuhan kualitas hidup dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan
		7. Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan	Pengarusutamaan Gender
			Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial dan kearifan buidaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ikhsan

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman,			
Tujuan 5: Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	Sasaran 5,1,: Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	1. Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan	Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial*
			Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif ketua RT, RW, LINMAS, KADER Posyandu, Marbod Masjid dan kelompok penggerak sosial lainnya*
		2. Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan
	Sasaran 5,2: Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana	3. Pencegahan konflik sosial	Pencegahan konflik sosial dengan mengembangkan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran dan demokratis
		1. Menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui mitigasi bencana	Peningkatan budaya sadar bencana;
			Pengembangan sistem informasi kebencanaan kepada masyarakat secara online, tepat dan cepat;
			Pelatihan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan,
			Integrasi penanggulangan resiko bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan;
Tujuan 6: Mewujudkan Kota	Sasaran 6,1,: Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan	1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan

Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Bekasi yang nyaman	Kota yang Berkelanjutan	2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
		3. Menegakan hukum lingkungan	Peningkatan pengawasan, penanganan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan lingkungan
		4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat peduli lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup
			Pengelolaan event "Car Free Day" yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan*

6.3 Tahapan Pembangunan

Setelah dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, maka setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dijadikan dasar untuk penyusunan RPJMD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang terpadu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Hasil perumusan pentahapan pembangunan Kota Bekasi 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.2.



Gambar 6-3 Tahapan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

Tabel 6.2 Tahapan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

2019	2020	2021	2022	2023
Tema :	Tema :	Tema :	Tema :	Tema :
Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Tata Kelola Pembangunan	Pemantapan Ketersediaan dan Pembangunan Parasana sarana Kota	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kapasitas Pelaku Ekonomi	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Melalui Pembangunan Industri Kreatif	Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan
Fokus Prioritas :	Fokus Prioritas :	Fokus Prioritas :	Fokus Prioritas :	Fokus Prioritas :
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Pemerintahan	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kota yang terintegrasi , Pelayanan prima dan berkelanjutan	Peningkatan akses masyarakat pada pendidikan yang lebih tinggi	Penguatan dan pengembangan ekonomi kreatif kota	Penguatan Tingkat Kematangan Bekasi sebagai kota Cerdas
Peningkatan akuntabilitas dan Profesionalisme Pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan IT dalam pelayanan PSU Kota	Peningkatan kapasitas dan Kualitas layanan pendidikan	Pengembangan Iklim dan kemampuan entrepreneurship masyarakat	Penguatan daya dukung lingkungan kota
Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Penyediaan PSU Ramah Anak, Gender, Disabilitas, Pejalan Kaki dan sepeda	Penguatan kapasitas dan Peningkatan Kualitas layanan kesehatan	Pemberdayaan sumber daya ekonomi lokal dan pasar domestik	Penguatan ketahanan kota terhadap bencana sosial, ekonomi maupun alam
Peningkatan kemitraan dan kolaborasi pemerintah masyarakat dalam pembangunan	Penataan kawasan kumuh dan penatagunaan tanah serta tata ruang	Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya	Peningkatan iklim usaha Kota Bekasi dan peluang kerja	
Peningkatan kapasitas penanganan masalah pembangunan kota	Menyediakan kawasan permukiman yang layak huni, cerdas dan hijau	Pengembangan creative society	Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital	
		Penguatan Kohesi sosial yang makin kuat	Pembentukan "BEKASI CITY START-UP" dan Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas	

Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
						Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
							target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1			MISI 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik																	
1	1		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	a	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,36	65,86	287,727	67,5	349,110	69,5	376,076	71,5	398,724	73,5	422,415	73,5	1834,05 2	
1	1	1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	a	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	62,49	64	287,727	65,8	349,110	67,6	376,076	69,4	398,724	72	422,415	72	1834,05 2	
				b	Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD	Nilai	3,184	3,219	237,695	3,254	288,403	3,290	310,680	3,325	329,390	3,360	348,962	3,360	1515,13	
1	1	1	1		Program kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif				8,092		9,814		10,57		11,207		11,873		51,55	Sekretariat Daerah (Bag, Organisasi)
				1	Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%	N/A	100%	0,578	100%	0,701	100%	0,755	100%	0,8	100%	0,848	100%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Organisasi)
				2	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	%	N/A	70%	0,578	70%	0,701	70%	0,755	70%	0,8	70%	0,848	70%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Tata Pemerintahan)

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																			
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
					Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
						target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			3	Persentase capaian IKK 2,1 dan 2,3 LPPD yang naik	%	45 indikator meningkat (34,62 %)	25%	0,578	25%	0,701	25%	0,755	25%	0,8	25%	0,848	25%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Tata Pemerintahan)
			4	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	%	N/A	100%	0,578	100%	0,701	100%	0,755	100%	0,8	100%	0,848	100%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Hukum)
			5	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	N/A	100%	0,578	100%	0,701	100%	0,755	100%	0,8	100%	0,848	100%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Tata Usaha)
			6	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	%	N/A	35%	0,578	40%	0,701	70%	0,755	75%	0,8	85%	0,848	85%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Kesejahteraan Sosial)
			7	Persentase Fasilitas kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya	%	N/A	100%	0,578	100%	0,701	100%	0,755	100%	0,8	100%	0,848	100%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Kesejahteraan Sosial)
			8	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	%	N/A	70%	0,578	70%	0,701	70%	0,755	70%	0,8	70%	0,848	70%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Pembangunan)
			9	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	%	N/A	10%	0,578	10%	0,701	10%	0,755	10%	0,8	10%	0,848	10%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Perekonomian)
			10	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	%	N/A	20%	0,578	40%	0,701	60%	0,755	80%	0,8	100%	0,848	100%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Kerjasama)

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					11	Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	%	N/A	9,30%	0,578	9,30%	0,701	9,30%	0,755	9,30%	0,8	9,30%	0,848	9,30%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Humas)
					12	Persentase pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	%	N/A	70%	0,578	70%	0,701	70%	0,755	70%	0,8	70%	0,848	70%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, KLPBJ)
					13	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	%	30,43%	52,17 %	0,578	65,22 %	0,701	78,26 %	0,755	91,30 %	0,8	100%	0,848	100%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Tata Pemerintahan)
					14	Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	%	N/A	90%	0,578	93%	0,701	95%	0,755	97%	0,8	100%	0,848	100%	3,68	Sekretariat Daerah (Bag, Hukum)
1	1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah						20,217		24,531		26,426		28,017		29,682		128,87	Sekretariat Daerah (Bag, Perlengkapan)
					1	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	%	100%	100%	6,065	100%	7,359	100%	7,928	100%	8,405	100%	8,905	100%	38,66	Sekretariat Daerah (Bag, Perlengkapan)
					2	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100%	100%	6,065	100%	7,359	100%	7,928	100%	8,405	100%	8,905	100%	38,66	Sekretariat Daerah (Bag, Umum)
					3	Persentase ketersediaan kantor pemerintahan dalam kondisi baik	%	100%	100%	8,087	100%	9,812	100%	10,57	100%	11,207	100%	11,873	100%	51,55	Sekretariat Daerah/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		target	Rp (Milyar)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1.1.3	Program administrasi, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD							32,467		39,394		42,437		44,992		47,665		206,95	Sekretariat Dewan		
					1	Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	%	100%	100%	8,117	100%	9,848	100%	10,609	100%	11,248	100%	11,916	100%	51,74	Sekretariat Dewan
					2	Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	100%	100%	8,117	100%	9,848	100%	10,609	100%	11,248	100%	11,916	100%	51,74	Sekretariat Dewan
					3	Persentase Terfasilitasinya kegiatan DPRD	%	100%	100%	8,117	100%	9,848	100%	10,609	100%	11,248	100%	11,916	100%	51,74	Sekretariat Dewan
					4	Persentase Terfasilitasinya informasi DPRD	%	100%	100%	8,117	100%	9,848	100%	10,609	100%	11,248	100%	11,916	100%	51,74	Sekretariat Dewan
1.1.1.4	Program Pengelolaan e_government							1,009		1,225		1,319		1,399		1,482		6,43	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian		
					1	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Lyanan Digital government	Jumlah	0	9	0,202	12	0,245	12	0,264	14	0,28	-	0,296	14	1,29	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
					2	Jumlah layanan digital government yang di integrasikan	Jumlah	0	9	0,202	12	0,245	12	0,264	14	0,28	-	0,296	14	1,29	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir					
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
																	Persandian			
																	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian			
				3	Cakupan unit kerja yang terkoneksi dengan jaringan primer	%	9%	9%	0,202	34%	0,245	66%	0,264	100%	0,28	100%	0,296	100%	1,29	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
				4	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah kepada publik	%	34,50%	34,50 %	0,202	50,80 %	0,245	67,20 %	0,264	83,60 %	0,28	100%	0,296	100%	1,29	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
				5	Persentase Tingkat Layanan infrastruktur pusat data	%	93%	94%	0,202	94,50 %	0,245	95%	0,264	95,50 %	0,28	96%	0,296	96%	1,29	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
1	1	1	5	Program Pengelolaan Komunikasi Publik					0,757		0,918		0,989		1,049		1,111		4,83	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
				1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	%	0	8%	0,189	17%	0,23	33%	0,247	50%	0,262	67%	0,278	67%	1,21	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
				2	Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Digital dan media luar ruang	%	647	91%	0,189	93%	0,23	95%	0,247	98%	0,262	100%	0,278	100%	1,21	Dinas Komunikasi Informasi

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		target	Rp (Milyar)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																			Statistik dan Persandian		
					3	Persentase pengembangan kemitraan dalam rangka desiminasi informasi pemerintah kota bekasi	%	1	17%	0,189	33%	0,23	50%	0,247	67%	0,262	83%	0,278	83%	1,21	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
					4	Persentase laporan hasil tindak lanjut aduan masyarakat secara online yang sudah ditangani oleh PD terkait	%	470	83%	0,189	85%	0,23	87%	0,247	90%	0,262	95%	0,278	95%	1,21	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
1	1	1	6	Program pengembangan data/informasi statistik sektoral				2,523		3,062		3,298		3,497		3,704		16,08	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian		
					1	Persentase Data Sektoral Perangkat Daerah Yang Harius Di Penuhi	%	0	4%	1,262	28%	1,531	52%	1,649	76%	1,748	100%	1,852	100%	8,04	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
					2	Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi dengan Open DataKota Bekasi	%	0	4%	1,262	28%	1,531	52%	1,649	76%	1,748	100%	1,852	100%	8,04	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
1	1	1	7	Program persandian untuk pengamanan informasi				0,757		0,918		0,989		1,049		1,111		4,83	Dinas Komunikasi Informasi		

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)				Satuan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																Kondisi Awal		2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Akhir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																		target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)			target	Rp (Milyar)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1				2				3				4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																								
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)				Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
										Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
											target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	
1				2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Manajemen																				Pendidikan dan Pelatihan Daerah
					1	Persentase Pelayanan Managemen ASN tepat waktu				%	100%	100%	0,637	100%	0,772	100%	0,832	100%	0,882	100%	0,935	100%	4,06	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
					2	Persentase penurunan Kasus Kasus Indisipliner aparatur				%	100%	100%	0,424	100%	0,515	100%	0,555	100%	0,588	100%	0,623	100%	2,71	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	1	1	10	Program Pengelolaan pegawai dan dukungan manajemen									1,326		1,609		1,733		1,838		1,947		8,45	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
					1	Persentse ASN yang mengikuti Pendidkan untuk peningkatan Kompetensi				%	100%	100%	0,663	100%	0,805	100%	0,867	100%	0,919	100%	0,974	100%	4,23	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
					2	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan sesuai Kompetensi				%	100%	100%	0,663	100%	0,805	100%	0,867	100%	0,919	100%	0,974	100%	4,23	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	1	1	11	Program Penyelenggaraan									0,603		0,732		0,788		0,836		0,885		3,84	Dinas Kearsipan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		target	Rp (Milyar)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Kedinasan Kearsipan Daerah															Daerah		
					1	Persentase pengelolaan Dinas Kearsipan Daerah inaktif	%	N/A	20%	0,151	40%	0,183	60%	0,197	80%	0,209	100%	0,221	100%	0,96	Dinas Kearsipan Daerah
					2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan Dinas Kearsipan Daerah secara baku	%	N/A	50%	0,151	54%	0,183	58%	0,197	63%	0,209	67%	0,221	67%	0,96	Dinas Kearsipan Daerah
					3	Penambahan khasanah Dinas Kearsipan Daerah statis pada depo Dinas Kearsipan Daerah	jumlah	N/A	2	0,151	5	0,183	8	0,197	12	0,209	15	0,221	15	0,96	Dinas Kearsipan Daerah
					4	Persentase peningkatan layanan informasi keDinas Kearsipan Daerahan	%	N/A	5%	0,151	20%	0,183	30%	0,197	40%	0,209	50%	0,221	50%	0,96	Dinas Kearsipan Daerah
1	1	1	12	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen						140,199		170,111		183,251		194,284		205,83		893,67	Kecamatan
					1	Persentase LPM Aktif	%	100%	100%	20,028	100%	24,302	100%	26,179	100%	27,755	100%	29,404	100%	127,67	Kecamatan
					2	Persentase PKK aktif	%	100%	100%	20,028	100%	24,302	100%	26,179	100%	27,755	100%	29,404	100%	127,67	Kecamatan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3	Posyandu Aktif	%	75%	80%	20,028	85%	24,302	90%	26,179	95%	27,755	100%	29,404	100%	127,67	Kecamatan
				4	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	12%	15%	20,028	18%	24,302	21%	26,179	26%	27,755	30%	29,404	30%	127,67	Kecamatan
				5	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan	%	100%	100%	20,028	100%	24,302	100%	26,179	100%	27,755	100%	29,404	100%	127,67	Kecamatan
				6	Tersedianya Monografi RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui	%	100%	100%	20,028	100%	24,302	100%	26,179	100%	27,755	100%	29,404	100%	127,67	Kecamatan
				7	Persentase kenaikan jumlah masyarakat yang mengikuti event sosial kemasyarakatan	%	80%	80%	20,028	80%	24,302	85%	26,179	85%	27,755	85%	29,404	85%	127,67	Kecamatan
				8	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	100%	100%	40,057	100%	48,603	100%	52,357	100%	55,51	100%	58,808	100%	255,34	Kecamatan
1	1	1	13		Program formulasi penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi				4,615		5,6		6,033		6,396		6,776		29,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				1	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	91%	100%	0,385	100%	0,467	100%	0,503	100%	0,533	100%	0,565	100%	2,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100%	100%	0,385	100%	0,467	100%	0,503	100%	0,533	100%	0,565	100%	2,45	Badan Perencanaan Pembangunan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																		
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																	Daerah	
																	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																			
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir				
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			7	Persentase kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100%	100%	0,385	100%	0,467	100%	0,503	100%	0,533	100%	0,565	100%	2,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			8	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan sektoral bidang pembangunan manusia dan masyarakat	%	N/A	30%	0,385	40%	0,467	50%	0,503	60%	0,533	70%	0,565	70%	2,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			9	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu dan tepat aturan	%	100%	100%	0,385	100%	0,467	100%	0,503	100%	0,533	100%	0,565	100%	2,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			10	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan sektoral bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	N/A	30,00 %	0,385	40,00 %	0,467	50,00 %	0,503	60,00 %	0,533	70,00 %	0,565	70,00 %	2,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			11	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan sektoral bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	N/A	30,00 %	0,385	40,00 %	0,467	50,00 %	0,503	60,00 %	0,533	70,00 %	0,565	70,00 %	2,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			12	Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan	%	100%	100%	0,385	100%	0,467	100%	0,503	100%	0,533	100%	0,565	100%	2,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
								Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
									target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1	1	14	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						0,948		1,15		1,239		1,314		1,392		6,04	Inspektorat Kota
					1	Perangkat Daerah yang akuntabilitasnya baik (kategori B ke atas)	%	N/A	74%	0,379	77%	0,46	79%	0,496	80%	0,525	82%	0,557	82%	2,42	Inspektorat Kota
					2	Tindak lanjut temuan Eksternal	%	N/A	85%	0,284	85%	0,345	90%	0,372	90%	0,394	95%	0,417	95%	1,81	Inspektorat Kota
					3	Tindak lanjut temuan Internal	%	N/A	71%	0,284	75%	0,345	75%	0,372	80%	0,394	80%	0,417	80%	1,81	Inspektorat Kota
1	1	1	15	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						0,474		0,575		0,619		0,657		0,696		3,02	Inspektorat Kota
					1	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	N/A	3	0,474	3	0,575	3	0,619	3	0,657	3	0,696	3	3,02	Inspektorat Kota
1	1	1	16	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan						0,948		1,15		1,239		1,314		1,392		6,04	Inspektorat Kota
					1	Perangkat daerah yang maturitas SPIP level terdefinisi	Jumlah	N/A	16	0,474	17	0,575	18	0,619	19	0,657	20	0,696	20	3,02	Inspektorat Kota
					2	Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK	Jumlah	0	1	0,474	2	0,575	3	0,619	4	0,657	5	0,696	5	3,02	Inspektorat Kota

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
								Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
									target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					3	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WTP	WTP	2,765	WTP	3,355	WTP	3,614	WTP	3,832	WTP	4,06	WTP	17,626	
1	1	1	17	Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah dan Perbendaharaan Daerah						2,765		3,355		3,614		3,832		4,06		17,63	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					1	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Nilai	A	A	0,415	A	0,503	A	0,542	A	0,575	A	0,609	A	2,64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					2	Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	%	100%	100%	0,415	100%	0,503	100%	0,542	100%	0,575	100%	0,609	100%	2,64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					3	Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu	%	100%	100%	0,415	100%	0,503	100%	0,542	100%	0,575	100%	0,609	100%	2,64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					4	Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD	%	100%	100%	0,553	100%	0,671	100%	0,723	100%	0,766	100%	0,812	100%	3,53	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					5	Bidang tanah milik pemkot yang bersertifikat	Sertifikat	241	15	0.553	20	0.671	25	0.723	30	0.766	35	0.812	366	3.53	Badan Pengelolaan Keuangan dan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																									
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)				Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
										Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir				
											target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)		
1				2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																									Aset Daerah
					6	Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM yang Diterima	%	100%	100%	0.415	100%	0.503	100%	0.542	100%	0.575	100%	0.609	100%	2.64					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					d	Persentase Peningkatan PAD	%	1,999,018, 742,158.68	35.12 %	15.857	11.67 %	19.239	11.57 %	20.727	10.57 %	21.975	10.89 %	23.281	4,125, 916,97 2,944. 80	101.079					Badan Pendapatan Daerah
1	1	1	18	Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.727		4.520		4.872		5.165		5.472		23.750					Badan Pendapatan Daerah
					1	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah	%	693.072	1%	0.559	1%	0.678	1%	0.731	1%	0.775	1%	0.821	728.42 6	3.56					Badan Pendapatan Daerah
					2	Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	43.04%	55.29 %	0.559	56.81 %	0.678	58.29 %	0.731	59.54 %	0.775	60.85 %	0.821	60.85 %	3.56					Badan Pendapatan Daerah
					3	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	%	627.923	91%	0.466	92%	0.565	93%	0.609	94%	0.646	95%	0.684	95%	2.97					Badan Pendapatan Daerah
					4	Persentase Pajak Parkir terhadap PAD	%	1.70%	3.70%	0.279	3.90%	0.339	4.10%	0.365	4.30%	0.387	4.50%	0.41	4.50%	1.78					Badan Pendapatan Daerah
					5	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah	%	100%	100%	0.932	100%	1.13	100%	1.218	100%	1.291	100%	1.368	100%	5.94					Badan Pendapatan Daerah

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		target	Rp (Milyar)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					6	Persentase Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sesuai SOP	%	90%	100%	0.932	100%	1.13	100%	1.218	100%	1.291	100%	1.368	100%	5.94	Badan Pendapatan Daerah
1	1	1	19	Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD						12.13		14.719		15.855		16.81		17.809		77.32	Sekretariat Daerah (Bag, Perekonomian)
					1	Jumlah BUMD Dalam Kondisi Sehat	jumlah	5	6	6.065	7	7.359	7	7.928	7	8.405	8	8.905	8	38.66	Sekretariat Daerah (Bag, Perekonomian)
					2	Persentase Peningkatan Deviden BUMD	%	12,086,694,279	2%	6.065	2%	7.359	3%	7.928	3%	8.405	4%	8.905	4%	38.66	Sekretariat Daerah
					e	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik		78.33	80.26	50.033	82.19	60.707	84.12	65.396	86.05	69.334	87.89	73.452	87.89	318.92	
1	1	1	20	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen						40,057		48,603		52,357		55,51		58,808		255,34	KECAMATAN
					1	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	100%	100%	40,057	100%	48,603	100%	52,357	100%	55,51	100%	58,808		255,34	KECAMATAN
1	1	1	21	Program Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						0,255		0,31		0,334		0,354		0,375		1,63	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																							
Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)				Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab				
									Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
										target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	
1			2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					1	Persentase penerbitan Perizinan Bidang Jasa Usaha sesuai SOP			%	98,96%	100,00 %	0,128	100%	0,155	100%	0,167	100%	0,177	100%	0,187	100%	0,81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					2	Persentase Penerbitan Perizinan Bidang Pembangunan sesuai SOP			%	99,88%	100%	0,128	100%	0,155	100%	0,167	100%	0,177	100%	0,187	100%	0,81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	1	1	22	Program Pengolahan Data Informasi Perizinan dan Investasi								0,128		0,155		0,167		0,177		0,187		0,81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					1	Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi			%	43%	100%	0,128	100%	0,155	100%	0,167	100%	0,177	100%	0,187	100%	0,81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	1	1	23	Program Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								0,191		0,232		0,25		0,265		0,281		1,22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																		
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1	1	1	24	Program Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil														
																	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
																	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
																	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
																	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
																	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				6	Cakupan Kepemilikan akte perkawinan	%	N/A	60,31 %	0,116	60,50 %	0,141	60,55 %	0,152	60,63 %	0,161	60,71 %	0,171	60,71 %	0,74	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				7	Cakupan kepemilikan akte kematian	%	N/A	64,23 %	0,116	64,24 %	0,141	64,26 %	0,152	64,28 %	0,161	64,32 %	0,171	64,32 %	0,74	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2				MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai																
2	1			a	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel	Indeks Infrastruktur wilayah	Nilai	N/A	27,93	1091,63	27,93	1324,55	27,93	1426,86	27,93	1512,76	27,93	1602,66	27,93	6958,46
2	1	1		a	Meningkatnya ketersediaan prasarana, yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel	Indeks Prasarana wilayah	Nilai	44,09	50,01	698,737	51,44	847,821	55,07	913,308	55,21	968,296	56,75	1025,836	4453,998	
2	1	1	1		Program Pengelolaan Jalan				239,552		290,663		313,114		331,966		351,694		1526,99	Dinas Bina Marga &

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																								
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)			Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab					
									Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir			
										target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target			Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	
1				2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																								Sumber Daya Air
						1	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	96%	96%	143,731	97%	174,398	98%	187,869	99%	199,179	100%	211,016	100%	916,19			Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
						2	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	70%	70%	71,866	75%	87,199	80%	93,934	85%	99,59	90%	105,508	90%	458,1			Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
						3	Persentase Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difable dan lansia	%	40%	40%	23,955	42%	29,066	45%	31,311	47%	33,197	50%	35,169	50%	152,7			Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
2	1	1	2	Program Perlengkapan Jalan							6,396		7,760		8,360		8,863		9,389		40,770			Dinas Perhubungan
						1	Persentase terbangunnya jalur sepeda	%	30%	30%	1,599	32%	1,94	35%	2,09	37%	2,216	40%	2,347	40%	10,19			Dinas Perhubungan
						2	persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik	%	60%	60%	4,797	70%	5,82	80%	6,27	85%	6,647	92%	7,042	92%	30,58			Dinas Perhubungan
2	1	1	3	Program Pengelolaan Sistem Drainase							107,799		130,798		140,901		149,385		158,262		687,15			Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
						1	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm) selama 2 Jam	%	70%	70%	64,679	75%	78,479	80%	84,541	85%	89,631	90%	94,957	90%	412,29			Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					lebih dari 2 kali setahun															
					2 persentase drainase (dengan konsep ecodrainage/resapan) dalam kondisi baik	%	10%	15%	25,872	20%	31,392	25%	33,816	30%	35,852	35%	37,983	35%	164,91	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
2	1	1	4	Program Pengelolaan Dekorasi Kota				2,806		3,405		3,668		3,888		4,119		17,89	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
					1 Persentase pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman	%	13%	14%	1,122	15%	1,362	16%	1,467	17%	1,555	18%	1,648	18%	7,15	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					2 Persentase pembangunan penataan dan pemeliharaan reklame	%	40%	60%	0,842	80%	1,021	100%	1,1	100%	1,167	100%	1,236	100%	5,37	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					3 Persentase pembangunan pemeliharaan PJU	%	80%	85%	0,842	85%	1,021	92%	1,1	97%	1,167	100%	1,236	100%	5,37	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
2	1	1	5	Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik				22,171		26,901		28,979		30,724		32,549		141,32	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	Persentase pencapaian Kapasitas pengolahan SPALD-S 169000 m3	%	20%	20%	5,543	20%	6,725	30%	7,245	30%	7,681	100%	8,137	100%	35,33	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				2	Persentase pencapaian 6560 unit tengki septik	%	4%	9%	5,543	15%	6,725	30%	7,245	30%	7,681	15%	8,137	100%	35,33	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				3	Persentase pencapaian penambahan hingga 800 SPALD-R Skala permukiman	%	19%	0%	5,543	25%	6,725	25%	7,245	25%	7,681	25%	8,137	2819%	35,33	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				4	Persentase pencapaian 8000 unit SPALD-R Skala kawasan	%	0%	0%	5,543	38%	6,725	38%	7,245	13%	7,681	13%	8,137	2819%	35,33	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2116	Program Pengelolaan Sampah							26,097		31,666		34,111		36,165		38,314		166,35		
				1	Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	24,94%	26%	2,565	27%	3,113	28%	3,353	29%	3,555	30%	3,766	30%	16,35	Dinas Lingkungan Hidup
				2	Persentase pencapaian target tambahan 10 unit Sarana dan Prasarana persampahan terbangun	%	9%	10%	15,836	10%	19,215	30%	20,699	30%	21,945	20%	23,25	100%	100,95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman &

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																				Pertanahan	
					3	Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Point	71.72	73	3.078	73	3.735	73	4.024	73	4.266	73	4.519	73	19.62	Dinas Lingkungan Hidup
					4	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	67,15%	74%	2,565	70%	3,113	64%	3,353	63%	3,555	62%	3,766	62%	16,35	Dinas Lingkungan Hidup
					5	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	70%	100%	2,052	100%	2,49	100%	2,682	100%	2,844	100%	3,013	100%	13,08	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	7	Program Pengendalian Fasilitas Parkir					1,599		1,94		2,09		2,216		2,347		10,19	Dinas Perhubungan	
					1	Persentase pencapaian perencanaan smart parking terpadu	%	N/A	-	0,799	25%	0,97	25%	1,045	25%	1,108	25%	1,174	100%	5,1	Dinas Perhubungan
					2	Persentase pelaksanaan penertiban parkir	%	N/A	-	0,799	25%	0,97	25%	1,045	25%	1,108	25%	1,174	100%	5,1	Dinas Perhubungan
2	1	1	8	Program Pencegahan Kebakaran					0,897		1,089		1,173		1,244		1,317		5,72	Dinas Pemadam Kebakaran	
					1	Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran (BALAKR)	%	30%	40%	0,449	50%	0,544	60%	0,586	70%	0,622	75%	0,659	75%	2,86	Dinas Pemadam Kebakaran
					2	Persentase pencapaian layanan 128 publikasi pencegahan dan	%	25,80%	11,70 %	0,449	15,60 %	0,544	15,60 %	0,586	15,60 %	0,622	15,60 %	0,659	294,30 %	2,86	Dinas Pemadam Kebakaran

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
						Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir				
							target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	1	1	9	Program Peralatan Proteksi Kebakaran				0,538		0,653		0,704		0,746		0,79		3,43	Dinas Pemadam Kebakaran		
					1	Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	%	15%	25%	0,538	35%	0,653	40%	0,704	45%	0,746	50%	0,79	50%	3,43	Dinas Pemadam Kebakaran
2	1	1	10	Program Penyelidikan Kebakaran				0,538		0,653		0,704		0,746		0,79		3,43	Dinas Pemadam Kebakaran		
					1	Persentase layanan pendataan dan inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	%	73%	78%	0,538	83%	0,653	88%	0,704	93%	0,746	100%	0,79	100%	3,43	Dinas Pemadam Kebakaran
2	1	1	11	Program Dampak Bahan Kebakaran Dan Beracun Akibat Kebakaran				0,718		0,871		0,938		0,995		1,054		4,58	Dinas Pemadam Kebakaran		
					1	Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran	%	73%	75%	0,359	77%	0,436	79%	0,469	80%	0,497	81%	0,527	81%	2,29	Dinas Pemadam Kebakaran
					2	Jumlah layanan penyelamatan evaluasi operasi non kebakaran (kali)	Jumlah	136	138	0,359	140	0,436	142	0,469	144	0,497	145	0,527	145	2,29	Dinas Pemadam Kebakaran

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																						
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab				
								Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
									target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
21112				Program Pengendalian Pemanfaatan Dan Penguasaan Tanah							15,836		19,215		20,699		21,945		23,25		100,95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					1	Persentase Pemenuhan 279.490 M2 pengadaan tanah		%	0%	23%	15,836	20%	19,215	20%	20,699	18%	21,945	19%	23,25	100%	100,95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
21113				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan							12,669		15,372		16,559		17,556		18,6		80,76	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					1	Persentase selesainya 40 sengketa tanah pada tahun 2023		%	0%	20%	12,669	20%	15,372	20%	16,559	20%	17,556	20%	18,6	100%	80,76	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
212				Meningkatnya ketersediaan sarana yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel	a	Indeks Sarana wilayah		Nilai	17,04	16,36	261,121	23,86	316,835	20,08	341,308	19,54	361,857	21,13	383,361		1664,47	
2121				Program Pendidikan Dasar							62,238		75,517		81,35		86,247		91,373		396,72	DISDIK/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman &

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																			Pertanahan		
					1	Persentase ketersediaan 1119 RKB sebagai prasarana pendidikan dasar yang representatif	%	7%	7%	62,238	21%	75,517	24%	81,35	23%	86,247	25%	91,373	100%	396,72	DISDIK/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2122	2	2	2			Program UKP Rujukan				71,827		87,152		93,884		99,536		105,451		457,85	
					1	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	34%	11%	35,913	22%	43,576	22%	46,942	22%	49,768	23%	52,726	100%	228,92	Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
					2	Persentase Ketersediaan 6 gedung RS Type D pada tahun 2023	%	14,29%	14%	35,913	29%	43,576	14%	46,942	14%	49,768	14%	52,726	86%	228,92	Dinas Kesehatan/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2123	2	1	2	3		Program Sarana Distribusi Perdagangan				16,147		19,592		21,105		22,376		23,706		102,93	Dinas Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					1	Persentase Ketersediaan 4 gedung perdagangan pada tahun 2023	%	0%	0%	16,147	25%	19,592	25%	21,105	25%	22,376	25%	23,706	100%	102,93	Dinas Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2124						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah				25,688		31,169		33,577		35,598		37,714		163,75	
					1	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	50%	60%	5,138	65%	6,234	70%	6,715	75%	7,12	80%	7,543	80%	32,75	Dinas Tata Ruang/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
					2	Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota	Jumlah	3	3	5,138	3	6,234	3	6,715	3	7,12	3	7,543	40,206	32,75	Dinas Tata Ruang
					3	Jumlah Rencana Penataan Kawasan Strategis Kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Jumlah	1	1	5,138	1	6,234	1	6,715	1	7,12	1	7,543	5	32,75	Dinas Tata Ruang

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				4	Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	%	17%	17%	2,569	17%	3,117	17%	3,358	17%	3,56	17%	3,771	100%	16,37	Dinas Tata Ruang
				5	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	%	11%	0,002 %	7,706	0,002 %	9,351	0,002 %	10,073	0,002 %	10,679	0,002 %	11,314	11,10 %	49,12	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air/Dinas Tata Ruang
2	1	2	5		Program Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis				19,003		23,058		24,839		26,334		27,899		121,13	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				1	Persentase cakupan ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	21%	21%	9,502	53%	11,529	16%	12,419	7%	13,167	2%	13,95	100%	60,57	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				2	Persentase Ketersediaan 1 Krematorium, forensik dan rumah duka pada tahun 2020	%	0%	0%	9,502	100%	11,529	0%	12,419	0%	13,167	0%	13,95	100%	60,57	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2	1	2	6		Program Pengembangan PSU Umum				6,651		8,07		8,694		9,217		9,765		42,4	
				1	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	%	35,70%	35,70 %	6,651	40%	8,07	43%	8,694	47%	9,217	51%	9,765	51%	42,4	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir	
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		target	Rp (Milyar)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2127	Program Pengelolaan Angkutan Umum							1,599		1,94		2,09		2,216		2,347		10,19	Dinas Perhubungan/ BUMD	
				1	Jumlah sarana prasarana angkutan publik massal terintegrasi yang terbangun	Jumlah	1	0	0,799	0	0,97	1	1,045	1	1,108	1	1,174	4	5,1	Dinas Perhubungan/ BUMD
				2	Persentase sarana transportasi city tourism yang terbangun	%	0%	0%	0,799	0%	0,97	33%	1,045	33%	1,108	33%	1,174	100%	5,1	Dinas Perhubungan
2128	Program Pengelolaan Dan Rekayasa Lalu Lintas							1,199		1,455		1,567		1,662		1,761		7,64	Dinas Perhubungan	
				1	Persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	%	5%	5%	0,6	10%	0,728	10%	0,784	10%	0,831	10%	0,88	45%	3,82	Dinas Perhubungan
				2	Persentase pembinaan, pengendalian dan penindakan lalu lintas	%	0%	5%	0,6	10%	0,728	10%	0,784	10%	0,831	10%	0,88	45%	3,82	Dinas Perhubungan
2129	Program Pengendalian Uji Kendaraan Bermotor							1,199		1,455		1,567		1,662		1,761		7,64	Dinas Perhubungan	
				1	Persentase kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor	%	100%	100%	1,199	100%	1,455	100%	1,567	100%	1,662	100%	1,761	100%	7,64	Dinas Perhubungan
21210	Program Pengelolaan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Umum							3,997		4,85		5,225		5,539		5,869		25,48	Dinas Perhubungan	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																						
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
								Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Akhir	
									target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)			target	Rp (Milyar)
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					1	Persentase peningkatan fasilitas penunjang transportasi	%	5%	5%	3,997	5%	4,85	5%	5,225	20%	5,539	25%	5,869	60%	25,48	Dinas Perhubungan	
2	1	2	11	Program Pengembangan Perumahan						28,505		34,587		37,258		39,502		41,849		181,7	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
					1	Persentase rehabilitasi 3095 rumah tidak layak huni pada tahun 2023	%	32%	32%	14,253	16%	17,293	16%	18,629	19%	19,751	16%	20,925	100%	90,85	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
					2	Cakupan ketersediaan rusunawa	Jumlah	2	1	14,253	1	17,293	1	18,629	1	19,751	1	20,925	5	90,85	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
2	1	2	12	Program Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh*						22,171		26,901		28,979		30,724		32,549		141,32	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
					1	Persentase Peningkatan kualitas lingkungan layak huni	%	24%	24%	22,171	28%	26,901	16%	28,979	16%	30,724	16%	32,549	100%	141,32	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																		
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
21213	Program Dampak Bahan Kebakaran Dan Beracun Akibat Kebakaran					0,897		1,089		1,173		1,244	60%	1,317		5,72	Dinas Pemadam Kebakaran	
		1	Persentase penyediaan sarana pemadaman kebakaran dan penyelematan	%	17%	25%	0,897	32%	1,089	39%	1,173	46%	1,244	53%	1,317	53%	5,72	Dinas Pemadam Kebakaran
213	Meningkatnya ketersediaan utilitas yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel	a	Indeks Utilitas wilayah	Nilai	17,33	17,95	131,776	34,5	159,891	39,49	172,241	44,19	182,611	48,07	193,464		839,99	
2131	Program Pengembangan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum					38,007		46,116		49,678		52,669		55,799		242,27	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
		1	Persentase rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan psu	%	19%	19%	38,007	22%	46,116	22%	49,678	22%	52,669	15%	55,799	100%	242,27	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2132	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum					22,171		26,901		28,979		30,724		32,549		141,32	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1	Persentase pelayanan 12800 SR air bersih non PDAM		%	26%	14%	11,085	16%	13,45	20%	14,489	23%	15,362	27%	16,275	100%	70,66	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				2	Persentase pelayanan 35000 SR air bersih PDAM		%	77%	14%	11,085	19%	13,45	21%	14,489	23%	15,362	23%	16,275	100%	70,66	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan/BU MD
2133					Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis					71,598		86,874		93,584		99,218		105,116		456,4	
				1	Persentase sistem Utilitas terpadu (ducting) yang terbangun		%	5%	10%	19,963	15%	24,222	20%	26,093	25%	27,664	30%	29,308	30%	127,25	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air/ BUMD
				2	persentase titik PJU dalam kondisi baik		%	85%	85%	19,963	92%	24,222	97%	26,093	100%	27,664	100%	29,308	100%	127,25	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				3	Persentase jaringan gas rumah tangga yang terpasang		%	1%	1%	15,836	1%	19,215	1%	20,699	1%	21,945	1%	23,25	5%	100,95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan/BU MD

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir					
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4		Persentase pengembangan jaringan gas rumah tangga melalui BUMD	%	1%	1%	15,836	1%	19,215	1%	20,699	1%	21,945	1%	23,25	5%	100,95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan/BU MD
		MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing												0		0		0		
3	1	Memperkuat struktur perkonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif,	a		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,73%	5,73%	9,672	5,90%	11,735	6,10%	12,642	6,30%	13,4	6,50%	14,195	6,50%	61,644	
3	1	1	a		Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	%	Rp,10.460.053.504.800,-	10% (Rp. 11.506.058.855.280,-)	0,701	10% (Rp.12.656.664.740.808,00)	0,851	10% (Rp. 13.922.331.214.888,80)	0,917	10% (Rp. 15.314.564.336.377,70)	0,972	10% (Rp. 16.846.020.770.015,40)	1,03	Rp. 16,846.020.770.015,40	4,471	
3	1	1	1		Program Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal				0,191		0,232		0,25		0,265		0,281		1,22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1		Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM	%	Rp. 6.372.571.600.000,00	10% (Rp. 7.009.828.760.000,00)	0,191	10% (Rp. 7.710.811.636.000,00)	0,232	10% (Rp.8.481.892.799.600,00)	0,25	10% (Rp.9.330.082.079.560,00)	0,265	10% (Rp.10.263.090.287.516,00)	0,281	Rp.10.263.090.287.516,00	1,22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																		
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3112	Program Promosi Penanaman Modal					0,319		0,387		0,417		0,442		0,468		2,03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1	Persentase Kenaikan Penanaman Modal Berdasarkan Perizinan Usaha dan Penyertaan Modal	%	Rp. 4.087.481. 904.800,00	10% (Rp. 4.496. 230.09 5.280, 00)	0,319	10% (Rp.4.9 45.853 .104.8 08,00)	0,387	10% (Rp.5.4 40.438 .415.2 88,80)	0,417	10% (Rp.5.9 84.482 .256.8 17,68)	0,442	10% (Rp.6.5 82.930 .482.4 99,45)	0,468	Rp.6.5 82.930 .482.4 99,45	2,03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3113	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					0,191		0,232		0,25		0,265		0,281		1,22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1	Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	397 Perusahaa n	25%	0,191	38%	0,232	48%	0,25	57%	0,265	65%	0,281	65%	1,22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
312	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif		Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif	%	N/A	N/A	4,09	5%	4,961	7%	5,345	11%	5,665	15%	6	15%	26,061	
3121	Program Promosi Pariwisata					0,502		0,609		0,656		0,695		0,736		3,2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																								
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)				Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
										Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
											target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	
1				2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					1	Jumlah kawasan wisata yang ditata				Lokasi	2	1	0.351	1	0.426	1	0.459	1	0.487	1	0.515	7	2.24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					2	Persentase peningkatan usaha/jasa kepariwisataan yang berizin				%	1200 pelaku usaha	40%	0.15	10%	0.183	10%	0.197	10%	0.209	10%	0.221	2460 pelaku usaha	0.96	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	1	2	2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata									0.502		0.609		0.656		0.695		0.736		3.2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					1	Jumlah kunjungan wisatawan				Orang	907729	925883	0.502	944400	0.609	963288	0.656	982553	0.695	1002204	0.736	1002204	3.2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	1	2	3	Program Cagar Budaya									1.254		1.522		1.639		1.738		1.841		7.99	
					1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan				Situs	8	3	0.502	3	0.609	4	0.656	4	0.695	5	0.736	27	3.2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					2	Museum kebudayaan yang dibangun				Museum	0	0	0.752	0	0.913	0	0.983	0	1.043	1	1.105	1	4.8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	1	2	4	Program Pengembangan Kesenian									0.251		0.304		0.328		0.348		0.368		1.6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					1	Jumlah Penyelenggaraan event bekasi kreatif				Event	6	8	0.251	10	0.304	12	0.328	14	0.348	16	0.368	16	1.6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	1	2	5	Program Pengembangan Industri Kecil dan									0.622		0.754		0.813		0.861		0.913		3.96	Dinas Perdagangan dan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																						
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
								Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Akhir	
									target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)			target	Rp (Milyar)
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Menengah																Perindustrian		
					1	Jumlah Industri kreatif yang memiliki legalitas	Unit	789	813	0.186	837	0.226	862	0.244	888	0.258	915	0.274	915	1.19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
					2	Terbangunnya Technopark Kota Bekasi	Unit	N/A	N/A	0.435	1	0.528	0	0.569	0	0.603	0	0.639	1	2.77	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	1	2	6	Program Pengembangan UMKM						0.479		0.581		0.626		0.664		0.703		3.05	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					1	Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil	%	2,086 usaha mikro	2%	0.144	2%	0.174	2%	0.188	2%	0.199	2%	0.211	216 usaha kecil	0.92	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					2	Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif	%	1000 unit	10%	0.192	10%	0.233	10%	0.251	10%	0.266	10%	0.281	1500 unit	1.22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					3	Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	%	NA	5%	0.144	15%	0.174	15%	0.188	15%	0.199	10%	0.211	360 PKL	0.92	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3	1	2	7	Program Penjaminan kesehatan koperasi						0.192		0.233		0.251		0.266		0.281		1.22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					1	Persentase koperasi aktif	%	612 koperasi	3%	0.192	3%	0.233	4%	0.251	4%	0.266	4%	0.281	722 kopera si	1.22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
								Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
									target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	2	8	Program Pemberdayaan koperasi						0.288		0.349		0.376		0.398		0.422		1.83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					1	Peningkatan Skala Usaha Koperasi	Koperas i	NA	2	0.288	2	0.349	2	0.376	2	0.398	2	0.422	10 Kopera si	1.83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	1	3		Memperkuat daya saing sektor perdagangan dan jasa	a	Persentase peningkatan nilai sektor perdagangan dan jasa	%	Rp. 32.482.110,00 juta (th 2017)*	6%	2,177	6%	2,639	6%	2,845	6%	3,014	6%	3,195	Rp. 46.076.493,84 Juta *	13,87	
3	1	3	1	Program Pengendalian Ketersediaan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						0,622		0,754		0,813		0,861		0,913		3,96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					1	Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	%	<1,5%	<1,5%	0.622	<1,5%	0.754	<1,5%	0.813	<1,5%	0.861	<1,5%	0.913	<1,5%	3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	1	3	2	Program Metrologi Legal						0.622		0.754		0.813		0.861		0.913		3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					1	Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	Unit	18000	18900	0.622	19845	0.754	20341	0.813	21370	0.861	21904	0.913	21904	3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir	
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		target	Rp (Milyar)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3133	Program Sarana Distribusi Perdagangan							0.622		0.754		0.813		0.861		0.913		3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
				1	Jumlah pasar rakyat yang berbasis modern	Pasar	5	7	0.622	9	0.754	10	0.813	11	0.861	12	0.913	12	3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3134	Program Promosi dan Kampanye Pencitraan Produk Ekspor							0.311		0.377		0.406		0.431		0.456		2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
				1	Nilai Ekspor	US Dollar	263,574,932	266,210,681	0.311	268,872,788	0.377	271,561,516	0.406	274,277,131	0.431	277,019,902	0.456	277,019,902	2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
314	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat				Indeks Daya Beli	Nilai	83,29	84,01	2,704	84,37	3,284	84,73	3,535	85,09	3,749	85,45	3,97	85,45	17,242	
3141	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							0,174		0,212		0,228		0,242		0,256		1,11	Dinas Ketahanan Pangan	
				1	Stabilisasi harga pangan	%	17%	<5%	0,174	<5%	0,212	<5%	0,228	<5%	0,242	<5%	0,256	<5%	1,11	Dinas Ketahanan Pangan
3142	Program Kerawanan Pangan							0,174		0,212		0,228		0,242		0,256		1,11	Dinas Ketahanan Pangan	
				1	Persentase Penanganan kerawanan pangan	%	69,58%	73,76 %	0,174	77,76 %	0,212	81,85 %	0,228	85,94 %	0,242	90%	0,256	90%	1,11	Dinas Ketahanan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																		
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																	Pangan	
3143	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan					0,349		0,423		0,456		0,483		0,512		2,22	Dinas Ketahanan Pangan	
		1	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	69,07%	75,26 %	0,139	83,91 %	0,169	88,89 %	0,182	94,51 %	0,193	98%	0,205	98%	0,89	Dinas Ketahanan Pangan
		2	Persentase produk PAH yang ASUH	%	42,50%	42,93 %	0,209	43,35 %	0,254	43,79 %	0,273	44,23 %	0,29	50,00 %	0,307	50,00 %	1,33	Dinas Pertanian dan Perikanan
3144	Program Target Konsumsi Pangan					0,174		0,212		0,228		0,242		0,256		1,11	Dinas Ketahanan Pangan	
		1	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	86,70%	88%	0,174	89%	0,212	90%	0,228	91%	0,242	92%	0,256	92%	1,11	Dinas Ketahanan Pangan
3145	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					0,733		0,89		0,958		1,016		1,076		4,67		
		1	Produksi komoditas pertanian	Ton	51,220,01	52,244 ,40	0.22	53,289 ,29	0.267	54,355 ,07	0.287	55,442 ,17	0.305	56,551 ,00	0.323	56,551 ,00	1.4	Dinas Pertanian dan Perikanan
		2	Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	1,856,36	1,949, 18	0.147	2,046, 64	0.178	2,148, 97	0.192	2,256, 42	0.203	2,369, 24	0.215	2,369, 24	0.93	Dinas Pertanian dan Perikanan
		3	Jumlah produksi peternakan	Ton	15,118,00	15,420 ,00	0.147	15,728 ,00	0.178	16,042 ,00	0.192	16,362 ,00	0.203	16,689 ,00	0.215	16,689 ,00	0.93	Dinas Pertanian dan Perikanan
		4	Jumlah Produksi Ikan Hias	ekor	21,006,510 ,00	22,056 ,836,0 0	0.22	23,159 ,677,0 0	0.267	24,317 ,661,0 0	0.287	25,533 ,544,0 0	0.305	26,810 ,221,0 0	0.323	26,810 ,221,0 0	1.4	Dinas Pertanian dan Perikanan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir	
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		target	Rp (Milyar)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3146	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Pertanian, peternakan dan perikanan							0.733		0.89		0.958		1.016		1.076		4.67		
				1	Jumlah Produksi olahan hasil peternakan	Ton	3,511,24	3,582,24	0.44	3,653,88	0.534	3,726,96	0.575	3,801,50	0.61	3,877,24	0.646	3,877,24	2.8	Dinas Pertanian dan Perikanan
				2	Jumlah Produksi olahan hasil perikanan	Ton	82,745,20	86,882,46	0.293	91,226,58	0.356	95,787,91	0.383	100,577,31	0.406	105,606,17	0.431	105,606,17	1.87	Dinas Pertanian dan Perikanan
3147	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan							0.367		0.445		0.479		0.508		0.538		2.34		
				1	Terkendalnya penyakit hewan menular dan Zoonosis	Kasus	tidak ada	tidak ada	0.147	tidak ada	0.178	tidak ada	0.192	tidak ada	0.203	tidak ada	0.215	tidak ada	0.93	Dinas Pertanian dan Perikanan
				2	Unit usaha peternakan, kesehatan dan produk hewan yang bersertifikat teknis	unit	53	61	0.22	69	0.267	77	0.287	85	0.305	93	0.323	93	1.4	Dinas Pertanian dan Perikanan
4	MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif,																			
41	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia			a	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,33	80,93	638,242	81,23	774,419	81,53	834,236	81,83	884,459	82,13	937,026	80,35	4068,382	
411	Tercapainya Masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan			a	Indeks Pendidikan	Nilai	74,59	75,23	186,392	75,77	226,164	76,21	243,632	76,55	258,299	76,79	273,652	76,79	1188,139	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																								
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)				Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
										Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
											target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	
1				2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				inovatif																				
4	1	1	1	Program pendidikan dasar							86,468		104,919			113,022		119,827			126,949		551,185	Dinas Pendidikan
					1	APK SD MI	%	114,44	114	19,456	113,51	23,607	113,12	25,430	112,78	26,961	112,22	28,563	112,22	192,915				Dinas Pendidikan
					2	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	%	83,61	86	8,647	88	10,492	90	11,302	92	11,983	94	12,695	94	55,119				Dinas Pendidikan
					3	Rata rata Nilai USBN SD	Nilai	80,11	81	6,485	82	7,869	83	8,477	84	8,987	85	9,521	85	41,339				Dinas Pendidikan
					4	APK SMP/MTs	%	96,35	96,74	15,132	96,91	18,361	97,25	19,779	97,75	20,880	98	22,216	98	151,487				Dinas Pendidikan
					5	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Nilai	97,54	97,75	8,647	97,86	10,492	97,97	11,302	98,00	11,983	98,20	12,695	98,20	55,119				Dinas Pendidikan
					6	Rata rata Nilai UN SMP	Nilai	61,34	61,54	6,485	61,73	7,869	61,85	8,477	61,92	8,987	62	9,521	62	41,339				Dinas Pendidikan
					7	Jumlah prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional tingkat SD	Prestasi	25	26	6,485	27	7,869	28	8,477	29	8,987	30	9,521	30	41,339				Dinas Pendidikan
					8	Jumlah prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional tingkat SMP	Prestasi	25	26	6,485	27	7,869	28	8,477	29	8,987	30	9,521	30	41,339				Dinas Pendidikan
					9	Rasio Sekolah SD Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:4	12:5	0	12:6	0	12:7	0	12:8	0	12:9	0	12:9	0				Dinas Pendidikan
					10	Rasio Sekolah SMP Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:1	12:2	0	12:3	0	12:4	0	12:5	0	12:6	0	12:6	0				Dinas Pendidikan
					11	Rasio Siswa SD : Rombel (SPM 1:32)	Rasio	1:30	1:32	8,646	1:32	10,491	1:32	11,301	1:32	11,982	1:32	12,696	1:32	55,116				Dinas Pendidikan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir	
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		target	Rp (Milyar)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				12	Rasio Siswa SMP : Rombel (SPM 1:32)	Rasio	1:33	1:34	0	1:35	0	1:36	0	1:36	0	1:36	0	Dinas Pendidikan		
				13	Daya Tampung SD/MI (Negeri+Swasta)	%	112,83	108	0	106	0	103	0	101	0	100	0	Dinas Pendidikan		
				14	Daya Tampung SMP/MTs (Negeri+Swasta)	%	84,72	84,92	0	86,24	0	88,38	0	90,51	0	92,68	0	Dinas Pendidikan		
				15	Persentase SD memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)	%	66,52%	66,72 %	0	66,92 %	0	67%	0	67,20 %	0	67,40 %	0	Dinas Pendidikan		
				16	Persentase SD memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)	%	72,68%	72,88 %	0	73%	0	73,22 %	0	73,42 %	0	73,62 %	0	Dinas Pendidikan		
				17	Persentase SMP memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)	%	72%	72,50 %	0	73%	0	73,50 %	0	74%	0	74,50 %	0	Dinas Pendidikan		
				18	Persentase SMP memilki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)	%	84,73%	85%	0	85,50 %	0	86%	0	86,50 %	0	87%	0	Dinas Pendidikan		
				19	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD/SMP	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Pendidikan		
4112	Program Anak Usia Dini							21,617		26,229		28,255		29,956		31,737		137,793	Dinas Pendidikan	
				1	APK Paud (Usia 3-6)	%	55,69	56	7,206	57	8,743	58	9,418	59	9,985	60	10,579	60	45,931	Dinas Pendidikan
				2	Rasio Guru : Siswa PAUD	Rasio	1:7	1:8	7,206	1:8	8,743	1:8	9,418	1:8	9,985	1:8	10,579	1:8	45,931	Dinas Pendidikan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																							
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)			Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab				
									Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir		
										target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target			Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)
1				2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					3	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1 PAUD			%	18.96%	19%	7,206	19.2%	8,743	19.4%	9,418	19.6%	9,985	19.8%	10,579	19.8%	45,931	Dinas Pendidikan
					4	Rasio TK Negeri per Kecamatan			Rasio	12:3	12:4	0	12:5	0	12-6	0	12 : 7	0	12 :8	0	12:8	0	Dinas Pendidikan
					5	TK Terakreditasi			Rasio	20,2	20,4	0	21	0	21,6	0	22,2	0	22,8	0	22,8	0	Dinas Pendidikan
					6	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik PAUD			%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Pendidikan
4	1	1	3	Program Pendidikan non formal								21,617		26,229		28,255		29,956		31,737		137,79	
					1	Persentase LKP Berijin			%	54,71%	56,10 %	12,97	58,54 %	15,738	60,49 %	16,953	62,44 %	17,974	64,39 %	19,042	64,39 %	82,68	Dinas Pendidikan
					2	Persentase PKBM Terakreditasi			%	27,45%	29,16 %	8,647	33,43 %	10,492	35,97 %	11,302	36,11 %	11,983	38,04 %	12,695	38,04 %	55,12	Dinas Pendidikan
					3	Persentase Daya Tampung PKBM Terhadap siswa putus sekolah/tidak melanjutkan pendidikan			%	N/A	120	0	118	0	117	0	116	0	115	0	115	0	Dinas Pendidikan
					4	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan dasar anak usia pendidikan non formal			%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan
					5	Persentase Tutor dengan kualifikasi akademik D4/S1			%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan
4	1	1	4	Program Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan								32,425		39,345		42,383		44,935		47,605		206,693	Dinas Pendidikan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir	
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		target	Rp (Milyar)
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	%	59,31	59,64	12,97	59,92	15,738	60,21	16,953	60,54	17,974	60,76	19,042	60,76	82,677	Dinas Pendidikan
				2	Persentase guru dengan kualifikasi akademik minimal D4/S1 (SD, SMP)	%	95,98	96	6,485	96,05	7,869	96,1	8,477	96,15	8,987	96,2	9,521	96,2	41,339	Dinas Pendidikan
				3	Persentase Jumlah SD yang memiliki Tenaga Kependidikan	%	71,10%	78%	12,97	78,50 %	15,738	79%	16,953	79,50 %	17,974	80%	19,042	80%	82,677	Dinas Pendidikan
4	1	1	5	Program manajemen Pelayanan pendidikan					23,779		28,852		31,081		32,952		34,911		151,575	Dinas Pendidikan
				1	Cakupan Pelayanan Berbasis IT	%	4	5	2,162	6	2,623	7	2,826	8	2,996	9	3,174	9	13,781	Dinas Pendidikan
				2	Persentase peningkatan layanan pendidikan	%	12%	12%	3,243	12%	3,934	12%	4,238	12%	4,493	12%	4,761	12%	20,669	Dinas Pendidikan
				3	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan	%	64,45%	64,65 %	5,404	64,71 %	6,557	64,85 %	7,064	64,90 %	7,489	65,00 %	7,934	65,00 %	34,448	Dinas Pendidikan
				4	Persentase SD berakreditasi A	%	77,83%	89,85 %	6,485	90%	7,869	90,25 %	8,477	90,40 %	8,987	90,45 %	9,521	90,45 %	41,3385	Dinas Pendidikan
				5	Persentase SMP berakreditasi A	%	62,09%	76,85 %	6,485	77,00 %	7,869	77,30 %	8,477	77,75 %	8,987	80%	9,521	80%	41,3385	Dinas Pendidikan
4	1	1	6	Program Budaya Gemar Membaca					0,146		0,177		0,191		0,202		0,214		0,93	Dinas Perpustakaan
				1	Persentase Perpustakaan Aktif	%	N/A	2%	0,146	2%	0,177	2%	0,191	2%	0,202	2%	0,214	2%	0,93	Dinas Perpustakaan

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		target	Rp (Milyar)	
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4117	Program Pengembangan Perpustakaan								0,34		0,413		0,445		0,471		0,499		2,17		
					1	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	18,20%	35%	0,102	35%	0,124	35%	0,133	35%	0,141	35%	0,15	35%	0,65	Dinas Perpustakaan
					2	Persentase Perpustakaan yang terintegrasi sistem informasi perpustakaan	%	N/A	2%	0,102	2%	0,124	2%	0,133	2%	0,141	2%	0,15	2%	0,65	Dinas Perpustakaan
					3	Persentase keanekaragaman koleksi	%	33,16%	35%	0,136	40%	0,165	45%	0,178	50%	0,189	55%	0,2	55%	0,87	Dinas Perpustakaan
412	Tercapainya Masyarakat Kota bekasi yang sehat			a	Indeks Kesehatan	Nilai	75,21	75,39	438,557	75,57	532,129	75,75	573,229	75,93	607,74	76,11	643,857	76,11	2.795,51		
4121	Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan								23,3		28,271		30,455		32,288		34,207		148,52	Dinas Kesehatan	
					1	Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	%	58%	58%	23,3	60%	28,271	62%	30,455	64%	32,288	65%	34,207	65%	148,52	Dinas Kesehatan
4122	Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Rujukan								77,521		94,061		101,326		107,426		113,81		494,144		
					1	Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100%	100%	12,92	100%	15,677	100%	16,888	100%	17,904	100%	18,968	100%	82,357	Dinas Kesehatan
					2	persentase cakupan Pelayanan Kesehatan	%	100%	100%	21,534	100%	26,128	100%	28,146	100%	29,841	100%	31,614	100%	137,263	Dinas Kesehatan,

[illegible]

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Akhir	
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		target	Rp (Milyar)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					12	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Kesehatan	
					13	Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Kesehatan	
					14	Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Kesehatan	
					15	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Kesehatan	
					16	Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Kesehatan	
					17	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Dinas Kesehatan	
4123	Program Kefarmasian dan Alkes							69,9		84,814		91,365		96,865		102,622		445,57	Dinas Kesehatan	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1	persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	%	90%	90%	48,93	91%	59,37	92%	63,955	93%	67,806	95%	71,835	95%	311,9	Dinas Kesehatan
				2	persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	%	100%	100%	20,97	100%	25,444	100%	27,409	100%	29,06	100%	30,787	100%	133,67	Dinas Kesehatan
4	1	2	4	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan					99,312		120,502		129,809		137,625		145,803		633,05	
				1	persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas dan RS	%	60%	60%	24,522	60%	29,755	60%	32,053	60%	33,983	60%	36,002	60%	156,31	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
				2	persentase PKM Terakreditasi	%	47,62%	64,29 %	6,99	71,43 %	8,481	83,33 %	9,136	83,33 %	9,687	83,33 %	10,262	83,33 %	44,56	Dinas Kesehatan
				3	persentase RS Terakreditasi	%	100%	100%	14,897	100%	18,075	100%	19,471	100%	20,644	100%	21,871	100%	94,96	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
				4	Terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	Bulan	12	12	10,543	12	12,792	12	13,78	12	14,61	12	15,478	12	67,2	Rumah Sakit Umum Daerah
				5	IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B	%	80	80	10,543	81	12,792	81	13,78	82	14,61	82	15,478	82	67,2	Rumah Sakit Umum Daerah

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				6	persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan RS	%	100%	100%	31,818	100%	38,607	100%	41,589	100%	44,093	100%	46,713	100%	202,82	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
4	1	2	5		Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan			76,277		92,552		99,7		105,703		111,985		486,22	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
				1	persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	%	70%	70%	76,277	80%	92,552	100%	99,7	100%	105,703	100%	111,985	100%	486,22	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4	1	2	6		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan			92,247		111,929		120,574		127,833		135,43		588,01	Rumah Sakit Umum Daerah	
				1	Persentase terpenuhinya persyaratan minimal Rumah Sakit Kelas B	%	80%	82%	92,247	84%	111,929	86%	120,574	88%	127,833	90%	135,43	90%	588,01	Rumah Sakit Umum Daerah
4	1	3		a	Angka Kemiskinan		4,20%	N/A	7,637	4,10%	9,266	3,80%	9,983	3,70%	10,584	3,70%	11,214	3,70%	48,684	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																		
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4131	Program Pemberdayaan Sosial					0,687		0,833		0,898		0,952		1,008		4,38	Dinas Sosial	
		1	Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat dalam 1 (satu) Tahun	%	42	9	0,275	9	0,333	9	0,359	9	0,381	9	0,403	9	1,75	Dinas Sosial
		2	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah	1	1	0,137	1	0,167	1	0,18	1	0,19	1	0,202	1	0,88	Dinas Sosial
		3	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	Jumlah	285	5	0,137	6	0,167	7	0,18	8	0,19	9	0,202	9	0,88	Dinas Sosial
4132	Program Rehabilitasi Sosial					1,03		1,25		1,347		1,428		1,513		6,568		
		1	Persentase penyandang disabilitas telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100%	100%	0,2575	100%	0,3125	100%	0,3367	100%	0,357	100%	0,378	100%	1,642	Dinas Sosial
		2	Persentase anak telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100%	100%	0,2575	100%	0,3125	100%	0,3367	100%	0,357	100%	0,378	100%	1,642	Dinas Sosial
		3	Persentase lanjut usia telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100%	100%	0,2575	100%	0,3125	100%	0,3367	100%	0,357	100%	0,378	100%	1,642	Dinas Sosial
		4	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di	%	100%	100%	0,2575	100%	0,3125	100%	0,3367	100%	0,357	100%	0,378	100%	1,642	Dinas Sosial

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																		
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		luar panti																
4 1 3 3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					1,03		1,25		1,347		1,428		1,513		6,57		
		1 Tersedianya data dan informasi PMKS	Nilai	1	1	0,309	2	0,375	1	0,404	2	0,428	1	0,454	1	1,97	Dinas Sosial	
		2 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100%	0,721	100%	0,875	100%	0,943	100%	0,999	100%	1,059	100%	4,6	Dinas Sosial	
4 1 3 4	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					0,978		1,187		1,278		1,355		1,436		6,23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 Persentase Cakupan anggota Poktan yang ber KB,	%	N/A	75%	0,978	76%	1,187	77%	1,278	78%	1,355	79%	1,436	79%	6,23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
4 1 3 5	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					1,956		2,373		2,557		2,71		2,872		12,47	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		1 Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR bagi	%	75%	75%	1,956	76%	2,373	77%	2,557	78%	2,71	79%	2,872	79%	12,47	Dinas Pengendalian	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab			
						Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir				
							target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																			Penduduk dan Keluarga Berencana		
4136				Program Pengendalian Penduduk				0,489		0,593		0,639		0,678		0,718		3,12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					1	Persentase Cakupan data Mikro Keluarga	%	N/A	60%	0,489	70%	0,593	80%	0,639	90%	0,678	100%	0,718	100%	3,12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4137				Program Penigkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kepesertaan Ber-KB				1,467		1,78		1,917		2,033		2,154		9,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
					1	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	N/A	9%	1,467	7%	1,78	6%	1,917	5%	2,033	5%	2,154	5%	9,35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
414				Menurunnya angka pencari kerja	a	Angka Pencari Kerja	%	9.32	9.07	0.66	8.96	0.8	8.87	0.863	8.79	0.914	8.72	0.97	8.72	4.207	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																		
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4141	Program Peningkatan Kapasitas dan Produktifitas Tenaga Kerja					0,198		0,24		0,259		0,274		0,291		1,26	Dinas Tenaga Kerja	
		1	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	%	100%	100%	0,139	100%	0,168	100%	0,181	100%	0,192	100%	0,204	100%	0,88	Dinas Tenaga Kerja
		2	Persentase Pencari kerja yang memiliki setifikat keahlian	%	5%	5%	0,059	5%	0,072	5%	0,078	5%	0,082	5%	0,087	5%	0,38	Dinas Tenaga Kerja
4142	Program Penempatan Tenaga Kerja					0,198		0,24		0,259		0,274		0,291		1,26	Dinas Tenaga Kerja	
		1	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan,	%	9,72%	9,72%	0,198	17,52 %	0,24	23,34 %	0,259	23,63 %	0,274	23,28 %	0,291	23,28 %	1,26	Dinas Tenaga Kerja
4143	Program Hubungan Industrial					0,264		0,32		0,345		0,366		0,388		1,68	Dinas Tenaga Kerja	
		1	Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja	%	5%	5%	0,264	5%	0,32	5%	0,345	5%	0,366	5%	0,388	5%	1,68	Dinas Tenaga Kerja
415	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan	a	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Prestasi	N,A	10 TP, 2 TN	2,544	15 TP, 4 TN	3,086	20 TP, 6 TN	3,324	25 TP, 8 TN	3,524	30 TP, 10 TN, 1 TI	3,734	30 TP, 10 TN, 1 TI	16,212	
4151	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda					0,509		0,617		0,665		0,705		0,747		3,24		
		1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	51%	60%	0,254	70%	0,309	80%	0,332	90%	0,352	100%	0,373	100%	1,62	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2	Jumlah Komunitas Kreatif yang berperan dalam pembangunan	%	N/A	0%	0,254	20%	0,309	35%	0,332	50%	0,352	65%	0,373	65%	1,62	Dinas Pemuda dan Olahraga

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	1	5	2	Program Pengelolaan Olahraga Pendidikan					1,272		1,543		1,662		1,762		1,867		8,11		
					1	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	N/A	20%	0,509	20%	0,617	20%	0,665	20%	0,705	20%	0,747	20%	3,24	Dinas Pemuda dan Olahraga
					2	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	N/A	50%	0,763	55%	0,926	60%	0,997	65%	1,057	70%	1,12	70%	4,86	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	1	5	3	Program Pengelolaan Organisasi Olahraga					0,763		0,926		0,997		1,057		1,12		4,86		
					1	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	N/A	60,00 %	0,381	65,00 %	0,463	70,00 %	0,499	75,00 %	0,529	80,00 %	0,56	80,00 %	2,43	Dinas Pemuda dan Olahraga
					2	Persentase Pelatih Yang Bersertifikat	%	N/A	100%	0,381	100%	0,463	100%	0,499	100%	0,529	100%	0,56	100%	2,43	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	1	6		Terbangunnya Masyarakat yang religius dan Berakhlak Mulia	a	Indeks Toleransi Beragama	Nilai	5,89	5,917	2,452	5,944	2,974	5,971	3,205	5,998	3,398	6,025	3,599	6,025	15,628	
4	1	6	1	Program Pengembangan wawasan kebangsaan					0,39		0,473		0,51		0,541		0,573		2,49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					1	Persentase penyelesaian masalah keagamaan	%	100%	100%	0,39	100%	0,473	100%	0,51	100%	0,541	100%	0,573	100%	2,49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	1	6	2	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus					0,825		1		1,078		1,143		1,21		5,26		

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Anak																
					1	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	100	100	0,412	100	0,5	100	0,539	100	0,571	100	0,605	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					2	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	N/A	100	0,412	100	0,5	100	0,539	100	0,571	100	0,605	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	1	6	3	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak				1,237		1,501		1,617		1,714		1,816		7,88		
					1	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat	Madya	Madya	0,742	Madya	0,9	Nindya	0,97	Nindya	1,028	Nindya	1,089	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49%	49%	0,495	49%	0,6	49%	0,647	49%	0,686	49%	0,726	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
5				MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang																

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
				Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir					
					target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman,																		
51		Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	a	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45%	6.0%	33.943	5.5%	41.184	5.5%	44.385	5.5%	47.054	6.0%	49.844	73.5%	216.41		
511		Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	a	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45%	6.0%	31.462	5.5%	38.174	5.5%	41.122	5.5%	43.599	6.0%	46.189	73.5%	200.546		
5111		Program Penanggulangan Gangguan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum						8,071		9,792		10,548		11,184		11,848		51,443		
			1	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	01.31	01.31	4,708	01.31	5,712	01.31	6,153	01.31	6,524	01.31	6,911	01.31	30,008	SATPOL PP	
			2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	60%	60%	3,363	65%	4,08	65%	4,395	70%	4,66	70%	4,937	75%	21,43	SATPOL PP	
5112		Program Penegakan Perda						3,363		4,08		4,395		4,66		4,937		21,435		
			1	Persentase penegakan perda	%	60%	5%	3,363	5%	4,08	5%	4,395	5%	4,66	5%	4,937	85%	21,435	SATPOL PP	
5113		Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						20,028		24,302		26,179		27,755		29,404		127,67	Kecamatan	
			1	Persentase wilayah tertib K3	%	100%	100%	20,028	100%	24,302	100%	26,179	100%	27,755	100%	29,404	100%	127,67	Kecamatan	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																					
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab		
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					b	Kasus Perselisihan Sara dan Kelompok Masyarakat yang diselesaikan	%	100%	100%	0,585	100%	0,71	100%	0,765	100%	0,811	100%	0,859	100%	3,73	
5	1	1	4	program pengelolaan pemerintahan umum						0,585		0,71		0,765		0,811		0,859		3,73	
					1	Persentase penyelesaian konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	%	N/A	100%	0,176	100%	0,213	100%	0,229	100%	0,243	100%	0,258	100%	1,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					2	Persentase Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	%	253	10%	0,234	10%	0,284	10%	0,306	10%	0,324	10%	0,344	10%	1,49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					3	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	%	1,65	3%	0,176	5%	0,213	5%	0,229	5%	0,243	5%	0,258	5%	1,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	1	2		Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana	a	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132	1,896	127	2,300	122	2,498	118	2,644	113	2,796	113	12,134	
5	1	2	1	Program Dukungan Manajemen, koordinasi pra bencana, tanggap						1,896		2,300		2,498		2,644		2,796		12,110	
					1	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	1,172	100	1,422	100	1,532	100	1,624	100	1,721	100	7,47	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah/Dinas Sosial

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																								
Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)				Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab					
									Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir				
										target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)		
1			2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					2	Persentase kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana			%	100	100	0,243	100	0,294	100	0,317	100	0,336	100	0,356	100	1,55	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	
					3	Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan			%	100	100	0,061	100	0,074	100	0,079	100	0,084	100	0,089	100	0,39	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	
					4	Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			%	100	100	0,14	100	0,17	100	0,19	100	0,20	100	0,21	100	0,90	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	
					5	persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			%	100	100	0,14	100	0,17	100	0,19	100	0,20	100	0,21	100	0,90	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	
					6	persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			%	100	100	0,14	100	0,17	100	0,19	100	0,20	100	0,21	100	0,90	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	
5	2				Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman	a	Indeks kualitas lingkungan hidup			Nilai			92,351		112,056		120,71		127,979		135,583	59	588,679	
5	2	1			Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	a	Indeks kualitas lingkungan hidup			Nilai	38.47,1	49	92,351	52	112,056	54	120,71	56	127,979	59	135,583	59	588,679	

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																						
Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab				
								Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
									target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	
1				2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5211				Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup							41,045		49,802		53,649		56,879		60,259		261,64	
					1	Indeks kualitas air		Nilai	4 (6,44)	3 (IP=1- 5)	8,209	3 (IP=1- 5)	9,96	3 (IP=1- 5)	10,73	3 (IP=1- 5)	11,376	3 (IP=1- 5)	12,052	3 (IP=1- 5)	52,33	Dinas Lingkungan Hidup
					2	Indeks kualitas udara		Nilai	82	83	8,209	83,4	9,96	83,8	10,73	84,2	11,376	84,6	12,052	84,6	52,33	Dinas Lingkungan Hidup
					3	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		%	40,35	50	8,209	52	9,96	55	10,73	60	11,376	65	12,052	65	52,33	Dinas Lingkungan Hidup
					4	Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3		%	40%	45%	16,418	50%	19,921	55%	21,46	60%	22,752	65%	24,104	65%	104,65	Dinas Lingkungan Hidup
5212				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam							25,653		31,127		33,531		35,55		37,662		163,52	
					1	Jumlah Pembangunan Taman KEHATI		Lokasi	0	0	17.957	0	21.789	0	23.472	0	24.885	1	26.364	1	114.47	Dinas Lingkungan Hidup

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN																				
Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/impact/Outcome)		Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab	
							Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
								target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target	Rp (Milyar)	target		Rp (Milyar)
1	2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				2	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Status	Ada	Tidak Ada	7.696	Ada	9.338	Ada	10.059	Ada	10.665	Ada	11.299	Ada	49.06	Dinas Lingkungan Hidup
5	2	1	3	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat					15.392		18.676		20.118		21.33		22.597		98.11	Dinas Lingkungan Hidup
				1	Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	%	100%	100%	15.392	100%	18.676	100%	20.118	100%	21.33	100%	22.597	100%	98.11	Dinas Lingkungan Hidup
5	2	1	4	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup					10.261		12.451		13.412		14.22		15.065		65.41	Dinas Lingkungan Hidup
				1	Persentase institusi/kelompok masyarakat/lingkungan yang peduli lingkungan	%	NA	30%	10.261	40%	12.451	50%	13.412	60%	14.22	70%	15.065	70%	65.41	Dinas Lingkungan Hidup

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Penjabaran visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih; 2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah; 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM); 4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup; dan 5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Rencana program perangkat daerah Kota Bekasi untuk periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 berjumlah 116 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kota Bekasi, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kota Bekasi disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel 7.2. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 3 terdapat 2 (dua) kategori belanja langsung yang dijabarkan dalam rencana belanja Kota Bekasi 2019-2023 yakni prioritas 1 dan prioritas 2. Prioritas 1 adalah belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan penunjang urusan di tiap perangkat daerah. Sementara prioritas 2 adalah belanja langsung yang mendukung pelaksanaan program sesuai visi, misi pembangunan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun jabaran program dengan alokasi anggaran prioritas 2 dimaksud disajikan pada Tabel 7.2. Sementara jabaran program dengan alokasi anggran belanja prioritas 1 dapat dilihat pada tabel 7.3.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Kapasitas Riil Keuangan	2.376.686.943.073	2.877.358.650.937	3.001.410.047.496	3.128.789.460.342	3.298.751.395.158
II	BELANJA DAERAH	5.276.349.598.554	5.591.896.807.129	5.972.935.841.611	6.385.864.722.600	6.869.153.854.586
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.899.662.655.481	2.714.538.156.192	2.971.525.794.115	3.257.075.262.259	3.570.402.459.428
2.1.1	Belanja Pegawai	2.088.835.144.953	2.360.383.713.797	2.596.422.085.177	2.856.064.293.694	3.141.670.723.064
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja Subsidi	5.000.000.000	5.350.000.000	5.671.000.000	6.067.970.000	6.492.727.900
2.1.4	Belanja Hibah	159.212.386.000	170.357.253.020	180.578.688.201	193.219.196.375	206.744.540.122
2.1.5	Belanja Bantuan sosial	97.264.960.000	104.073.507.200	110.317.917.632	118.040.171.866	126.302.983.897
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	64.835.216.986	69.373.682.175	73.536.103.106	78.683.630.323	84.191.484.446
2.1.7	Belanja Tidak terduga	484.514.947.542	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2.376.686.943.073	2.877.358.650.937	3.001.410.047.496	3.128.789.460.342	3.298.751.395.158
2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	201.092.856.725	243.454.979.473	253.951.039.876	264.728.685.662	279.109.263.259
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.626.493.565	1.574.615.833.947	1.642.502.155.029	1.712.209.711.409	1.805.220.276.374
2.2.3	Belanja Modal	874.967.592.783	1.059.287.837.517	1.104.956.852.591	1.151.851.063.270	1.214.421.855.526

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Urusan Wajib																
1.1	Tingkat Pelayanan Dasar																
1.1.1	Pendidikan																
1.1.1.1	Program pendidikan dasar					86.468		104.919		113.022		119.827		126.949		551.185	DINAS PENDIDIKAN
		APK SD MI	%	114.44	114	19.456	113.51	23.607	113.12	25.430	112.78	26.961	112.22	28.563	112.22	192.915	DINAS PENDIDIKAN
		Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	%	83.61	86	8.647	88	10.492	90	11.302	92	11.983	94	12.695	94	55.119	DINAS PENDIDIKAN
		Rata rata Nilai USBN SD	Nilai	80.11	81	6.485	82	7.869	83	8.477	84	8.987	85	9.521	85	41.339	DINAS PENDIDIKAN
		APK SMP/MTs	%	96.35	96.74	15.132	96.91	18.361	97.25	19.779	97.75	20.880	98	22.216	98	151.487	DINAS PENDIDIKAN
		Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Nilai	97.54	97.75	8.647	97.86	10.492	97.97	11.302	98.00	11.983	98.20	12.695	98.20	55.119	DINAS PENDIDIKAN
		Rata rata Nilai UN SMP	Nilai	61.34	61.54	6.485	61.73	7.869	61.85	8.477	61.92	8.987	62	9.521	62	41.339	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional tingkat SD	Prestasi	25	26	6.485	27	7.869	28	8.477	29	8.987	30	9.521	30	41.339	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional tingkat SMP	Prestasi	25	26	6.485	27	7.869	28	8.477	29	8.987	30	9.521	30	41.339	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Sekolah SD Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:4	12:5	0	12:6	0	12:7	0	12:8	0	12:9	0	12:9	0	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Sekolah SMP Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:1	12:2	0	12:3	0	12:4	0	12:5	0	12:6	0	12:6	0	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Siswa SD : Rombel (SPM 1:32)	Rasio	1:30	1:32	8.646	1:32	10.491	1:32	11.301	1:32	11.982	1:32	12.696	1:32	55.116	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Siswa SMP : Rombel (SPM 1:32)	Rasio	1:33	1:34	0	1:35	0	1:36	0	1:36	0	1:36	0	1:36	0	DINAS PENDIDIKAN
		Daya Tampung SD/MI (Negeri+Swasta)	%	112.83	108	0	106	0	103	0	101	0	100	0	100	0	DINAS PENDIDIKAN
		Daya Tampung SMP/MTs (Negeri+Swasta)	%	84.72	84.92	0	86.24	0	88.38	0	90.51	0	92.68	0	94.68	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase SD memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer	%	66.52%	66.72%	0	66.92%	0	67%	0	67.20%	0	67.40%	0	67.40%	0	DINAS PENDIDIKAN

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		(Negeri+Swasta)															
		Persentase SD memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)	%	72.68%	72.88%	0	73%	0	73.22%	0	73.42%	0	73.62%	0	73.62%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase SMP memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)	%	72%	72.50%	0	73%	0	73.50%	0	74%	0	74.50%	0	74.50%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase SMP memilki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)	%	84.73%	85%	0	85.50%	0	86%	0	86.50%	0	87%	0	87%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD/SMP	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS PENDIDIKAN
1.1.1.2	Program Anak Usia Dini					21.617		26.229		28.255		29.956		31.737		137.793	DINAS PENDIDIKAN
		APK Paud (Usia 3-6)	%	55.69	56	7.206	57	8.743	58	9.418	59	9.985	60	10.579	60	45.931	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Guru : Siswa PAUD	Rasio	1:7	1:8	7.206	1:8	8.743	1:8	9.418	1:8	9.985	1:8	10.579	1:8	45.931	DINAS PENDIDIKAN
		Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1 PAUD	%	18.96%	19%	7.206	19.2%	8.743	19.4%	9.418	19.6%	9.985	19.8%	10.579	19.8%	45.931	DINAS PENDIDIKAN
		Rasio TK Negeri per Kecamatan	Rasio	12:3	12:4	0	12:5	0	12-6	0	12 : 7	0	12 :8	0	12:8	0	DINAS PENDIDIKAN
		TK Terakreditasi	Rasio	20.2	20.4	0	21	0	21.6	0	22.2	0	22.8	0	22.8	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik PAUD	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS PENDIDIKAN
1.1.1.3	Program Pendidikan non formal					21.617		26.229		28.255		29.956		31.737		137.79	
		Persentase LKP Berijin	%	54.71%	56.10%	12.97	58.54%	15.738	60.49%	16.953	62.44%	17.974	64.39%	19.042	64.39%	82.68	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase PKBM Terakreditasi	%	27.45%	29.16%	8.647	33.43%	10.492	35.97%	11.302	36.11%	11.983	38.04%	12.695	38.04%	55.12	DINAS PENDIDIKAN

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Daya Tampung PKBM Terhadap siswa putus sekolah/tidak melanjutkan pendidikan	%	N/A	120	0	118	0	117	0	116	0	115	0	115	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan dasar anak usia pendidikan non formal	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Tutor dengan kualifikasi akademik D4/S1	%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	DINAS PENDIDIKAN
1.1.1.4	Program Pembinaan Pendidik dan tenaga Kependidikan					32.425		39.345		42.383		44.935		47.605		206.693	
		Persentase guru yang bersertifikat pendidik	%	59.31	59.64	12.97	59.92	15.738	60.21	16.953	60.54	17.974	60.76	19.042	60.76	82.677	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase guru dengan kualifikasi akademik minimal D4/S1 (SD, SMP)	%	95.98	96	6.485	96.05	7.869	96.1	8.477	96.15	8.987	96.2	9.521	96.2	41.339	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Jumlah SD yang memiliki Tenaga Kependidikan	%	71.10%	78%	12.97	78.50%	15.738	79%	16.953	79.50%	17.974	80%	19.042	80%	82.677	DINAS PENDIDIKAN
1.1.1.5	Program manajemen Pelayanan pendidikan					23.779		28.852		31.081		32.952		34.911		151.575	
		Cakupan Pelayanan Berbasis IT	%	4	5	2.162	6	2.623	7	2.826	8	2.996	9	3.174	9	13.781	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase peningkatan layanan pendidikan	%	12%	12%	3.243	12%	3.934	12%	4.238	12%	4.493	12%	4.761	12%	20.669	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan	%	64.45%	64.65%	5.404	64.71%	6.557	64.85%	7.064	64.90%	7.489	65.00%	7.934	65.00%	34.448	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase SD berakreditasi A	%	77.83%	89.85%	6.485	90%	7.869	90.25%	8.477	90.40%	8.987	90.45%	9.521	90.45%	41.3385	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase SMP berakreditasi A	%	62.09%	76.85%	6.485	77.00%	7.869	77.30%	8.477	77.75%	8.987	80%	9.521	80%	41.3385	DINAS PENDIDIKAN
1.1.2	Kesehatan																Dnas Kesehatan
1.1.2.1	Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan	Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	%	58%	58%	23.3	60%	28.271	62%	30.455	64%	32.288	65%	34.207	65%	148.52	DINAS KESEHATAN
1.1.2.2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Rujukan					77.521		94.061		101.326		107.426		113.81		494.144	

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100%	100%	12.92	100%	15.677	100%	16.888	100%	17.904	100%	18.968	100%	82.36	DINAS KESEHATAN
		persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan bagi peserta jaminan kesehatan	%	100%	100%	21.534	100%	26.128	100%	28.146	100%	29.841	100%	31.614	100%	137.26	DINAS KESEHATAN, RSUD
		Prevalensi kekurangan gizi pada balita (kesehatan keluarga dan gizi)	%	7%	7%	8.613	5%	10.451	5%	11.258	4%	11.936	3%	12.646	3%	54.9	DINAS KESEHATAN
		persentase Institusi memenuhi syarat kesehatan	%	62%	62%	12.92	65%	15.677	68%	16.888	72%	17.904	75%	18.968	75%	82.36	DINAS KESEHATAN
		Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	Unit	42	42	21.534	45	26.128	49	28.146	52	29.841	56	31.614	56	137.26	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN
		Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN
		Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN
		Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN
		Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN
		Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN
		Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	DINAS KESEHATAN
1.1.2.3	Program Kefarmasaan dan Alkes					69,90		84,81		91,36		96,87		102,62		445,566	
		Persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	%	90%	90%	48.93	91%	59.37	92%	63.955	93%	67.806	95%	71.835	95%	311.9	DINAS KESEHATAN
		Persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	%	100%	100%	20.97	100%	25.444	100%	27.409	100%	29.06	100%	30.787	100%	133.67	DINAS KESEHATAN
1.1.2.4	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Rujukan					99,31		120,50		129,81		137,62		145,80		633,052	
		persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas dan RS	%	60%	60%	24.522	60%	29.755	60%	32.053	60%	33.983	60%	36.002	60%	156.31	DINAS KESEHATAN, RSUD
		persentase PKM Terakreditasi	%	47.62%	64.29%	6.99	71.43%	8.481	83.33%	9.136	83.33%	9.687	83.33%	10.262	83.33%	44.56	DINAS KESEHATAN
		persentase RS Terakreditasi	%	100%	100%	14.897	100%	18.075	100%	19.471	100%	20.644	100%	21.871	100%	94.96	DINAS KESEHATAN, RSUD
		Terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	Bulan	12	12	10.543	12	12.792	12	13.78	12	14.61	12	15.478	12	67.2	RSUD
		IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B	%	80	80	10.543	81	12.792	81	13.78	82	14.61	82	15.478	82	67.2	RSUD

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan RS	%	100%	100%	31.818	100%	38.607	100%	41.589	100%	44.093	100%	46.713	100%	202.82	DINAS KESEHATAN, RSUD
1.1.2.5	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan					76.277		92.552		99.7		105.703		111.985		486.217	DINAS KESEHATAN, RSUD, BKPPD
		Persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	%	70%	70%	76.277	80%	92.552	100%	99.7	100%	105.703	100%	111.985	100%	486.22	DINAS KESEHATAN, RSUD, BKPPD
1.1.2.6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan					92.247		111.929		120.574		127.833		135.43		588.01	RSUD
		Persentase terpenuhinya persyaratan minimal Rumah Sakit Kelas B	%	80%	82%	92.247	84%	111.929	86%	120.574	88%	127.833	90%	135.43	90%	588.01	RSUD
1.1.3	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang																
1.1.3.1	Program Pengelolaan Jalan					239.552		290.663		313.114		331.966		351.694		1526.99	DBMSDA
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	96%	96%	143.731	97%	174.398	98%	187.869	99%	199.179	100%	211.016	100%	916.19	DBMSDA
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	70%	70%	71.866	75%	87.199	80%	93.934	85%	99.59	90%	105.508	90%	458.1	DBMSDA
		Persentase Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difable dan lansia	%	40%	40%	23.955	42%	29.066	45%	31.311	47%	33.197	50%	35.169	50%	152.7	DBMSDA
1.1.3.2	Program Perlengkapan Jalan					6.396		7.760		8.360		8.863		9.389		40.770	
		Persentase terbangunnya jalur sepeda	%	30%	30%	1.599	32%	1.94	35%	2.09	37%	2.216	40%	2.347	40%	10.19	
		persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik	%	60%	60%	4.797	70%	5.82	80%	6.27	85%	6.647	92%	7.042	92%	30.58	DISHUB
1.1.3.3	Program Pengelolaan Sistem Drainase					107.799		130.798		140.901		149.385		158.262		687.15	DBMSDA
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm) selama 2 Jam lebih dari 2 kali setahun	%	70%	70%	64.679	75%	78.479	80%	84.541	85%	89.631	90%	94.957	90%	412.29	DBMSDA

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		persentase drainase (dengan konsep ecodrainage/resapan) dalam kondisi baik	%	10%	15%	25.872	20%	31.392	25%	33.816	30%	35.852	35%	37.983	35%	164.91	DBMSDA
1.1.3.4	Program Pengelolaan Dekorasi Kota					2.806		3.405		3.668		3.888		4.119		17.89	DISTARU
		Persentase pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman	%	13%	14%	1.122	15%	1.362	16%	1.467	17%	1.555	18%	1.648	18%	7.15	DISTARU
		Persentase pembangunan penataan dan pemeliharaan reklame	%	40%	60%	0.842	80%	1.021	100%	1.1	100%	1.167	100%	1.236	100%	5.37	DISTARU
		Persentase pembangunan pemeliharaan PJU	%	80%	85%	0.842	85%	1.021	92%	1.1	97%	1.167	100%	1.236	100%	5.37	DISTARU
1.1.3.5	Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik					22.171		26.901		28.979		30.724		32.549		141.32	PERKIMTAN
		Persentase pencapaian Kapasitas pengolahan SPALD-S 169000 m3	%	20%	20%	5.543	20%	6.725	30%	7.245	30%	7.681	100%	8.137	100%	35.33	PERKIMTAN
		Persentase pencapaian 6560 unit tengki septik	%	4%	9%	5.543	15%	6.725	30%	7.245	30%	7.681	15%	8.137	100%	35.33	PERKIMTAN
		Persentase pencapaian penambahan hingga 800 SPALD-R Skala permukiman	%	19%	0%	5.543	25%	6.725	25%	7.245	25%	7.681	25%	8.137	2819%	35.33	PERKIMTAN
		Persentase pencapaian 8000 unit SPALD-R Skala kawasan	%	0%	0%	5.543	38%	6.725	38%	7.245	13%	7.681	13%	8.137	2819%	35.33	PERKIMTAN
1.1.3.6	Program Pengelolaan Sampah					26.097		31.666		34.111		36.165		38.314		166.35	
		Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	24.94%	26%	2.565	27%	3.113	28%	3.353	29%	3.555	30%	3.766	30%	16.35	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pencapaian target tambahan 10 unit Sarana dan Prasarana persampahan terbangun	%	9%	10%	15.836	10%	19.215	30%	20.699	30%	21.945	20%	23.25	100%	100.95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	%	71.72%	73%	3.078	73%	3.735	73%	4.024	73%	4.266	73%	4.519	73%	19.62	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	67.15%	74%	2.565	70%	3.113	64%	3.353	63%	3.555	62%	3.766	62%	16.35	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	70%	100%	2.052	100%	2.49	100%	2.682	100%	2.844	100%	3.013	100%	13.08	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.3.7	Program Pengendalian Fasilitas Parkir					1.599		1.94		2.09		2.216		2.347		10.19	Dinas Perhubungan
		Persentase pencapaian perencanaan smart parking terpadu	%	N/A	-	0.799	25%	0.97	25%	1.045	25%	1.108	25%	1.174	100%	5.1	Dinas Perhubungan
		Persentase pelaksanaan penertiban parkir	%	N/A	-	0.799	25%	0.97	25%	1.045	25%	1.108	25%	1.174	100%	5.1	Dinas Perhubungan
1.1.3.8	Program Perlengkapan Jalan					6.396		7.760		8.360		8.863		9.389		40.770	Dinas Perhubungan
		Persentase terbangunnya jalur sepeda	%	30%	30%	1.599	32%	1.94	35%	2.09	37%	2.216	40%	2.347	40%	10.19	Dinas Perhubungan
		persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik	%	60%	60%	4.797	70%	5.82	80%	6.27	85%	6.647	92%	7.042	92%	30.58	Dinas Perhubungan
1.1.3.9	Program Pencegahan Kebakaran					0.897		1.089		1.173		1.244		1.317		5.72	Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran (BALAKR)	%	30%	40%	0.449	50%	0.544	60%	0.586	70%	0.622	75%	0.659	75%	2.86	Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase pencapaian layanan 128 publikasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	%	25.80%	11.70%	0.449	15.60%	0.544	15.60%	0.586	15.60%	0.622	15.60%	0.659	294.30%	2.86	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.3.10	Program Peralatan Proteksi Kebakaran					0.538		0.653		0.704		0.746		0.79		3.43	Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	%	15%	25%	0.538	35%	0.653	40%	0.704	45%	0.746	50%	0.79	50%	3.43	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.3.11	Program Penyelidikan Kebakaran					0.538		0.653		0.704		0.746		0.79		3.43	Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase layanan pendataan dan inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	%	73%	78%	0.538	83%	0.653	88%	0.704	93%	0.746	100%	0.79	100%	3.43	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.3.12	Program Dampak Bahan Kebakaran Dan Beracun Akibat Kebakaran					0.718		0.871		0.938		0.995		1.054		4.58	Dinas Pemadam Kebakaran

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran	%	73%	75%	0.359	77%	0.436	79%	0.469	80%	0.497	81%	0.527	81%	2.29	Dinas Pemadam Kebakaran
		Jumlah layanan penyelamatan evaluasi operasi non kebakaran (kali)	Jumlah	136	138	0.359	140	0.436	142	0.469	144	0.497	145	0.527	145	2.29	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.3.16	Program Pendidikan Dasar					62.238		75.517		81.35		86.247		91.373		396.72	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase ketersediaan 1119 RKB sebagai prasarana pendidikan dasar yang representatif	%	7%	7%	62.238	21%	75.517	24%	81.35	23%	86.247	25%	91.373	100%	396.72	DINAS PENDIDIKAN
1.1.3.17	Program UKP Rujukan					71.827		87.152		93.884		99.536		105.451		457.85	
		Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	34%	11%	35.913	22%	43.576	22%	46.942	22%	49.768	23%	52.726	100%	228.92	Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase Ketersediaan 6 gedung RS Type D pada tahun 2023	%	14.29%	14%	35.913	29%	43.576	14%	46.942	14%	49.768	14%	52.726	86%	228.92	Dinas Kesehatan/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1.1.3.18	Program Sarana Distribusi Perdagangan					16.147		19.592		21.105		22.376		23.706		102.93	Dinas Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase Ketersediaan 4 gedung perdagangan pada tahun 2023	%	0%	0%	16.147	25%	19.592	25%	21.105	25%	22.376	25%	23.706	100%	102.93	Dinas Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1.1.3.19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah					25.688		31.169		33.577		35.598		37.714		163.75	

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	50%	60%	5.138	65%	6.234	70%	6.715	75%	7.12	80%	7.543	80%	32.75	Dinas Tata Ruang/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota	Jumlah	3	3	5.138	3	6.234	3	6.715	3	7.12	3	7.543	40.206	32.75	Dinas Tata Ruang
		Jumlah Rencana Penataan Kawasan Strategis Kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Jumlah	1	1	5.138	1	6.234	1	6.715	1	7.12	1	7.543	5	32.75	Dinas Tata Ruang
		Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	%	17%	17%	2.569	17%	3.117	17%	3.358	17%	3.56	17%	3.771	100%	16.37	Dinas Tata Ruang
		Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	%	11%	0.002%	7.706	0.002%	9.351	0.002%	10.073	0.002%	10.679	0.002%	11.314	11.10%	49.12	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air/Dinas Tata Ruang
1.1.3.20	Program Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis					19.003		23.058		24.839		26.334		27.899		121.13	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase cakupan ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	21%	21%	9.502	53%	11.529	16%	12.419	7%	13.167	2%	13.95	100%	60.57	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase Ketersediaan 1 Krematorium, forensik dan rumah duka pada tahun 2020	%	0%	0%	9.502	100%	11.529	0%	12.419	0%	13.167	0%	13.95	100%	60.57	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1.1.3.21	Program Pengembangan PSU Umum					6.651		8.07		8.694		9.217		9.765		42.4	
		Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	%	35.70%	35.70%	6.651	40%	8.07	43%	8.694	47%	9.217	51%	9.765	51%	42.4	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1.1.3.22	Program Pengelolaan Angkutan Umum					1.599		1.94		2.09		2.216		2.347		10.19	Dinas Perhubungan/ BUMD
		Jumlah sarana prasarana angkutan publik massal terintegrasi yang	Jumlah	1	0	0.799	0	0.97	1	1.045	1	1.108	1	1.174	4	5.1	Dinas Perhubungan/ BUMD

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		terbangun															
		Persentase sarana transportasi city tourism yang terbangun	%	0%	0%	0.799	0%	0.97	33%	1.045	33%	1.108	33%	1.174	100%	5.1	Dinas Perhubungan
1.1.3.23	Program Pengelolaan Dan Rekayasa Lalu Lintas					1.199		1.455		1.567		1.662		1.761		7.64	Dinas Perhubungan
		persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	%	5%	5%	0.6	10%	0.728	10%	0.784	10%	0.831	10%	0.88	45%	3.82	Dinas Perhubungan
		Persentase pembinaan, pengendalian dan penindakan lalu lintas	%	0%	5%	0.6	10%	0.728	10%	0.784	10%	0.831	10%	0.88	45%	3.82	Dinas Perhubungan
1.1.3.24	Program Pengendalian Uji Kendaraan Bermotor					1.199		1.455		1.567		1.662		1.761		7.64	Dinas Perhubungan
		persentase kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor	%	100%	100%	1.199	100%	1.455	100%	1.567	100%	1.662	100%	1.761	100%	7.64	Dinas Perhubungan
1.1.3.25	Program Pengelolaan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Umum					3.997		4.85		5.225		5.539		5.869		25.48	Dinas Perhubungan
		Persentase peningkatan fasilitas penunjang transportasi	%	5%	5%	3.997	5%	4.85	5%	5.225	20%	5.539	25%	5.869	60%	25.48	Dinas Perhubungan
1.1.3.26	Program Pencegahan Kebakaran					0.897		1.089		1.173		1.244		1.317		5.72	Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran (BALAKR)	%	30%	40%	0.449	50%	0.544	60%	0.586	70%	0.622	75%	0.659	75%	2.86	Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase pencapaian layanan 128 publikasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	%	25.80%	11.70%	0.449	15.60%	0.544	15.60%	0.586	15.60%	0.622	15.60%	0.659	294.30%	2.86	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.3.27	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum					22.171		26.901		28.979		30.724		32.549		141.32	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase pelayanan 12800 SR air bersih non PDAM	%	26%	14%	11.085	16%	13.45	20%	14.489	23%	15.362	27%	16.275	100%	70.66	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase pelayanan 35000 SR air bersih PDAM	%	77%	14%	11.085	19%	13.45	21%	14.489	23%	15.362	23%	16.275	100%	70.66	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan/BUMD
1.1.3.28	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis					71.598		86.874		93.584		99.218		105.116		456.4	
		Persentase sistem Utilitas terpadu (ducting) yang terbangun	%	5%	10%	19.963	15%	24.222	20%	26.093	25%	27.664	30%	29.308	30%	127.25	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air/ BUMD
		persentase titik PJU dalam kondisi baik	%	85%	85%	19.963	92%	24.222	97%	26.093	100%	27.664	100%	29.308	100%	127.25	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persentase jaringan gas rumah tangga yang terpasang	%	1%	1%	15.836	1%	19.215	1%	20.699	1%	21.945	1%	23.25	5%	100.95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan/BUMD
		Persentase pengembangan jaringan gas rumah tangga melalui BUMD	%	1%	1%	15.836	1%	19.215	1%	20.699	1%	21.945	1%	23.25	5%	100.95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan/BUMD
1.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																
1.1.4.1	Program Pengembangan Perumahan					28.505		34.587		37.258		39.502		41.849		181.7	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase rehabilitasi 3095 rumah tidak layak huni pada tahun 2023	%	32%	32%	14.253	16%	17.293	16%	18.629	19%	19.751	16%	20.925	100%	90.85	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Cakupan ketersediaan rusunawa	Jumlah	2	1	14.253	1	17.293	1	18.629	1	19.751	1	20.925	5	90.85	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1.1.4.3	Program Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh*					22.171		26.901		28.979		30.724		32.549		141.32	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase Peningkatan kualitas lingkungan layak huni	%	24%	24%	22.171	28%	26.901	16%	28.979	16%	30.724	16%	32.549	100%	141.32	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1.1.4.4	Program Pengembangan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum					38.007		46.116		49.678		52.669		55.799		242.27	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	19%	19%	38.007	22%	46.116	22%	49.678	22%	52.669	15%	55.799	100%	242.27	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																
1.1.5.1	Program Penanggulangan Gangguan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum					8.071		9.792		10.548		11.184		11.848		51.443	
		Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1:31	1:31	4.708	1:31	5.712	1:31	6.153	1:31	6.524	1:31	6.911	1:31	30.008	SATPOL PP
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	60%	60%	3.363	65%	4.08	65%	4.395	70%	4.66	70%	4.937	75%	21.43	SATPOL PP
1.1.5.2	Program Penegakan Perda					3.363		4.08		4.395		4.66		4.937		21.435	
		Persentase penegakan perda	%	60%	5%	3.363	5%	4.08	5%	4.395	5%	4.66	5%	4.937	85%	21.435	SATPOL PP
1.1.6	Sosial																
1.6.1	Program Pemberdayaan Sosial					0.687		0.833		0.898		0.952		1.008		4.38	DINAS SOSIAL
		Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat dalam 1 (satu) Tahun	%	42	9	0.275	9	0.333	9	0.359	9	0.381	9	0.403	9	1.75	DINAS SOSIAL
		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah	1	1	0.137	1	0.167	1	0.18	1	0.19	1	0.202	1	0.88	DINAS SOSIAL
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	Jumlah	285	5	0.137	6	0.167	7	0.18	8	0.19	9	0.202	9	0.88	DINAS SOSIAL
1.6.2	Program Rehabilitasi Sosial					1.03		1.25		1.347		1.428		1.513		6.568	
		Persentase penyandang disabilitas telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100%	100%	0.2575	100%	0.3125	100%	0.3367	100%	0.357	100%	0.378	100%	1.642	DINAS SOSIAL
		Persentase anak telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100%	100%	0.2575	100%	0.3125	100%	0.3367	100%	0.357	100%	0.378	100%	1.642	DINAS SOSIAL
		Persentase lanjut usia telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar	%	100%	100%	0.2575	100%	0.3125	100%	0.3367	100%	0.357	100%	0.378	100%	1.642	DINAS SOSIAL

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		panti															
		Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100%	100%	0.2575	100%	0.3125	100%	0.3367	100%	0.357	100%	0.378	100%	1.642	DINAS SOSIAL
1.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					1.03		1.25		1.347		1.428		1.513		6.57	
		Tersedianya data dan informasi PMKS	Nilai	1	1	0.309	2	0.375	1	0.404	2	0.428	1	0.454	1	1.97	DINAS SOSIAL
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100%	0.721	100%	0.875	100%	0.943	100%	0.999	100%	1.059	100%	4.6	DINAS SOSIAL
1.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar																
1.2.1	Tenaga Kerja																
1.2.1.1	Program Peningkatan Kapasitas dan Produktifitas Tenaga Kerja					0.198		0.24		0.259		0.274		0.291		1.26	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	%	100%	100%	0.139	100%	0.168	100%	0.181	100%	0.192	100%	0.204	100%	0.88	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Pencari kerja yang memiliki setifikat keahlian	%	5%	5%	0.059	5%	0.072	5%	0.078	5%	0.082	5%	0.087	5%	0.38	Dinas Tenaga Kerja
1.2.1.2	Program Penempatan Tenaga Kerja					0.198		0.24		0.259		0.274		0.291		1.26	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan,	%	9.72%	9.72%	0.198	17.52%	0.24	23.34%	0.259	23.63%	0.274	23.28%	0.291	23.28%	1.26	Dinas Tenaga Kerja
1.2.1.3	Program Hubungan Industrial					0.264		0.32		0.345		0.366		0.388		1.68	Dinas Tenaga Kerja
		Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja	%	5%	5%	0.264	5%	0.32	5%	0.345	5%	0.366	5%	0.388	5%	1.68	Dinas Tenaga Kerja
1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.2.1	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak					0.825		1		1.078		1.143		1.21		5.26	
		Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	100	100	0.412	100	0.5	100	0.539	100	0.571	100	0.605	100	2.63	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	N/A	100	0.412	100	0.5	100	0.539	100	0.571	100	0.605	100	2.63	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.2.2.2	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak					1.237		1.501		1.617		1.714		1.816		7.88	
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat	Madya	Madya	0.742	Madya	0.9	Nindya	0.97	Nindya	1.028	Nindya	1.089	Nindya	4.73	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49%	49%	0.495	49%	0.6	49%	0.647	49%	0.686	49%	0.726	49%	3.15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.2.3	Pangan																
1.2.3.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					0.174		0.212		0.228		0.242		0.256		1.11	Dinas Ketahanan Pangan
		Stabilisasi harga pangan	%	17%	<5%	0.174	<5%	0.212	<5%	0.228	<5%	0.242	<5%	0.256	<5%	1.11	Dinas Ketahanan Pangan
1.2.3.2	Program Kerawanan Pangan					0.174		0.212		0.228		0.242		0.256		1.11	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Penanganan kerawanan pangan	%	69.58%	73.76%	0.174	77.76%	0.212	81.85%	0.228	85.94%	0.242	90%	0.256	90%	1.11	Dinas Ketahanan Pangan
1.2.3.3	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan					0.349		0.423		0.456		0.483		0.512		2.22	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	69.07%	75.26%	0.139	83.91%	0.169	88.89%	0.182	94.51%	0.193	98%	0.205	98%	0.89	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase produk PAH yang ASUH	%	42.50%	42.93%	0.209	43.35%	0.254	43.79%	0.273	44.23%	0.29	50.00%	0.307	50.00%	1.33	Dinas Pertanian dan Perikanan
1.2.3.4	Program Target Konsumsi Pangan					0.174		0.212		0.228		0.242		0.256		1.11	Dinas Ketahanan Pangan
		Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	86.70%	88%	0.174	89%	0.212	90%	0.228	91%	0.242	92%	0.256	92%	1.11	Dinas Ketahanan Pangan
1.2.4	Pertanahan																

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.4.1	Program Pengendalian Pemanfaatan Dan Penguasaan Tanah					15.836		19.215		20.699		21.945		23.25		100.95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase Pemenuhan 279.490 M2 pengadaan tanah	%	0%	23%	15.836	20%	19.215	20%	20.699	18%	21.945	19%	23.25	100%	100.95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1.2.4.2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					12.669		15.372		16.559		17.556		18.6		80.76	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase selesainya 40 sengketa tanah pada tahun 2023	%	0%	20%	12.669	20%	15.372	20%	16.559	20%	17.556	20%	18.6	100%	80.76	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1.2.5	Lingkungan Hidup																
1.2.5.1	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					41.045		49.802		53.649		56.879		60.259		261.64	
		Indeks kualitas air	Nilai	4 (6,44)	3 (IP=1-5)	8.209	3 (IP=1-5)	9.96	3 (IP=1-5)	10.73	3 (IP=1-5)	11.376	3 (IP=1-5)	12.052	3 (IP=1-5)	52.33	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas udara	Nilai	82	83	8.209	83.4	9.96	83.8	10.73	84.2	11.376	84.6	12.052	84.6	52.33	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	40.35	50	8.209	52	9.96	55	10.73	60	11.376	65	12.052	65	52.33	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	%	40%	45%	16.418	50%	19.921	55%	21.46	60%	22.752	65%	24.104	65%	104.65	Dinas Lingkungan Hidup
1.2.5.2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					25.653		31.127		33.531		35.55		37.662		163.52	
		Jumlah Pembangunan Taman KEHATI	Lokasi	0	0	17.957	0	21.789	0	23.472	0	24.885	1	26.364	1	114.47	Dinas Lingkungan Hidup
		Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Status	Ada	Tidak Ada	7.696	Ada	9.338	Ada	10.059	Ada	10.665	Ada	11.299	Ada	49.06	Dinas Lingkungan Hidup
1.2.5.3	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat					15.392		18.676		20.118		21.33		22.597		98.11	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	%	100%	100%	15.392	100%	18.676	100%	20.118	100%	21.33	100%	22.597	100%	98.11	Dinas Lingkungan Hidup
1.2.5.4	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup					10.261		12.451		13.412		14.22		15.065		65.41	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase institusi/kelompok masyarakat/lingkungan yang peduli lingkungan	%	NA	30%	10.261	40%	12.451	50%	13.412	60%	14.22	70%	15.065	70%	65.41	Dinas Lingkungan Hidup
1.2.5.5	Program Pengelolaan Sampah					26.097		31.666		34.111		36.165		38.314		166.35	
		Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	24.94%	26%	2.565	27%	3.113	28%	3.353	29%	3.555	30%	3.766	30%	16.35	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pencapaian target tambahan 10 unit Sarana dan Prasarana persampahan terbangun	%	9%	10%	15.836	10%	19.215	30%	20.699	30%	21.945	20%	23.25	100%	100.95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Point	71.72	73	3.078	73	3.735	73	4.024	73	4.266	73	4.519	73	19.62	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	67.15%	74%	2.565	70%	3.113	64%	3.353	63%	3.555	62%	3.766	62%	16.35	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	70%	100%	2.052	100%	2.49	100%	2.682	100%	2.844	100%	3.013	100%	13.08	Dinas Lingkungan Hidup
1.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
1.2.6.1	Program Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					9.401		11.407		12.288		13.028		13.802		59.93	
		Persentase Ketersediaan Data Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan yang lengkap dan terbaru	%	100%	100%	0.163	100%	0.198	100%	0.213	100%	0.226	100%	0.239	100%	1.04	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Ketersediaan profil kependudukan	%	100%	100%	0.14	100%	0.17	100%	0.183	100%	0.194	100%	0.205	100%	0.89	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan kepemilikan KTP-el	%	N/A	94.03%	0.14	94.26%	0.17	94.51%	0.183	94.82%	0.194	95.23%	0.205	95.23%	0.89	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	N/A	91.40%	0.14	93.17%	0.17	94.97%	0.183	97.75%	0.194	99.60%	0.205	99.60%	0.89	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	N/A	66.33%	0.116	66.96%	0.141	67.29%	0.152	67.62%	0.161	67.96%	0.171	67.96%	0.74	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan Kepemilikan akte perkawinan	%	N/A	60.31%	0.116	60.50%	0.141	60.55%	0.152	60.63%	0.161	60.71%	0.171	60.71%	0.74	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan kepemilikan akte kematian	%	N/A	64.23%	0.116	64.24%	0.141	64.26%	0.152	64.28%	0.161	64.32%	0.171	64.32%	0.74	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.2.7	Pemerintahan Umum																
1.2.7.1	Program pengelolaan pemerintahan umum					0.585		0.71		0.765		0.811		0.859		3.73	
		Persentase penyelesaian konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	%	N/A	100%	0.176	100%	0.213	100%	0.229	100%	0.243	100%	0.258	100%	1.12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	%	253	10%	0.234	10%	0.284	10%	0.306	10%	0.324	10%	0.344	10%	1.49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	%	1.65	3%	0.176	5%	0.213	5%	0.229	5%	0.243	5%	0.258	5%	1.12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
1.2.8.1	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					0.978		1.187		1.278		1.355		1.436		6.23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Cakupan anggota Poktan yang ber KB,	%	N/A	75%	0.978	76%	1.187	77%	1.278	78%	1.355	79%	1.436	79%	6.23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2.8.2	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					1.956		2.373		2.557		2.71		2.872		12.47	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	75%	75%	1.956	76%	2.373	77%	2.557	78%	2.71	79%	2.872	79%	12.47	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.8.3	Program Pengendalian Penduduk					0.489		0.593		0.639		0.678		0.718		3.12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Cakupan data Mikro Keluarga	%	N/A	60%	0.489	70%	0.593	80%	0.639	90%	0.678	100%	0.718	100%	3.12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2.8.4	Program Penigkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kepesertaan Ber-KB					1.467		1.78		1.917		2.033		2.154		9.35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	N/A	9%	1.467	7%	1.78	6%	1.917	5%	2.033	5%	2.154	5%	9.35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.2.9	Perhubungan																
1.2.9.1	Program Pengelolaan Angkutan Umum					1.599		1.94		2.09		2.216		2.347		10.19	Dinas Perhubungan/ BUMD
		Jumlah sarana prasarana angkutan publik massal terintegrasi yang terbangun	Jumlah	1	0	0.799	0	0.97	1	1.045	1	1.108	1	1.174	4	5.1	Dinas Perhubungan/ BUMD
		Persentase sarana transportasi city tourism yang terbangun	%	0%	0%	0.799	0%	0.97	33%	1.045	33%	1.108	33%	1.174	100%	5.1	Dinas Perhubungan
1.2.9.2	Program Pengelolaan Dan Rekayasa Lalu Lintas					1.199		1.455		1.567		1.662		1.761		7.64	Dinas Perhubungan
		persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	%	5%	5%	0.6	10%	0.728	10%	0.784	10%	0.831	10%	0.88	45%	3.82	Dinas Perhubungan
		Persentase pembinaan, pengendalian dan penindakan lalu lintas	%	0%	5%	0.6	10%	0.728	10%	0.784	10%	0.831	10%	0.88	45%	3.82	Dinas Perhubungan
1.2.9.3	Program Pengendalian Uji Kendaraan Bermotor					1.199		1.455		1.567		1.662		1.761		7.64	Dinas Perhubungan
		persentase kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor	%	100%	100%	1.199	100%	1.455	100%	1.567	100%	1.662	100%	1.761	100%	7.64	Dinas Perhubungan

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.9.4	Program Pengelolaan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Umum					3.997		4.85		5.225		5.539		5.869		25.48	Dinas Perhubungan
		Persentase peningkatan fasilitas penunjang transportasi	%	5%	5%	3.997	5%	4.85	5%	5.225	20%	5.539	25%	5.869	60%	25.48	Dinas Perhubungan
1.2.9.5	Program Perlengkapan Jalan					6.396		7.760		8.360		8.863		9.389		40.770	Dinas Perhubungan
		Persentase terbangunnya jalur sepeda	%	30%	30%	1.599	32%	1.94	35%	2.09	37%	2.216	40%	2.347	40%	10.19	Dinas Perhubungan
		persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik	%	60%	60%	4.797	70%	5.82	80%	6.27	85%	6.647	92%	7.042	92%	30.58	Dinas Perhubungan
1.2.10	Komunikasi dan Informatika																
1.2.10.1	Program Pengelolaan E_Government					1.009		1.225		1.319		1.399		1.482		6.43	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Lyanan Digital government	Jumlah	0	9	0.202	12	0.245	12	0.264	14	0.28	-	0.296	14	1.29	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Jumlah layanan digital government yang di integrasikan	Jumlah	0	9	0.202	12	0.245	12	0.264	14	0.28	-	0.296	14	1.29	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Cakupan unit kerja yang terkoneksi dengan jaringan primer	%	9%	9%	0.202	34%	0.245	66%	0.264	100%	0.28	100%	0.296	100%	1.29	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Cakupan layanan informasi pemerintah daerah kepada publik	%	34.50%	34.50%	0.202	50.80%	0.245	67.20%	0.264	83.60%	0.28	100%	0.296	100%	1.29	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Persentase Tingkat Layanan infrastruktur pusat data	%	93%	94%	0.202	94.50%	0.245	95%	0.264	95.50%	0.28	96%	0.296	96%	1.29	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
1.2.10.2	Program Pengelolaan Komunikasi Publik					0.757		0.918		0.989		1.049		1.111		4.83	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	%	0	8%	0.189	17%	0.23	33%	0.247	50%	0.262	67%	0.278	67%	1.21	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Digital dan media luar ruang	%	647	91%	0.189	93%	0.23	95%	0.247	98%	0.262	100%	0.278	100%	1.21	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase pengembangan kemitraan dalam rangka desiminasi informasi pemerintah kota bekasi	%	1	17%	0.189	33%	0.23	50%	0.247	67%	0.262	83%	0.278	83%	1.21	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Persentase laporan hasil tindak lanjut aduan masyarakat secara online yang sudah ditangani oleh PD terkait	%	470	83%	0.189	85%	0.23	87%	0.247	90%	0.262	95%	0.278	95%	1.21	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
1.2.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah																
1.2.11.1	Program Pengembangan UMKM					0.479		0.581		0.626		0.664		0.703		3.05	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil	%	2,086 usaha mikro	2%	0.144	2%	0.174	2%	0.188	2%	0.199	2%	0.211	216 usaha kecil	0.92	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif	%	1000 unit	10%	0.192	10%	0.233	10%	0.251	10%	0.266	10%	0.281	1500 unit	1.22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	%	NA	5%	0.144	15%	0.174	15%	0.188	15%	0.199	10%	0.211	360 PKL	0.92	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.2.11.2	Program Penjaminan kesehatan koperasi					0.192		0.233		0.251		0.266		0.281		1.22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase koperasi aktif	%	612 koperasi	3%	0.192	3%	0.233	4%	0.251	4%	0.266	4%	0.281	722 koperasi	1.22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.2.11.3	Program Pemberdayaan koperasi					0.288		0.349		0.376		0.398		0.422		1.83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Skala Usaha Koperasi	Koperasi	NA	2	0.288	2	0.349	2	0.376	2	0.398	2	0.422	10 Koperasi	1.83	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.2.12	Penanaman Modal																
1.2.12.1	Program Perencanaaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal					0.191		0.232		0.25		0.265		0.281		1.22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM	%	Rp, 6,372,571,600,000,00	10% (Rp, 7,009,828,760,000,00)	0.191	10% (Rp, 7,710,811,636,000,00)	0.232	10% (Rp,8,481,892,799,600,00)	0.25	10% (Rp,9,330,082,079,560,00)	0.265	10% (Rp,10,263,090,287,516,00)	0.281	Rp,10,263,090,287,516,00	1.22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.2.12.2	Program Promosi Penanaman Modal					0.319		0.387		0.417		0.442		0.468		2.03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Kenaikan Penanaman Modal Berdasarkan Perizinan Usaha dan Penyertaan Modal	%	Rp, 4,087,481,904,800,00	10% (Rp, 4,496,230,095,280,00)	0.319	10% (Rp,4,945,853,104,808,00)	0.387	10% (Rp,5,440,438,415,288,80)	0.417	10% (Rp,5,984,482,256,817,68)	0.442	10% (Rp,6,582,930,482,499,45)	0.468	Rp,6,582,930,482,499,45	2.03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.2.12.3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					0.191		0.232		0.25		0.265		0.281		1.22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	397 Perusahaan	25%	0.191	38%	0.232	48%	0.25	57%	0.265	65%	0.281	65%	1.22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.2.12.4	Program Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					0.255		0.31		0.334		0.354		0.375		1.63	
		Persentase penerbitan Perizinan Bidang Jasa Usaha sesuai SOP	%	98.96%	100.00%	0.128	100%	0.155	100%	0.167	100%	0.177	100%	0.187	100%	0.81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Penerbitan Perizinan Bidang Pembangunan sesuai SOP	%	99.88%	100%	0.128	100%	0.155	100%	0.167	100%	0.177	100%	0.187	100%	0.81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.2.12.5	Program Pengolahan Data Informasi Perizinan dan Investasi	Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik	Jumlah	32	55	0.191	60	0.232	65	0.25	70	0.265	75	0.281	75	1.22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						0.128		0.155		0.167		0.177		0.187		0.81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi	%	43%	100%	0.128	100%	0.155	100%	0.167	100%	0.177	100%	0.187	100%	0.81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga																
1.2.13.1	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda																

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						0.509		0.617		0.665		0.705		0.747		3.24	
		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	51%	60%	0.254	70%	0.309	80%	0.332	90%	0.352	100%	0.373	100%	1.62	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.2.13.2	Program Pengelolaan Olahraga Pendidikan	Jumlah Komunitas Kreatif yang berperan dalam pembangunan	%	N/A	0%	0.254	20%	0.309	35%	0.332	50%	0.352	65%	0.373	65%	1.62	Dinas Pemuda dan Olahraga
						1.272		1.543		1.662		1.762		1.867		8.11	
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	N/A	20%	0.509	20%	0.617	20%	0.665	20%	0.705	20%	0.747	20%	3.24	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.2.13.3	Program Pengelolaan Organisasi Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	N/A	50%	0.763	55%	0.926	60%	0.997	65%	1.057	70%	1.12	70%	4.86	Dinas Pemuda dan Olahraga
						0.763		0.926		0.997		1.057		1.12		4.86	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	%	N/A	60.00%	0.381	65.00%	0.463	70.00%	0.499	75.00%	0.529	80.00%	0.56	80.00%	2.43	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Pelatih Yang Bersertifikat	%	N/A	100%	0.381	100%	0.463	100%	0.499	100%	0.529	100%	0.56	100%	2.43	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.2.14	Statistik																
1.2.14.1	Program pengembangan data/informasi statistik sektoral																
						2.523		3.062		3.298		3.497		3.704		16.08	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Persentase Data Sektoral Perangkat Daerah Yang Harius Di Penuhi	%	0	4%	1.262	28%	1.531	52%	1.649	76%	1.748	100%	1.852	100%	8.04	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi dengan Open DataKota Bekasi	%	0	4%	1.262	28%	1.531	52%	1.649	76%	1.748	100%	1.852	100%	8.04	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
1.2.15	Persandian																
1.2.15.1	Program persandian untuk pengamanan informasi																
						0.757		0.918		0.989		1.049		1.111		4.83	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Persentase Sistem keamanan informasi milik pemerintah daerah yang dikelola	%	100%	100%	0.378	100%	0.459	100%	0.495	100%	0.524	100%	0.556	100%	2.41	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
		Persentase Perangkat Daerah yang	%	3.50%	16.50%	0.378	42.50%	0.459	87.50%	0.495	100%	0.524	-	0.556	100%	2.41	Dinas Komunikasi Informasi Statistik

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		menggunakan layanan persandian															dan Persandian
1.2.16	Kebudayaan																
1.2.16.1	Program Cagar Budaya																
						1.254		1.522		1.639		1.738		1.841		7.99	
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	8	3	0.502	3	0.609	4	0.656	4	0.695	5	0.736	27	3.2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Museum kebudayaan yang dibangun	Museum	0	0	0.752	0	0.913	0	0.983	0	1.043	1	1.105	1	4.8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1.2.17	Perpustakaan																
1.2.17.1	Program Budaya Gemar Membaca																
						0.146		0.177		0.191		0.202		0.214		0.93	DINAS PERPUSTAKAAN
1.2.17.2	Program Pengembangan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Aktif	%	N/A	2%	0.146	2%	0.177	2%	0.191	2%	0.202	2%	0.214	2%	0.93	DINAS PERPUSTAKAAN
						0.34		0.413		0.445		0.471		0.499		2.17	
		Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	18.20%	35%	0.102	35%	0.124	35%	0.133	35%	0.141	35%	0.15	35%	0.65	DINAS PERPUSTAKAAN
		Persentase Perpustakaan yang terintegrasi sistem informasi perpustakaan	%	N/A	2%	0.102	2%	0.124	2%	0.133	2%	0.141	2%	0.15	2%	0.65	DINAS PERPUSTAKAAN
		Persentase keanekaragaman koleksi	%	33.16%	35%	0.136	40%	0.165	45%	0.178	50%	0.189	55%	0.2	55%	0.87	DINAS PERPUSTAKAAN
1.2.18	Kearsipan																
1.2.18.1	Program Penyelenggaraan Kedinasan Kearsipan Daerah																
						0.603		0.732		0.788		0.836		0.885		3.84	Dinas Kearsipan Daerah
		Persentase pengelolaan Dinas Kearsipan Daerah inaktif	%	N/A	20%	0.151	40%	0.183	60%	0.197	80%	0.209	100%	0.221	100%	0.96	Dinas Kearsipan Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan Dinas	%	N/A	50%	0.151	54%	0.183	58%	0.197	63%	0.209	67%	0.221	67%	0.96	Dinas Kearsipan Daerah

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kearsipan Daerah secara baku															
		Penambahan khasanah Dinas Kearsipan Daerah statis pada depo Dinas Kearsipan Daerah	jumlah	N/A	2	0.151	5	0.183	8	0.197	12	0.209	15	0.221	15	0.96	Dinas Kearsipan Daerah
		Persentase peningkatan layanan informasi kedinasan Kearsipan Daerah	%	N/A	5%	0.151	20%	0.183	30%	0.197	40%	0.209	50%	0.221	50%	0.96	Dinas Kearsipan Daerah
2	Layanan Urusan Pilihan																
2.1	Pariwisata																
2.1.1	Program Promosi Pariwisata																
						0.502		0.609		0.656		0.695		0.736		3.2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah kawasan wisata yang ditata	Lokasi	2	1	0.351	1	0.426	1	0.459	1	0.487	1	0.515	7	2.24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.1.2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan usaha/jasa kepariwisataan yang berizin	%	1200 pelaku usaha	40%	0.15	10%	0.183	10%	0.197	10%	0.209	10%	0.221	2460 pelaku usaha	0.96	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						0.502		0.609		0.656		0.695		0.736		3.2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.1.3	Program Pengembangan Kesenian	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	907729	925883	0.502	944400	0.609	963288	0.656	982553	0.695	1002204	0.736	1002204	3.2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
						0.251		0.304		0.328		0.348		0.368		1.6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah Penyelenggaraan event bekasi kreatif	Event	6	8	0.251	10	0.304	12	0.328	14	0.348	16	0.368	16	1.6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.2	Pertanian																
2.2.1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan																
						0.733		0.89		0.958		1.016		1.076		4.67	
		Produksi komoditas pertanian	Ton	51,220,01	52,244,40	0.22	53,289,29	0.267	54,355,07	0.287	55,442,17	0.305	56,551,00	0.323	56,551,00	1.4	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	1,856,36	1,949,18	0.147	2,046,64	0.178	2,148,97	0.192	2,256,42	0.203	2,369,24	0.215	2,369,24	0.93	Dinas Pertanian dan Perikanan

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah produksi peternakan	Ton	15,118,00	15,420,00	0.147	15,728,00	0.178	16,042,00	0.192	16,362,00	0.203	16,689,00	0.215	16,689,00	0.93	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.2.2	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Pertanian, peternakan dan perikanan	Jumlah Produksi Ikan Hias	ekor	21,006,510,00	22,056,836,00	0.22	23,159,677,00	0.267	24,317,661,00	0.287	25,533,544,00	0.305	26,810,221,00	0.323	26,810,221,00	1.4	Dinas Pertanian dan Perikanan
						0.733		0.89		0.958		1.016		1.076		4.67	
		Jumlah Produksi olahan hasil peternakan	Ton	3,511,24	3,582,24	0.44	3,653,88	0.534	3,726,96	0.575	3,801,50	0.61	3,877,24	0.646	3,877,24	2.8	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.2.3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah Produksi olahan hasil perikanan	Ton	82,745,20	86,882,46	0.293	91,226,58	0.356	95,787,91	0.383	100,577,31	0.406	105,606,17	0.431	105,606,17	1.87	Dinas Pertanian dan Perikanan
						0.367		0.445		0.479		0.508		0.538		2.34	
		Terkendalnya penyakit hewan menular dan Zoonosis	Kasus	tidak ada	tidak ada	0.147	tidak ada	0.178	tidak ada	0.192	tidak ada	0.203	tidak ada	0.215	tidak ada	0.93	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Unit usaha peternakan, kesehatan dan produk hewan yang bersertifikat teknis	unit	53	61	0.22	69	0.267	77	0.287	85	0.305	93	0.323	93	1.4	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.3	Perdagangan																
2.3.1	Program Pengendalian Ketersediaan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting																
						0.622		0.754		0.813		0.861		0.913		3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.3.2	Program Metrologi Legal	Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	%	<1,5%	<1,5%	0.622	<1,5%	0.754	<1,5%	0.813	<1,5%	0.861	<1,5%	0.913	<1,5%	3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						0.622		0.754		0.813		0.861		0.913		3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.3.3	Program Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	Unit	18000	18900	0.622	19845	0.754	20341	0.813	21370	0.861	21904	0.913	21904	3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						0.622		0.754		0.813		0.861		0.913		3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.3.4	Program Promosi dan Kampanye Pencitraan Produk Ekspor	Jumlah pasar rakyat yang berbasis modern	Pasar	5	7	0.622	9	0.754	10	0.813	11	0.861	12	0.913	12	3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						0.311		0.377		0.406		0.431		0.456		2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Nilai Ekspor	US Dollar	263,574,932	266,210,681	0.311	268,872,788	0.377	271,561,516	0.406	274,277,131	0.431	277,019,902	0.456	277,019,902	2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.4	Perindustrian																
2.4.1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																
						0.622		0.754		0.813		0.861		0.913		3.96	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Jumlah Industri kreatif yang memiliki legalitas	Unit	789	813	0.186	837	0.226	862	0.244	888	0.258	915	0.274	915	1.19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Terbangunnya Technopark Kota Bekasi	Unit	N/A	N/A	0.435	1	0.528	0	0.569	0	0.603	0	0.639	1	2.77	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Penunjang Urusan / Pendukung																
3.1	Perencanaan Pembangunan																
3.1.1	Program formulasi penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi																
						4.615		5.6		6.033		6.396		6.776		29.42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	91%	100%	0.385	100%	0.467	100%	0.503	100%	0.533	100%	0.565	100%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100%	100%	0.385	100%	0.467	100%	0.503	100%	0.533	100%	0.565	100%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Kesesuaian Dokumen rencana pembangunan dengan RTRW	%	100%	100%	0.385	100%	0.467	100%	0.503	100%	0.533	100%	0.565	100%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (Jml rekom yg ditindaklanjuti / rekom yang dibuat) x100	%	100%	100%	0.385	100%	0.467	100%	0.503	100%	0.533	100%	0.565	100%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	100%	100%	0.385	100%	0.467	100%	0.503	100%	0.533	100%	0.565	100%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	%	100%	100%	0.385	100%	0.467	100%	0.503	100%	0.533	100%	0.565	100%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100%	100%	0.385	100%	0.467	100%	0.503	100%	0.533	100%	0.565	100%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan sektoral bidang pembangunan manusia dan masyarakat	%	N/A	30%	0.385	40%	0.467	50%	0.503	60%	0.533	70%	0.565	70%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu dan tepat aturan	%	100%	100%	0.385	100%	0.467	100%	0.503	100%	0.533	100%	0.565	100%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan sektoral bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	N/A	30.00%	0.385	40.00%	0.467	50.00%	0.503	60.00%	0.533	70.00%	0.565	70.00%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan sektoral bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	N/A	30.00%	0.385	40.00%	0.467	50.00%	0.503	60.00%	0.533	70.00%	0.565	70.00%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan	%	100%	100%	0.385	100%	0.467	100%	0.503	100%	0.533	100%	0.565	100%	2.45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.2	Keuangan																
3.2.1	Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah dan Perbendaharaan Daerah																
						2.765		3.355		3.614		3.832		4.06		17.63	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	A	0.415	A	0.503	A	0.542	A	0.575	A	0.609	A	2.64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	%	100%	100%	0.415	100%	0.503	100%	0.542	100%	0.575	100%	0.609	100%	2.64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu	%	100%	100%	0.415	100%	0.503	100%	0.542	100%	0.575	100%	0.609	100%	2.64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD	%	100%	100%	0.553	100%	0.671	100%	0.723	100%	0.766	100%	0.812	100%	3.53	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Bidang tanah milik pemkot yang bersertifikat	Sertifikat	241	15	0.553	20	0.671	25	0.723	30	0.766	35	0.812	366	3.53	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM yang Diterima	%	100%	100%	0.415	100%	0.503	100%	0.542	100%	0.575	100%	0.609	100%	2.64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.2.2	Program Perencanaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.727		4.520		4.872		5.165		5.472		23.750	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah	%	693.072	1%	0.559	1%	0.678	1%	0.731	1%	0.775	1%	0.821	728.426	3.56	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	43.04%	55.29%	0.559	56.81%	0.678	58.29%	0.731	59.54%	0.775	60.85%	0.821	60.85%	3.56	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	%	627.923	91%	0.466	92%	0.565	93%	0.609	94%	0.646	95%	0.684	95%	2.97	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Pajak Parkir terhadap PAD	%	1.70%	3.70%	0.279	3.90%	0.339	4.10%	0.365	4.30%	0.387	4.50%	0.41	4.50%	1.78	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah	%	100%	100%	0.932	100%	1.13	100%	1.218	100%	1.291	100%	1.368	100%	5.94	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sesuai SOP	%	90%	100%	0.932	100%	1.13	100%	1.218	100%	1.291	100%	1.368	100%	5.94	Badan Pendapatan Daerah
3.2.3	Program Pembinaan dan Pemantauan BUMD					12.13		14.719		15.855		16.81		17.809		77.32	Sekretariat Daerah (Bag, Perekonomian)
		Jumlah BUMD Dalam Kondisi Sehat	jumlah	5	6	6.065	7	7.359	7	7.928	7	8.405	8	8.905	8	38.66	Sekretariat Daerah (Bag, Perekonomian)
		Persentase Peningkatan Deviden BUMD	%	12,086,694,279	2%	6.065	2%	7.359	3%	7.928	3%	8.405	4%	8.905	4%	38.66	Sekretariat Daerah
3.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan																
3.3.1	Program Administrasi dan Manajemen					1.061		1.287		1.387		1.47		1.558		6.76	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Persentase Pelayanan Managemen ASN tepat waktu	%	100%	100%	0.637	100%	0.772	100%	0.832	100%	0.882	100%	0.935	100%	4.06	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Persentase penurunan Kasus Kasus Indisipliner aparatur	%	100%	100%	0.424	100%	0.515	100%	0.555	100%	0.588	100%	0.623	100%	2.71	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3.3.2	Program Pengelolaan pegawai dan dukungan manajemen					1.326		1.609		1.733		1.838		1.947		8.45	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan untuk peningkatan Kompetensi	%	100%	100%	0.663	100%	0.805	100%	0.867	100%	0.919	100%	0.974	100%	4.23	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan sesuai Kompetensi	%	100%	100%	0.663	100%	0.805	100%	0.867	100%	0.919	100%	0.974	100%	4.23	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3.4	Penelitian dan pengembangan																
3.4.1	Program Kelitbangan Utama dan Pendukung					3.077		3.733		4.022		4.264		4.517		19.61	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	%	N/A	10%	1.231	10%	1.493	20%	1.609	40%	1.706	60%	1.807	60%	7.85	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	%	N/A	10%	2.231	10%	1.493	20%	1.609	40%	1.706	60%	1.807	60%	7.85	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Inovasi dan teknologi	%	N/A	10%	3.231	10%	1.493	20%	1.609	40%	1.706	60%	1.807	60%	7.85	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah	Kebijakan	N/A	1	1.846	1	2.24	1	2.413	1	2.558	1	2.71	5	11.77	Badan Penelitian dan Pengembangan
3.5	Pengawasan																
3.5.1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					0.948		1.15		1.239		1.314		1.392		6.04	Inspektorat Kota
		Perangkat Daerah yang akuntabilitasnya baik (kategori B ke atas)	%	N/A	74%	0.379	77%	0.46	79%	0.496	80%	0.525	82%	0.557	82%	2.42	Inspektorat Kota
		Tindak lanjut temuan Eksternal	%	N/A	85%	0.284	85%	0.345	90%	0.372	90%	0.394	95%	0.417	95%	1.81	Inspektorat Kota
		Tindak lanjut temuan Internal	%	N/A	71%	0.284	75%	0.345	75%	0.372	80%	0.394	80%	0.417	80%	1.81	Inspektorat Kota
3.5.2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					0.474		0.575		0.619		0.657		0.696		3.02	Inspektorat Kota
		Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	N/A	3	0.474	3	0.575	3	0.619	3	0.657	3	0.696	3	3.02	Inspektorat Kota

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.5.3	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					0.948		1.15		1.239		1.314		1.392		6.04	Inspektorat Kota
		Perangkat daerah yang maturitas SPIP level terdefinisi	Jumlah	N/A	16	0.474	17	0.575	18	0.619	19	0.657	20	0.696	20	3.02	Inspektorat Kota
		Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK	Jumlah	0	1	0.474	2	0.575	3	0.619	4	0.657	5	0.696	5	3.02	Inspektorat Kota
		Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WTP	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	
3.6	Sekretariat Dewan																
3.6.1	Program administrasi, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD																
						32.467		39.394		42.437		44.992		47.665		206.95	Sekretariat Dewan
		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	%	100%	100%	8.117	100%	9.848	100%	10.609	100%	11.248	100%	11.916	100%	51.74	Sekretariat Dewan
		Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	100%	100%	8.117	100%	9.848	100%	10.609	100%	11.248	100%	11.916	100%	51.74	Sekretariat Dewan
		Persentase Terfasilitasinya kegiatan DPRD	%	100%	100%	8.117	100%	9.848	100%	10.609	100%	11.248	100%	11.916	100%	51.74	Sekretariat Dewan
3.7	Kecamatan	Persentase Terfasilitasinya informasi DPRD	%	100%	100%	8.117	100%	9.848	100%	10.609	100%	11.248	100%	11.916	100%	51.74	Sekretariat Dewan
3.7.1	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaran Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen																
						140.199		170.111		183.251		194.284		205.83		893.67	KECAMATAN
		Persentase LPM Aktif	%	100%	100%	20.028	100%	24.302	100%	26.179	100%	27.755	100%	29.404	100%	127.67	KECAMATAN

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase PKK aktif	%	100%	100%	20.028	100%	24.302	100%	26.179	100%	27.755	100%	29.404	100%	127.67	KECAMATAN
		Posyandu Aktif	%	75%	80%	20.028	85%	24.302	90%	26.179	95%	27.755	100%	29.404	100%	127.67	KECAMATAN
		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	12%	15%	20.028	18%	24.302	21%	26.179	26%	27.755	30%	29.404	30%	127.67	KECAMATAN
		Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan	%	100%	100%	20.028	100%	24.302	100%	26.179	100%	27.755	100%	29.404	100%	127.67	KECAMATAN
		Tersedianya Monografi RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui	%	100%	100%	20.028	100%	24.302	100%	26.179	100%	27.755	100%	29.404	100%	127.67	KECAMATAN
3.7.2	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase kenaikan jumlah masyarakat yang mengikuti event sosial kemasyarakatan	%	80%	80%	20.028	80%	24.302	85%	26.179	85%	27.755	85%	29.404	85%	127.67	KECAMATAN
		Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	100%	100%	40.057	100%	48.603	100%	52.357	100%	55.51	100%	58.808	100%	255.34	KECAMATAN
						20.028		24.302		26.179		27.755		29.404		127.67	KECAMATAN
3.8	Sekretariat daerah	Persentase wilayah tertib K3	%	100%	100%	20.028	100%	24.302	100%	26.179	100%	27.755	100%	29.404	100%	127.67	KECAMATAN
3.8.1.	Program kebijakan daerah, koordinasi, pembinaan, dukungan manajemen dan pelayanan administratif																
						8.092		9.814		10.57		11.207		11.873		51.55	Sekretariat Daerah (Bag, Organisasi)
		Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%	N/A	100%	0.578	100%	0.701	100%	0.755	100%	0.8	100%	0.848	100%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Organisasi)
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	%	N/A	70%	0.578	70%	0.701	70%	0.755	70%	0.8	70%	0.848	70%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Tata Pemerintahan)

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase capaian IKK 2,1 dan 2,3 LPPD yang naik	%	45 indikator meningkat (34,62 %)	25%	0.578	25%	0.701	25%	0.755	25%	0.8	25%	0.848	25%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Tata Pemerintahan)
		Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	%	N/A	100%	0.578	100%	0.701	100%	0.755	100%	0.8	100%	0.848	100%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Hukum)
		Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	N/A	100%	0.578	100%	0.701	100%	0.755	100%	0.8	100%	0.848	100%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Tata Usaha)
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	%	N/A	35%	0.578	40%	0.701	70%	0.755	75%	0.8	85%	0.848	85%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Kesejahteraan Sosial)
		Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya	%	N/A	100%	0.578	100%	0.701	100%	0.755	100%	0.8	100%	0.848	100%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Kesejahteraan Sosial)
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	%	N/A	70%	0.578	70%	0.701	70%	0.755	70%	0.8	70%	0.848	70%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Pembangunan)
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	%	N/A	10%	0.578	10%	0.701	10%	0.755	10%	0.8	10%	0.848	10%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Perekonomian)
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	%	N/A	20%	0.578	40%	0.701	60%	0.755	80%	0.8	100%	0.848	100%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Kerjasama)
		Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	%	N/A	9.30%	0.578	9.30%	0.701	9.30%	0.755	9.30%	0.8	9.30%	0.848	9.30%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Humas)
		Persentase pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	%	N/A	70%	0.578	70%	0.701	70%	0.755	70%	0.8	70%	0.848	70%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, KLPBJ)
		Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	%	30.43%	52.17%	0.578	65.22%	0.701	78.26%	0.755	91.30%	0.8	100%	0.848	100%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Tata Pemerintahan)
3.8.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	%	N/A	90%	0.578	93%	0.701	95%	0.755	97%	0.8	100%	0.848	100%	3.68	Sekretariat Daerah (Bag, Hukum)
						20.217		24.531		26.426		28.017		29.682		128.87	Sekretariat Daerah (Bag, Perlengkapan)

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	RENCANA TARGET KINERJA DAN INDIKASI PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		PERANGKAT DINAS
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	%	100%	100%	6.065	100%	7.359	100%	7.928	100%	8.405	100%	8.905	100%	38.66	Sekretariat Daerah (Bag, Perlengkapan)
		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100%	100%	6.065	100%	7.359	100%	7.928	100%	8.405	100%	8.905	100%	38.66	Sekretariat Daerah (Bag, Umum)
		Persentase ketersediaan kantor pemerintahan dalam kondisi baik	%	100%	100%	8.087	100%	9.812	100%	10.57	100%	11.207	100%	11.873	100%	51.55	Sekretariat Daerah/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
3.9	Bencana																
3.9.1	Program Dukungan Manajemen, koordinasi pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana																
						1.896		2.300		2.498		2.644		2.796		12.110	
		Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	1.172	100	1.422	100	1.532	100	1.624	100	1.721	100	7.47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Dinas Sosial
		Persentase kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100	100	0.243	100	0.294	100	0.317	100	0.336	100	0.356	100	1.55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	%	100	100	0.061	100	0.074	100	0.079	100	0.084	100	0.089	100	0.39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	0.14	100	0.17	100	0.19	100	0.20	100	0.21	100	0.90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	0.14	100	0.17	100	0.19	100	0.20	100	0.21	100	0.90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran, dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi periode 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi periode 2018-2023.

IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Bekasi. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (impact) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran RPJMD, disajikan pada Tabel 8.1. Sementara indikator kinerja hasil (outcome) yang digunakan untuk menggambarkan kinerja program disajikan pada Tabel 8.2. Pemilahan kinerja mulai dari IKU daerah, IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Per Tahun					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
				target	target	target	target	target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64.36	65.86	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	62.49	64	65.8	67.6	69.4	72	72
3	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase peningkatan PAD	%	Rp.1.999.018.742.158,68	35.12%	11.67%	11.57%	10.57%	10.89%	Rp.4.125.916.972.944,80
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	78.33	80.26	82.19	84.12	86.05	87.89	87.89
6	Indeks Infrastruktur wilayah	Nilai	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.73%	5.73%	5.90%	6.10%	6.30%	6.50%	6.50%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Per Tahun					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
				target	target	target	target	target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp.10.460.053.504.800,-	10% (Rp. 11.506.058.855.280,-)	10% (Rp.12.656.664.740.808,00)	10% (Rp. 13.922.331.214.888,80)	10% (Rp. 15.314.564.336.377,70)	10% (Rp. 16.846.020.770.015,40)	Rp. 16.846.020.770.015,40
9	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80.33	80.93	81.23	81.53	81.83	82.13	80,35
10	Angka Pencari Kerja	%	9.32	9.07	8.96	8.87	8.79	8.72	8.72
11	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45	6	5,5	5,5	5,5	6	73,5
12	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	47,15	49	52	54	56	59	59

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.73%	5.73%	5.90%	6.10%	6.30%	6.50%	6,50%
2	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp. 10.460.053.504.800,-	10%	10%	10%	10%	10%	Rp. 16.846.020.770.015.40
				(Rp. 11.506.058.855.280,-)	(Rp. 12.656.664.740.808,00)	(Rp. 13.922.331.214.888,80)	(Rp. 15.314.564.336.377,70)	(Rp. 16.846.020.770.015,40)	
3	Persentase Kenaikan Penanaman Modal berdasarkan LKPM	%	Rp. 6.372.571.600.000,00	10%	10%	10%	10%	10%	Rp. 10.263.090.287.516,00
				(Rp. 7.009.828.760.000,00)	(Rp. 7.710.811.636.000,00)	(Rp. 8.481.892.799.600,00)	(Rp. 9.330.082.079.560,00)	(Rp. 10.263.090.287.516,00)	

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Persentase Kenaikan Penanaman Modal Berdasarkan Perizinan Usaha dan Penyertaan Modal		Rp. 4.087.481.904.800,00	10% (Rp. 4.496.230.095.280,00)	10% (Rp.4.945.853.104.808,00)	10% (Rp.5.440.438.415.288,80)	10% (Rp.5.984.482.256.817,68)	10% (Rp.6.582.930.482.499,45)	Rp.6.582.930.482.499,45
5	Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	397 Perusahaan	25%	38%	48%	57%	65%	65%
6	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif	%	N/A	N/A	5%	7%	11%	15%	15%
7	Persentase peningkatan usaha/jasa kepariwisataan yang berizin	%	1200 pelaku usaha	40%	10%	10%	10%	10%	2460 pelaku usaha
8	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	907729	925883	944400	963288	982553	1002204	1002204
9	Jumlah Industri kreatif yang memiliki legalitas	Unit	789	813	837	862	888	915	915
10	Terbangunnya Technopark Kota Bekasi	Unit	N/A	N/A	1	0	0	0	1
11	Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil	%	2.086 usaha mikro	2%	2%	2%	2%	2%	216 usaha kecil
12	Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif	%	1000 unit	10%	10%	10%	10%	10%	1500 unit
13	Persentase PKL yang menempati tempat yang telah ditetapkan	%	NA	5%	15%	15%	15%	10%	360 PKL

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Persentase koperasi aktif	%	612 koperasi	3%	3%	4%	4%	4%	722 koperasi
15	Peningkatan Skala Usaha Koperasi	Koperasi	NA	2	2	2	2	2	10 Koperasi
16	Persentase peningkatan nilai sektor perdagangan dan jasa	%	32,482,110.00 juta (th 2017)*	6%	6%	6%	6%	6%	Rp. 46,076,493.84 Juta *
17	Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	%	<1,5%	<1,5%	<1,5%	<1,5%	<1,5%	<1,5%	<1,5%
18	Nilai Ekspor	USD	263.574.932	266.210.681	268.872.788	271.561.516	274.277.131	277.019.902	277.019.902
19	Angka Kemiskinan	%	4,2%	N/A	4,1%	3,8%	3,7%	3,7%	3,7%
20	Angka Pencari Kerja	%	9.32	9.07	8.96	8.87	8.79	8.72	8.72
21	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase Pencari kerja yang memiliki sertifikat keahlian	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
23	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan.	%	9,72%	9,72%	17,52%	23,34%	23,63%	23,28%	23,28%
24	Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Daya Beli	Nilai	83,29	84,01	84,37	84,73	85,09	85,45	85,45
2	Stabilisasi harga pangan	%	17%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
3	Persentase Penanganan kerawanan pangan	%	69,58%	73,76%	77,76%	81,85%	85,94%	90%	90%
4	Persentase produk PAH yang ASUH	%	42,50%	42,93%	43,35%	43,79%	44,23%	50,00%	50,00%
5	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	86,7%	88%	89%	90%	91%	92%	92%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Produksi komoditas pertanian	Ton	51.220,01	52.244,40	53.289,29	54.355,07	55.442,17	56.551,00	56.551,00
7	Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	1.856,36	1.949,18	2.046,64	2.148,97	2.256,42	2.369,24	2.369,24
8	Jumlah produksi peternakan	Ton	15.118,00	15.420,00	15.728,00	16.042,00	16.362,00	16.689,00	16.689,00
9	Jumlah Produksi Ikan Hias	Ekor	21.006.510	22.056.836	23.159.677	24.317.661	25.533.544	26.810.221	26.810.221
10	Jumlah Produksi olahan hasil peternakan	Ton	3.511,24	3.582,24	3.653,88	3.726,96	3.801,50	3.877,24	3.877,24
11	Jumlah Produksi olahan hasil perikanan	Ton	82.745,20	86.882,46	91.226,58	95.787,91	100.577,31	105.606,17	105.606,17
12	Terkendalinya penyakit hewan menular dan Zoonosis	Kasus	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
13	Unit usaha peternakan, kesehatan dan produk hewan yang bersertifikat teknis	Unit	53	61	69	77	85	93	93
14	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Prestasi	N.A	10 TP, 2 TN	15 TP, 4 TN	20 TP, 6 TN	25 TP, 8 TN	30 TP, 10 TN, 1 TI	30 TP, 10 TN, 1 TI
15	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	51%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
16	Jumlah Komunitas Kreatif yang berperan dalam pembangunan	%	N/A	0%	20%	35%	50%	65%	65%
17	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	N/A	20%	20%	20%	20%	20%	20%
18	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	N/A	50%	55%	60%	65%	70%	70%
19	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	N/A	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
20	Persentase Pelatih Yang Bersertifikat	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Indeks Toleransi Beragama	Nilai	5,89	5,917	5,944	5,971	5,998	6,025	6,025
22	Persentase penyelesaian masalah keagamaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	indeks keamanan dan ketertiban	Nilai	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
24	Indeks risiko bencana	Nilai	113	113	113	113	113	113	113
25	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45%	6%	5,5%	5,5%	5,5%	6%	73,5%
26	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1:31	1:31	1:31	1:31	1:31	1:31	1:31
27	Persentase penegakan perda	%	60%	5%	5%	5%	5%	5%	85%
28	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	60%	60%	65%	65%	70%	70%	75%
29	persentase wilayah tertib K3	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Kasus Perselisihan Sara dan Kelompok Masyarakat yang diselesaikan	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Persentase penyelesaian konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Persentase Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	%	253	10%	10%	10%	10%	10%	10%
33	Persentase peningkatan pembinaan politik daerah	%	1,65	3%	5%	5%	5%	5%	5%
34	Indeks Infrastruktur wilayah	Nilai	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93	27.93
35	Indeks Prasarana wilayah	Nilai	44.09	50.01	51.44	55.07	56.75	60.34	60.34
36	persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	96%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
37	persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Persentase Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difable dan lansia	%	40%	40%	42%	45%	47%	50%	50%
39	persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik	%	60%	60%	70%	80%	85%	92%	92%
III	ASPEK PELAYANAN UMUM								
3.1	Pendidikan								
1	Indeks Pendidikan	Nilai	74,59	75,23	75.77	76.21	76.55	76.79	76.79
2	APK SD MI	%	114.44	114	113.51	113.12	112.78	112.22	112.22
3	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	%	83.61	86	88	90	92	94	94
4	Rata rata Nilai USBN SD	Nilai	80.11	81	82	83	84	85	85
5	APK SMP/MTs	%	96.35	96.74	96.91	97.25	97.75	98	98
6	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Nilai	97.54	97.75	97.86	97.97	98.00	98.20	98.20
7	Rata rata Nilai UN SMP	Nilai	61.34	61.54	61.73	61.85	61.92	62	62
8	Jumlah prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional tingkat SD	Prestasi	25	26	27	28	29	30	30
9	Jumlah prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional tingkat SMP	Prestasi	25	26	27	28	29	30	30
10	Rasio Sekolah SD Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:4	12:5	12:6	12:7	12:8	12:9	12:9
11	Rasio Sekolah SMP Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:1	12:2	12:3	12:4	12:5	12:6	12:6

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Rasio Siswa SD : Rombel (SPM 1:32)	Rasio	1:30	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
13	Rasio Siswa SMP : Rombel (SPM 1:32)	Rasio	1:33	1:34	1:35	1:36	1:36	1:36	1:36
14	Daya Tampung SD/MI (Negeri+Swasta)	%	112.83	108	106	103	101	100	100
15	Daya Tampung SMP/MTs (Negeri+Swasta)	%	84.72	84.92	86.24	88.38	90.51	92.68	94.68
16	Persentase SD memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)	%	66.52%	66.72%	66.92%	67%	67.20%	67.40%	67.40%
17	Persentase SD memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)	%	72.68%	72.88%	73%	73.22%	73.42%	73.62%	73.62%
18	Persentase SMP memiliki Laboratorium IPA dan atau Komputer (Negeri+Swasta)	%	72%	72.50%	73%	73.50%	74%	74.50%	74.50%
19	Persentase SMP memiliki perpustakaan sesuai standar (Negeri+Swasta)	%	84.73%	85%	85.50%	86%	86.50%	87%	87%
20	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD/SMP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	APK Paud (Usia 3-6)	%	55.69	56	57	58	59	60	60
22	Rasio Guru : Siswa PAUD	Rasio	1:7	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8
23	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1 PAUD	%	18.96%	19%	19.2%	19.4%	19.6%	19.8%	19.8%
24	Rasio TK Negeri per Kecamatan	Rasio	12:3	12:4	12:5	12:6	12 : 7	12 :8	12:8
25	TK Terakreditasi	Rasio	20.2	20.4	21	21.6	22.2	22.8	22.8

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik PAUD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Persentase LKP Berijin	%	54.71%	56.10%	58.54%	60.49%	62.44%	64.39%	64.39%
28	Persentase PKBM Terakreditasi	%	27.45%	29.16%	33.43%	35.97%	36.11%	38.04%	38.04%
29	Persentase Daya Tampung PKBM Terhadap siswa putus sekolah/tidak melanjutkan pendidikan	%	N/A	120	118	117	116	115	115
30	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan dasar anak usia pendidikan non formal	%	100	100	100	100	100	100	100
31	Persentase Tutor dengan kualifikasi akademik D4/S1	%	100	100	100	100	100	100	100
32	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	%	59.31	59.64	59.92	60.21	60.54	60.76	60.76
33	Persentase guru dengan kualifikasi akademik minimal D4/S1 (SD, SMP)	%	95.98	96	96.05	96.1	96.15	96.2	96.2
34	Persentase Jumlah SD yang memiliki Tenaga Kependidikan	%	71.10%	78%	78.50%	79%	79.50%	80%	80%
35	Cakupan Pelayanan Berbasis IT	%	4	5	6	7	8	9	9
36	Persentase peningkatan layanan pendidikan	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
37	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan	%	64.45%	64.65%	64.71%	64.85%	64.90%	65.00%	65.00%
38	Persentase SD berakreditasi A	%	77.83%	89.85%	90%	90.25%	90.40%	90.45%	90.45%
39	Persentase SMP berakreditasi A	%	62.09%	76.85%	77.00%	77.30%	77.75%	80%	80%
40	Persentase Perpustakaan Aktif	%	N/A	2%	2%	2%	2%	2%	2%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	18,20%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
42	Persentase Perpustakaan yang terintegrasi sistem informasi perpustakaan	%	N/A	2%	2%	2%	2%	2%	2%
43	Persentase keanekaragaman koleksi	%	33,16%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
3.2	Kesehatan								
1	Indeks Kesehatan	Nilai	75,21	75,39	75,57	75,75	75,93	76,11	76,11
2	Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	%	58%	58%	60%	62%	64%	65%	65%
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan bagi peserta jaminan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prevalensi kekurangan gizi pada balita (kesehatan keluarga dan gizi)	%	7%	7%	5%	5%	4%	3%	3%
6	persentase Institusi memenuhi syarat kesehatan	%	62%	62%	65%	68%	72%	75%	75%
7	Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	Unit	42	42	45	49	52	56	56
8	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	%	90%	90%	91%	92%	93%	95%	95%
21	persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kesehatan								
22	persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas dan RS	%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
23	persentase PKM Terakreditasi	%	47,62%	64,29%	71,43%	83,33%	83,33%	83,33%	83,33%
24	persentase RS Terakreditasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
26	IKM Pelayanan kesehatan RSUD Type B	%	80	80	81	81	82	82	82
27	persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan RS	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	%	70%	70%	80%	100%	100%	100%	100%
29	Persentase terpenuhinya persyaratan minimal Rumah Sakit Kelas B	%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
3.3	Sosial								
1	Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat dalam 1 (satu) Tahun	%	42	9	9	9	9	9	9
2	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	Jumlah	285	5	6	7	8	9	9

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Persentase penyandang disabilitas telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase anak telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase lanjut usia telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tersedianya data dan informasi PMKS	Jumlah	1	1	2	1	2	1	1
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	persentase Cakupan anggota Poktan yang ber KB.	%	N/A	75%	76%	77%	78%	79%	79%
2	Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	75%	75%	76%	77%	78%	79%	79%
3	persentase Cakupan data Mikro Keluarga	%	N/A	60%	70%	80%	90%	100%	100%
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	N/A	9%	7%	6%	5%	5%	5%
3.5	Perempuan dan Anak								
1	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
4	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%
3.6	Penanganan Bencana								
1	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132	127	122	118	113	
2	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.7	Lingkungan Hidup								
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	47,15	49	52	54	56	59	59
2	Indeks kualitas air	Nilai	4 (6.44)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)	3 (IP=1-5)

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Indeks kualitas udara	Nilai	82	83	83,4	83,8	84,2	84,6	84,6
4	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	40,35%	50%	52%	55%	60%	65%	65%
5	Presentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
6	Jumlah Pembangunan Taman KEHATI	Lokasi	0	0	0	0	0	1	1
7	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Status	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Persentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan	%	100%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase institusi/kelompok masyarakat/lingkungan yang peduli lingkungan	%	NA	30	40	50	60	70	70
3.8	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
1	Persentase terbangunnya jalur sepeda	%	30%	30%	32%	35%	37%	40%	40%
2	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm) selama 2 Jam lebih dari 2 kali setahun	%	70%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
3	Persentase drainase (dengan konsep ecodrainage/resapan) dalam	%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	35%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kondisi baik								
4	Persentase pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman	%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	18%
5	Persentase pembangunan penataan dan pemeliharaan reklame	%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pembangunan pemeliharaan PJU	%	80%	85%	85%	92%	97%	100%	100%
7	Persentase pencapaian Kapasitas pengolahan SPALD-S 169000 m3	%	20%	20%	20%	30%	30%	100%	100%
8	Persentase pencapaian 6560 unit tengki septik	%	4%	9%	15%	30%	30%	15%	100%
9	Persentase pencapaian penambahan hingga 800 SPALD-T Skala permukiman	%	19%	0%	25%	25%	25%	25%	100%
10	Persentase pencapaian 8000 unit SPALD-T Skala kawasan	%	0%	0%	38%	38%	13%	13%	100%
11	Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	24,94%	26%	27%	28%	29%	30%	30%
12	Persentase pencapaian target tambahan 10 unit Sarana dan Prasarana persampahan terbangun	%	9%	10%	10%	30%	30%	20%	100%
13	Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Point	71.72	73	73	73	73	73	73
14	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	67.15%	74%	70%	64%	63%	62%	62%
15	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Persentase pencapaian perencanaan smart parking terpadu	%	N/A	-	25%	25%	25%	25%	100%
17	Persentase pelaksanaan penertiban parkir	%	N/A	-	25%	25%	25%	25%	100%
18	Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran (BALAKR)	%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	75%
19	Persentase pencapaian layanan 128 publikasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	%	25,8%	11,7%	15,6%	15,6%	15,6%	15,6%	74,2%
20	Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	%	15%	25%	35%	40%	45%	50%	50%
21	Persentase layanan pendataan dan inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	%	73%	78%	83%	88%	93%	100%	100%
22	Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran	%	73%	75%	77%	79%	80%	81%	81%
23	Jumlah layanan penyelamatan evaluasi operasi non kebakaran (kali)	%	136	138	140	142	144	145	145
24	Persentase Pemenuhan 279.490 M2 pengadaan tanah	%	0%	23%	20%	20%	18%	19%	100%
25	Persentase selesainya 40 sengketa tanah pada tahun 2023	%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
26	Indeks Sarana wilayah	%	NA	28,52	43,18	51,05	58,20	64,97	64,97

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Persentase ketersediaan 1119 RKB sebagai prasarana pendidikan dasar yang representatif	%	7%	7%	21%	24%	23%	25%	100%
33	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar (Poned)	%	34%	11%	22%	22%	22%	23%	100%
34	Persentase Ketersediaan 6 gedung RS Type D pada tahun 2023	%	14,29%	14%	29%	14%	14%	14%	86%
35	Persentase Ketersediaan 4 gedung perdagangan pada tahun 2023	%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%
36	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
37	Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota	Jumlah	3	3	3	3	3	3	15
38	Jumlah Rencana Penataan Kawasan Strategis Kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Jumlah	1	1	1	1	1	1	5
39	Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	100%
40	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	%	11%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	0,002%	11,1%
41	Persentase cakupan ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	21%	21%	53%	16%	7%	2%	100%
42	Persentase Ketersediaan 1 Krematorium, forensik dan rumah duka pada tahun 2020	%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Cakupan areal pemakaman sebagai ruang terbuka hijau	%	0.92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%
44	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk	%	35,70%	35.70%	40%	43%	47%	51%	51%
45	Jumlah sarana prasarana angkutan publik massal terintegrasi yang terbangun	Jumlah	1	0	0	1	1	1	4
46	Persentase sarana transportasi city tourism yang terbangun	%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	100%
47	persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	45%
48	Persentase pembinaan, pengendalian dan penindakan lalu lintas	%	0%	5%	10%	10%	10%	10%	45%
49	persentase kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50	Persentase peningkatan fasilitas penunjang transportasi	%	5%	5%	5%	5%	20%	25%	60%
51	Persentase rehabilitasi 3095 rumah tidak layak huni pada tahun 2023	%	32%	32%	16%	16%	19%	16%	100%
52	Cakupan ketersediaan rusunawa	%	2	1	1	1	1	1	5
53	Persentase Peningkatan kualitas lingkungan layak huni	%	24%	24%	28%	16%	16%	16%	100%
54	Persentase penyediaan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	%	17%	25%	32%	39%	46%	53%	53%
55	Indeks Utilitas wilayah	Nilai	NA	29,58	33,32	36,7	39,66	42,38	42,38

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Persentase rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan psu	%	19%	19%	22%	22%	22%	15%	100%
57	Persentase pelayanan 12800 SR air bersih non PDAM	%	26%	14%	16%	20%	23%	27%	100%
58	Persentase pelayanan 35000 SR air bersih PDAM	%	77%	14%	19%	21%	23%	23%	100%
59	Persentase sistem Utilitas terpadu (ducting) yang terbangun	%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	30%
60	persentase titik PJU dalam kondisi baik	%	85%	85%	92%	97%	100%	100%	100%
61	Persentase jaringan gas rumah tangga yang terpasang	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	5%
62	Persentase pengembangan jaringan gas rumah tangga melalui BUMD	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	5%
3.9	Pemerintahan								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64.36	65.86	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	63,49	64,00	65,8	67,6	69,4	72,00	72
3	Nilai EKPPD	Nilai	31,842	32,193	32,544	32,895	33,249	33,597	33,597
4	Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	%	N/A	70%	70%	70%	70%	70%	70%
6	Persentase capaian IKK 2.1 dan 2.3 LPPD yang naik	%	45 indikator meningkat - 34.62%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	%	N/A	35%	40%	70%	75%	85%	85%
10	Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	%	N/A	70%	70%	70%	70%	70%	70%
12	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	%	N/A	10	10	10	10	10	10
13	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	%	N/A	20%	40%	60%	80%	100%	100%
14	Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	%	N/A	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
15	Persentase pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	%	N/A	70%	70%	70%	70%	70%	70%
16	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	%	30,43%	52,17%	65,22%	78,26%	91,30%	100%	100%
17	Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	%	N/A	90%	93%	95%	97%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase ketersediaan kantor pemerintahan dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase Terfasilitasinya kegiatan DPRD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Persentase Terfasilitasinya informasi DPRD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.10	Komunikasi Dan Informasi								
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Lyanan Digital government	Jumlah	0	9	12	12	14	-	14
2	Jumlah layanan digital government yang di integrasikan	Jumlah	0	9	12	12	14	-	14
3	Cakupan unit kerja yang terkoneksi dengan jaringan primer	%	9%	9%	34%	66%	100%	100%	100%
4	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah kepada publik	%	34,5%	34,5%	50,8%	67,2%	83,6%	100%	83,6%
5	Persentase Tingkat Layanan infrastruktur pusat data	%	93%	94%	94,50%	95%	95,50%	96%	95,50%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	%	0	8%	17%	33%	50%	67%	50%
7	Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Digital dan media luar ruang	%	647	91%	93%	95%	98%	100%	98%
8	Persentase pengembangan kemitraan dalam rangka desiminasi informasi pemerintah kota bekasi	%	1	17%	33%	50%	67%	83%	67%
9	Persentase laporan hasil tindak lanjut aduan masyarakat secara online yang sudah ditangani oleh PD terkait	%	470	83%	85%	87%	90%	95%	90%
10	Persentase Data Sektoral Perangkat Daerah Yang Harius Di Penuhi	%	0	4%	28%	52%	76%	100%	76%
11	Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi dengan Open DataKota Bekasi	%	0	4%	28%	52%	76%	100%	76%
12	Persentase Sitem keamanan informasi milik pemerintah daerah yang dikelola	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Perangkat Daerahyang menggunakan layanan persandian	%	3,50%	16,50%	42,50%	87,50%	100%	-	100%
14	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	N/A	10%	10%	20%	40%	60%	60%
15	Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah	Kebijakan	N/A	1	1	1	1	1	5
3.11	Kepegawaian								
1	Persentase Pelayanan Managemen ASN tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase penurunan Kasus Kasus Indisipliner aparat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan untuk peningkatan Kompetensi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan sesuai Kompetensi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.12	Kearsipan								
1	Persentase pengelolaan arsip inaktif	%	N/A	20%	40%	60%	80%	100%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	N/A	50%	54%	58%	63%	67%	67%
3	Penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip	Jumlah	N/A	2	5	8	12	15	15
4	Persentase peningkatan layanan informasi kearsipan	%	N/A	5%	20%	30%	40%	50%	50%
5	Persentase LPM Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase PKK aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Posyandu Aktif	%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3.13	Kecamatan								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	78.33	80.26	82.19	84.12	86.05	87.89	87.89
2	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	12%	15%	18%	21%	26%	30%	30%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya Monografi RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase kenaikan jumlah masyarakat yang mengikuti event sosial kemasyarakatan	%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%
3.14	Perencanaan Pembangunan								
1	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Kesesuaian Dokumen rencana pembangunan dengan RTRW	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (Jml rekom yg ditindaklanjuti / rekom yang dibuat) x100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Persentase kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan sektoral bidang pembangunan manusia dan masyarakat	%	N/A	30%	40%	50%	60%	70%	70%
9	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu dan tepat aturan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan sektoral bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	N/A	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%
11	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan sektoral bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	N/A	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%
12	Persentase kesesuaian antara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan								
13	Perangkat Daerah yang akuntabilitasnya baik (kategori B ke atas)	%	N/A	74%	77%	79%	80%	82%	82%
3.15	Pengawasan								
1	Tindak lanjut temuan Eksternal	%	N/A	85%	85%	90%	90%	95%	95%
2	Tindak lanjut temuan Internal	%	N/A	71%	75%	75%	80%	80%	80%
3	Tingkat Kapabilitas APIP	Tingkat	N/A	3	3	3	3	3	3
4	Perangkat daerah yang maturitas SPIP level terdefinisi	Jumlah	N/A	16	17	18	19	20	20
5	Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK	Jumlah	0	1	2	3	4	5	5
3.16	Keuangan								
1	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	A	A	A	A	A	A
3	Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Bidang tanah milik pemkot yang bersertifikat	Sertifikat	241	15	20	25	30	35	366
7	Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPD dan SPM yang Diterima	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase peningkatan PAD	%	Rp.1.999.018.742.158,68	35,12%	11.67%	11.57%	10.57%	10.89%	Rp.4.125.916.972.944,80
9	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah	%	693.072	1%	1%	1%	1%	1%	728.426
10	Persentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	43,04%	55,29%	56,81%	58,29%	59,54%	60,85%	60,85%
11	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	%	627.923	91%	92%	93%	94%	95%	95%
12	Persentase pajak parkir terhadap PAD	%	1,7%	3,7%	3,9%	4,1%	4,3%	4,5%	4,5%
13	Jumlah BUMD Dalam Kondisi Sehat	Jumlah	5	6	7	7	7	8	8
14	Persentase Peningkatan Deviden BUMD	%	12.086.694.279	2%	2%	3%	3%	4%	4%
15	Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik	Jumlah	32	55	60	65	70	75	75
16	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sesuai SOP	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.17	Penanaman Modal								
1	Persentase penerbitan Perizinan Bidang Jasa Usaha sesuai SOP	%	98,96%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penerbitan Perizinan Bidang Pembangunan sesuai SOP	%	99,88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi	%	43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.18	Kependudukan dan Catatan sipil								
1	Persentase Ketersediaan Data Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan yang lengkap dan terbaru	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketersediaan profil kependudukan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan kepemilikan KTP-el.	%	N/A	94,03%	94,26%	94,51%	94,82%	95,23%	95,23%
4	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	N/A	91,40%	93,17%	94,97%	97,75%	99,60%	99,60%
5	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	N/A	66,33%	66,96%	67,29%	67,62%	67,96%	67,96%
6	Cakupan Kepemilikan akte perkawinan	%	N/A	60,31%	60,50%	60,55%	60,63%	60,71%	60,71%
7	Cakupan kepemilikan akte kematian	%	N/A	64,23%	64,24%	64,26%	64,28%	64,32%	64,32%

BAB 9

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi, RPJPD Provinsi dan RPJMN. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019-2023, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh setiap perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kota Bekasi berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota sekitar, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Walikota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.
6. Penyusunan RKPD Kota Bekasi pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi Tahun 2019 sampai dengan 2023.

7. Kepala Perangkat Daerah Kota Bekasi berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kota Bekasi. Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN. Selanjutnya RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2024. Pemerintah Kota Bekasi akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain itu untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

